PUNDI-PUNDI UANG TIM SUKSES HABIBIE

PANJI

MASYARAKAT

Sjafrie Sjamsoedin

Zacky Anwar Makarim

Misi Rahasia DUA JENDERAL

SEPAK TERJANG MEREKA DI ACEH DAN TIMOR TIMUR

RP8.500

MINGGUAN BERITA KHAS

NO. 19 TAHUN III • 25 AGUSTUS 1999

PANJI MASYARAKAT
MINGGUAN BERITA KHAS
http: //www.panji.co.id
NO. 19 TAHUN III • 25 AGUSTUS 1999

DAFTAR ISI

LEMBAR KHAS PANJI

Foto: Yusnirsyah S.
Desain: M. Sewoko

KULIT MUKA
FOTO : Tatan Agust RST/Gatra & Satari
DESAIN : Imbang Sri W.

BERITA MINGGU INI

AP

Sepak Terjang Dua Jenderal

Tiba-tiba saja Mayjen Sjafrie Sjamsoedin dan Mayjen Zacky Anwar Makarim mengemban tugas penting. Sjafrie diterjunkan ke Aceh dan Zacky ke Timor Timur. Padahal, selama ini kedua jenderal tersebut sudah "masuk kotak" karena terimbas kasus Letjen Prabowo Subianto. Kabarnya, Sjafrie dan Zacky membawa misi rahasia dari Menhankam/ Panglima TNI. Apa itu? Betulkah Sjafrie akan memainkan Aceh bila Megawati terpilih menjadi presiden?

SATRI

Nasib Tragis TKI Kita

Satu lagi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Wiwin Widaningsih, 20, tewas misterius. Tahun ini, 69 orang bernasib serupa. Belum terhitung mereka yang mengalami penyiksaan. Bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap mereka?

YUSNIRSYAH SIRIN

Nungki Kusumastuti

Situasi di Aceh agaknya tak pernah luput dari perhatian Nungki Kusumastuti. Maklum, penari ini lahir di Banda Aceh. Ketika di sana, ia tak merasakan adanya permusuhan antara penduduk dan militer. Lalu mengapa itu terjadi?

Aceh kini benar-benar menjadi duka kita. Di rezim yang lalu, rakyat di sana merasa dianaktirikan. Kini, ketika angin reformasi berembus, mereka malah merasa hidup ketakutan.

Berduka tentu tak bisa hanya dengan kata-kata. Kami, selaku penyebar informasi, juga dituntut bereaksi. Untuk itulah, Selasa siang pekan lalu, kami mencoba menyelami persoalan Aceh lebih dekat lewat kunjungan silaturahmi sejumlah tokoh Aceh yang tergabung dalam Forum Keprihatinan untuk Aceh (Forka). Ada Nazaruddin Sjamsuddin, guru besar ilmu politik FISIP UI, Prof Baihaqie, gurubesar IAIN, yang mengenal baik "Abu" Daud Beureu'eh, serta A.M. Fatwa. Hadir pula sejumlah tokoh Aceh, yakni Nisrina Nur Ubay, Yuna Anwar Nasution Sy. Thayeb, Ramly Gani, dan Muchtar Aziz. Diskusi berlangsung hangat dan memakan waktyu hampir tiga jam.

Cerita, pendapat, atau sekadar omongan ringan memadati bincang-bincang kami. Tapi muaranya, seperti dilontarkan Baihaqie, keadilanlah yang dikehendaki orang-orang Aceh, bukan merdeka. "Juga bukan janji sekadar janji," tegasnya. Sebab, bagaimanapun, Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia.

Kedatangan wakil Forum Keprihatinan untuk Aceh tentu bukan sebuah upaya akhir. Kami sudah menerjunkan beberapa reporter dan fotografer langsung ke Aceh. Sementara di dapur redaksi, untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke-54, selama Agustus ini, kami menyajikan cerita berseri tentang Aceh dan tokohnya. Sekadar mengingatkan betapa Aceh adalah daerah modal yang melahirkan negeri ini. Banyak tokoh besar yang lahir di Serambi Mekah itu. Dan mereka tercatat sebagai bintang pada zamannya. Selain Daud Beureu'eh, Aceh punya Teuku Umar, dan Teuku Cik Ditiro. Juga wanita-wanita pemberani seperti Cut Nyak Din dan Cut Mutiah. Tulisannya bisa anda nikmati di Lembar Khas.

Pada edisi ini pula, Anda bisa menikmati sebuah rubrik baru, Tasawuf namanya. Letaknya ada di lembar Khas. Sebenarnya, ini bukan kali pertama. Dua pekan silam, Anda mungkin sudah mencicipinya. Ketika itu kami mengungkap soal penyakit AIDS yang ternyata bisa disembuhkan melalui metode tasawuf.

M. ZAKIR SALMUN

Diskusi tentang Aceh: Menuntut keadilan

Pada edisi ini, kami mengangkat soal tarekat Jamu Taqwa di Pesantren Darul Ulum, Jombang. Tarekat ini diikuti oleh banyak kalangan termasuk para *abege*. Lengkapnya silakan Anda simak di halaman 51 lembar Khas.

Tampilnya rubrik ini tak lepas dari obsesi Ustadz Hamid, penanggung jawab lembar Khas, setelah mendapat masukan dari para pembaca. "Rubrik ini akan membuat oase kita lebih jernih karena sudah semakin dalam," tuturnya, seperti diungkap di rubrik ini, lima nomor silam. Silakan menikmati. ■

Abdullah Ibn Mas'ud r.a.

Setiap kali seseorang berdusta, maka sebuah noda hitam akan tumbuh di hatinya, sampai seluruh hatinya menjadi hitam. Kemudian, ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

PANJI **PENERBIT:** PT Panji Media Nusantara **SIUPP:** Tanggal 26 November 1985, No. 016/SK/Menpen/SIUPP/D.3/1985, Persetujuan Perubahan No. 09/Ditjen PPG/K/1997 Tanggal 10 April 1997 **PEMIMPIN UMUM:** B. Wiwoho. **ASISTEN PEMIMPIN UMUM:** Syu'bah Asa. **WAKIL PEMIMPIN UMUM/Pj. PEMIMPIN REDAKSI:** Uni Zulfiani Lubis **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Imam Baskoro **REDAKTUR PELAKSANA:** A. Suryana Sudrajat, Akhmad Supriyatna, Budi Setyanto, Pracoyo Wiryoutomo (Liputan) **Redaktur Rubrik:** Agung Rulianto, Hamid Ahmad, M. Iman Aulia, Muzakkir Husain, Nasrullah Alief, Puji Irwanto, Rizagana **Staf Redaksi:** Abdul Rahman Ma'mun, Agung Y. Achmad, Akmal Stanzah, Budiyono, Deny R. Secaatmaja, Dodi Kusmajadi, Dudi Rahman, Elly Burhaini Faizal, Imam Setyobudi, Iqbal Setyarso, Johansyah, M. Ridwan Pangkapi, Mas'ad T., Rifwan Hendri **Fotografer:** Yusnirsyah Sirin (Koord), M. Zakir Salmun, Satari **Koresponden:** Abdul Haerah H.R. (Ujungpandang), Almaidha Sitompul (Medan), Suryana (Bandung) **Sekretaris Redaksi:** Andi Riawaty Aldy **PRODUKSI & PENGEMBANGAN: Redaksi Bahasa:** Mujakir, Subhan **Redaktur Artistik:** Imbang Sri W. **Pracetak:** M. Sewoko (Koord.), Arief Rachman Sudrajat, Kusdiyat, Sagar Ibrahim **Riset dan Dokumentasi:** A. Bakir Ihsan (Koord.), Dyah Safitri, E. Suhimat, R. Nurdoro Widadi, Sri Wahono, Vivi Ahmad Subandi **Sistem Informasi:** Gaman Kamajaya, Muhamad Gazy **PEMASARAN:** Z. R. Nur (Kepala), Emira S. Susatyo, Nugroho **Sirkulasi:** Adi Suratno (Kepala), Nurwan Agus **Iklan:** Moh. Ridha, Ocky Adhyastini. **KEUANGAN & UMUM:** Solihin (Kepala), Aspiyono, Hamda Mazidah, Syabli Marbun, Triana Indriyati **PENCETAK:** PT Dian Rakyat **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Kemang Selatan Raya No. 111 H, Jakarta 12730, Kotak Pos 4101/JKP/1004 Telp. 7182940, 7182943-46, Fax. 7182941 **ALAMAT PEMASARAN/KEUANGAN/UMUM:** Gedung Raudha, Lantai 1, Terusan Kuningan No. 21, Jl. H.R. Rasuna Said, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, Telp. 52960434-36, Fax. 52960437, E-Mail: panjimas@indo.net.id. **REKENING BANK:** Bank BNICabang Rasuna Said, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C11-14, Jakarta 12940, No. Rekening. 023.448.001.

KOREKSI RATIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada majalah *Panji* yang telah memuat saya dalam rubrik *Selingan* pada edisi Nomor 17 Tahun III, 11 Agustus 1999.

Cuma, saya agak terkejut karena saya tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah pemilik Fashion Cafe kepada wartawan *Panji* seperti yang tertulis pada rubrik tersebut. Dan memang pada kenyataannya saya bukanlah pemilik Fashion Cafe.

Saya merasa perlu membuat surat ini untuk meluruskan masalah tersebut dan mencegah praduga yang tidak benar terhadap saya.

Ratih Sanggarwaty, S.E.
Mal Ambasador Lt. II No. 35
Jl. Prof. Dr. Satrio
Jakarta 12940

Terima kasih atas koreksi Anda. Red.

IRONI NEGARA KESATUAN

Saya sangat setuju dengan pendapat budayawan Rendra tentang pentingnya menjaga teritorial (Wawacara Khas *Panji* edisi Nomor 17 Tahun III, 11 Agustus 1999). Sejak Belanda menginjakkan kakinya di Nusantara, sebetulnya masalah teritorial inilah yang telah diinjak-injak oleh Belanda. Tanpa rasa penghormatan sedikit pun pada teritorial masyarakat setempat, dengan kekuatan senjata dan balatentara lengkap, Belanda telah memporakporandakan hak-hak mereka.

Sebelum kedatangan penjajah, cukup banyak kerajaan di Nusantara berdiri megah. Prinsip kebersamaan dan kesetaraan membuat mereka bisa hidup damai dan bisa menyelesaikan konflik yang sekali-sekali muncul. Makanya hampir tidak kita temukan adanya perang yang berlangsung lama antarkerajaan itu. Kecuali Perang Paregreg yang dipicu oleh ambisi Gadjah Mada yang ingin menguasai Nusantara dengan konsep negara kesatuannya yang pada akhirnya gagal juga. Prinsip kesetaraan dan keanekaan inilah sebenarnya yang telah dianut sebagai sistem pemerintahan di Nusantara yang telah berumur ribuan tahun. Miripmirip dengan konsep federasi dalam masyarakat modern. Contohnya, federasi antara Sriwijaya dan Medang, Tarumanegara dan Kalingga. Bukan seperti sekarang ini, sistem negara kesatuan dianggap segala-galanya. Padahal, yang mengemuka justru kesatuan yang semu.

Lihat saja bagaimana penyeragaman di bidang pemerintahan daerah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak pernah kita dengar nama kampung, mukim, nagari dan sebagainya, tapi yang ada hanyalah desa. Wilayah-wilayah kaya hasil bumi dikeruk dan dibawa ke pusat. Itu kan sama dengan sistem upeti. Tanah adat dirampas dengan mendatangkan para transmigran dan perusahaan nasional serta internasional, tanpa meminta persetujuan masyarakat setempat. Semua diminta berkorban dengan alasan untuk persatuan dan kesatuan. Tidak ada lagi penghargaan terhadap keanekaan yang sebenarnya sungguh indah bila dijaga. Dan kini di mana kesetaraan?

Anehnya, pada era kemerdekaan inilah keanekaan itu seakan-akan mau dilibas, mau dihilangkan. Lalu mulailah Van Mook dan Van Der Plass ditiuptiup sebagai biang federasi dengan negara bonekanya. Setelah berhasil memanipulasi Van

KILAS

Anak yang cerdas biasanya pemberani dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ciri-ciri itu mungkin dimiliki bocah cilik ini. Selain "cuek" di depan banyak orang, ia juga berani menirukan gaya sang penceramah. Syarat-syarat sudah ada, kini tinggal membina. Mudah-mudahan, dik, kelak menjadi anak yang berguna.

TEKS: YUSNIRSYAH SIRIN
FOTO: M. ZAKIR SALMUN

Mook, otonomi dipakai juga sebagai solusi. Ini tak akan menyelesaikan persoalan. Persoalannya adalah rakyat di daerah sudah terluka akibat teritorialnya telah diinjak-injak.

Lantas kenapa wacana negara federasi yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dianggap sebagai antipersatuan? Padahal makna persatuan bukan segala sesuatunya berpusat di suatu wilayah, seperti Jawa atau Jakarta saja, tapi membangun kesadaran persamaan dengan tujuan dan cita-cita yang jelas untuk menjadikan daerah masing-masing maju tanpa pernah mengganggu yang lain. Contoh baku adalah negara Madinah yang dipraktekkan Rasulullah s.a.w. Tidak ada satu suku pun yang merasa teritorialnya terganggu, tapi mereka bahu-membahu melawan serangan dari luar. Jadi konsep federasi atau federal bukan datang dari Barat. Barat masih saling membunuh selama ratusan tahun karena nafsu berkuasa ketika Timur telah mempraktekkan federasi. Ketika mereka mengadopsi sistem itu, kita lantas mempraktekkan sistem negara kesatuan yang sentralistis dan cenderung korup. Ironis sekali, kan?

Hermanto
Jl. Mayor Oking No. 989
Cibinong, Bogor
Jawa Barat

PERS TAK ADIL TERHADAP PELAJAR

Beberapa waktu terakhir saya mencoba mengamati perilaku media massa terhadap permasalahan di seputar pelajar atau remaja kita. Ini saya lakukan karena keprihatinan yang amat mendalam terhadap para pemuda yang selalu saja dicap *memble*, tak tahu aturan, tak bisa diharapkan, sukanya tawuran, dan seterusnya. Benarkah sudah separah itu kondisi generasi muda kita?

Dari tiga koran nasional yang saya baca, selama Juni dan Juli, mereka menurunkan sekitar 100-150 item berita tentang pelajar atau remaja. Sekitar 95%-nya atau sekitar 95-135 item berita berisi tentang kenakalan mereka—tawuran, terlibat narkoba, prostitusi, pesta-pesta, kebut-kebutan, pencurian, dll. Selebihnya berisi berita tentang kegiatan bermanfaat dan prestasi. Bahkan, ada satu koran yang hanya tiga kali melaporkan kegiatan bermanfaat remaja, selebihnya hanya menyorot hal-hal negatif mereka.

Timbul pertanyaan dalam benak saya. Benarkah demikian komposisi kegiatan para remaja kita? Atau, sedemikian minimkah kegiatan positif atau prestasi yang mereka ukir? Saya *kok* ragu. Di lingkungan saya saja, banyak hal-hal positif yang bisa saya sebutkan tentang remaja di situ. Mereka memelopori kegiatan perlombaan menyambut HUT Kemerdekaan RI, sebelumnya menanam pohon pelindung untuk lingkungan, dan banyak lagi.

Saya cenderung menyimpulkan, isu kenakalan remaja sudah terlalu dibesar-besarkan oleh media massa. Ini tidak berarti saya mengingkari besarnya jumlah kasus kenakalan mereka, tapi sebenarnya kita tidak perlu sepesimistis ini bila pemberitaannya lebih imbang antara kenakalan dan prestasi.

Massifnya berita kenakalan remaja justru
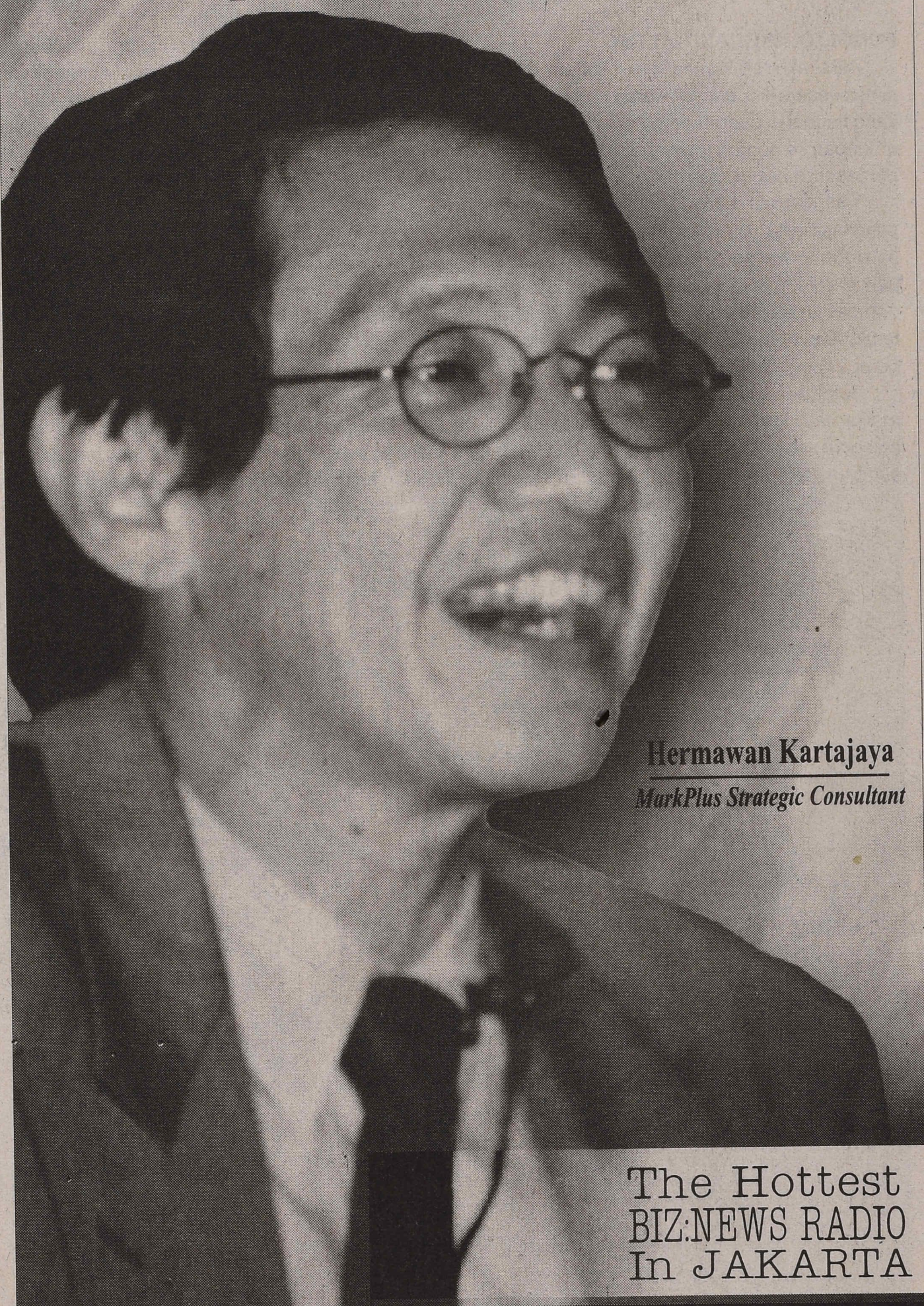
membuat mereka seperti terpojok dan telah dicap tidak benar. Yang ada di hadapan mereka hanyalah citra bahwa mereka brengsek, tidak cukup tersedia contoh kasus untuk mengukir prestasi. Nah, bagaimana teman-teman wartawan? Bisakah kita lebih adil memandang mereka? Untuk kebaikan masa depan kita juga, *toh*?

Fadlilah Jamil
Mahasiswa Pascasarjana
IKIP Padang

PUNGLI DI IMIGRASI KALTIM

Akhir-akhir ini, karena krisis ekonomi yang menimpa negara kita, banyak warga Kalimantan Timur yang tinggal di daerah perbatasan mencoba peruntungan ke negara tetangga, Malaysia, dengan berdagang kecil-kecilan dan menjadi buruh kasar.

Tapi, kasihan sekali, kesempatan memperbaiki penghasilan itu justru dimanfaatkan oleh para pejabat di Kantor Imigrasi Nunukan, Kaltim, untuk memperkaya diri. Yaitu dengan menaikkan biaya paspor dan pas lintas jauh dari kewajaran. Tidak jarang terjadi juga pemerasan kepada para pelintas, baik berupa uang maupun barang.

Sekalipun telah berulang-ulang dikritik melalui media massa setempat, perilaku para pejabat itu tidak berubah juga. Begitupun kalau ditanya langsung, jawabannya selalu, "Itu adalah kebijakan dari pusat." Bagaimana mungkin kebijakan dari pusat bila tarifnya variatif, dari Rp400.000 sampai Rp900.000 per orang, bergantung pada negosiasi. Sementara di papan pengumuman Kantor Imigrasi jelas tertera, biaya paspor dari Nunukan ke Tawao hanya Rp63.000.

Sebagai tambahan informasi, pekerja yang melintas ke Malaysia dari Nunukan rata-rata 150-250 orang per hari. Bayangkan, berapa uang pungutan liar yang dikumpulkan secara haram oleh para pejabat itu setiap bulannya.

Mohon kiranya pejabat di Jakarta memberikan perhatian akan hal ini. Janganlah rakyat kecil yang ingin memperbaiki penghasilan ini diperas lagi.

Andi Hasan Abdullah
Jl. Hasanuddin No. 115
RT 08, Nunukan Utara
Kalimantan Timur

SOAL PREDIKSI MOETOJIB

Pada era reformasi ini, mengeritik atau membuat pernyataan itu sah-sah saja. Tapi bila yang mengeritik atau yang membuat pernyataan di media massa adalah seorang Letjen Moetojib, wah, rasanya pengaruhnya sangat besar.

Belum lama ini, mantan orang nomor satu di jajaran intelijen itu memprediksi, akan terjadi *chaos* kalau Mega tak jadi presiden. Terlepas dari benar tidaknya prediksi tersebut, dalam analisis saya, prediksi itu bisa menimbulkan suasana yang makin tidak sehat dalam kehidupan politik kita hari ini dan masa mendatang. Seperti kita ketahui, tugas Pak Moetojib dulu adalah mewaspadai agar jangan sampai ada individu, kelompok masyarakat, institusi, bahkan orang asing yang coba-coba melakukan adu domba atau agitasi untuk menggoyahkan persatuan bangsa dan integritas wilayah Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang ada, Pak Moetojib bisa melakukan banyak rekayasa agar upaya-upaya tersebut bisa dihambat dan diberantas.

Nah, dengan latar belakang seperti itu, prediksi tersebut menjadi sangat menakutkan. Bila nanti pada kenyataannya dalam SU MPR 1999 Megawati betul-betul tidak terpilih menjadi presiden, saya khawatir secara otomatis ada kekuatan yang berupaya mewujudkan prediksi Moetojib itu. Bisa dari pendukung Megawati yang betul-betul terpengaruh, bisa pula dari kekuatan lain yang sengaja membuat pengaruh. Itu artinya, *chaos* yang Pak Moetojib prediksikan menjadi kenyataan.

Kalau sudah begitu, negara ini tentu kembali ke dalam keadaan bahaya. Rusuh di mana-mana. Pemilu dan SU MPR yang kita harapkan bisa menjadi awal perbaikan keadaan akan gagal. Setiap warga bangsa, terutama jajaran TNI-Polri, akan makin

DOCTOR HONORIS CAUSA
UNITED STATES SPORTS ACAD.
1 2 3
1999 The 20th SEA GAMES
TYUD '99.
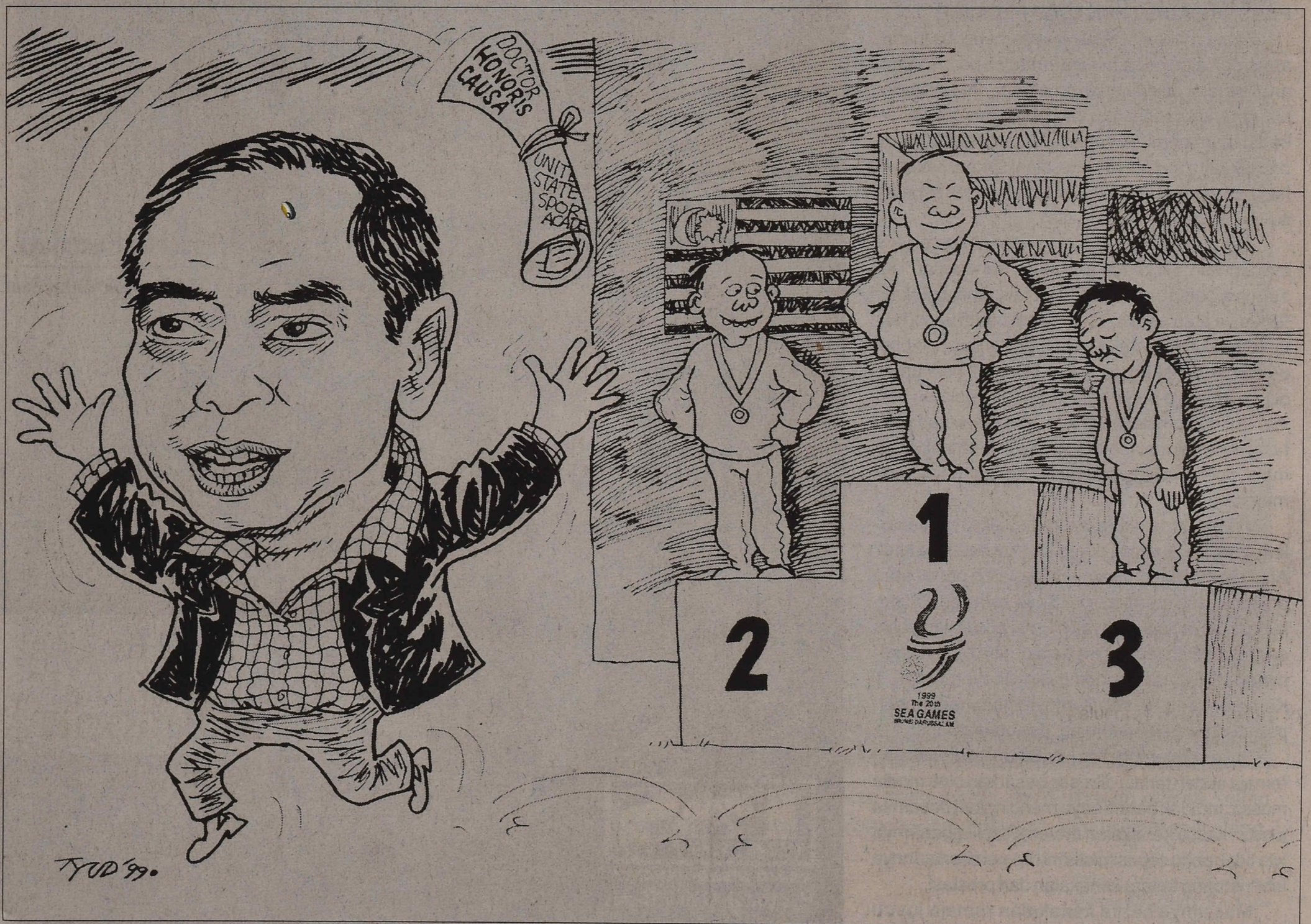
keteteran memulihkan keamanan negara.

Karena itu, ada baiknya bila Pak Moetojib mempertimbangkan untuk mandeg pidato saja. Tidak usahlah melakukan manuver-manuver yang memperkeruh suasana. Sebab, jika dilakukan juga, kasihan rakyat, terus-menerus ditimpa penderitaan. Juga para aparat, junior Pak Moetojib, yang saat ini sudah cukup pusing tujuh keliling untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang SU MPR 1999. Ada Ambon yang bergolak, Batam yang rusuh, Aceh yang berdarah-darah, Timtim yang cakar-cakaran.

T. Malik Saleh
Jl. Kutilang 4 RT006/008
Manggarai, Tebet, Jakarta

TAK PERLU LAGI POSKO PARTAI

Instruksi Megawati untuk menghidupkan kembali posko-posko gotong royong PDI Perjuangan benar-benar telah membuktikan ada yang tak beres dalam tradisi kepartaian kita. Seperti kata pengamat politik Arbi Sanit, tindakan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang partai, persisnya PDI Perjuangan, telah mengadopsi cara-cara militer dalam melakukan kegiatan politik.

Posko-posko itu jelas akan mengarah dan mengundang ketegangan antara yang pro dan kontra terhadap Megawati. Ini sangat tidak sehat bagi kehidupan masyarakat, terlebih kita sedang menjelang Sidang Umum MPR 1999. Tanpa bermaksud menuduh, hendaknya cara-cara pengerahan dan rekayasa massa mulai dihindari jauh-jauh bila kita ingin membangun kehidupan demokrasi dalam jangka panjang. Jika tidak, bukan demokrasi yang didapat, melainkan anarki dan ingin menang sendiri.

Mangara Siahaan, salah seorang pengurus PDI Perjuangan memang telah membantah bila penghidupan posko-posko itu untuk tujuan politik. Tapi pada kenyataannya, hanya efek politiklah yang terasa dari kegiatan tersebut. Makanya saya sangat mendukung sikap tegas TNI yang tidak mentolerir keinginan Megawati ini. Biar dunia politik kita tidak diwarnai cara-cara premanisme dan pemaksaan kehendak.

Deris L. Ekosandi
Jl. Cucakrowo 4, Sukun,
Malang

IDEAL, DUET MEGA-AKBAR

Sangat menarik mencermati perkembangan politik pasca-Pemilu 1999. Baik elite politik maupun masyarakat awam menyampaikan berbagai gagasan dan pendapatnya, terutama yang menyangkut pemilihan presiden dalam SU MPR nanti. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kebuntuan. Ada pula yang dengan gigih dan berbagai dalih menolak peluang Megawati menjadi presiden walaupun partainya menang dalam pemilu. Di antaranya ada yang mensyaratkan bahwa presiden harus dipilih oleh MPR dengan kemenangan suara mayoritas mutlak *(single majority)* atau diistilahkan 50 plus satu. Semua usulan dan gagasan disertai dengan alasan atau argumentasi mulai dari yang pokoknya menolak sampai dengan

yang masuk akal dan canggih. Padahal konstitusi kita hanya menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak (baca: paling banyak). Tapi pendapat yang menyatakan harus mendapatkan dukungan mayoritas juga tidak salah karena berkaitan dengan kualitas legitimasi dan stabilisasi pemerintahan.

Berbagai pihak pun mulai melakukan manuver untuk menjagokan capres dukungan masing-masing. Perkembangan terakhir makin menarik dengan lahirnya poros tengah yang diharapkan dapat mengimbangi kekuatan PDI Perjuangan maupun Golkar sehingga dapat dijadikan alternatif.

Keadaan politik tampaknya makin kompleks dan seakan-akan sangat sulit ditemukan solusinya. Saya pikir, sebetulnya pemecahan masalah cukup mudah dan sederhana demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Mudah-mudahan semuanya dapat diatasi jika PDI Perjuangan beraliansi strategis dengan Golkar (gabungan keduanya sudah 57% suara pemilu) untuk membentuk pemerintahan. Reformasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita rakyat apabila kedua ketua umum partai tersebut bekerja sama untuk membangun Indonesia Baru.

Jadi, solusi terbaik adalah Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan Akbar Tandjung sebagai wapres dengan mengajak putra-putri terbaik yang reformis dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan PAN ke dalam kabinet.

Akbar Tandjung yang terbuka dan berpandangan luas serta cukup bersih dari KKN dapat dengan mudah bekerja sama secara konstruktif dengan Megawati. Dan saya yakin, Amien Rais bersama poros tengahnya dapat menerima dan memberikan dukungan karena gagasan ini segaris dengan usulannya beberapa waktu lalu. "Partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 7 Juni berhak memperoleh kursi presiden, sedangkan pemenang kedua mendapatkan kursi wakil presiden. Itu logika demokrasi. Kalau ada partai yang hanya memperoleh suara 10% ingin jadi presiden akan ditertawakan kucing," kata Amien seperti ditulis *Kompas*, 5 Juni 1999.

Andreyadi Berliano
Graha Cempaka Mas Blok E2Lt.7
RT019/007, Sumur Batu, Kemayoran
Jakarta

SOLUSI ACEH MERDEKA

Saya adalah anak kandung seorang pejuang kemerdekaan RI di Aceh dan merasakan betul aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini tertindas. Andaikan saya diperkenankan menjadi anggota MPR RI dari unsur utusan golongan, maka pada SU MPR mendatang saya akan memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Aceh dan saya yakin mayoritas anggota MPR akan menyetujuinya. Paling tidak, solusi gaya pemerintahan satu negara dua sistem seperti RRC-Hong Kong bisa dicapai.

Bagi Irian dan Ambon, pemekaran memang bisa menjadi solusi yang baik. Sebagaimana otonomi luas merupakan jalan keluar yang ideal untuk Timor Timur. Tapi, otonomi atau negara federasi bagi Aceh bukanlah cita-cita karena Aceh telah seperti bisul di

pelupuk mata. Busuk kalau dicium dan tidak sedap kalau dipandang.

Operasi militer terlalu meminta biaya yang sangat besar bahkan tidak terbatas. Padahal negara kita sudah bangkrut dan sudah tidak mampu lagi membayar gaji pegawai negeri baik sipil maupun militer tanpa menambah utang luar negeri yang sudah menggunung.

Demikian pula pembasmian etnis Aceh tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru akan menyebarkan rasa pesimistis bagi warga negara lainnya.

Kalau persoalan Aceh terus berlarut-larut, menurut jalan pikiran saya, soal disintegrasi bangsa hanya tinggal tunggu waktu saja.

Dr. Muhammad Kasim Bin Hasan Samalanga
Jl. H. Mean Raya No. 10
Bekasi 17411

HARAPAN UMAT KONGHUCU

Aksi damai yang dilakukan oleh para aktivis dan simpatisan Kompak (Komisi Pendukung untuk Agama Konghucu) di depan kantor KPU, Jakarta, pada Senin pagi, 9 Agustus 1999, membuat saya terharu sekaligus berterima kasih.

Betapa tidak, lebih dari dua dasawarsa saya dan para umat Konghucu Indonesia diberangus dan dikucilkan serta kehilangan hak-hak sipil. Agama Konghucu yang kami imani tidak boleh dicantumkan pada KTP; pendidikan agama Konghucu di sekolah-sekolah ditiadakan; kantor catatan sipil menolak mencatat pernikahan yang dilakukan secara agama Konghucu; upacara-upacara keagamaan dilarang untuk dilakukan secara terbuka. Tudingan-tudingan keji dilontarkan, seperti penghambat pembauran, feodalistis, aliran sesat, budaya Cina, penyembah berhala, dan lain sebagainya.

Padahal, dalam penjelasan UU Nomor 1/PNPS/1965, antara lain disebutkan agama-agama yang dipeluk penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Juga dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 18 Ayat (1), "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau pribadi menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran." Dan Ayat (2), "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri."

Entah, apakah pada era reformasi ini, harapan-harapan itu akan terwujud dan hak-hak sipil umat Konghucu Indonesia akan pulih.

Tjandra R. Mulyadi
Jl. Mangga Besar XIII
RT0012/02 No. 17
Jakarta Pusat

KPR NIAGA, KAPAN TURUN?

Hampir dua tahun sudah saya menjadi nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Niaga. Ketika akad kredit dilakukan, bunga KPR yang dikenakan kepada saya sebesar 22% per tahun. Tapi, karena kondisi perekonomian yang makin memburuk—ditandai dengan naiknya bunga perbankan—maka sejak Januari 1999 bunga KPR yang dikenakan kepada saya naik menjadi 30% per tahun. Cicilan saya otomatis membengkak cukup signifikan. Dengan sangat terpaksa, saya terima keadaan itu sebagai akibat krisis moneter yang sangat menyengsarakan.

Tapi, pelan-pelan sejak Mei 1999 bunga perbankan terus turun dan sekarang telah sampai 13% per tahun. Angka ini bahkan lebih rendah dibanding bunga perbankan ketika saya menandatangani akad kredit yang 18% per tahun. Semestinya, bunga KPR yang dikenakan kepada saya diturunkan juga. Baru beberapa bulan bunga perbankan naik, bunga KPR segera naik. Mengapa setelah sekian bulan bunga perbankan turun bunga KPR tidak ikut turun? Hukum kausalitas ini mestinya dipegang teguh oleh pihak Bank Niaga. Dan memang begitu pu-

la janji Bank Niaga ketika acara akad kredit berlangsung.

Sayangnya, ketika masalah ini saya coba komunikasikan kepada pihak customer servis Bank Niaga yang konon dipusatkan di cabang Falatehan, yang saya dengar justru jawaban yang tidak masuk akal. "*Lho*, Mas. Bank Niaga kan masih banyak menanggung kerugian akibat krismon. Masa bunganya minta diturunkan cepat-cepat?" ujar seorang pegawai di sana. Logiskah alasan seperti ini dijadikan dasar mempertahankan suku bunga KPR yang tinggi itu? Ayolah Bank Niaga, jangan egois begitu *dong*.

Rika M. Dwiyanto
Pura Bojong Gede
Bogor

MENGENAL KEMBALI YAYASAN TUNAS BANGSA

Mengingat makin rentannya persatuan dan kesatuan bangsa saat ini, ada baiknya saya kembali memperkenalkan lembaga Yayasan Tunas Bangsa kepada khalayak, kiranya bermanfaat.

Yayasan Tunas Bangsa (dulu bernama Yayasan Pembina Kesatuan Bangsa) dibentuk pada 1962 dengan tujuan: (1) memberikan bantuan kepada usaha-usaha dalam rangka pembinaan perkembangan bangsa Indonesia, menuju ke arah kesatuan yang bulat dan homogen, dengan jalan asimilasi; (2) menyelenggarakan usaha-usaha di bidang pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan yang sesuai dengan hal tersebut dalam poin pertama, dalam arti kata seluas-luasnya.

Pengurus Yayasan Tunas Bangsa ialah Drs. Frans Seda (ketua kehormatan), K. Sindhunata, S.H. (ketua), Drs. H. Junus Jahja (sekretaris), H. Prasasto Sudyatmiko, S.H. (bendahara), dan Drs. RI Djoko Sukaro, Ny. Titi Sumbung, S.H., Drs. Jakob Oetama, Triwoko, dan Lukman Setiawan (anggota).

Yayasan ini telah mendirikan Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran (LPMP) yang mengadakan dokumentasi mengenai pembauran bangsa, masalah Cina di Indonesia, maupun di negara-negara Asia Tenggara; mengadakan evaluasi keadaan serta menyebarluaskan gagasan pembauran dalam masyarakat luas.

Drs. H Junus Jahja
Sekretaris Yayasan Tunas Bangsa
Jl. Kerinci I/9 Jakarta 12120
Tel. 7203734 Faks. 7235348

PERLU, RAPAT AKBAR PUTRA ACEH

Ada dua kesimpulan yang bisa kita pilih melihat kenyataan makin semrawutnya kasus Aceh. *Pertama*, ini membuktikan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah selama ini betul-betul tidak serius, kacau, dan tidak sistematik. Cobalah kita tanyai pejabat yang berwenang, termasuk petinggi TNI, tentang apa yang telah mereka capai dalam upaya penyelesaian kekacauan di sana. Saya yakin, jawabannya pasti berputar-putar, abstrak, menunjukkan bahwa mereka sudah bingung dan tidak lagi menguasai masalah. Sejak setahun yang lalu, jawaban Feisal Tandjung tidak berubah seperti yang dia kemukakan beberapa hari yang lalu di televisi. "Ya, kita usahakan agar ada penyelesaian yang terbaik. Kita akan selesaikan." Cuma begitu.

Artinya, pemerintah dengan jajaran TNI dan Polri sebenarnya sudah gagal menangani masalah tersebut. Harus ada perubahan radikal, baik dalam pola pikir maupun dalam pola tindak di jajaran pemerintah bila kasus Aceh betul-betul mau diselesaikan. Atau, angkat tangan saja, dan panggillah pihak ketiga untuk turun tangan.

Kesimpulan *kedua*, pemerintah—atau setidaknya sekelompok dari mereka—memang menginginkan kesemrawutan seperti sekarang terjadi di Aceh. Seperti banyak dikemukakan pengamat, memang ada sekelompok elite politik dan TNI yang berkepentingan membuat kasus Aceh terus berlarut-larut untuk tujuan tertentu.

Pemerintah dan jajaran militer sebenarnya tetap canggih dan sukses besar merekayasa Aceh untuk hancur lebur. Mustahil kan, TNI yang sedemikian besar, dengan Kostrad dan Kopassusnya yang andal, tidak mampu menyelesaikan kasus Aceh bila mereka memang mau?

Walhasil, terlepas dari mana yang benar dari dua kesimpulan itu, sebetulnya sudah saatnya putra

Aceh mengambil prakarsa sendiri dalam rangka penyelesaian masalah Aceh. Jangan lagi hanya menjadi penonton atau pengamat karena pemerintah tidak bisa lagi diandalkan. Begitupun LSM yang kini bermunculan tidak bisa sepenuhnya dipercaya karena bisa saja mereka punya motif lain, seperti mencari proyek dan sebagainya. Ayolah, kecuali kita memang ingin menyaksikan rakyat Aceh tak tertolong lagi.

Untuk mengawalinya, saya mengusulkan agar para putra Aceh, terutama yang punya akses ke Jakarta, mengadakan rapat akbar di Istora Senayan atau di Banda Aceh. Jangan lagi membuat pertemuan yang terpisah-pisah dan tidak terkoordinasi. Mulai dari Ismail Hasan Metareum dan Abdul Gafur yang Wakil Ketua MPR, Busthanul Arifin yang mantan pejabat, Ismail Sunny, Nazaruddin Syamsuddin, Fachry Ali, dan Prof. Baiquni yang cendikiawan, Ghazali Abbas yang politikus, tak ketinggalan para pejabat di Aceh sendiri, sampai Si Agam yang sopir, harus berkumpul di sana, bergandengan tangan, menyatukan visi, menyatakan kebulatan tekad, untuk betul-betul mewujudkan Aceh yang merdeka dari rasa takut dan kezaliman.

Pada forum tersebut harus ada semacam deklarasi yang berisi agenda yang jelas bagi penyelesaian masalah Aceh. Deklarasi harus memberi ultimatum kepada pemerintah agar betul-betul serius menangani Aceh dan melibatkan sepenuhnya tokoh-tokoh Aceh bagi upaya tersebut. Konsekuensinya, semua putra Aceh yang terkait dengan jabatan resmi pemerintah menyatakan akan mundur dari jabatan mereka bila sampai batas waktu tertentu, isi deklarasi itu tidak juga dijalankan. Buya Ismail, Pak Gafur, masak masih bisa merasa nyaman duduk di MPR sementara saudara-saudaranya di Aceh terus berguguran setiap hari?

Masalah Aceh hanya bisa selesai bila putra Aceh sendiri bergandeng tangan, berbulat tekad, dan berani mengambil risiko untuk menyelesaikannya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup becermin bangkai.

M. Abid Tamlicha
Mahasiswa asal Aceh di Jakarta
(alamat pada Redaksi)

BEASISWA YAYASAN NURUL FALAH

Yayasan Nurul Falah adalah lembaga sosial keagamaan yang sangat peduli terhadap masalah pembinaan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu tidak semata diarahkan untuk mewujudkan manusia-manusia yang cerdas dan terampil, tetapi juga yang memiliki kedalaman iman, keluhuran budi, serta kesadaran sehingga senantiasa merasa terpanggil untuk memajukan masyarakat.

Pelajar dan pemuda adalah calon-calon pemimpin masyarakat dan bangsa di kemudian hari. Karena itu, pembinaan dan pembentukan kualitas mereka harus dilakukan secara terus-menerus. Tapi, kenyataan menunjukkan, masyarakat Indonesia secara mayoritas masih belum memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan mereka.

Untuk itulah Yayasan Nurul Falah membuat program bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar Islam berprestasi. Tahun lalu, yayasan telah memberikan bantuan kepada 20 pelajar dan dua mahasiswa. Dan insya Allah, tahun ini yayasan akan memberi bantuan beasiswa lagi kepada 25 orang pelajar. Dengan demikian, secara keseluruhan penerima bantuan beasiswa Yayasan Nurul Falah menjadi 45 orang.

Para penerima beasiswa itu tidak dilepas begitu saja, tetapi diikutsertakan dalam program pembinaan keagamaan yang diselenggarakan dua kali tiap bulan. Melalui program ini, diharapkan wawasan keagamaan dan kedalaman iman mereka bisa tumbuh. Yang lebih penting lagi, dari program ini mudah-mudahan keluhuran budi pekerti mereka akan berkembang dan mendorong mereka untuk turut berbuat bagi sesama.

Bagi semua pihak yang ingin mendapatkan informasi tentang program bantuan beasiswa Yayasan Nurul Falah, kami membuka pintu untuk dihubungi sewaktu-waktu.

Drs. Bahrudin
Pengurus Yayasan Nurul Falah
Jl. Sakura Blok C Nomor 1
Ciputat 15417
Tel. 7497410
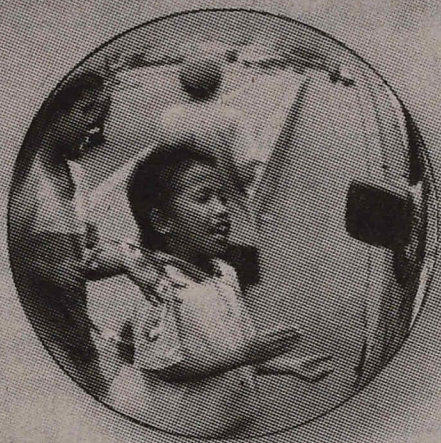
masih banyak anak-anak
yang mencari nafkah di jalanan
untuk satu tujuan:

Tetap Terus Sekolah

apa jadinya
kalau kebodohan ada dimana-mana
semakin tertinggal pendidikan kita
semakin terpuruk bangsa kita
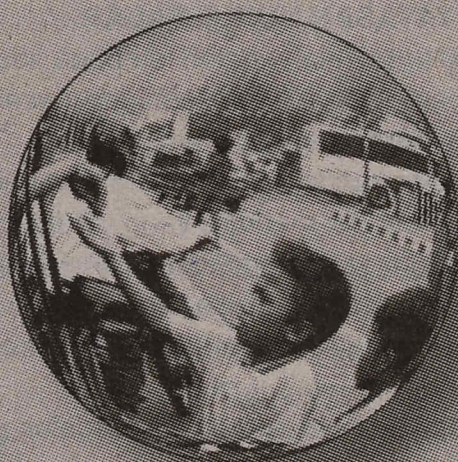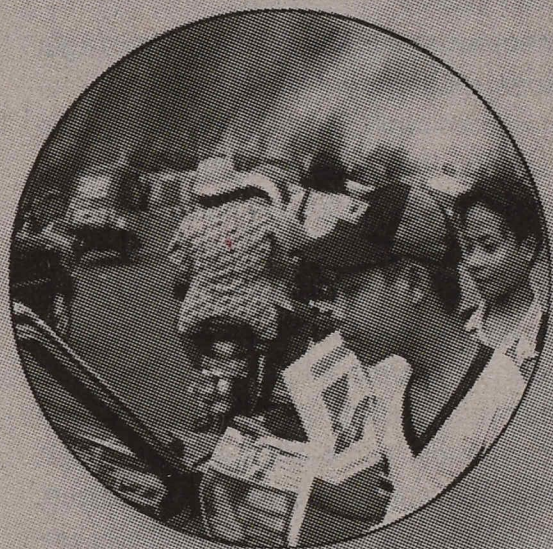
Sungguh, Sekolah masih tetap Perlu
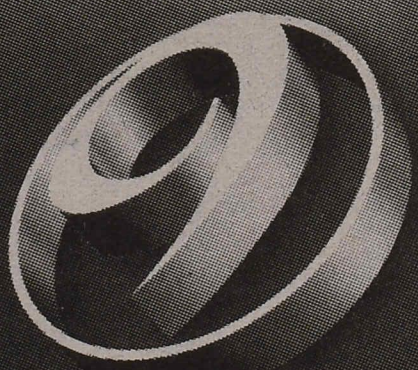
Memperingati 9 tahun SCTV
Surya Gemilang - Peduli Anak Bangsa,
YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) & SCTV
mengajak Anda mengulurkan bantuan agar mereka
tetap sekolah. Salurkan lewat

BCA Cabang Green Garden Jakarta Barat
No. rekening 253.300977.8

SCTV

JADIKAN DIRI KITA
BERARTI BUAT MEREKA

Aceh·

Di televisi, Senin, 16 Agustus 1999, pukul 11.05 wib, Presiden B.J. Habibie memasuki bagian tengah pidato kenegaraannya. Ia menguraikan angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pergerakan nilai rupiah. Lima menit sebelumnya, tepuk tangan bergemuruh di Auditorium MPR/DPR, ketika Habibie dengan gayanya yang berapi-api mengatakan, pemulihan ekonomi setahun terakhir merupakan kerja semua pihak di Indonesia. Bukan semata-mata faktor eksternal. Pendeknya, pidato kenegaraan presiden kabinet reformasi itu tak beda dengan pidato serupa presiden kabinet Orde Baru. Penuh dengan klaim keberhasilan, seperti juga pidato pembukaan Ketua MPR/DPR Harmoko yang penuh dengan kata-kata, "Dewan pun tanggap...."

Sudah cukup lama kita jenuh mendengarkan pidato-pidato yang penuh dengan bahasa slogan. Kali ini, perasaan jadi tak keruan. Di depan mata, di layar televisi, sederetan sukses pemerintahan Habibie tengah digelar. Tapi justru pikiran kita melayang ke Aceh, ke Ambon. Di Serambi Mekah, nun di ujung barat Indonesia, bumi masih bersimbah darah. Di timur, Ambon Manise masih terus menangis. Dua daerah modal Republik Indonesia ini masih bergolak, dengan sebab musababnya sendiri.

Kita bertanya-tanya, bagaimana saudara kita di Aceh dan Maluku merayakan ulang tahun ke-54 kemerdekaan RI? Jangan-jangan, pertanyaan yang muncul justru adalah sudahkah kita merdeka? Merdeka dari penindasan tangan-tangan kekuasaan. Merdeka untuk merundingkan dan memilih apa yang terbaik untuk daerahnya.

Sejarah Aceh mencatat, para pejuang dan ulamanya adalah pendukung utama, dan yang pertama-tama, terhadap negara kesatuan RI. Pada saat eksistensi negara kesatuan RI mendapat cobaan berat, rakyat Acehlah, yang diwakili para ulamanya, yang menyatakan setia mendukung negara kesatuan RI.

Dukungan para ulama terkemuka Aceh terhadap pemerintahan yang sah bisa dilihat dari cuplikan catatan sejarah.

Dalam mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, para ulama Aceh tampil ke depan dengan mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah dan mendirikan barisan-barisan perjuangan, baik yang bernama hizbullah atau bukan. Soal ini, Teungku Syekh Haji Hasan Krueng Kalee, selaku ulama besar di Aceh, guru dari Teungku Muhammad Waly al Khalidy, ulama besar Aceh, mengeluarkan fatwa: *perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dan berperang menentang musuh-musuh Allah merupakan suatu kewajiban. Dan apabila mati dalam peperangan, maka mendapat pahala syahid. Hendaknya umat Islam mengorbankan jiwa dan harta untuk menolong agama Allah dan negara yang sah.*

Fatwa ulama besar itu secara luas disiarkan ke seluruh Aceh melalui pemuda-pemuda Aceh yang tergabung dalam barisan pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia. Prof. Teungku H Ali Hasjmi, mantan gubernur Daerah Istimewa Aceh dan ketua Majelis Ulama Indonesia di daerah itu, ketika mengenangkan pribadi Teungku Muhammad Waly Al Khalidy menceritakan, Waly adalah ulama besar Aceh yang nasionalis.

Memang, sejarah juga mencatat, pada 1953, pecah pemberontakan yang dilakukan tokoh reformis Aceh, yang juga pimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Muhammad Daud Beureu'eh. Daud Beureu'eh ikut berjuang melawan kolonialisme Belanda dan menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Tapi, kemudian mengambil posisi berhadap-hadapan dengan pemerintahan pusat karena merasa dibohongi penguasa Indonesia. Mulai dari Soekarno sampai Soeharto (*lihat Bintang Zaman edisi ini*). Status provinsi Aceh dicabut. Dan, Aceh akan dijadikan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Soekarno bersimbah air mata di depan Daud Beureu'eh, menjanjikan tiga keistimewaan bagi Serambi Mekah: syariat islam, pendidikan, dan kebudayaan.

Sejarah mencatat angin kemerdekaan itu tersendat tiupannya di bumi Aceh. Sumber alamnya yang teramat kaya disedot habis-habisan oleh persekutuan antara penguasa pusat dan investor asing. Pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) sepanjang pemerintahan Soeharto telah menginjak-injak dan membinasakan rakyat sipil, dengan alasan memberangus kelompok yang dituding separatis.

Masa suram itu belum selesai. Pun setelah Presiden Habibie mengobral sederet janji di depan rakyat Tanah Rencong beberapa waktu lalu. Pula setelah Panglima TNI Jenderal Wiranto mencabut status DOM dan meminta maaf kepada rakyat Aceh atas segala pelanggaran hak asasi manusia yang dialami rakyat Aceh selama orde Soeharto. Sampai hari-hari ini, darah masih tertumpah di Serambi Mekah.

Ironis. Setengah abad lalu Soekarno menangis dan berjanji atas tiga hal, yang kemudian tak pernah ditepati. Soeharto melanjutkannya, bahkan membuat penderitaan rakyat Aceh makin bertumpuk dan menimbulkan trauma yang melampaui satu generasi. Kini, presiden ketiga masih menebar janji. Bahkan dalam pidato kenegaraannya yang disampaikan pada 16 Agustus ini, 54 tahun setelah kemerdekaan yang disokong oleh rakyat Aceh itu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Mengapa kita tidak belajar dari sejarah dan berhenti mengobral janji?

Kekerasan harus dihentikan. Di Aceh, di Ambon, di seluruh pelosok negeri. Atau, kita belum sepenuhnya "merdeka"? ■

UNI Z. LUBIS

Fuad Hassan

Kita Menderita Amnesia Sejarah

Semestinya, yang sudah kelihatan salah pada masa lalu jangan diulang. Sebodoh-bodohnya manusia, dia tidak akan mau mengulangi kesalahan pendahulunya.

Kritik terhadap dunia pendidikan kembali gencar terdengar. Masalahnya, makin hari semakin banyak saja kasus kebobrokan moral yang terungkap. Para elite politik dipandang telah mengabaikan etika dalam perebutan kekuasaan, para pengusaha semakin banyak yang ditemukan melakukan korupsi dan kolusi, perjudian marak, dan banyak remaja kita bermasalah. Berikut wawancara Redaktur Khusus *Panji* Ulil Abshar Abdalla dengan Fuad Hassan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan. Wawancara berlangsung di ruang kerjanya sebagai guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Senin lalu.

Pendidikan kita dipandang telah gagal membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian luhur. Apa tanggapan Anda?

Yang saya lihat, dalam setahun terakhir ini, kritik terhadap dunia pendidikan hanya berkisar pada soal kurikulum. Kurikulum terlalu padatlah, harus ditambah inilah, di kurangi itulah, dan seterusnya. Ini suatu hal yang tidak semestinya. Kurikulum itu hanya acuan untuk menyelenggarakan pelajaran. Tidak ada satu kurikulum pun bisa berjalan tanpa kesiapan tenaga pengajar. Kan begitu. Ini yang sering dilupakan. Persoalan kurikulum bukan sekadar apa mata pelajarannya, muatannya, berapa banyaknya. Tapi juga bagaimana tenaga pengajarnya, cukup berkompeten, tidak?

Itu sebabnya dari dulu saya selalu mengatakan, setiap perencanaan pengajaran juga harus memperhatikan dua hal pokok, yaitu sarana belajar dan tenaga pengajar. Seideal apa pun kurikulumnya, kalau tidak ada sarananya pasti sulit terlaksana. Secanggih apa pun sarananya, kalau tenaga pengajarnya tidak kompeten, pasti tidak berguna. Jadi, sarana belajar dan tenaga pengajar merupakan penunjang mutlak yang harus ada sehingga sebuah kurikulum bisa berjalan baik. Tanpa dua hal itu, berbicara tentang kurikulum itu buang waktu.

Faktanya, pemerintah mulai memberlakukan kurikulum 1999 sebagai penyempurnaan kurikulum 1994, tapi justru makin mengundang kritikan. Seorang guru di Medan mengeluhkan semakin terkungkungnya para murid sekolah kejuruan, setiap hari masuk pukul 7:30, keluar pukul 15:00, dan harus mengunyah sembilan materi.

Itu cerita lama. Pada Rakernas Pendidikan tahun 1986, saya sudah mengatakan, kurikulum kita keberatan beban dan kebanyakan dosis. Kebanyakan dosis artinya bahan yang sama diberikan banyak sekali. Dulu ada PSPB, terus ada lagi Sejarah Nasional. Materi dua pelajaran itu kan sama. Keberatan beban maksudnya macam pelajaran terlalu banyak. Jadi, itu persoalan 13 tahun lalu.

Kenapa selalu berulang?

Sudah kita ringkas, kita pangkas, eh menggelembung lagi. Sebagian karena ulah masyarakat juga. Kadang-kadang mereka menuntut segala macam materi dimasukkan ke kurikulum. Minta tambah jam budi pekerti, minta tambah pelajaran agama, sastra. Sebetulnya, kurikulum itu yang pantas-pantas saja. Dalam batas kemampuan anak. Kemudian, sekali lagi, jangan hanya melihat megahnya apa yang tercantum, tapi lihatlah mungkin tidaknya dilaksanakan.

Sepertinya tuntutan-tuntutan itu bisa dipahami karena berangkat dari kenyataan semakin merosotnya kesadaran moral bangsa kita. Maka perlu memperbanyak pelajaran humaniora, budi pekerti, dan agama.

Lo, memangnya segala-galanya menjadi tanggung jawab sekolah? Semua orang mestinya maklum, pendidikan itu tergantung pada tiga lingkungan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terjadi di dalam masyarakat juga mempunyai dampak didik. Apa bisa sekolah memaksakan kepada anak didik, "Menunggu bis harus di halte," sementara ketika mereka keluar, menunggu di halte, malah tidak dapat tempat. Masyarakat justru mengajari mereka, "Menunggunya harus di tempat yang ada rambu dilarang berhenti." Yang mana mereka turuti?

Kalau ketiga lingkungan ini tidak sinkron, ya kesalahan jangan hanya ditimpakan kepada sekolah, *dong*. Berapa lama, sih, anak didik berada di sekolah? Berapa lama guru bisa mengawasi mereka? Dan ketika dia berdiri di depan kelas, dia kan berdiri di hadapan sekian puluh anak yang berbeda-beda wataknya, yang lain latar belakangnya, lain kepentingannya.

Tanggung jawab pendidikan, pertama kali, ada pada keluarga. Itu alamiah. Jadi, kalau ada masalah, ya pihak keluargalah yang pertama-tama harus ditanyai, "Mereka sudah bikin apa, sih, dalam mendidik anaknya?" Ya, kan? Pengaruh keluarga juga tidak kalah pentingnya. Orangtua bertugas menjaga kebersamaan keluarga, menjaga kewibawaan sebagai panutan sehingga mereka masih diterima. Sebab, kalau orangtua sembrono juga, ya bagaimana?

Dan ini saya jaga betul. Di rumah, sejak anak-anak masih kecil, saya biasakan ada kesempatan untuk bersama. Entah makan malam, minum sore, itu mesti ada. *Home sweet home.* Kalau rumah bisa menjadi *home*, itu sudah merupakan pertolongan besar. Tapi kalau rumah cuma *house*, wah itu alamat runyam.

Di mana perbedaannya?

Rumah cuma sebagai *house*, artinya penghuninya pulang seperti masuk goa saja, masuk kandang, tidak betah. Kalaupun pulang, mereka segera masuk ke goa masing-masing, menyetel tivinya masing-masing, memakai telepon masing-masing, dan seterusnya.

Rumah sebagai *home* berarti rumah telah menjadi basis, suaka, di mana semua anggotanya merasa kerasan, berkumpul dengan perasaan senang.

Ya, dalam Islam, ada konsep *baitiy jannatiy*.

Betul. Dan hadis tentang itu diucapkan setiap hari, dikhutbahkan setiap Jumat, tapi dilaksanakan, tidak? Terus terang, saya mengeritik para penganjur, konsep ini *mbok* ya didalami, dihayati.

Bayangkan, *baitiy jannatiy*, rumahku surgaku. Surgaku sudah bisa dinikmati sekarang, di rumah, tidak hanya nanti. Dalam bahasa Arab, *bait* itu antara lain disebut juga *manzil*. *Manzil* itu berarti tempat kita turun, mendarat, berlabuh. Ibu disebut juga *rabbatul manzil*, kaptennya pelabuhan, sangat berkompeten dalam memberikan bimbingan yang baik. Dia bisa memancarkan wibawa, sehingga rumah itu menjadi *jannah*. Bayangin rumah dalam suasana seperti itu. Sudah separo jalan, kan.

Saya jamin, siapa yang bisa menjadikan rumahnya sebagai surga, banyak dampak dari luar yang bisa ditanggulangi. Tapi, kalau kursi di rumah sudah terasa panas, baru pulang langsung pergi lagi, tidak betah, bertemu dengan yang lain malah berkelahi, yaa bagaimana itu. Rumahku nerakaku?

Nah kalau menurut saya, konsep ini penting sekali dihidupkan lagi. Karena, lingkungan keluarga kita sekarang ini semakin berantakan. Bapak rapat, ibu repot, anak-anak jadi apa?

Mereka diguncang oleh macam-macam kontroversi. Di sekolah dikatakan begini, di rumah begitu, di luar kok lain lagi. Dia harus pilih mana? Ya memilih yang paling enak, kan? Itu *pleasure principle*, mana yang enak, itulah yang dipilih.

Dan yang lebih enak itu sepertinya cenderung lingkungan yang ketiga, lebih bebas dan lebih luas?

Lebih luas hampir tak berbatas. Di situ termasuk televisi, film, majalah, iklan, dan segala macam. Semua itu membawa dampak yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan anak. Kalau misalnya semua hal di lingkungan luar itu diumbar, ya celakalah kita. Sebab, makin besar sang anak, makin luas pula dunianya. Dulu, ketika kecil, barangkali dia cuma di rumah. Makin besar, dia makin keluar. Sementara di luar semuanya terjadi.

Nah, pertanyaannya, ada *nggak*, yang mengatur apa yang tampil di tivi, yang diperagakan di film, yang nongol di koran-koran? Ada *nggak* yang peduli dengan apa yang terjadi sehari-hari di pinggir jalan? Di sekolah anak diajar disiplin. Tapi di jalan, coba tunjukkan kepada saya, di mana di Jakarta ini ada daerah yang bisa kita katakan, "Nih, lihat, inilah contoh hidup berdisiplin."

Padahal imbauan untuk itu cukup banyak.

Di bawah tulisan imbauan itu justru disiplin tidak jalan. Jadi apa yang terjadi di luar ini jauh lebih banyak membawa dampak bagi pendidikan anak.

Cuma, kalau persoalannya digeser ke sana, ya tidak adil juga?

Tidak, tidak. Saya tidak bermaksud menimpakan kesalahan hanya ke masyarakat. Yang saya maksudkan, semua pihak harus bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Semua harus sinkron dari lingkaran pertama sampai lingkaran ketiga. Setiap lingkaran wajib menjadikan lingkungannya sebagai tempat yang punya pengaruh pendidikan.

Dalam lingkungan ketiga, barangkali, saya melihat ada dampak yang serius dari proses urbanisasi yang terus berlangsung. Ada semacam hubungan yang positif, begitu urbanisasi tinggi, dampak-dampak negatif moralnya juga tinggi. Bagaimana menurut Anda?

Dalam proses urbanisasi, yang segera bisa kita lihat adalah jumlah penduduk kota meningkat sementara penduduk desa menurun. Proses urbanisasi terjadi karena migrasi penduduk dari pinggiran, *rural*, ke arah perkotaan, urban, kan?

Nah, ketika masuk ke kota, selain
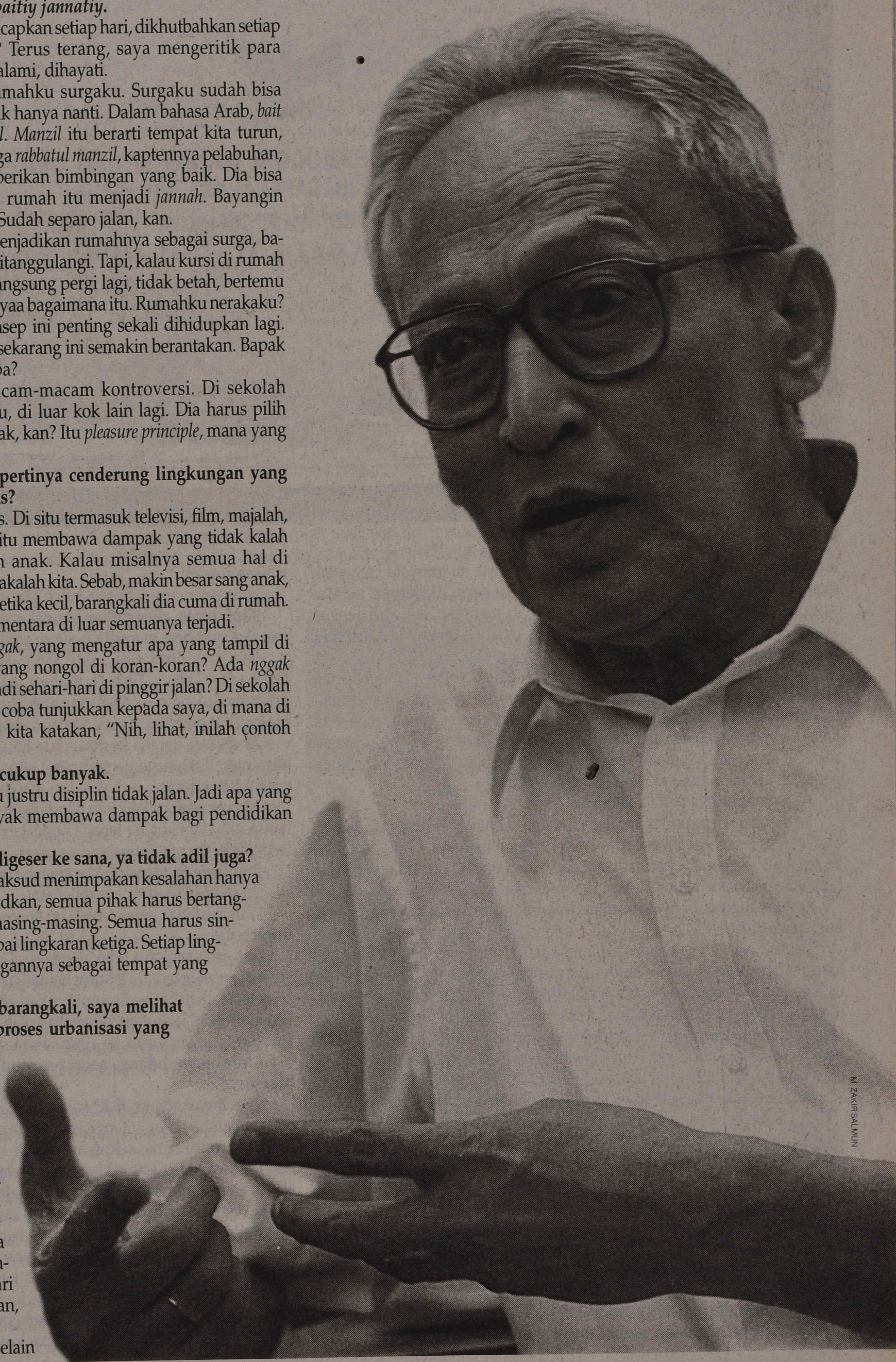
M. ZAKIR SALMUN

Dalam sebuah acara: Kekerasan diumbar

membawa budayanya masing-masing, orang desa ini ternyata juga telah mempersiapkan diri untuk menyerap nilai-nilai baru. Akibatnya, mereka yang tadinya tradisional, bisa tiba-tiba berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan kota yang semakin heterogen. Baik dalam selera, pola konsumsi, dan sebagainya.

Jadi, di situ ada gaya hidup tersendiri yang tidak tetap. Hari ini begini, besok ganti lagi, lusa ganti lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya, gaya hidup di perkotaan akan menjadi heteronomis, majemuk dalam norma, banyak ukurannya. Tidak lagi seperti di desa normanya masih sederhana, sangat mudah membedakan apa yang pantas dan yang tidak pantas. Di kota, masing-masing maunya sendiri.

Apa dampaknya pada anak didik?

Ya meniru. Heteronomi ini menciptakan pilihan yang banyak. Begini bisa, begitu bisa, *begono* bisa. Anak didik tinggal memilih, "Ah, saya mau begini saja." Besok, dia berubah lagi, lusa lain lagi. Tidak cuma pada cara berpakaian atau penampilan saja, tapi kelakuan juga.

Terbentangnya banyak pilihan, bukankah ini sesuatu yang positif bagi anak didik?

Tergantung dari apa yang dia pilih. Kalau dia *urbanize* lalu melihat peluang belajar yang lebih banyak, dan dia menggunakan waktu selama hidup di kota untuk belajar, ya berarti positif. Banyak juga anak desa yang maju di kota, seperti banyak juga anak kota yang mundur. Jadi, *urban life* ini memang memberikan apa yang disebut *apertura*, pintu kepada pilihan yang banyak sekali. Mau belajar siang malam bisa, mau nonton kesenian bisa, mau *ndak* keruan juga bisa. Silakan pilih.

Berarti tidak juga selamanya negatif bagi anak didik?

O, ya. Jangan melihat jeleknya saja. Barangkali di Jakarta ini lebih banyak pengajian daripada di kota-kota lain. Banyak diskusi agama, pengajian di kantor-kantor, majelis-majelis taklim. Jangan heran, mereka yang sehari-harinya mengenakan celana jins, kaos oblong, tahu-tahunya mereka rajin ke musala.

Atau rajin ke gereja.

Ya. Artinya, kehidupan religius tidak mati. Jangan diprasangkai dari penampilan saja. Nah, kenapa mereka begitu, karena mereka pilih begitu. Tapi mereka yang saban malam mau nongkrong di kafe, ya banyak juga. Jadi pilihannya terbuka.

Apa yang menentukan mereka memilih yang positif dan menghindari yang negatif?

Sangat tergantung pada bekal diri sang anak.

Tapi, tentu, diperlukan model pendidikan sekolah yang pas bagi mereka agar bisa memilih dengan cerdas.

Bagi saya, dengan SD, SMP, SMA, dan segala macam itu, sudah cukup, tidak ada masalah. Tinggal disempurnakan dengan menyediakan tenaga pengajar dan sarana belajar yang baik. Itu saja. Tidak perlu ribut-ribut mengutak-atik kurikulum. Tidak ada gunanya. Dua hal itu yang sangat mutlak.

Andaikata karena keadaan kita harus memilih di antara dua ini, saya akan memilih tenaga pengajaran. Dulu, ketika fakultas kedokteran masih susah, laboratorium terbatas, tapi karena dosen-dosennya hebat, mereka bisa improvisasi, ya kegiatan pendidikan berjalan baik juga. Sekarang, sarananya ada, tapi karena tenaga pengajarnya buruk, ya tidak berguna juga. Sekali lagi, tenaga pengajar itu sangat penting.

Problemnya, menciptakan tenaga guru yang kompeten itu bagaimana?

Ya, IKIP-IKIP itu harus dibenahi.

Wah, padahal, sejak bulan ini sejumlah IKIP malah diubah menjadi universitas.

Nah, itu yang saya tidak mengerti. Terus terang saja, saya tidak melihat ada alasan yang tepat. Menurut hemat saya, dan ini juga sudah saya katakan sejak lama, IKIP harus disempurnakan sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Jadi, yang dihasilkan oleh IKIP harus guru-guru. Bukan pakar sejarah, pakar sastra, tapi guru. Pakar-pakar itu, itu jatahnya universitas.

Anda memandang, secara umum, IKIP telah gagal memenuhi tugasnya?

Saya memandang, IKIP sudah mekar terlalu luas sehingga fokusnya seolah-olah tidak lagi menghasilkan tenaga pengajar.

Anda optimistis, sekolah-sekolah kita mampu mencegah tawuran dan budaya kekerasan di kalangan pelajar setelah disempurnakan dari aspek tenaga pengajar dan sarana belajar itu?

Sekolah akan mampu menjalankan tugasnya di lingkungannya. Sekarang, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan lingkungan pendidikan yang lain—keluarga dan masyarakat—sinkron atau tidak?

Sekali lagi, jangan melimpahkan kesalahan hanya kepada sekolah. Apalagi berbicara tentang budaya kekerasan. Justru di tengah masyarakatlah, saat ini, telah terjadi kultus kekerasan.

Apa yang Anda maksud dengan kultus kekerasan?

Begini. Dalam bahasa Inggris, ada istilah *the finger pull the trigger*, jarilah yang menarik pelatuk. Tapi, sekarang ini, sepertinya sudah terbalik, pelatuk yang gatal minta ditarik oleh jari.

Artinya, saat ini, kekerasan telah begitu banyak dicontohkan di tengah-tengah kita. Dalam adegan-adegan film, dalam peristiwa-peristiwa perkelahian, dalam surat kabar, bagaimana menggunakan celurit, pistol, membuat bom molotov, semua dibeberkan padahal tadinya tidak dikenal. Sadar atau tidak, telah terjadi proses *social learning*, belajar dari masyarakat, tentang kekerasan bagi masyarakat.

Sekarang ini, kekerasan diumbar, seolah-olah tidak ada hukumnya. Bahkan, dicontohkan, yang keraslah yang selalu menang. Lemah berarti mati. Akibatnya, ya semua orang mau keras. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ada tindakan yang tegas terhadap semua itu?

Anda ingin mengatakan, media massa kita sudah lepas kendali?

Saya lagi-lagi mengatakan, ekspose terhadap kekerasan, terutama melalui media massa, khususnya televisi, sudah sangat berlebihan. Coba, amati semua stasiun televisi kita. Adakah yang tidak menayangkan adegan kekerasan? Kekerasan sudah menjadi bagian sehari-hari televisi kita. Bahkan film kartun pun, tak luput, dibuat dalam adegan kekerasan. *La*, kartun itu untuk siapa? Anak-anak, kan? Terus, perhatikan mainan mereka. Pistol-pistolan, pedang-pedangan. Jadi, sudah sejak dini mereka disiapkan dengan budaya kekerasan.

Jadi, harus ada regulasi di bidang hiburan?

Bukan, bukan regulasi. Semua ini tergantung kesadaran seluruhnya. Regulasi selalu menimbulkan pertentangan. Lihat saja isu pornografi baru-baru ini, ribut setengah mati. Diatur apa *nggak*? Pakai apa? Bisa dihukum, *nggak*? Ujung-ujungnya, tidak ada yang jelas. Jadi, tergantung *sense of morality*, kesadaran moral masing-masing.

Bagaimana membentuk *sense of morality* itu?

Teladan. Itu yang pertama. Kedua, jangan ada ekspose berkelebihan.

Nah, apa defenisi berkelebihan itu? Kan akhirnya harus ada regulasi juga, kan?

Itu gampang. Lihat saja televisi. Dikatakan, fungsi televisi itu tiga: *information, education, recreation*. Sudahkah tiga fungsi itu dijalankan? Dalam susunan program mereka, berapa jam berita, berapa jam pendidikan, berapa jam hiburan? Menampilkan adegan berdarah-darah, menghiburkah itu?

Dengan alasan untuk memberikan informasi, media massa kan tetap bisa mengekspose kekerasan. Seperti penayangan gambar potongan-potongan mayat korban mutilasi di Tangerang, beberapa pekan lalu?

Tidak bisa. Di negara yang lebih maju, sebelum gambar seperti itu ditayangkan, penyiarnya mesti memberikan peringatan, "Tayangan berikut ini kemungkinan besar akan membuat Anda terkejut," atau semacamnya. Nah, di sini kan tidak. Blas... tiba-tiba tubuh berlumuran darah sudah nongol di layar tv. Ya, kan?

Ada perbandingan menarik. Di Mesir, ada peraturan yang dikeluarkan kementerian kebudayaan di sana yang melarang ekspose film-film kekerasan. Peraturan itu dijalankan dengan ketat, tidak bisa ditawar-tawar. Kita bisa mencontoh ini, barangkali?

Bisa kalau kita mau. Cuma, masalahnya, nanti akan timbul perdebatan, film *Cut Nyak Dien* termasuk mengandung kekerasan, tidak? Maksud saya, *over regulation* selalu menimbulkan protes, dan bisa saja tidak efektif.

Jadi regulasi seperti apa yang pantas?

Regulasi yang pantas itu datang dari pihak penyelenggara ekspose kekerasan selama ini. Setiap stasiun tv hendaknya mengatur sendiri apa yang akan mereka tayangkan.

Rasanya *kok* mustahil mengharapkan mereka membuat peraturan yang membatasi gerak mereka sendiri.

Ya, kalau mereka hanya ingin menghasilkan duit. Kalau mereka hanya berorientasi materialistis dan komersial. Dan pada kenyataannya, orientasi itu memang sudah menjadi-jadi saat ini. Mereka hampir-hampir tidak lagi membuat kriteria, kecuali diserahkan kepada selera pasar. Apa yang pasar mau, ya disajikan. Tidak ada urusan dengan misi segala macam.

Artinya, kita memang sudah tidak bisa menghindar dari itu semua?

Bisa, pasti bisa.

Bagaimana?

Dengan meningkatkan selera masyarakat.

Anda bisa mengambil contoh suatu pengalaman konkret di mana hal itu terjadi?

Kenapa pada zaman dulu, Chairil Anwar, misalnya, memiliki kreativitas tinggi? Karena dia sangat kritis kepada sesuatu yang datang dari luar. Tidak dikunyah begitu saja. Kenapa daya kritisnya tinggi, karena latar pendidikannya kuat, bacaannya banyak. Pada usia 20 tahun, karya-karya Chairil sudah bagus. Tapi jangan bayangkan bacaannya sama dengan pemuda 20-an tahun sekarang. Ini yang sekarang agak diabaikan, yaitu membekali diri dengan bahan cukup, sebelum berbuat sesuatu.

Sosok seperti Chairil Anwar adalah contoh yang amat sedikit dari kalangan terdidik kita.

Bukan, bukan. Di mana-mana, orang seperti itu memang terbatas. Tapi, kan pikirannya turun ke khalayak ramai. Dulu, yang mengarang novel sekelas Atheis kan hanya satu dua, tapi bukunya tersebar dan digandrungi orang. Sekarang bagaimana? *You* bikin buku yang berat-berat, siapa yang mau menerbitkan? Siapa yang mau membaca? Selera kebanyakan anak muda kita, *nyampe, nggak*?

Anda terlihat sangat pesimistis?

O, tidak. Saya sama sekali tidak pesimistis dengan generasi muda kita yang memang belajar dan ada fokusnya. Saya bahkan jauh lebih punya pandangan optimistis melihat anak-anak muda yang langsung di depan saya, yang belajar sesuatu dengan bagus, tapi juga tahu banyak hal di bidang lain. Cukup banyak mahasiswa saya yang belajar psikologi tapi juga melukis, atau menulis, menari, main biola. Bagus-bagus. Terus terang, saya lebih pesimistis melihat kelakuan para pemain sirkus di panggung politik kita saat ini.

Tapi, bukankah para pemain sirkus itu dulunya juga besar di kampus-

M. ZAKIR/SALMUN
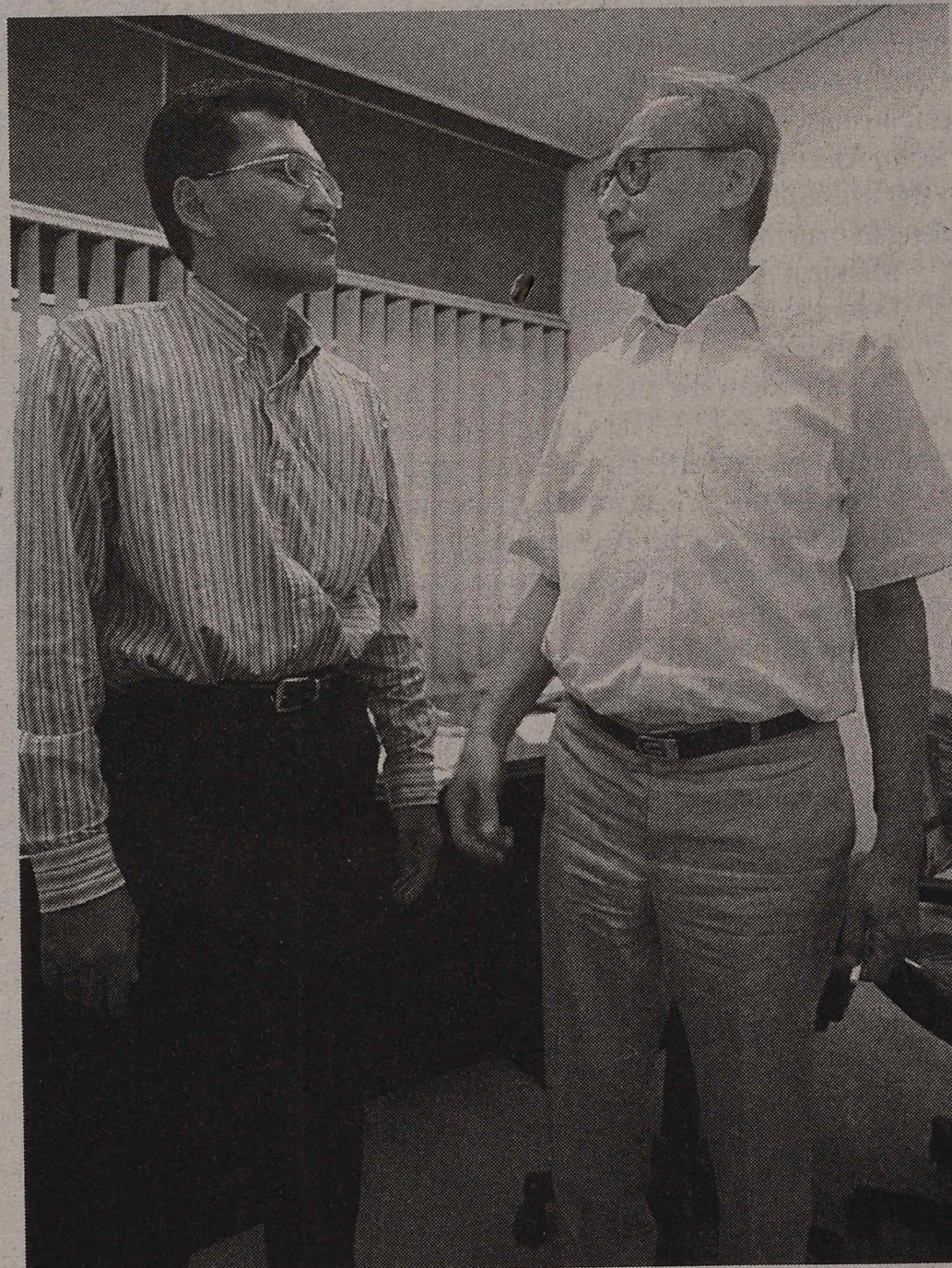
Seusai diwawancarai Ulil Abshar: Tidak pesimistis
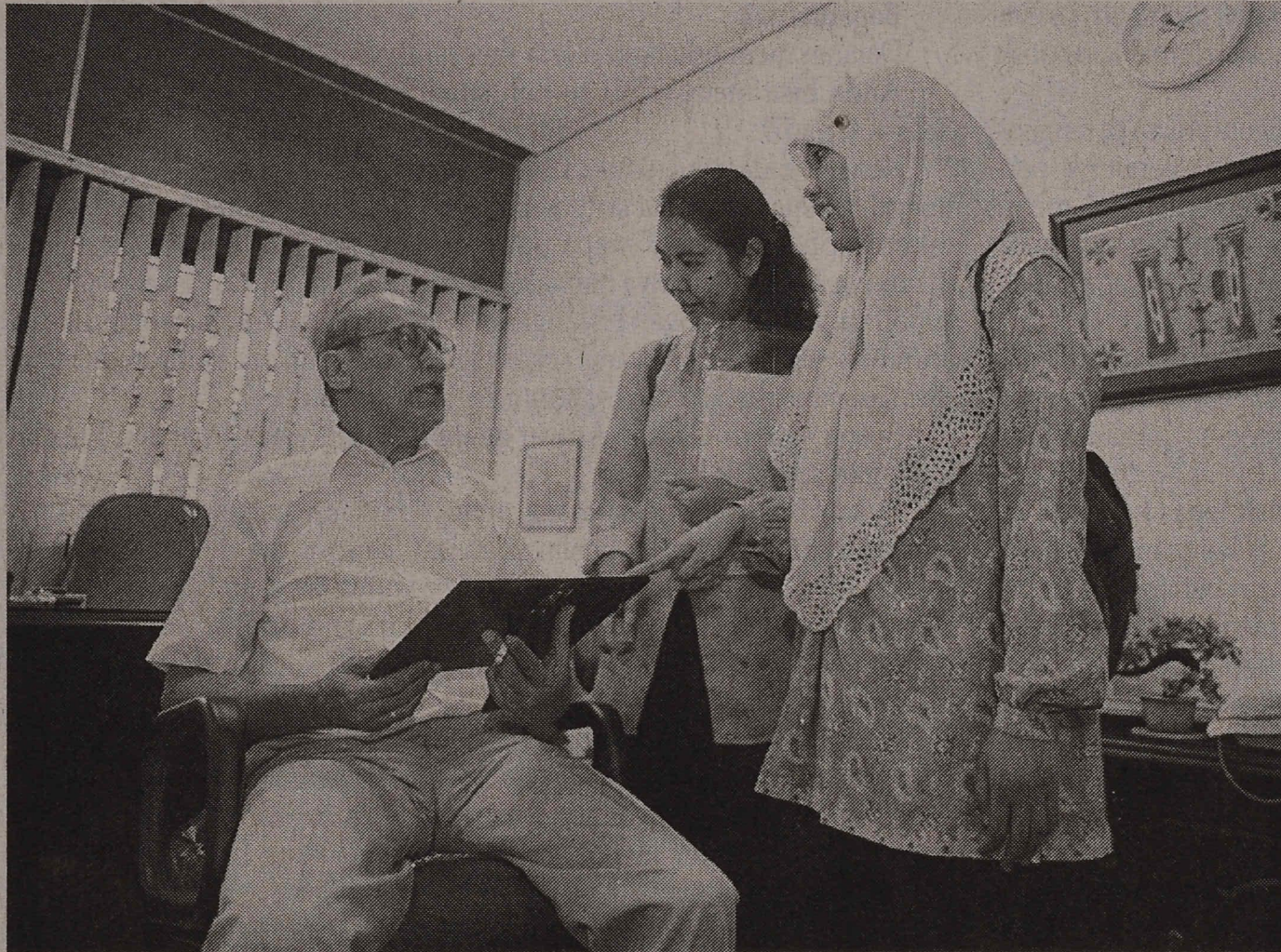
Bersama anak didiknya: Demokrasi yang kebablasan

M. ZAKIR SALMUN

kampus seperti mahasiswa-mahasiswa Anda?

Ha... ha... ha. Mungkin juga. Cuma, saya sendiri bingung, kultur apa sebenarnya yang sedang kita bangun saat ini. Semua cuma sibuk menghitung kursi, negosiasi kekuasaan, tak peduli apa yang terjadi di bawah. Coba, mana ada yang mengurus masalah-masalah yang aktual dalam kehidupan masyarakat. Mana ada yang memperhatikan kepentingan nasional. Aceh, Ambon, dan seterusnya, dibiarkan berlarut-larut. Seperti *ndak* ada yang *ngurusin* saja. *Ngurus sih ngurus*, tapi konsentrasi tidak. Mereka sibuk dengan matematika politik.

Menurut Anda, dari mana asal usul kultur politik seperti itu?

Demokrasi yang kebablasan ini. Demokrasi yang diartikan segala boleh.

Anarkisme?

Ya, saya khawatir kita menuju anarkisme. Saya hargai orang seperti Harun Alrasid di KPU. Tapi kan dia itu sendiri dan menjadi korban dari permainan sekian banyak Abu Nawas yang culas.

Saya tidak pro ini atau pro itu, golongan saya independen. Tapi, keadaan berlarut-larut begini, itu bagaimana, sih. Orang ribut, dulu, pada zaman Pak Harto, bobrok begini-begini. *Lo*, sekarang, dalam waktu singkat, sudah rusak kayak ini, *kok*?

Barangkali karena sisa-sisa masa lalu?

Bukan. Ini menunjukkan bahwa mentalitas kita sebetulnya yang harus dibenahi. Dan jangan orang anggap masyarakat itu bodoh. Jangan ditimbuni mereka frustrasi terus-menerus. Satu saat kalau sudah tak terkendali, mereka akan memberontak. Nah, apa perlu itu? Semua dibohongi, semua dikelabui.

Artinya, Anda kembali mengingatkan mengenai keteladanan tadi?

Ya, bagaimana pentingnya keteladanan pimpinan itu, bagaimana ucapan mereka bisa diandalkan. Dalam Islam disebutkan, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau diandalkan dia khianat. Nah!

Masalahnya, sekarang ini orang berbicara tentang sistem, bukan keteladanan yang sifatnya individuil.

Semua sistem, semua struktur, ada kulturnya. Kita memakai sistem manajemen, pemerintahan, kulturnya apa? Kalau kulturnya feodal, ya yang berlaku sistem yang feodal. Sistem itu kan cuma bangunannya. Yang berperilaku adalah manusia, dan manusianya adalah makhluk kultural. Kalau kultur yang dibangun masih paternalistik, ya sistemnya akan paternalistik. Jadi, jangan salahkan sistem.

Sekarang saja, sudah subur lagi ungkapan, "Ya nanti tunggu restu bapak presiden." Wah, wah, wah. Saya bukan membela Pak Harto, tapi dulu, yang sering mengatakan itu, ya karena maunya dia sendiri. Saya, selama delapan tahun jadi menteri, tidak pernah mengatakan begitu. Karena Pak Harto tidak minta, *kok*. Pak Widjojo, Pak Emil, apa pernah bilang begitu? Yang mau begitu, ya karena memang kulturnya begitu. Belum apa-apa, dia sudah bilang, "Ooh, seluruh rakyat mendukung Bapak." *Walah!*

Anda ingin mengatakan bahwa kultur feodal masih cukup kuat dalam politik kita?

Saya tidak tahu, apakah kultur feodal atau kultur budak. Nietze bilang, masyarakat ini terbagi dua: kelas majikan dan kelas budak. Nah, budak ini tahunya bilang, *"Just tell me what to do."*

Jadi, dari mana kita harus memulai untuk mengatasi itu?

Teladankan dari atas. Budaya-budaya seperti itu, buanglah jauh-jauh. Terus terang, saya tidak melihat banyak perubahan. Tidak ada. Apa perubahannya?

Mungkin karena waktu yang amat pendek?

Semestinya, yang sudah kelihatan salah pada masa lalu, ya jangan diulang lagi. Sebodoh-bodohnya orang, dia tidak akan mengulang kesalahan pendahulunya. Orang di depannya terpeleset, ya jangan mengikuti jejaknya, *dong*. Cuma, karena kita lebih unggul dari keledai, ya kita akhirnya mau berkali-kali tersandung batu yang sama.

Atau, inilah bukti bahwa ingatan bangsa kita memang pendek terhadap masa lalu?

Persisnya, kita sedang menderita amnesia sejarah. Peristiwa yang baru terjadi tahun lalu, sudah kita lupakan. Jadi, setiap kali ada distorsi dalam perlakuan sejarah kita sendiri. Dan itu, menurut hemat saya, tanggung jawab para ahli sejarah dan media massa yang selalu menampilkan hal-hal yang lepas dari konteks sejarah. ■

MUZAKKIR HUSAIN

Untuk Kedamaian Aceh

Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, pada Ahad, 15 Agustus 1999, mengajak umat Islam Jakarta dan sekitarnya untuk berdoa bagi kedamaian Aceh. Acara *istighatsah* bagi kedamaian di Aceh ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan diakhiri dengan pembacaan puisi tentang Aceh oleh Taufik Ismail. *(Foto 3)*

Selamatkan Aceh

Bertempat di Jakarta Media Centre, Gedung Dewan Pers, 13 Agustus lalu diluncurkan buku kecil berjudul *Simak dan Selamatkan Aceh,* yang ditulis Isma Sawitri, Amran Zamzami, dan B. Wiwoho. Peluncuran buku ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Panitia Peduli Aceh, sebuah forum yang didirikan beberapa tokoh yang merasa prihatin dan khawatir atas nasib masyarakat Aceh dewasa ini. Forum ini bergerak dengan pendekatan budaya, kasih sayang, dan antikekerasan. *(Foto 1)*

Amigos 19 Tahun

Seperti halnya anak remaja yang memasuki usia 19 tahun, saat ia sedang aktif mengembangkan diri, Amigos Restoran di bawah bendera Grup Ponderosa menyelenggarakan "Anniversary Customer Reward Program" selama satu setengah bulan yang berlaku di setiap *outlet*-nya. Program ini dimaksudkan untuk memanjakan tamu dengan memberikan sebuah kartu yang pada nilai tertentu berhak mengikuti undian *lucky draw* untuk memperebutkan sejumlah hadiah menawan. *(Foto 4)*

Suara Rakyat

Untuk kedua kalinya, wartawan foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menyelenggarakan pameran bersama. Pameran bertajuk "Suara Rakyat" ini digelar di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 12-22 Agustus. Pajangan foto-foto kegiatan seputar kampanye dan pemilu ini dibuka mantan meneg KLH, Emil Salim. Emil Salim juga sempat mengajak salah seorang wartawan foto korban tindak kekerasan aparat, Saptono, ke panggung saat memberi sambutan. *(Foto 2)*

Buku A.M. Saefuddin

Dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-60, A.M. Saefuddin meluncurkan buku yang berjudul *Indonesia dari Reformasi ke Masyarakat Madani* yang diterbitkan oleh Media Dakwah. Peluncuran buku yang pengantarnya ditulis Achmad Tirtosudiro ini dihadiri banyak tokoh nasional. *(Foto 5)*

BAPEPAM

22ND ANNIVERSARY OF THE INDONESIAN CAPITAL MARKET REACTIVATION

1999 CAPITAL MARKET CONFERRENCE

"ECONOMIC RECOVERY THROUGH A REVITALIZED CAPITAL MARKET"

AUGUST 24TH, 1999 – CENDRAWASIH ROOM, JAKARTA CONVENTION CENTER

WELCOMING SPEECH
JUSUF ANWAR, Chairman Bapepam

OPENING SPEECH
DR. BOEDIONO
Minister of State for National Development Planning/ Chairman of Bappenas
Development Strategi For A New Millenium

Luncheon Speaker
JEAN MICHEL SEVERINO
Vice President, East Asian & The Pacific Region, The World Bank

Asia Pacific Rim: Lesson From a Crisis

PANEL # 1
Macro Economic Policy & Setting A Conducive Climate for Investments

DR. BAMBANG SUBIANTO, Minister of Finance

MARZUKI USMAN, Minister of Tourism, Art & Culture/ Minister of State for Investment/ Chairman of Investment Coordinating Board

DR. SJAHRIL SABIRIN, Governor Bank of Indonesia

JESSE BHATTAL, Chairman Lehman Brothers Asia

MODERATOR :
JUSUF ANWAR, Chairman Bapepam

PANEL # 2
Corporate Governance & Its Role in Business Restructuring

MAR'IE MUHAMMAD,
Chairman Indonesian Transparency Society

ALI ABDUL KADIR
Chairman Malaysian Securities & Exchange Commission

PROF. PAUL M. DICKIE
University of Wellington, New Zealand, Former Director The Asian Development Bank

CALLY JORDAN
Corporate Governance Specialist, The World Bank

MODERATOR :
EDWARD NOCCO
Managing Director, Chase Manhattan Bank

PANEL # 3
Capital Markets & Their Role in Overcoming Econimic Downturn

ALAN CAMERON
Chairman Australian Securities & Investment Commission

RINI M.S. SOEWANDI
President, Astra International

DAVID N. KOWITZ
Managing Director, Soros Fund Management, LLC

MODERATOR :
DR. TIMOTHY S. BUEHRER
Indonesia Coordinator, Harvard Institute for International Development

PANEL # 4
Indonesia : The New Outlooks

DR. SRI MULYANI INDRAWATI
University of Indonesia

LT. GENERAL (TNI)
S. BAMBANG YUDHOYONO
Territorial Chief of Staff, Indonesian Armed Forces

PROF. DR. NURCHOLIS MADJID
Principal, Paramadina Mulya University

MODERATOR :
DJAFAR ASSEGAFF
Chief Editor, Media Indonesia

(   ) YES, I WOULD LIKE TO PARTICIPATE IN THE 1999 CAPITAL MARKET CONFERENCE

FOR INFORMATION/ CONFIRMATION
CAPITAL MARKET SOCIETY OF INDONESIA
62 – 21 922 9562/ 63
62 – 21 515 1676 (HUNTING):
MS. DWI/ MR. WILYAN – EXT. 241
MS. DHARMA – EXT. 141

Fax. 62 – 21 515 1794

E-mail : dewi@cms.or.id
cmi@cms.or.id

ORGANIZED BY :
CMS
Capital Market Society of Indonesia

Sponsored By :

LIPPO GROUP
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk.
PT BAT Indonesia Tbk
LEHMAN BROTHERS
BANK CIC
PT Bank CIC Internasional Tbk.
PRASETIO UTOMO
ARTHUR ANDERSEN
LONSUM
Merrill Lynch
SAMPOERNA

REGISTRATION FEE RP 450.000,- (WILL BE DONATED FOR SOCIAL PURPOSE)
PLEASE TRANSFER TO BANK LIPPO BRANCH BEJ C.Q CAPITAL MARKET SOCIETY OF INDONESIA ACC. NO. 569–30–09059–7
PLEASE FILL IN THE FORM AND FAX IT BACK TO THE ABOVE NUMBER WITH TRANFER SLIP ATTACHED

PANJI UTAMA

Sjafrie & Zacky

Banyak yang menduga, sinar dua petinggi TNI itu, Mayjen Sjafrie Sjamsoedin dan Mayjen Zacky Anwar Makarim, segera redup. Gara-garanya, mereka, sebagai orang yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bekas Pangkostrad, bakal perlahan-lahan disingkirkan. Dugaan-dugaan itu rupanya malah bertolak belakang. Terakhir, keduanya justru mendapat tugas khusus. Sjafrie ditugaskan di Aceh dan Zacky di Timor Timur. Di lapangan santer beredar bahwa mereka akan mengisi pos-pos strategis. Misi apa sebenarnya yang akan mereka emban? Lalu bagaimana juga nasib karier mereka di kemudian hari? Topik Panji Utama kali ini mengungkap soal misi Sjafrie di Aceh dan Zacky di Timor Timur.■

SATARI

Misi Dua Jenderal: Sjafrie dikirim ke Aceh untuk mencari akar masalah. Zacky ditugaskan ke Timtim untuk memenangkan pro-otonomi. Mengapa dua jenderal itu yang justru dipilih?
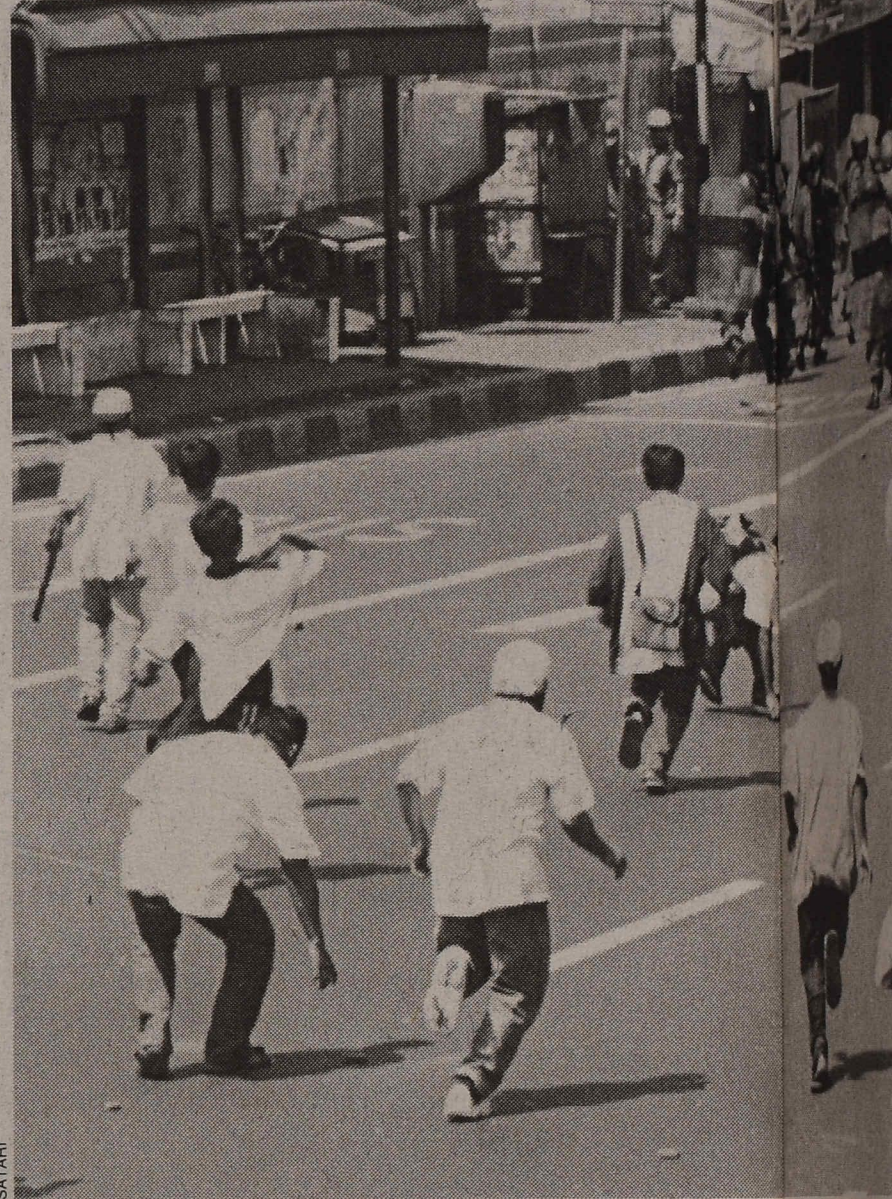
SATARI

Dua Jenderal Satu

Untuk memenangkan perang, tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Filosofi perang yang sudah kuno ini, agaknya, tidak berlaku bagi TNI. Paling tidak untuk sekarang. Perhatikan saja kiprah TNI di Daerah Istimewa Aceh. Betapa banyak rakyat sipil yang harus menjadi korban, justru setelah daerah operasi militer (DOM) dicabut. TNI ngotot mengejar pasukan bersenjata yang biasa disebut pihak keamanan sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Ya, bagaimana tidak. DOM dicabut, tetapi sebagai gantinya dikirim ribuan anggota PPRM. Setelah puluhan rakyat tak bersalah menjadi korban, ada desakan agar PPRM ditarik. Namun, Presiden B.J. Habibie agaknya punya alasan lain sehingga PPRM perlu tetap dipertahankan. "Tuntutan untuk menarik PPRM dari Aceh tanpa diimbangi peletakan senjata dari para pengacau keamanan, justru menempatkan masyarakat dalam bahaya, tanpa perlindungan," katanya saat pidato kenegaraan menyambut 17 Agustus. Bagi tokoh masyarakat Aceh semacam Hasballah M. Saad, kondisi tanah kelahirannya kian memburuk setelah DOM dicabut. "Keadaan jauh lebih parah daripada sebelum dicabut status DOM," katanya.

Di tengah guncangan-guncangan Aceh itu, ada gerakan seorang perwira tinggi yang cukup membuat terpana. "*You* mesti perhatikan gerakan dia, pasti ada kejadian menarik," begitu pesan seorang perwira tinggi lainnya di Markas Besar TNI. Siapa dia? Tidak lain Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoedin yang bekas pangdam Jaya itu.

Sumber *Panji* itu lantas memberikan gambaran yang cukup gamblang. Sjafrie adalah jenderal yang menurut perhitungan banyak perwira tinggi, mestinya, kurang pas untuk mendapatkan pekerjaan di Aceh. Alasannya sederhana. Alumnus Akabri angkatan 1974 ini terbukti gagal mengamankan daerah operasinya saat kerusuhan Mei tahun lalu. Sjafrie selaku panglima komando operasi tidak berhasil menanggulangi keamanan Ibu Kota dan akibatnya ia pernah ikut dimintai keterangan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Intinya, Sjafrie dianggap bersalah dalam penanganan kerusuhan. Selain itu, ia juga sering diisukan ikut mengetahui penculikan para aktivis. "*Lho kok* dia bisa mendapat kepercayaan begitu besar? Dari mana ketemu hitungan semacam itu?" kata sumber *Panji* tadi.

Apa pun keberatan terhadap Sjafrie—bisa juga karena faktor cemburu—ia sudah berada di Aceh. Menurut sumber-sumber *Panji* di Banda Aceh, ia "beroperasi" di Tanah Rencong itu beberapa hari sebelum pengiriman PPRM. Bekas pangdam Jaya ini memimpin 400-an orang. Mereka adalah personel pilihan dari pasukan Kopassus dan Kostrad. Seorang tokoh Aceh memiliki laporan dari orang-orangnya, kebanyakan pasukan yang dibawa Sjafrie adalah bekas anggota TNI yang desersi. "Mereka sangat ahli menggunakan berbagai jenis senjata," kata sumber itu. Yang menjadi sasaran tembak selalu tempat yang mematikan. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang terlatih, bukan sembarang orang," ujar sumber di Banda Aceh.

Dalam beroperasi di Tanah Rencong, Sjafrie

Sau Misteri

Kerusuhan Mei 1998: Sjafrie tak berkutik
Zacky Anwar Makarim (kanan): Dipertanyakan
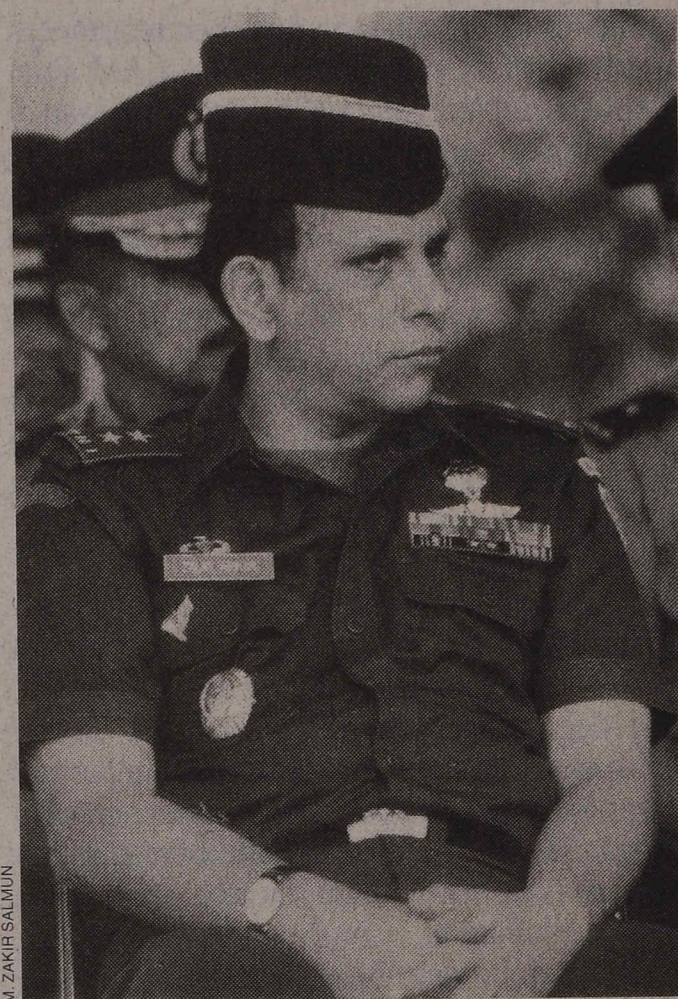
M. ZAKIR SALMUN

lebih banyak memakai pakaian sipil. Ia lebih sering berada di Lhokseumawe ketimbang di Banda Aceh. Ia pernah menginap di Hotel Lido Graha. Belakangan ia sering terlihat di Hotel Mutia. Sumber ini agak tercengang ketika hotel tersebut terbakar. Maklumlah, hotel ini milik PT Pupuk Iskandar Muda yang dijaga ketat aparat. Jadi, tidak masuk akal bila orang-orang GAM bisa leluasa membakar hotel yang dijaga ketat itu. Nah, ia mengaitkan, setelah Sjafrie datang, operasi militer demikian deras. Belum lagi kisah penangkapan provokator oleh warga. Saat diinterogasi ia mengaku sebagai anggota Kopassus. Tapi, ini dibantah Mabes TNI sebagai akal-akalan belaka. Pokoknya, tidak ada anggota pasukan elite itu yang terlibat.

Hanya saja, banyak tokoh Aceh yang kini terbengong-bengong, termasuk seorang perwira tinggi di bidang intelijen. "Sudah lama gerakan Aceh Merdeka hidup, tapi tidak ada pembakaran sekolah-sekolah. *Kok* sekarang banyak terjadi," kata perwira itu. Rumor yang berkembang pun lantas macam-macam. Ada yang mensinyalir pelaku adalah anggota GAM palsu. Ya, semacam kekuatan yang sudah terkena "polusi" penyusupan. Bisa juga dari kelompok lain yang mengklaim dirinya anggota GAM.

Keanehan lain juga tampak dalam bentuk ketakutan warga Aceh. Mereka mengungsi bukan takut terhadap GAM, tetapi justru takut dicap sebagai simpatisan. Menurut pemantauan Kontras, kini bentuk ketakutan juga melanda para pengungsi karena ada pemaksaan untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

Menurut seorang tokoh Aceh yang ikut mengupayakan penyelesaian menyeluruh di daerah itu, kehadiran Sjafrie sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan sepak terjang anggota Kopassus yang ada di sana. Selama DOM diberlakukan, pasukan Kopassus cukup banyak yang ditempatkan di sana. "Selama di sana citranya jelek. Contohnya, ya rumor tentang anggota Kopassus yang desersi dan diduga terlibat dalam banyak tindak kekerasan serta membuat kekacauan," kata tokoh Aceh ini.

Nah, Sjafrie ke sana untuk menyelidiki seberapa jauh kebenaran masalah itu. Jika benar, dia akan membuat laporan agar Kopassus segera mengambil tindakan. Penugasan ini bermula dari tertangkapnya seorang sipil di Lhokseumawe tiga bulan lalu, Sulityo namanya. Saat diperiksa polisi ia mengaku anggota Kopassus. Namun, setelah dijemput BIA, ia mengubah pengakuan dengan mengaku sebagai insiyur dan bernama Bahar. Lucunya, setelah kembali diberikan kepada polisi, ia berbalik lagi mengaku sebagai anggota Kopassus.

Dalam pertemuan 29 tokoh Aceh dengan Wiranto, seorang mayor jenderal yang punya tanggung jawab di bidang intelijen mengungkapkan bahwa pihak TNI merekrut puluhan orang GAM yang tertangkap kemudian dibina dan diterjunkan di Aceh untuk tugas-tugas intelijen. Mereka pernah dilatih di Jakarta. Inilah yang disinyalir membuat ulah di daerah kaya hasil alam tetapi tetap miskin itu.

Ada juga yang menyusup ke tubuh GAM. Juru bicara GAM Teuku Maulida, misalnya, seperti ditulis *Kompas*, mengaku pernah dilatih di Cijantung. Dalam tahap ini, mereka kerap mengelabuhi dengan menggunakan simbol-simbol GAM. "Hampir bisa dipastikan, ulah aktivis GAM yang selama ini berani secara terbuka membawa simbol-simbol Aceh Merdeka adalah rekaan intelijen pimpinan Sjafrie," kata tokoh Aceh tadi. Modus seperti ini sebenarnya juga sudah mulai tampak sejak 1998 lalu.

Apa yang terjadi dalam sidang pengadilan Isa Daud (tokoh GAM yang tinggal di Malaysia) di Lhokseumawe, Agustus 1998, adalah salah satu contohnya. Dalam penjagaan ketat aparat, banyak orang membawa bendera Aceh Merdeka lalu meneriakkan yel-yel melalui pengeras suara untuk GAM. Aparat membiarkannya. Yang jadi tanda tanya adalah, setelah itu, beberapa orang lalu mengeluarkan kotak dana yang katanya untuk membiayai GAM.

Bahkan terjadi beberapa kali, bendera merah putih diturunkan diganti bendera GAM. Pun, aparat membiarkannya. Yang pasti, keadaan di Aceh makin porak-poranda.

Yang terasa memojokkan Sjafrie, selama tindak kekerasan terjadi di Aceh, ia tengah berada di provinsi paling barat Indonesia ini. Karena itu, tidak heran bila muncul dugaan tak sedap terhadap Sjafrie. Ia dianggap ikut menggerakkan aksi itu. Kabar burung semacam ini sudah banyak beredar di Aceh. "Biar tidak salah paham, Panglima TNI harus melakukan klarifikasi apakah Sjafrie terlibat atau tidak," kata Koordinator Kontras Munir.

Ada satu sumber yang justru melihat persoalan Aceh memang sengaja diambangkan sampai pemerintahan baru terbentuk. Bisa jadi, bila Megawati terpilih sebagai presiden, daerah Aceh akan dijadikan satu bandul politik untuk menunjukkan sikap pembangkangan terhadap Mega. "Kalau itu benar terjadi, berarti mempertaruhkan nasib suatu daerah," kata Ketua PAN A.M. Fatwa.

Semua itu tentu bukan semata-mata tanggung jawab Sjafrie. Bagaimanapun Sjafrie mengemban tugas resmi dari Wiranto untuk menyelidiki akar masalah yang terjadi di sana. "Saya memang mendapat tugas dari Panglima TNI untuk mencari akar persoalan Aceh. Saya juga diminta untuk mencari solusinya," kata Sjafrie saat menghadiri pelantikan Wapangab Laksamana Widodo A.S. *Panji* berkali-kali mengontak Sjafrie lewat telepon rumah dan telepon genggamnya, tapi yang menjawab selalu ajudannya. "Bapak masih rapat," ujar staf Sjafrie tersebut. Setelah itu, telepon genggamnya dimatikan terus.

Yang agak janggal justru aparat di Aceh. Danrem 012/Lilawangsa Kolonel Syafnil Armen tetap menyangkal kehadiran Sjafrie di daerahnya, Lhokseumawe. "*Ndak* ada ke sini. Kalau ke sini pasti ketemu saya. Masak dia kerja di Makorem saya tidak tahu. Tidak mungkin kan?" katanya. Begitu pula soal kehadiran PPRM, justru Kapolda Kolonel Bahrumsyah menyatakan PPRM tidak ada lagi. Padahal Wiranto bergeming untuk menariknya. "Yang ada satuan tugas pengamanan saja, sedangkan satuan lain yang berasal dari luar Aceh secara bertahap mulai ditarik," ujarnya.

Operasi di Timtim. Bagaimana dengan sepak terjang Mayjen Zacky Anwar Makarim di Timor Timur? Ini pun menjadi tanda tanya. Persoalannya, mantan ketua BIA ini juga dipertanyakan *track record*-nya. Sebenarnya, tuduhan ini tidak lepas jauh dengan sangkaan yang diarahkan kepada Sjafrie. Zacky, sebagai ketua lembaga intelijen, dianggap ikut bertanggung jawab atas kerusuhan Mei dan juga penculikan sejumlah aktivis.
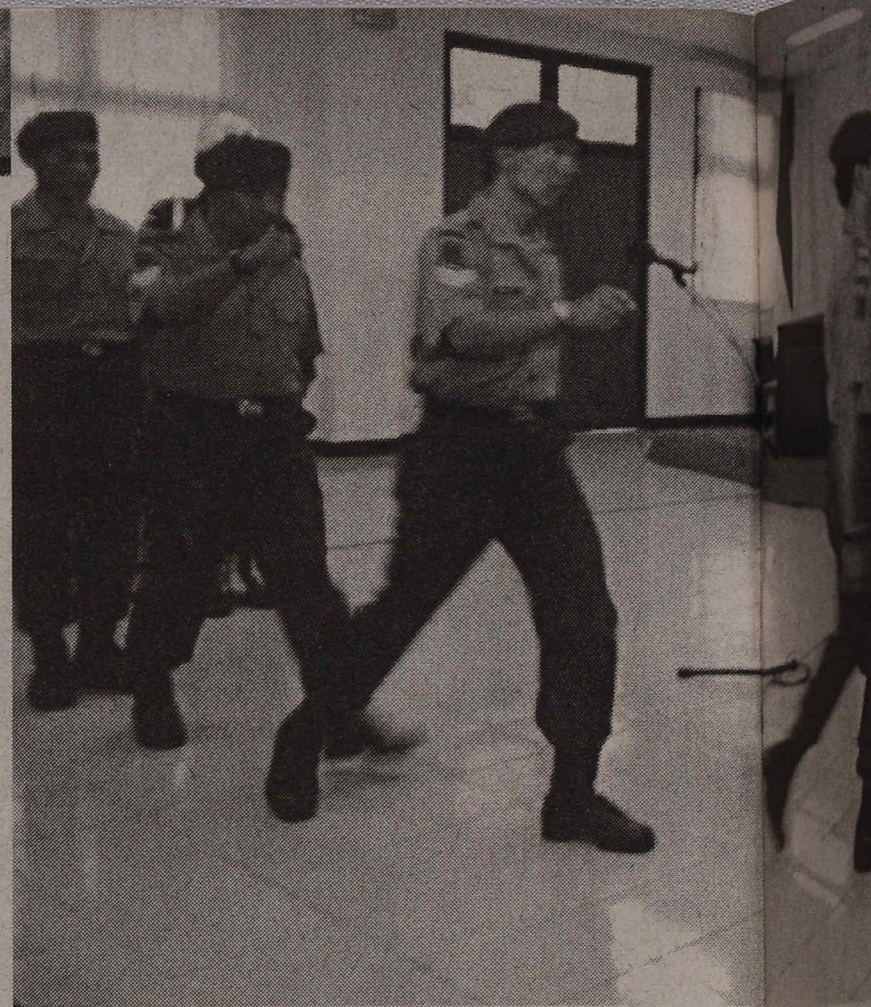
Sebagai kepala BIA, ia mestinya mengetahui akan terjadi pergolakan. Dengan demikian antisipasi dan deteksi bisa dijalankan dengan baik. Tapi, itu tidak berjalan dengan baik. Karena itu ia dianggap gagal menjalankan

Mayjen Syamsul Ma'arif: Kapuspen membantah sinyalemen penempatan dua jenderal dengan motif politik tertentu.

Tidak Ada Misi Politik

SATARI

Mayjen Syamsul Ma'arif

Usai memimpin Rapat Pimpinan TNI pada 14 Agustus, Panglima TNI Jenderal Wiranto memberikan keterangan pers. Menurut Wiranto, rapim itu punya nilai cukup penting guna menyikapi perkembangan situasi nasional menjelang sidang umum mendatang. Selain itu, Wiranto juga memberikan sedikit gambaran tentang situasi umum di Aceh, termasuk ketidaksetujuannya menarik pasukan PPRM.

Petikannya. "Sebenarnya letak permasalahan bukan pada bagaimana TNI bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Masalah bukan terletak pada bagaimana kinerja TNI untuk mengatasi soal itu. Akar masalahnya adalah mengapa pada saat bangsa Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan ada bagian masyarakat kita yang justru berkelahi satu sama lain. Mengapa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merupakan hasil final Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ada yang mengingkari dengan ingin melepaskan diri dari pemerintah yang sah. Itu masalah yang utama sebenarnya."

"Mengenai bagaimana TNI mengatasinya, sekarang muncul keinginan agar pasukan yang mengatasi itu di Aceh ditarik saja. Saya kira justru masalahnya bukan di situ. Maka terhadap tuntutan seperti itu saya akan menghadapi dengan langkah-langkah yang persuasif, langkah-langkah koordinatif. Saya akan bersiap melakukan dialog dengan pihak mana pun untuk menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan rakyat, tetapi sekaligus bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai ada solusi, di satu sisi memenuhi aspirasi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Percuma. Ada aturan di tubuh TNI yang bersenjata ini agar tidak merugikan rakyat sendiri. Tidak pernah ada dalam doktrin TNI bahwa kita memusuhi rakyat atau membunuh rakyat. Karena kita punya hukum yang keras yang mengatur masalah itu."

Selain masalah tersebut, Wiranto memberikan evaluasi secara umum menjelang sidang umum. Menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR, situasi politik kian menghangat yang diwarnai dengan meruyaknya pertentangan demi kepentingan pribadi dan kelompok. "Situasi makin tidak menentu," kata Wiranto seusai Rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap Sabtu sore (14 Agustus). Motivasi pertentangan ini beragam, mulai dari sekadar mencari popularitas, tapi ada juga yang ingin melampiaskan dendam.
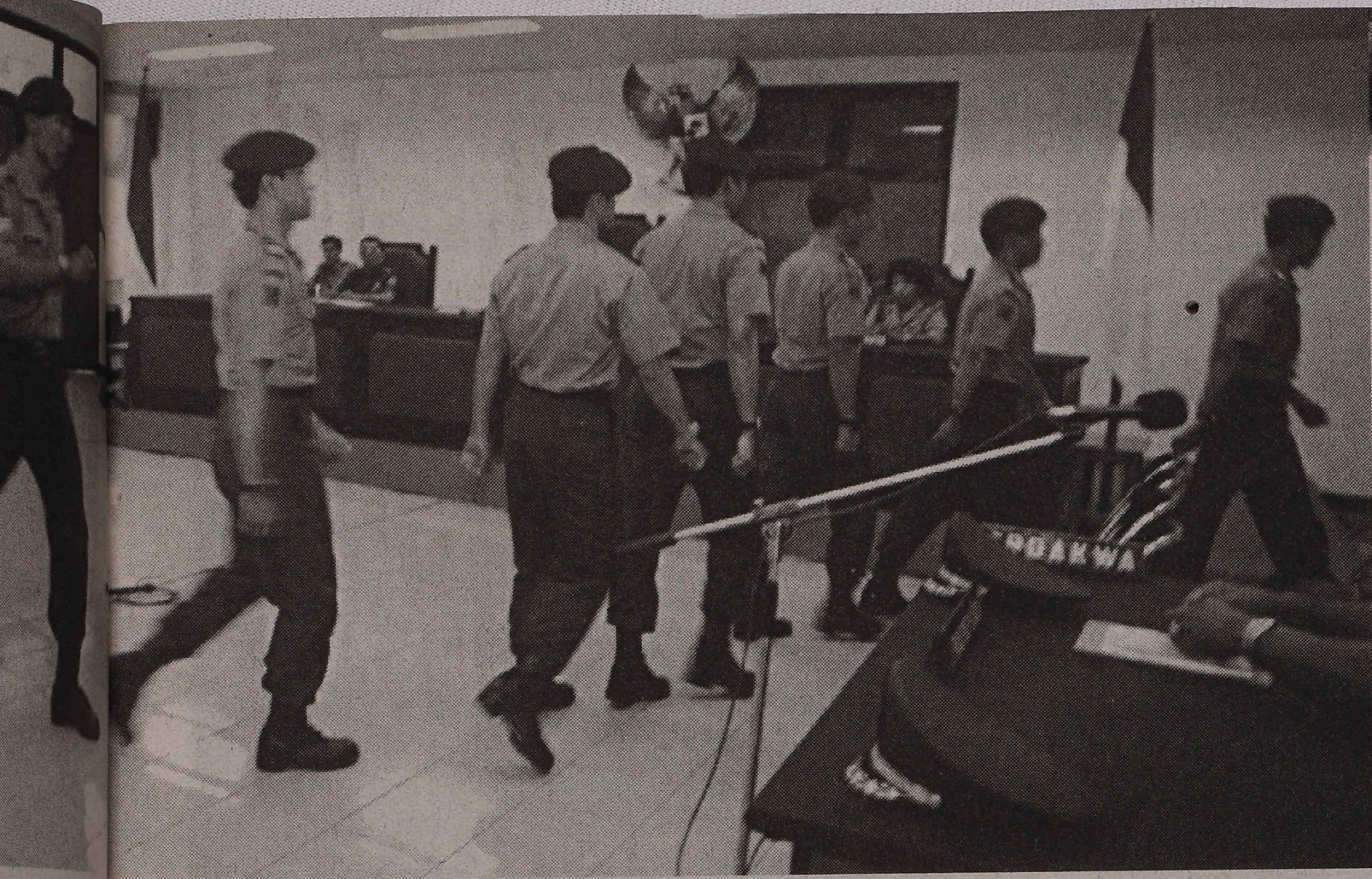
Persidangan tim mawar: Terlibat penculikan

MORIZA P./DOK.PANJI

penciuman intelijennya. Terlepas dari itu, dua jenderal ini sebenarnya dicurigai semata-mata karena dianggap pernah dekat dengan Letjen (purn.) Prabowo Subianto.

Sumber-sumber di kalangan prokemerdekaan mencatat peran Zacky dalam penggalangan para milisi sipil. Ia rajin mengadakan rapat-rapat di kantor-kantor kodim. Pendeknya, ia bekerja sama dengan kesatuan organik. Belum lama ini (26 Juli) Zacky juga dikabarkan mengadakan rapat koordinasi menyeluruh, antara aparat keamanan, pemda, dan juga para pimpinan kelompok integrasi di Baucau. Dari pertemuan itu, para bupati mengadakan koordinasi dengan jajarannya masing-masing.

Menurut pengamatan Marlin Dinamikanto dari Komite Independen Pemantau Pemungutan Suara di Timtim (KIPER), Zacky datang ke Dili sudah sejak Maret lalu. "Pokoknya sejak mulai ramai-ramai ada -milisi itu," katanya. Adakah Zacky yang memprakarsai pembentukan kesatuan-kesatuan rakyat sipil bersenjata? Tidak mudah menjawabnya. Selain itu, untuk antisipasi jajak pendapat, warga prointegrasi juga dipermudah untuk mengurus KTP di beberapa tempat. Namun, cara ini nyatanya tidak efektif karena syarat ikut jajak pendapat bukan hanya KTP, tetapi juga ada surat permandian (semacam rekomendasi dari gereja Katolik).

Sumber *Panji* di Mabes TNI mengatakan, misi khusus yang diemban Zacky tidaklah kecil. Ia harus ikut mengupayakan kemenangan bagi kelompok pro-otonomi luas (integrasi). Kabarnya, misi ini disokong dana miliaran rupiah untuk mengkonter gerakan dari pihak prokemerdekaan yang disinyalir mendapat bantuan dari banyak negara asing. Termasuk dugaan terhadap sikap Unamet yang cenderung memihak kepada Xanana dkk.

Meski begitu, bukan pula berarti pihak sayap bersenjata CNRT, Falantil tidak mengadakan perlawanan. Beberapa warga prointegrasi mendapat teror dari mereka, termasuk juga penembakan. Sehingga, eskalasi tindak keke-

---

Itulah sebabnya TNI mengambil beberapa sikap. *Pertama*, untuk kritik bersifat konstruktif, TNI akan menerima dengan baik. Namun untuk kritik yang bersifat tendensius, subjektif, dan emosional, TNI berharap agar tuduhan semacam itu tidak dikembangkan sebab dapat mengganggu penyelesaian misi TNI. *Kedua*, TNI tetap konsisten menjalankan misi dan tugas Hankamnas untuk mempertahankan agenda nasional. *Ketiga*, TNI tetap merupakan bagian integral bangsa bersama komponen bangsa lainnya untuk melaksanakan reformasi dan menyelamatkan keutuhan bangsa. *Keempat*, TNI akan tetap setia kepada bangsa dan negara. *Kelima*, TNI tidak akan terombang-ambing tarikan-tarikan politik tertentu. *Keenam*, TNI tetap berada pada kondisi yang solid dan kompak serta siap mengemban tugas apa pun.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, wartawan *Panji* Elly Burhaini Faizal mengorek keterangan lebih lanjut kepada Kapuspen TNI Mayjen Syamsul Ma'arif.

Kabarnya Sjafrie ditempatkan Wiranto di Aceh untuk mengatasi masalah di sana. Benarkah?

Salah..., salah..... Tidak ada penempatan di sana. Panglima TNI memerintahkan Sjafrie ke sana kapasitasnya sebagai staf ahli bidang Polkam. Dia harus melaporkan hal-hal yang menonjol dari sana kepada Panglima TNI. Dan di sana dia cuma dua-tiga hari. *Kok* ada yang dinamakan Tim Elang segala macam? Itu tidak benar. Saya tidak tahu dari mana asal gosip itu. Isu itu semata-mata keinginan orang untuk mendiskreditkan TNI saja. Sama sekali tidak benar.

Benarkah ia menjalankan misi politik di Aceh?

Justru itulah yang tidak benar. Itu *misinformation*. Tidak ada misi politik yang dijalankan Sjafrie di sana. Kita bersikap netral.

Ada dugaan, bila Megawati terpilih sebagai presiden, Aceh sengaja akan dibuat bergolak?

Lho, apa kaitannya dengan Sjafrie?

Artinya dia memang ikut menjalankan strategi untuk mempertahankan Habibie sebagai presiden mendatang?

Ya tidak *dong*. Sjafrie kan cuma ditugaskan oleh Panglima TNI. Logika itu premisnya salah. Saat mau diluruskan si pembuat premis tidak mau karena dia memang punya premis sendiri. Tapi tugas yang dijalankan Sjafrie itu cuma tugas biasa. Sama halnya ketika saya ditugaskan ke Aceh untuk mencari masukan.

Sepulang dari Aceh, apa masukan yang diberikan Sjafrie?

Banyak. Masukan itu sekarang sedang diolah. Nanti akan disampaikan bila masukan itu sudah diolah. Yang jelas Sjafrie berupaya memberikan masukan bagi Panglima TNI secara komprehensif.

Inti masukan Sjafrie?

Ya, pokoknya ia memberikan masukan bagaimana menyelesaikan masalah secara komprehensif, tidak cuma melalui pendekatan keamanan saja. Tapi harus menyelesaikan masalah secara makro.

Mengapa saat Sjafrie ke sana situasi bukannya membaik, tetapi malah makin marak kerusuhan?

Kalau Sjafrie tidak ke sana juga akan tetap ada pergolakan. Ketika Sjafrie ke sana juga tetap ada pergolakan. Sama saja.

Tapi intensitas kerusuhan meningkat saat Sjafrie ke sana?

Kalau Sjafrie tidak ke sana pun pergolakan akan tetap besar. Ini bukan faktor Sjafrie. Maka saya bilang premisnya salah.

Bagaimana dengan Zacky Anwar Makarim yang mendapat tugas serupa di Timor Timur?

Oh, pengirimannya di bawah koordinasi P3TT (Panitia Pelaksanaan Jajak Pendapat Timor Timur) yang dibentuk langsung oleh presiden. Pengiriman Zacky ke sana bukan urusan Mabes TNI. Dia berangkat bersama-sama Dino (Dino Patti Djalal dari Deplu) berkaitan dengan rencana penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur.

Tidak ada unsur politiknya sama sekali? Misalnya untuk menciptakan situasi agar rakyat menginginkan merdeka?

Oh, itu isu yang tidak benar. ■

rasan di Timtim terasa sekali terus meningkat. "Misi apa pun yang dibawa Pak Zacky, saya harapkan adalah misi perdamaian dan persatuan supaya apa pun hasil yang dipilih rakyat Timtim tetap menciptakan rasa damai," ujar anggota Komnas HAM dari Timtim, Clementino dos Reis Amaral.

Penugasan. Seorang jenderal bintang dua yang dekat dengan Wiranto mengakui, kehadiran Sjafrie di Aceh jelas-jelas merupakan penugasan langsung dari Panglima TNI karena dia staf ahli panglima bidang politik. Ia memimpin satu tim, tujuannya untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Aceh. Dia membantah dugaan adanya tim siluman berkode Elang yang dipimpin Sjafrie. Memang, kata Pak Mayjen, Sjafrie kadang-kadang memakai pakaian sipil dalam beroperasi. Tapi, kedatangannya dipolitisasi oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), yang mengatakan Sjafrie datang atas suruhan Prabowo untuk melakukan provokasi. "Apa urusannya dengan Prabowo?" kata Pak Mayjen itu.

Di mata Mabes TNI, hasil kerja Sjafrie sudah kelihatan. Banyak masukan yang diberikan kepada panglima. Bahkan Sjafrie berhasil mendapatkan rekaman kejadian kekejaman GPK selama 15 menit. Dalam tayangan itu jelas kelihatan, di daerah simpang tiga, entah siapa yang memobilisasi, tiba-tiba ada rombongan 10 truk unimox penuh dengan penumpang penduduk. Saat itu berbarengan dengan kedatangan satu batalion pasukan ke Aceh. Tiba-tiba ada tembakan berhamburan dari arah bukit. Spontan penduduk yang menumpang truk lari ke arah tentara, mencari perlindungan. Mereka menembaki dari arah belakang. Banyak penduduk dan tentara yang jadi korban.

Persoalan itu menjadi gunjingan, memang tidak terlepas dari masa lalu Sjafrie yang dianggap bermasalah. "Cuma, saya tanya, masalahnya apa? Selama ini tuduhan kepada Pak Sjafrie tidak benar. Saya tahu betul wataknya. Meski ia teman akrab Prabowo, pola pikirnya lain dengan Prabowo. Soal penculikan, Kodam Jaya waktu itu tidak terlibat sama sekali. Kalau dikatakan ada pasukan yang di BKO-kan, itu pasukan untuk pengamanan Jakarta," ujar Pak Mayjen. Begitu pula soal kerusuhan Mei, semua sudah dilaporkan kepada panglima. "Semua itu ulah Prabowo. Panglima jawab, jadi Sjafrie bisa dikatakan punya *track record* yang tak tercela. Makanya beliau selamat sampai sekarang," kata Pak Mayjen ini mengutip ucapan Wiranto.

Selain itu, kedatangan Sjafrie ke Aceh juga berkaitan dengan lumpuhnya intelijen di Aceh. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi intelijen melakukan kegiatan karena belum apa-apa kalau ada orang asing dikatakan *cuak* (matamata). "Intel kita masuk saja *nggak* bisa. Kecuali kalau ada darurat sipil di sana, intel kita bisa bekerja," katanya.

Setelah didesak pers, Panglima TNI Jenderal Wiranto akhirnya mengakui telah menugasi Sjafrie ke Aceh dalam kapasitas staf ahli Panglima TNI. Penugasan ini bermula dari laporan dari Aceh tentang insiden Krueng Geukeuh, bahwa yang menembaki warga adalah tentara. Karena hendak ingin tahu rinciannya, Wiranto mengutus Syafrie. "Di sana Jenderal Sjafrie melakukan investigasi, dengan mendatangi lokasi, menanyai saksi, baik di lokasi maupun warga yang tertembak, yang ketika itu sudah dirawat di rumah sakit," kata Wiranto.

Hasilnya pun mengejutkan. Ketika insiden terjadi, ada manuver pasukan GAM menggiring warga ke hadapan pasukan TNI. Sementara itu, pasukan GAM berada di belakang warga. Jadi posisi warga pada saat itu berada di tengah-tengah dua kekuatan bersenjata. Tembakan pertama kali berawal dari pasukan GAM. Ditujukan kepada pasukan TNI. Berhubung ada warga di tengah-tengah medan tempur, ya, merekalah yang kena duluan. Pasukan TNI pun membalas. "Faktanya, dilihat dari luka tembak, warga yang terbunuh kebanyakan ditembak dari belakang. Dilihat dari luka tembakan yang mengakibatkan bolong besar di tubuh, bisa diduga itu hasil peluru yang ditembakkan senapan AK 47. Dan, itu bukan senjata milik TNI. Itulah faktanya," ujar Wiranto.

Kapuspen TNI Mayjen Syamsul Ma'arif mengakui Sjafrie sudah membawa hasil dari Aceh. "Masukan-masukan itu sedang diolah. Nanti akan disampaikan bila masukan itu sudah diolah. Yang jelas Sjafrie memberikan masukan secara komprehensif, tidak cuma melalui pendekatan keamanan saja, tetapi harus menyelesaikan secara makro," katanya.

Kawan baik Wiranto tadi juga memberi alasan yang sama untuk Zacky Makarim. Mantan kepala BIA ini diutus langsung oleh panglima. Pertimbangannya, Zacky mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus,dan dia sudah hafal Timtim karena pernah lama bertugas di bumi Lorosae. "Misinya adalah memperlancar tugas-tugas Unamet agar tidak terjadi salah pengertian. Jadi tidak ada misi macam-macam. Pokoknya TNI siap menerima apa pun hasil jajak pendapat," kata sumber *Panji*.

Yang masih mengganjal, apa target penyertaan dua jenderal dalam operasi besar itu? Jawabannya datang dari kolega Sjafrie dan Zacky di Cilangkap. "Supaya ada alasan kuat untuk mempromosikan mereka." Bila mereka sukses menjalankan tugas, maka Habibie (sebagai pangti) masih punya kekuatan untuk memberikan satu bintang kepada keduanya dan menempatkan mereka pada posisi yang strategis lagi. Selain itu, ada skenario lain, Wiranto ingin mengampuni mereka untuk merangkul sayap hijau di militer. *Toh*, pekan lalu Wiranto sudah menyatakan TNI dalam keadaan solid dan tetap kompak. Syukurlah.■

PRACOYO WIRYOUTOMO, BUDIYONO, DUDI RAHMAN, ELLY BURHAINI FAIZAL, AULIA HS, DAN AGUNG Y. ACHMAD, AGUS S. ADI

Sjafrie (kanan) bersama Prabowo: Surut

MORIZAP /DOK PANJI

Yang Terimbas Prabowo

Karier Sjafrie dan Zacky: Dua jenderal ini dicopot setelah Prabowo dipensiun. Mereka sekarang mulai dirangkul.

Bintang di pundak Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoedin agaknya bakal terus mencorong. Semula, saat menjadi panglima Kodam Jaya, cahayanya begitu kemilau. Lalu tiba-tiba surut, bahkan tidak sedikit yang meramalkan akan segera redup. Perubahan cepat pada diri Sjafrie itu tidak lepas dari peran dan jalur yang dilalui jenderal asal Sulawesi Selatan ini.

Semasa Soeharto berkuasa, orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya secara spesifik mendapatkan tempat. Bukan hanya di hati presiden, tetapi juga di tataran pemerintahan. Hingga kini, bekas ajudan dan pengawal pribadinya masih banyak yang bercokol di elite TNI. Mereka adalah para jenderal dengan aneka posisi yang amat strategis.

Akan halnya karier Sjafrie, agaknya tidak terlepas dari peta politik yang berkembang di tubuh TNI. Semua ini bermula dari penculikan para aktivis. Belasan pemuda dan mahasiswa ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, diculik, dan baru dibebaskan beberapa bulan berikutnya. Tapi, apa mau dikata, skandal memalukan itu terungkap. Tim Mawar diadili, dan Letjen Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad diperiksa Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Kasad Jenderal Subagyo H.S.

Tak lama kemudian, Prabowo dipensiunkan dini sebagai bentuk hukuman. Perlakuan serupa juga dikenakan kepada Mayjen Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Sjafrie pun terkena imbas. Prabowo dan Sjafrie adalah dua meteor yang bersinar terang. Keduanya merupakan orang pertama di angkatannya (1974) yang bisa mencapai posisi brigadir jenderal. Tapi, Prabowo, benar-benar bak meteor yang jatuh meluncur tatkala memasuki atmosfer bumi.

Agaknya, bukan penculikan yang menjadi sebab utama. Sebagai penanggung jawab keamanan Jakarta, ia dianggap paling bertanggung jawab atas kerusuhan 13-15 Mei 1998. "Dia yang paling bertanggung jawab, mengapa kerusuhan begitu meluas, dan aparat keamanan diam saja?" kata seorang jenderal di Mabes ABRI. Jenderal ini telah mengecek ke lapangan, mewawancarai banyak komandan regu atau komandan kompi dan batalion, saat kerusuhan berlangsung. "Mereka mengaku dilarang bertindak. Itu *real* di lapangan," katanya.

Jika Prabowo diperiksa DKP, Sjafrie harus menghadapi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Dari sinilah Sjafrie tampaknya harus terhenti laju kariernya. Minimal terhenti sejenak. Secara resmi ia diberi jabatan sebagai asisten teritorial Kasum ABRI. Tetapi, ia sempat terkatung-katung berbulan-bulan menunggu pelantikan. Sjafrie toh bisa bernafas lega saat Wiranto menunjuknya sebagai anggota MPR pengganti antarwaktu dari Fraski ABRI. Meski jabatan itu tidak strategis, namun punya makna besar. Paling tidak, tergambar bahwa Sjafrie masih dipakai, tidak langsung dibuang bagai sepah. Benar saja, Sjafrie sudah mendapat posisi lagi, sekarang sebagai penasihat bidang polkam untuk Menhankam.

Selain Sjafrie, tokoh yang juga ikut terimbas kasus Prabowo adalah mantan Kepala BIA Mayjen Zacky Anwar Makarim. Ia ikut diperiksa TGPF. Sebagai kepala BIA, Zacky dianggap ikut bertanggung jawab atas tragedi itu. Badan intelijen itu mestinya bisa mendeteksi secara dini berbagai kemungkinan terburuk saat situasi kritis. Tapi, di depan TGPF, Zacky menganggap kerusuhan Mei hanyalah sebagai musibah belaka.

Pihak intelijen, menurut pengakuan Zacky di depan TGPF, sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan jatuhnya martir saat demonstrasi mulai memanas. Dalam perkiraan BIA, bila jatuh martir maka akan membangkitkan kekuatan rakyat. Dari akumulasi kejadian yang berkembang, BIA memperkirakan puncak kerusuhan akan terjadi pada tanggal 20 Mei. Kajian inilah yang disampaikan ke pimpinan militer. Benar, tanggal 20 Mei pengamanan di Jakarta menjadi superketat. Banyak jalan-jalan diblokir, dan pasukan tempur ditempatkan di hampir seluruh titik vital. Tapi, apa mau dikata, kerusuhannya sendiri sudah meluluhlantakkan Jakarta, Solo, dan beberapa kota lain jauh hari sebelum tanggal yang diantisipasi itu: 13-15 Mei.

Di luar masalah itu, tampaknya, ada semacam pembersihan orang-orang yang dianggap dekat dengan Prabowo. Mayjen Kivlan Zein yang menjadi kastaf Kostrad ditarik sebagai staf ahli di Mabes TNI, dan Letjen Fachroel Razi dicopot dari jabatan kasum ABRI. Mereka inilah yang di kalangan intern militer dikenal sebagai anggota TNI "hijau", artinya condong keberpihakannya ke kelompok Islam.

Nah, cukup mencengangkan bila tiba-tiba Sjafrie dan Zacky mendapat tugas khusus. Adakah angin perubahan di tubuh TNI? Boleh jadi. Namun, yang pasti Jenderal Wiranto mengaku jajarannya tetap solid. Tidak ada gesekan. Amin. ■

PRACOYO WIRYOUTOMO

Dua Kubu yang Beradu

Timor Timur: Pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur kian dekat. Ancaman gagal muncul akibat pertikaian kedua kubu yang makin memanas.

Lecidere, wilayah di Dili Timur, pada Ahad lalu terlihat meriah. Ribuan orang, yang memadati rumah presiden pertama Fretilin, F.X. Amaral, terkesima mendengarkan rekaman pidato tokoh Fretilin Xanana Gusmao. "Kibarkan bendera perdamaian di Timor Timur," pesan Xanana dalam bahasa Tetun. Bersamaan dengan itu bendera CNRT (organisasi perlawanan rakyat Timor) berkibar dengan gagahnya. Inilah kali pertama bendera prokemerdekaan secara resmi berkibar.

Hari itu memang giliran kubu prokemerdekaan melakukan kampanye menjelang jajak pendapat, kalau tidak mundur, tanggal 30 Agustus nanti. Seolah-olah tak mau kalah dengan kubu prootonomi, ribuan massa prokemerdekaan sejak pagi sudah memadati kawasan itu. Dengan berbagai atribut, mereka menerikkan yel-yel kemerdekaan. Pekikan "Viva Timor Leste!" terdengar berulang-ulang.

Sehari sebelumnya, kubu prootonomi mengawali rangkaian masa kampanye menjelang jajak pendapat. Pada Sabtu lalu Bandar Udara Komoro di Kota Dili dipadati massa prointegrasi. Ribuan orang berkumpul di salah satu pintu gerbang Timor Timur itu. Suasananya meriah. Ada teriakan dan lontaran yel-yel. Pakaian mereka seragam, kaos warna putih dengan ikat kepala merah-putih. Tangannya mengacungkan bendera kecil, juga berwarna merah-putih. Di tengah keriuhan suara musik, kerap terdengar teriakan: "Otonomi yes!" Dan, layaknya kampanye, selain diisi pidato, acara yang diselenggarkan Front Bersama Pro Otonomi, Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT), dan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), diselingi acara pemberian beras gratis untuk menarik dukungan.

Kampanye massa prokemerdekaan hari Minggu itu menepis dugaan bahwa pihak antiintegrasi tidak akan melakukan kampanye terbuka. "Situasinya sangat sulit buat kami," ungkap Ketua Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT) David Ximenes. Maklum, teror kekerasan selalu membayangi kubu prokemerdekaan. Karena itu, pagi-pagi pihak prokemerdekaan sudah menyatakan tidak akan melakukan kampanye terbuka. "Toh kami sudah melakukan kampanye selama 20 tahun," kata Ximenes yang memilih berkampanye dari rumah ke rumah.

Pernyataan Ximenes memang beralasan. Sebab, tekanan terhadap pihak prokemerdekaan terus meningkat. Pekan lalu, dua hari sebelum pelaksanaan masa kampanye, kantor sekretariat Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur (DSMTT) di Viqueque diserang kelompok prointegrasi. Sehari kemudian giliran sekretariat Ikatan Mahasiswa Pelajar Timor Timur (Impettu) diserbu kelompok yang sama. Kedua organisasi mahasiswa itu memang dikenal sebagai basis anak-anak muda prokemerdekaan. Akibat penyerangan itu, tiga anak muda tewas—Mario Soares (23), Carlos Sarmento (22), dan Marcelino Soares (21)—kantor mereka berantakan. Empat orang lainnya luka-luka.

Aksi serang-menyerang di antara dua kelompok itu memang kerap terjadi sejak pemerintahan Habibie menawarkan dua opsi—otonomi atau merdeka—pada 27 September 1998. Sejak itu pula, dua kubu politik yang telah bertikai selama 30 tahun tidak tinggal diam. Kubu prootonomi yang merasa terpukul dengan adanya dua opsi itu melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan gerakan prokemerdekaan. Salah satu strateginya adalah membentuk barisan prointegrasi yang dikenal dengan nama milisi. "Kami harus membela rakyat Timor Timur jika sewaktu-waktu tentara ditarik," ucap Hermenio da Silva da Costa, kepala Staf Pasukan Pejuang Integrasi.

Sejak itu pula pasukan para militer itu bermunculan di seluruh bumi Loro Sae. Di sebelah selatan Kota Dili, tepatnya di Ainaro, muncul kelompok milisi Mahidi (Mati Hidup Demi Integrasi). Organisasi yang mengklaim punya anggota 1.300 orang itu di pimpin oleh Lopes de Carvallo. Di Ainaro pula berdiri pasukan paramiliter Aitarak, yang dalam bahasa Indonesia berarti duri. Aitarak dipimpin oleh Eurico Guterres yang sekarang menjabat wakil komandan dari seluruh milisi. Keseluruhan, menurut catatan LSM Solidaritas untuk Rakyat Timor (Solidamor), ada sekitar 20 kelompok milisi, termasuk Gada Paksi, pasukan semimiliter bentukan mantan Danjen Kopassus Prabowo. Belum lagi ditambah organisasi prokemerdekaan seperti Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan yang diketua Bupati Dili Dominggos Soares. Ada pula Barisan Rakyat Timor Timur yang dipimpin Duta Besar Keliling Khusus Urusan Timor Timur Lopes da Cruz.

Barisan prokemerdekaan tidak tinggal diam. Pasukan pejuang Fretilin yang selama ini berada di hutan-hutan turun gunung. Selain organisasi lama seperti CNRT dengan sayapnya, Renetil dan Falintil, ditambah sayap organisasi mahasiswa, mereka membentuk APKTL (Aktivis Pro Kemerdekaan Timor Leste).

Dengan polarisasi dua kelompok itu,

AP

Pasukan Falintil: Turun gunung

bentrokan tinggal menunggu waktu. Aksi pertama dilakukan oleh Mahidi pada 26 Desember 1998. Mereka menyerang penduduk Covalima. Selain itu, Mahidi juga melakukan patroli jalan raya mendirikan pos-pos di jalan raya, untuk mencari orang-orang prokemerdekaan. Aksi Mahidi pada 3 Januari 1999 memakan korban jiwa. Dua orang pemuda—Reinaldo Orleans (21) dan Julio (23)—tewas.

Sejak itu, darah menetes hampir setiap hari di wilayah yang mempunyai pantai indah itu. Aksi milis yang menggegerkan terjadi pada pertengahan April 1999. Hari itu, di halaman kantor gubernur, kelompok prootonomi mengadakan rapat umum yang diikuti seluruh kelompok milisi. Wakil komandan seluruh milisi Eurico Guterres menyerukan kepada para peserta rapat umum untuk melakukan pembersihan terhadap semua orang yang mengkhianati integrasi. "Kita tangkap mereka," teriaknya.

Akibatnya, sekitar pukul dua siang sekitar 100 anggota milisi menyerbu rumah Manuel Carrascalao, kakak mantan gubernur Timtim Mario Viegas Carsascalao. Suara tembakan dan batu-batu berhamburan ke dalam rumah itu. Penduduk yang sudah beberapa hari mengungsi ke rumah Manuel menjerit ketakutan. Untunglah Manuel yang mereka cari sedang berada di luar rumah. Tapi, anaknya Manuleito (18) tak ayal menjadi korban. Tubuhnya tertembus peluru milisi, mati. Bersamanya, menurut catatan Solidamor, 11 orang meninggal.

Aksi milisi makin meningkat sejak kedatangan misi PBB yang dikenal dengan Unamet. Milisi menganggap tim Unamet tidak netral. Karena itu mereka tak segan menyerang saat tim itu sedang menjalankan tugasnya. Bahkan beberapa wartawan tak luput dari aksi milisi.

Aksi kekerasan tidak hanya didominasi milisi. Kelompok prokemerdekaan ikut-ikutan melakukan aksi. Awal Juli lalu, misalnya. Falintil, sayap bersenjata CNRT, melakukan penghadangan terhadap rombongan prointegrasi di Liquica. Akibatnya, satu orang tewas dan dua lainnya menderita luka parah. Sebelumnya, pada Mei lalu Polres Ermera menemukan 11 mayat yang diduga dibunuh anggota CNRT di Kecamatan Hatulia.

Aksi serang-menyerang antara dua kelompok ini terus terjadi karena belum disepakatinya perlucutan senjata. Pihak Falintil mengajukan syarat pembebasan Xanana jika ingin melucuti senjata mereka. Sedangkan pihak prointegrasi keberatan jika Falintil tidak melakukan hal yang sama. "Jika senjata prokemerdekaan sudah dilucuti, kami menjamin senjata kelompok prointegrasi dapat dilucuti dalam waktu 24 jam," kata Kepala Staf Pasukan Pro Integrasi Hermenio da Silva da Costa.

Tampaknya masalah perlucutan senjata bakal menjadi ganjalan serius bagi pelaksanaan jajak pendapat, jika tidak segera diwujudkan. Apalagi setelah masa pendaftaran berakhir, timbul masalah baru. Kedua kubu saling mengklaim bahwa lawannya melakukan kecurangan. Selain menuduh TNI terlibat dalam penggalangan milisi, pihak prokemerdekaan menuduh kubu prointegrasi dibantu TNI menyelundupkan orang-orang dari NTT ikut mendaftar sebagai peserta jajak pendapat. Hal itu dibenarkan oleh Marlin Dinamikato, aktivis Kiper (Komite Independen Pemantau Pemungutan Suara di Timor Timur). Pihak antiintegrasi juga menuduh adanya sentralisasi pasukan TNI di kawasan NTT bagian Timur. "Mereka menyiapkan aksi militer jika kalah dalam referendum," ungkap aktivis Solidamor, Yenny Rosa Damayanti.

Sebaliknya, kubu prointegrasi tak tinggal diam. Mereka menuduh kubu prokemerdekaan mendaftarkan 600 orang Portugal sebagai peserta jajak pendapat. "Ada 600 orang warga Lisabon ikut mendaftar," kata Menlu Ali Alatas. Tampaknya, aksi saling serang memang sulit dihentikan. ■

BUDIYONO

AP

Milisi pro integrasi: Agresif

Aceh yang Tak Henti Berdarah

TNI-GAM: Dua kekuatan bersaudara bertarung memperebutkan Aceh. Ribuan orang telah tewas akibat konflik berdarah itu. Sampai kapan ini harus terjadi?

AP
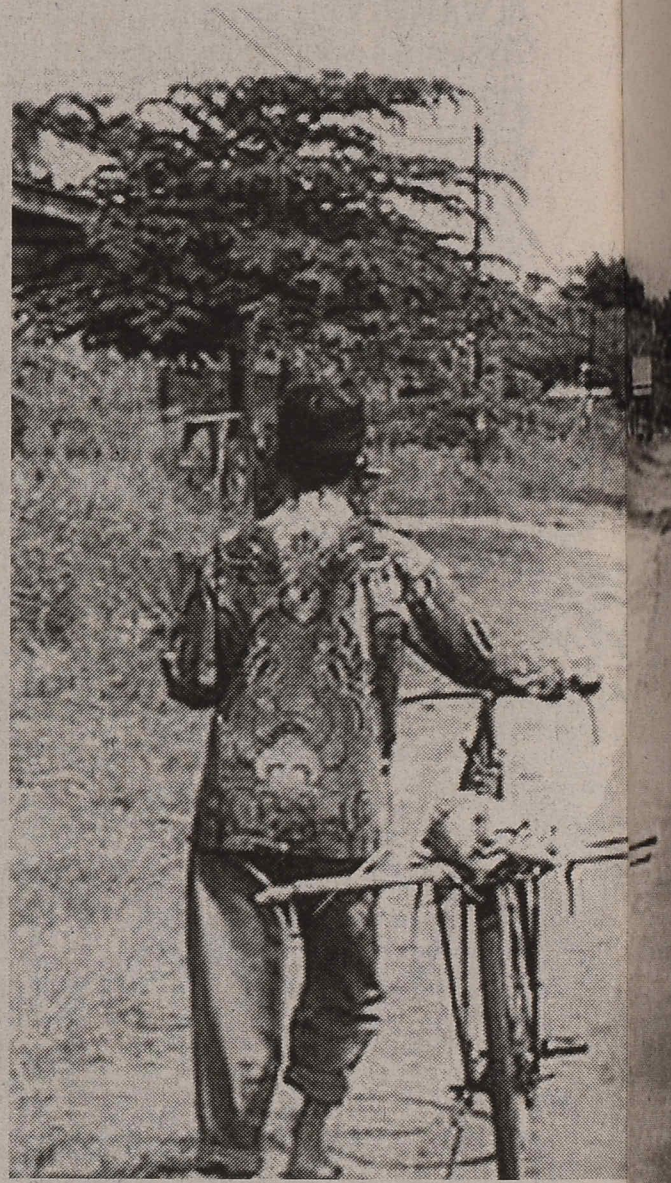
Pasukan GAM: Tak kalah lihai

Jumat pekan lalu, Banda Aceh hampir mati. Sarana transportasi darat yang menuju ke ibu kota provinsi DI Aceh ini nyaris lumpuh total. Penyebabnya adalah munculnya maklumat yang dikeluarkan oleh mereka yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maklumat yang dikeluarkan oleh Komandan Operasi Wilayah Batee Iliek, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Darwis Djeunieb itu membuat warga jadi resah. Adapun isi maklumat mengingatkan warga masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas sejak 13 sampai 20 Agustus. Hanya itu?

Rupanya tidak. Maklumat itu juga melarang warga menaikkan bendera merah putih untuk menyemarakkan HUT Proklamasi ke-54. Entah karena seruan ini tidak diindahkan atau bagimana, pihak GAM membakar lima unit kendaraan umum di lintas Banda Aceh-Medan pada 14 Agustus lalu. Selain itu, satu unit armada pengangkut koran *Serambi Indonesia* tak luput dari tindakan serupa. "Itu adalah salah satu bentuk protes kami kepada TNI yang tidak pernah putus mengambil korban," kata Sekjen GAM Teuku Don Zulfahri. Situasi mencekam menjalar ke kota-kota lain di Serambi Mekah.

Tindakan GAM tersebut memang patut disesalkan. Tapi, mereka punya alasan. "Itu adalah jalan terbaik mengusir militer dari bumi Aceh," kata Bachtiar Abdullah, salah seorang anggota GAM yang dihubungi *Panji* di markasnya, Stockholm, Swedia. Menurut dia, meski Aceh sudah bebas dari daerah operasi militer (DOM) sejak 7 Agustus tahun lalu, kenyataannya justru militer lebih kejam dibanding masa DOM. "Selama bumi Aceh berada di bawah pemerintahan pusat Jawa, Aceh tidak akan tenang dan Aceh Merdeka akan dituntut sampai titik darah penghabisan," kata Bachtiar. Tokoh GAM ini berpendapat, TNI harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Aceh. "Kematian hampir setengah anggota kabinet Aceh Merdeka itu adalah tanggung jawab TNI," katanya. Karena itu, kata dia, pihak GAM akan terus melakukan perlawanan terhadap TNI sampai muncul Aceh Merdeka yang bebas dari kolonisasi Indonesia.

Tapi, gerakan perlawanan GAM bukannya tanpa masalah. Soalnya, pemerintah masih memandang Aceh sebagai bagian dari wilayahnya. Panglima TNI Jenderal Wiranto sempat berucap beberapa waktu lalu. "Ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri. Untuk negara kita, ancaman dari dalam negeri itu yang lebih dominan dan harus lebih diwaspadai," katanya.

Tindakan Wiranto didasari oleh pertimbangan bahwa Aceh memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pemerintah (pusat). Daerah ini kaya akan hasil alam. Selain itu, Aceh punya industri yang berkembang pesat, di samping daerah ini menjadi "jembatan penyeberangan" internasional karena berdekatan dengan Selat Malaka. Karena itu, Wiranto mengambil kebijakan memperkuat basis pertahanan dan keamanan di Aceh meski status DOM telah

dicabut setahun lalu.

Pengalaman selama ini membuktikan, konflik antar-TNI dengan warga Aceh bukan kali ini terjadi. Pada dekade 1950-an, TNI pernah berkonflik dengan gerakan separatis di Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh yang ingin membentuk NII di Aceh. Bertahun-tahun pasukan TNI harus bergerilya untuk menggempur pasukan Daud Beureu'eh dari segala penjuru sampai akhirnya berhasil.

Patroli TNI di Aceh: Dalilnya mengamankan

Nah, rupanya, perjuangan Daud Beureu'eh tak berhenti. Masih ada pendukung setia di balik itu. Tepat pada 4 Desember 1976, diproklamasikanlah Negara Aceh Merdeka dengan pimpinannya Dr. Teungku Muhammad Hasan Tiro. Hasan Tirolah yang sampai saat ini memimpin GAM secara bergerilya. *Toh*, sejumlah tokoh yang pernah mengikuti sepak terjang Abu Daud mengatakan, Hasan Tito bukanlah pemimpin sekelas Abu. Soalnya, setelah pamit kepada Abu dan pengikutnya, untuk pergi selama setahun, Hasan Tiro baru muncul 20 tahun kemudian. Dia pun tak pernah membantu apa-apa untuk rakyat Aceh," kata tokoh senior itu. Bandingkan dengan Abu Daud yang memilih berada di samping pengikutnya dan rakyat Aceh, baik pada saat perjuangan melawan Belanda maupun ketika bergerilya menentang pemerintahan Soekarno.

Bagi Hasan Tiro, Aceh Merdeka adalah gerakan meminta kembali sejarah kegemilangan Kesultanan Iskandar Muda tiga abad lampau. "Kita telah lama dijajah oleh Jawa. Karena itu paduka yang mulia wali negara Aceh Dr. Teungku Hasan Tiro menyatakan kemerdekaan atas negeri Aceh," kata Bachtiar.

Tapi, pemerintah tak berkenan dengan keberadaan GAM. Diberlakukanlah DOM di sana. Ratusan—bahkan mungkin ribuan orang—simpatisan GAM ditangkap dan jadi korban pasukan TNI. Suasana di Aceh sempat mereda untuk beberapa saat. Tapi apa lacur? Rupanya, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak GAM untuk melakukan perlawanan. Keadaan di Aceh jadi kacau kembali.

Dua Korem di Aceh tak berdaya menghadapi gempuran anggota GAM. Beberapa kali pertempuran sengit tak terhindarkan. Korban dari dua kubu, TNI-GAM, berjatuhan. Masyarakat yang tak tahumenahu soal konflik pun ikut kena getahnya.

Sampai pertengahan tahun ini, setidaknya tercatat tiga tragedi pembantaian massal yang telah dilakukan tentara di berbagai tempat di Aceh. *Pertama*, penembakan di Jembatan Arakundo (Aceh Timur). *Kedua*, peristiwa Simpang KKA Lhokseumawe. *Ketiga*, pembunuhan atas Teungku Bantaqiyah berikut 51 pengikutnya. Tokoh karismatik Aceh yang pernah dipidana di LP Tanjung Gusta Medan—karena tuduhan subversif—ini dihabisi tanpa perlawanan sedikit pun.

Telur Burung. Situasi makin runyam ketika beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu 7 Juni, Panglima TNI Jenderal Wiranto mengirimkan Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) ke Aceh. Dalihnya mengamankan pemilu. Tapi pemilu sudah lebih sebulan rampung, PPRM belum juga ditarik. Situasi Serambi Mekah bukannya tambah aman, korban berjatuhan tiap hari. Tuntutan penarikan pasukan PPRM pun berdatangan. Apalagi pasukan ini telah menewaskan tidak kurang dari 51 orang dalam tragedi Betong Ateuh.

Tapi, pimpinan TNI tampaknya bergeming. Menurut Wiranto, kecil kemungkinan aparat keamanan dari unsur PPRM yang jumlahnya mencapai 7.000 orang itu ditarik. Alasannya, kata Wiranto, justru akan menimbulkan peristiwa yang lebih besar lagi jika PPRM ditarik. "Kita khawatir justru akan menciptakan peristiwa lebih besar. Kalau PPRM ditarik apakah kita membiarkan kelompok bersenjata liar menguasai salah satu bagian wilayah RI," katanya.

Tentu saja sikap Wiranto dikritik lawannya, kelompok GAM. "Kehadiran PPRM bukan mengamankan, tapi membuat kondisi Aceh makin tegang," kata Bachtiar. Menurut dia, PPRM sama saja dengan Kopassus dan unit-unit militer lain. "Karena di dalamnya diselundupkan juga tentara-tentara dari unit khusus guna menghancurkan GAM yang sampai saat ini ternyata tidak berhasil juga."

Malahan, untuk memperkuat pasukan PPRM di Aceh, TNI dituding menerjunkan pasukan liar. Pers mulai mengangkat adanya pasukan TNI itu di bawah komando langsung Mayjen (TNI) Sjafrie Sjamsoedin, yang ditugasi Wiranto melakukan investigasi di Aceh.

Meski keberadaan Sjafrie di Aceh masih misterius, GAM tampaknya tidak mempedulikannya. "Saya rasa dia sama seperti yang lainlainnya itu. Membunuhi orang saja," kata Bachtiar. Bahkan, GAM akan makin serius berjuang melawan TNI. Apalagi ada ancaman dari Kapolri Roesmanhadi untuk menembak di tempat bagi para pengacau. "Ancaman ini juga memberi ruang dan legalitas kepada kami untuk menggempur TNI/Polri di seluruh Indonesia," kata Teuku Zulfahri.

Menurut Zulfahri, GAM mengeluarkan ancaman itu karena aparat militer telah membunuh rakyat Aceh yang tak berdosa. Karena itu, kata dia, jangan salahkan jika GAM bertindak sama dengan menggempur aparat militer di seluruh Indonesia. Namun, Zulfahri menegaskan, pihaknya tidak bermusuhan dengan rakyat Indonesia.

Sumber *Panji* di kalangan militer mengatakan, GAM juga tidak kalah lihainya dari TNI dalam mengatur siasat. Bahkan ratusan orang sukarelawan GAM telah dididik kemiliteran secara khusus di Libia. Mereka itu cukup piawai dalam menggunakan sandi. "Misalnya Telur Burung, yang berarti aparat keamanan," katanya. Jika ada telur burung tertangkap, artinya adalah ada aparat keamanan yang telah dibunuh anggota GAM.

TNI sendiri menengarai, perkembangan pergerakan GAM, menurut Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen Abdul Rahman Gaffar, dewasa ini bergerak atas tiga fron, yakni aksi bersenjata, diplomatik, dan politik. Sehubungan dengan terdesaknya fron bersenjata GAM, mereka mulai mengalihkan perhatian pada fron diplomatik-politik melalui pembentukan opini dengan memutarbalikkan fakta. Menurut dia, GAM memiliki sekitar 250-300 unit senjata, sedangkan kekuatan nyata personelnya sekitar 400 orang. "Namun, mereka itu didukung simpatisan," ujarnya. Maka tak heran, selama bahasa senjata yang menyalak, kata aman jauh dari kamus percakapan di Aceh. Masalahnya, sampai kapan? ■

DUDI RAHMAN
LAPORAN DARI ACEH

Uangku Kembali dan Ka...

Kasus Bank Bali: Empat terdakwa dan 13 saksi diperiksa Mabes Polri. Meski Setya Novanto berjanji mengembalikan *fee* yang telah diterimanya, kasus pidananya akan terus diproses.

Bancakan duit Bank Bali tampaknya akan berujung di bui. Satu per satu peserta pesta mulai dipanggil polisi. Setidaknya hingga Senin lalu, sudah tujuh belas orang diperiksa di Mabes Polri berkaitan dengan skandal Bank Bali (BB). Empat orang di antaranya dari direksi dan manajer BB statusnya sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut Rusli Suryadi (manajer *treasury*), Firman Sucahya (wakil dirut), Hendri Kurniawan (salah seorang direktur), dan Irvan Gunadi (*manager legal*).

Trimedya Pandjaitan, pengacara Rusli Suryadi, mengaku bahwa kliennya memang ikut menandatangani perjanjian *cessie* yang menghebohkan tersebut. Namun sebelum Rusli menandatangani perjanjian itu, sudah ada tanda tangan Djoko Tjandra dan Rudy Ramli. Hal itu dilakukan setelah Rusli mendapat kabar dari Rudy Ramli bahwa ada pihak ketiga yang bersedia melakukan penagihan terhadap piutang BB di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN). Namun setelah penandatanganan itu, menurut Panjaitan, kliennya tidak mengetahui siapa dan bagaimana kelanjutannya.

Menurut Panjaitan, posisi kliennya sebagai manajer *treasury* tentu tak bisa menolak perintah untuk menandatangani *cessie* tersebut. "Jadi keterlibatan klien kami sumir sekali." Ia pun melihat gelagat bahwa pemeriksaan terhadap kliennya mengarah pada pelanggaran tindak pidana. Sedangkan Juan Felix Tampubolon yang mendampingi Firman Sucahya, saat ditemui mengaku tak menutup kemungkinan kliennya akan ditahan.

Dalam keterangannya kepada pers, Kadispen Polri Brigjen (Pol.) Togar M. Sianipar menyebut para tersangka akan dikenai Pasal 372 dan 378 KUHP serta Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Nomor 10/1998 dan UU Korupsi No 3/1971. Pasal 372 KUHP memuat tentang penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Sedangkan untuk Pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Namun jika para tersangka dianggap melanggar Pasal 49 UU Perbankan Nomor 10/1998 mengenai pencatatan palsu dalam pembukuan, maka bisa diancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp10 miliar.

Polisi juga melakukan cekal terhadap keempat tersangka plus Rudy Ramli (mantan dirut BB), Djoko S. Tjandra (direktur PT Era Giat Prima-EGP), dan Setya Novanto (dirut EGP). Tiga nama terakhir ini tampaknya dalam waktu dekat akan segera menyusul diperiksa polisi. Sementara lima orang saksi dipanggil Mabes Polri Senin lalu menyusul delapan orang yang diperiksa dua hari sebelumnya. Delapan orang karyawan BPPN yang diperiksa pada Sabtu lalu hanyalah sebagai saksi. Mereka adalah Indra Pratikto Sunyoto dan Toto Budiarso (bagian *leability*), Pandu dan Yusuf Wahyudi (bagian hukum), Gustiarto dan Toni Visianto (asisten manajer investasi) serta Antonius dan Hendro Santoso (asisten manajer operasional).

Kasus BB ini merebak dua pekan lalu setelah pengamat hukum perbankan, Pradjoto melansirnya kepada pers dalam sebuah acara. Berbagai pihak yang terlibat kasus ini segera kebakaran jenggot karena menerima bagian dalam upaya pencairan klaim tagihan pinjaman antarbank dari Bank Bali sebesar Rp904 miliar di BDNI, BUN, dan Bank Tiara. Skandal ini berawal dari status BDNI dan BUN sebagai bank beku operasi (BBO) dan Bank Tiara yang berstatus *bank take-over* (BTO) sehingga ketiga bank ini dalam pengawasan BPPN. Pada 14 Mei 1999, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

SATARI

Demo Bank Bali di Kejagung: Burulah semua yang terlibat

Nah, pihak BB pun kemudian mengajukan tagihannya melalui BPPN. Namun, menurut Rudy Ramli, pihaknya telah mengajukan tujuh kali penagihan secara formal, dan kesemuanya ditolak pihak BPPN. Alasannya tagihan tersebut tidak terdaftar dan kalaupun mau mendaftar sudah terlambat. "Padahal sebelumnya kami tidak diberi waktu untuk mendaftar," kata Rudy kepada pers.

Kemudian sekitar Oktober-November

Ka Kubui

1998, Djoko S. Tjandra selaku direktur EGP menawarkan jasa untuk menguruskan tagihan antarbank milik BB di BPPN. Kesepakatan antara EGP dan BB inilah yang disebut sebagai perjanjian *cessie*. "Waktu itu saya sudah putus asa dan menganggap BPPN tidak akan membayar tagihan BB. Jadi ketika Djoko menawarkan *cessie*, saya tidak menolaknya," kata Rudy. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa BB kelak tak akan menerima dana pencairan tetapi hanya akan menerima surat berharga senilai tagihan pokok kepada BDNI sebesar Rp598 miliar.

Berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan, maka BI melakukan pembayaran dana antarbank BB sebesar Rp904 miliar pada 1 Juni. Kemudian pada 4 Juni 1999, BPPN menerima surat pernyataan dari BI bahwa dana tersebut sudah dikreditkan ke rekening BB di BI. Setelah itu terjadilah bancakan: dana tersebut dikucurkan ke sana ke mari hingga merebak kabar dana tersebut digunakan tim sukses Habibie untuk memuluskan presiden ketiga ini kembali ke tampuknya.

Menurut pengamat ekonomi dari Econit, Arief Aryman, satu-satunya langkah menyelesaikan kasus ini haruslah dilakukan investigasi secara menyeluruh. "Jadi jangan hanya dibatasi kepada para tersangka yang ada saat ini," kata Arief. Tak peduli setinggi apa pun pelakunya, jika memang bersalah harus dituntaskan, sebab implikasinya besar sekali terhadap perekonomian nasional.

Sementara Ketua DPA A.A. Baramuli menyebut pihaknya telah mendengar janji dari Setya Novanto, bahwa dirut EGP ini akan segera mengembalikan *fee* hasil kontrak *cessie* dengan BB. "Dia menyatakan dana itu tidak ke mana-mana," kata Baramuli. Sementara itu Bendahara Umum Golkar menyangkal bahwa Setya yang wakil bendahara Golkar itu telah menyumbang sebesar Rp2,3 miliar ke kas Golkar. "Dia memang menyumbang Rp150 juta, tetapi itu dari *company* dia," kata Fadel Muhammad.

Meski Setya bermaksud mengembalikan dana tersebut, pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka tampaknya akan jalan terus. "Pengambalian hanya soal hukum perdata, sedangkan korupsi soal pidana," kata Togar. Sementara pihak Kejaksaan Agung mengaku sedang mengumpulkan berbagai keterangan. Namun karena berbagai rambu instansi itu masih memberi kesempatan kepada BI untuk mengumpulkan data. ■

AGUNG RULIANTO
LAPORAN: ALMAIDHA SITOMPUL, DENY R. SECAATMAJA, IMAM SETYOBUDI, DAN MAS'AD T.

A.A. Baramuli
Semua Mendengar Saya

Ketua Dewan Pertimbangan Agung A.A. Baramuli disebut-sebut ikut menjadi arsitek dalam perjanjian *cessie* Bank Bali. Bahkan Sabtu lalu saat menerima Bintang Mahaputra di Istana Negara, dia mengaku menasihati Setya Novanto untuk segera mengembalikan *fee* penagihan pinjaman antarbank sebesar Rp540 miliar.

Untuk mengetahui lebih jauh peran pengusaha dari Sulawesi Selatan ini, wartawan *Panji* bersama beberapa wartawan Ibu Kota mewawancarainya usai pidato presiden di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin lalu. Berikut petikannya :

Anda disebut salah satu aktor dalam kasus BB (Bank Bali)?

Yang benar saja. Masa ketua DPA disebut di mana-mana. Jaksa Agung ada masalah (dikaitkan) ketua DPA, di dalam soal-soal bisnisnya Novanto (Setya Novanto) (dikaitkan) ketua DPA. Tudingan itu tidak benar. Bahwa saya kasih nasihat kepada banyak orang, benar. Tetapi saya tidak dapat bagian (tertawa).

Bagaimana Anda bisa meyakinkan Setya Novanto untuk mengembalikan dana Rp540 miliar itu?

Tidak ada dalam sejarah, orang yang bisa meyakinkan orang lain untuk mengembalikan dana 540 miliar (rupiah). Tetapi saya bisa. Tetapi bukan berarti proses hukumnya berhenti. Dan dia mendengarkan saya. Hal ini kan merupakan bukti bahwa ketua DPA itu kan banyak yang dengar. Ha... ha... ha.... Banyak yang mendengar, dan banyak yang taat.

Ya itu setelah ketahuan, kalau tidak kan aman-aman saja?

Ya dia bisa bertahan kan. Kalau dia bertahan kan tidak dikembalikan, silakan polisi, silakan BI, silahkan periksa dia (Setya). Dia bersedia. Tapi karena dia mempunyai iktikad baik, atas nasihat saya, mesti mengaku kan.

Mengenai tuduhan Anda terlibat dalam kasus ini kan sangat berat?

Dalam hal ini ada dua masalah kan. Satu, hukum publik. Hukum publik itu, apa benar tindakan Bank Indonesia dalam hal ini. Benar apa tidak tindakan Menkeu. Benar apa tidak tindakkan BPPN. Itu hukum publik. Menurut saya, tindakan pemerintah mau menyerahkan ini kembali ke Bank Bali, itu benar. Sekarang soal kedua, soal *private*. Perjanjian antara Joko-Novanto dengan BB, itu kan *private*. Nah itu, biarkan saja mereka. Kalau dia misalnya saling merugikan, ya mereka saja yang bertanggung jawab.

Tapi itu kan menyangkut uang rakyat?

Tunggu dulu, uang rakyat itu di mana. Itu uang dari Bank Bali adalah uang daripada publik kan. Pemegang saham. Jadi hanya sebagian rakyat kan. Kalau uang negara, nah itu betul-betul milik rakyat. ■

ARIF ARIADI

A.A. Baramuli: Ngakunya tak dapat bagian

Teror Ala Hotman

Praktek Litigasi: Pengacara Hotman Paris Hutapea dituding telah mengintimidasi saksi dan memalsukan bukti di pengadilan. Apa pula sanggahannya?

Hotman meneror? Hotman menipu? Inilah tuduhan baru yang dialamatkan kepada pengacara yang "selalu" menang perkara: Hotman Paris Hutapea.

Andrey Sitanggang, kuasa hukum Bank Niaga, menuding Hotman Paris telah mengintimidasi saksi ahli dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dua hari sebelum persidangan pada 5 Agustus 1999, Hotman melayangkan surat berisi ancaman pidana jika saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan. Akibatnya, saksi tidak mau datang karena ketakutan. "Padahal, kehadirannya sangat penting untuk menjelaskan kedudukan laporan keuangan PT Suryamas Duta Makmur (klien Hotman Paris, *Red.*) dalam sengketa valas yang sedang digelar."

Semula, Andrey melanjutkan, pihaknya tidak *ngeh* dengan masalah ini. Nah, setelah terbongkar, Andrey memohon majelis hakim untuk memanggil saksi baru pada persidangan berikutnya. Karena berdasarkan surat Ketua Umum IAI, saksi pengganti baru bisa dihadirkan pada dua minggu mendatang. "Sayang, permohonan ini tidak diindahkan karena majelis hakim tetap bersikukuh batas terakhir pemanggilan saksi pada 5 Agustus lalu," kata Titus Rimo, pengacara Bank Niaga lainnya.

Tudingan lain datang dari Kantor Hukum Dermawan & Co. Kali ini tuduhannya terbilang berat. Hotman dan/atau kliennya diduga kuat telah memalsukan barang bukti di pengadilan. Ceritanya begini. Pada persidangan sengketa valas di PN Jakarta Selatan, Hotman Paris Hutapea—selaku kuasa hukum PT Mayora—menyajikan bukti *ISDA Master Agreement* (*International Swap and Derivative Agreement*), yang berbeda dengan pihak lawannya, Banker Trust International. Dalam dokumen tersebut, Hotman hanya melampirkan perjanjian induk, sedangkan *schedule*-nya (semacam perjanjian yang melengkapi perjanjian induk) tidak ada. Padahal, kata Tony Budidjaja, pengacara dari Dermawan & Co, *schedule* ini telah mengatur alternatif institusi hukum yang akan dipilih kedua pihak jika bersengketa. Yakni, lembaga arbitrase internasional di London. "Rupanya, Hotman tidak ingin membawa kasusnya ke lembaga arbitrase," ujar Tony.

Dermawan & Co sebenarnya sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan Hotman. Ini penting bagi hakim, kata Tony, karena perkara perdata hanya berdasarkan atas bukti-bukti formal yang tertuang dalam perjanjian tertulis. Nah, jika bukti yang diajukan palsu, maka keputusan yang diambil pun akan fatal. Tapi, ketua majelis hakim J.M.T. Simatupang malah menolak permohonan, dengan tanpa menyebutkan alasannya. "Kami sedang mempersiapkan sejumlah berkas agar kepolisian mengusut tindak pidana ini," ujarnya sambil menyebutkan beberapa kejanggalan fisik dokumen Hotman.

Hotman Paris Hutapea tentu saja membantah keras kedua tudingan itu. Hotman mengaku tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman dan hanya ingin mengingatkan saksi tentang dua hal. *Pertama*, pemanggilan saksi ini bukan atas inisiatif pengadilan, melainkan keinginan Bank Niaga. *Kedua*, ia ingin memberikan peringatan kepada saksi ahli agar lebih berhati-hati memberikan keterangan. Sebab jika tidak, Hotman akan menuntutnya secara pidana. "Apakah salah jika saya memaparkan isi peraturan kepada saksi?" tanyanya. Jikapun itu dikatakan ancaman, ujar Hotman, mengapa saksi ahli dari BI tetap datang meski dikirimi surat serupa.

Soal pemalsuan bukti, Hotman belum bisa memberikan komentar. Sebab, ia belum melihat materi gugatannya. Sekiranya *schedule* tersebut dipersoalkan, kata Hotman, itu tidak ada masalah. Sebab, Mayora merasa belum terikat dengan perjanjian yang belum ditandatangani. Mau isinya berbeda, ya masih sah-sah saja karena belum ada perjanjian. "Kecuali jika saya mengubah isi perjanjian yang telah ditandatangani, ya itu termasuk tindak pidana. Kalau sekarang, apa yang dipalsukan?" katanya sembari mengaku siap menghadapi gugatan pidana tersebut. "Tapi, jika klien saya memberi dokumen yang salah, saya gugat balik."

Menurut Guru Besar FH UGM Sudikno Mertokusumo, kecermatan majelis hakim sangat diperlukan untuk kedua kasus tadi. Kata ancaman, misalnya, belum tentu akan dinilai sama oleh setiap orang. Karena itu, majelis hakim harus menginterpretasikan konteks serta redaksionalnya. Begitu pula soal pemalsuan barang bukti, majelis hakim diharapkan bisa meminta bantuan kepolisian untuk menyelidiki kesahihannya. Nah, hasil penyelidikan inilah yang akan dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara. Tapi, jika majelis hakim menolak, salah satu pihak masih bisa mengajukan pengaduan ke kepolisian. Dan, langkah terakhir inilah yang dipilih Banker Trust untuk mengadukan nasibnya. Bisakah Hotman berkelit? ■

DODI KUSMAJADI

M. ZAKIR SALMUN

Hotman Paris Hutapea: Apa saya salah?

Lahan Parkir, Siapa Punya

Rebutan Lahan: Wali Kota Medan dan pengelola Medan Plaza memperebutkan pengelolaan lahan parkir. Meski putusan MA sudah turun, kasus ini tampaknya akan berlanjut.

Rebutan lahan parkir ternyata bukan cuma kebiasaan para preman. Sebab di Medan, Sumatera Utara, justru melibatkan pengusaha dan wali kota. Mereka memperebutkan lahan parkir seluas 8.933 meter persegi di Pusat Perbelanjaan Medan Plaza, yang setiap bulannya rata-rata menghasilkan Rp30 juta. Kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda ke arah penyelesaian.

Pemda Kodia Medan mengklaim areal parkir itu merupakan bagian dari hak pengelolaan lahan (HPL) miliknya. Ketua Tim Penasihat Hukum Pemda, Redwin Rohimun, menjelaskan bahwa pada 1971 areal parkir itu merupakan eks proyek Petisah II. Untuk pembangunan prasarana fisik jalan, ruko, taman, dan termasuk areal parkir, pemda bekerja sama dengan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) I—lembaga ini sudah dihapuskan pada masa Benny Moerdani menjadi pangab—sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian 26 Juli 1971. Namun, sejak Desember 1975 Kowilhan I menunjuk PT Sumber Latex (SL) untuk meneruskan pekerjaan. Anehnya, pada 22 September 1976 PT SL memohon kepada Pangkowilhan I agar proyek dilanjutkan PT Saat Jaya Utama (SJU), dan baru dikerjakan dua tahun kemudian (1978).

ABDI PURMONO

Lahan parkir Medan Plaza: Sumber uang

Pada tahun 1984 PT SJU mengalihkan hak pengelolaan bangunan serta areal parkir kepada PT Medan Plaza Center (MPC) sebagaimana dicatat dalam akta notaris Kusmulyanto Ongko dengan No. 132 tanggal 23 Mei 1984 tentang perjanjian pelepasan hak atas tanah pelataran parkir itu. Untuk mendapatkan hak guna bangunan (HGB), kata Redwin, PT MPC memasukkan areal parkir ke dalam satu kesatuan dengan bangunan yang luas keseluruhan mencapai 17.462 meter persegi. Padahal Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1977 menyatakan, pelepasan aset Pemda Tingkat II harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesudah disetujui DPRD Medan dan di-acc Gubernur Sumatera Utara. "Jadi pemda keberatan karena hak-haknya telah dimanipulasi oleh PT SJU," kata Redwin.

Masih menurut Redwin, direktur PT SJU dan PT MPC sebenarnya orangnya sama, yaitu Jaya Chandra. Sehingga pengalihan proyek itu hanya merupakan akal-akalan saja. Masalah ini makin rumit ketika pada 1992 PT MPC malah mengajukan gugatan kepada PT SJU karena enggan mengurusi HGB untuk areal parkir. Pada 1993 gugatan PT MPC menang di tingkat kasasi. Melihat berbagai keanehan ini, Redwin berpendapat, "Medan Plaza melakukannya hanya untuk mendapatkan kekuatan hukum supaya Pemda Medan tunduk dan mengizinkan pengalihan hak sesuai yang dicantumkan dalam akta notaris."

Pemda kemudian melayangkan gugatan kepada PT MPC (tergugat I) dan PT SJU (tergugat II) pada 1995. Pokok gugatan meminta Pengadilan Negeri Medan agar membatalkan akta notaris yang dibuat Kusmulyanto Ongko pada 23 Mei 1984. PN Medan memenangkan gugatan wali kota (pemda) pada 1997. PT MPC yang mengajukan banding ternyata menang di tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tahun yang sama.

Siasat dan pledoi pun terus diadu. Wali kota mengajukan kasasi ke MA. Melalui surat keputusan bernomor 2603/K/PDT/1997 tanggal 28 Oktober 1998, MA mengabulkan kasasi wali kota. Pertimbangan hukum MA di antaranya karena tindakan PT MPC dan PT SJU tidak memiliki landasan hukum yang sah berhubung tidak ada izin dari Pemda Medan selaku pemegang HPL. PT SJU juga tidak berwenang melepaskan hak atas tanah meski sudah ditunjuk sebagai pelaksana Proyek Petisah II, dan wali kota tidak terikat dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua tergugat.

Selama sengketa berlangsung, demikian Redwin, pengelolaan uang parkir langsung ditangani oleh Badan Pengelolaan Perparkiran (BPP). "Jadi uang yang masuk ke kas negara merupakan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Redwin. Karenanya pemda sangat berkepentingan atas areal parkir yang disengketakan. Sebab, bila tidak menggugat, maka pemda bakal tekor. "Bila pihak Medan Plaza menang, berarti areal parkir dikuasai swasta, dan kita hanya kebagian 20%. Itu pun dari bruto saja," tutur Redwin.

Setelah memenangkan kasasi, pada 7 Agustus silam pemda mengajukan permohonan eksekusi ke PN Medan atas beberapa fasilitas yang ada di atas lahan parkir. Di antaranya, mesin genset dan kantor satpam. Pihak PT MPC sendiri tampak enggan memberikan keterangan dan menyerahkan semua urusan sengketa itu ke tim penasihat hukum dari kantor penasihat hukum K. Sembiring & Associates. Sementara pihak penasihat hukum PT MPC menolak memberi keterangan "Maaf kami belum mendapat izin dari klien kami," kata Akhmad Zaini mewakili PT MPC.

Tampaknya pihak MPC belum bisa menerima keputusan MA tersebut. Sebab, menurut sumber *Panji* di pengadilan, pihak MPC sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara ini. ■

AR

Laporan: *Abdi Purmono (Medan)*

Gara-Gara Lahan Basah

Pembunuhan: Seorang polisi dibunuh atasannya sendiri. Tak cukup ditembak, mayatnya pun dibakar untuk menghilangkan jejak. Korban dianggap suka membangkang perintah atasan.

Membongkar kasus pembunuhan merupakan tugas polisi. Karena itu mereka harus bisa mengais jejak yang mungkin ditinggalkan pelaku. Namun bukan berarti jika pelaku pembunuhannya seorang polisi otomatis mereka ahli menghapus jejak dengan rapi. Contohnya dalam kasus pembunuhan Sertu (Pol.) Rubiman yang terjadi pada Kamis dua pekan lalu.

Mayat Rubiman ditemukan penduduk Jumat keesokan harinya, di tegalan di pinggir jalan Dusun Nitiprayan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Wajah hingga perut dan kedua tangannya hangus terbakar. Di saku celana pun tak ditemukan identitas dirinya. Terang saja polisi kesulitan mengenali korban.

Esok harinya jajaran Polsekta Gondokusuman berhasil memastikan bahwa mayat yang terbakar itu adalah anggotanya, Sertu (Pol.) Rubiman. Sebab, selama dua hari Rubiman tak masuk kantor. Bahkan saat dicek, istrinya tak tahu keberadaannya. "Ketika celana dalam dan pakaian mayat kami tunjukkan, istri Rubiman langsung pingsan," kata petugas di Polsekta Gondokusuman. Selain itu dari bagian ibu jari tangan kiri yang tidak terbakar, dapat dikenali sidik jarinya. Awalnya, kematian Rubiman diduga bermotif perampokan, mengingat motor korban pun ikut raib.

Namun, kurang dari 48 jam tim gabungan dari Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Polresta Yogyakarta yang dipimpin Kadit Serse Polda DIY Letkol (Pol.) Drs. Yotje Mende berhasil mengungkap jati diri tersangka. Yang mengejutkan, tersangka pembunuh Rubiman adalah mantan atasannya sendiri, Serma (Pol.) Bambang Sugiarto, yang hingga enam bulan lalu masih menjabat kepala unit Bimmas Polsekta Gondokusuman Yogyakarta.

Bukti-bukti memang mengarah pada Bambang. Di antaranya, seorang saksi melihat di malam pembunuhan, korban pergi bersama Bambang. "Petugas juga menemukan sandal merek Homypad di TKP (tempat kejadian perkara), yang saat ditunjukkan kepada anak tersangka, dia mengakui bahwa itu milik bapaknya," kata Yotje.

REPRO KR

Senjata yang disita polisi: Demi martabat

Berdasar bukti itu tim dan Provost Polda DIY, Senin pagi, 9 Agustus lalu, membekuk tersangka di rumahnya di asrama polisi Pathuk. Di sudut rumah, ditemukan pistol korban dan satu kotak peluru yang ditanam di kolong tempat tidur dan telah ditutup semen. Selain motor dan pistol korban, pistol colt kaliber 38 milik tersangka, satu kotak berisi 12 peluru, yang salah satunya berupa selongsong, jaket hitam, baju, dan dompet warna coklat bersimbol Polri kini disita polisi.

Dari pengakuan tersangka di depan penyidik Polda DIY, dia membunuh korban karena jengkel. "Selaku atasan ia merasa martabatnya direndahkan," kata Kapolda DIY Kolonel (Pol.) Dadang Sutrisno. Sebab, korban sering tidak mematuhi perintah, bahkan membantah.

Ada dugaan ketidakpatuhan Rubiman itu karena tugas-tugas sampingan seperti menjaga atau mengawal petugas bank. Maklum, tugas-tugas semacam ini sering dianggap sebagai lahan basah. Bambang mengaku, sebagai orang yang mengatur penugasan kawal Bank Lippo, Jalan Sudirman dan jaga Toko Gramedia, ia meminta agar Rubiman membagi tugas tersebut dengan empat anggota unit Bimmas lainnya. Ternyata Rubiman membantah dan ingin memonopoli tugas-tugas itu.

Dalam melaksanakan aksinya, Bambang mengajak korban untuk mencarikan guru les anaknya. Sampai di wilayah Dusun Nitiprayan, tersangka minta berhenti dan pura-pura buang air kecil. Di kegelapan itulah Bambang mengeluarkan pistol dan menembakkan ke leher Rubiman. Korban pun tersungkur dengan peluru yang menembus hingga kening. Korban ditinggalkan di semak-semak, sementara dia pergi membeli satu liter bensin. Kemudian Bambang kembali dan membakar tubuh korban setelah mengambil kartu identitas beserta pistol milik korban.

Merasa beres, Bambang membawa kendaraan korban ke tempat penitipan sepeda motor di Janti, lalu pulang naik taksi. Esoknya Bambang sempat mengarang alibi dalam wawancaranya dengan koran lokal. "Saya bertemu korban Kamis malam, saat diantar mencari guru les untuk anak saya. Tapi dia mengajak mampir ke Toko Ramai (Jalan Malioboro, *Red.*) untuk menjumpai seorang gadis yang belum saya kenal. Karena akan mengantar gadis itu, Rubiman membatalkan rencana mencari guru les, lalu mengantarkan saya pulang ke rumah," kata Bambang Sugiarto seperti dikutip harian *Bernas*, Minggu, 8 Agustus 1999.

Rupanya Bambang ingin mengembangkan cerita bahwa pembunuhan itu terjadi lantaran soal perempuan. Buktinya istri korban, Sriyati, saat malam terjadinya pembunuhan mengaku diteror orang tak dikenal lewat telepon. Mungkin agar memberi kesan bahwa ada pihak lain yang tak suka dengan istri korban dan ingin menghabisi Rubiman.

Betapapun nyaris sempurna skenario pembunuhan itu, tapi kini semua telah terbongkar. "Karena pembunuhan dilakukan secara terencana, tersangka bisa terancam hukuman mati dan dipecat dari dinas kepolisian," kata Kapolda DIY (Kol.) Dadang Sutrisno. Serapi-rapinya melenyapkan barang bukti, ternyata terbongkar juga. Meski dia seorang polisi. ■

ABDUL RAHMAN MA'MUN (YOGYAKARTA)

Nungki Merangkul Aceh

Nungki Kusumastuti: Kita lupa

YUSNIRSYAH SIRIN

Kabar terbaru tentang Aceh selalu membangkitkan minat **Nungki Kusumastuti** untuk menyimaknya. Selain karena kepeduliannya sebagai sesama bangsa Indonesia, Aceh juga membangkitkan kenangan masa kecil Nungki. Ya, penari ini memang dilahirkan di Banda Aceh, empat puluh tahun silam. Namun, hingga ayahnya yang dokter sekaligus tentara ini dipindahkan dari tanah rencong pada 1964, dia tak merasakan ada permusuhan antara penduduk dan militer. Kalaupun kini sering terjadi sengketa, menurut Nungki, "Kita telah lupa merangkul mereka."

Beberapa kali Nungki mengunjungi tempat kelahirannya itu. Memang, ada beberapa ketimpangan yang tak bisa ditutupi. Di Banda Aceh atau di Lhokseumawe, dia melihat kemajuan yang cukup pesat. "Namun, di Sigli atau Langsa, misalnya, lebih dari 30 tahun hampir tak ada perubahan," ujar Nungki.

Usul Nungki, pendekatan budaya mungkin bisa menjadi resep yang manjur. Sebagai seniman dia telah beberapa kali menyumbang dalam bentuk karya tari. Pada 1980-an saat pengambilan api PON dari Aceh, Nungki ikut menggarap koreografi hiburannya. Dan, pada acara aksi damai untuk Aceh yang digelar Rabu lalu, Nungki ikut mengkoordinasikan 150-an penari dari berbagai sanggar di Jakarta. "Ini bentuk solidaritas kami—para seniman—untuk Aceh," ujarnya.■

Rupanya, **Robby Djohan** adalah pengagum berat musisi jaz dunia George Benson. Presdir Bank Mandiri ini tampak di antara pengunjung yang memadati pentas George Benson, Kamis malam pekan lalu, di Hotel Mulia, Jakarta. Saking gandrungnya, Robby yang ditemani istrinya datang lebih awal. Apalagi maksudnya kalau bukan untuk menemui dan mengobrol langsung dengan sang idola.

"Benson di mata saya adalah penyanyi yang sempurna. Vokalnya bagus, permainan gitarnya pun sempurna," pujinya usai pertunjukan kepada Deny R. Secaatmadja dari *Panji*.

Mantan Presdir Bank Niaga itu mengaku sudah gemar musik jaz sejak SMA. Entah kenapa, kata Robby, ketika itu tiap kali mendengar alunan musik jaz, ia seperti terpukau. "Jaz itu *art*, sama saja dengan lukisan. Indah namun tak bisa dijelaskan," ucap pengagum *jazzer* dunia George Benson, David Benoit, dan Miles Davis ini. Setelah itu, Robby selalu ditemani jaz. Di rumah, kantor, di mobil, dan ketika naik kereta api. Jaz..., jaz..., jaz, siapa hendak turut.■

M. ZAKIR SALMUN
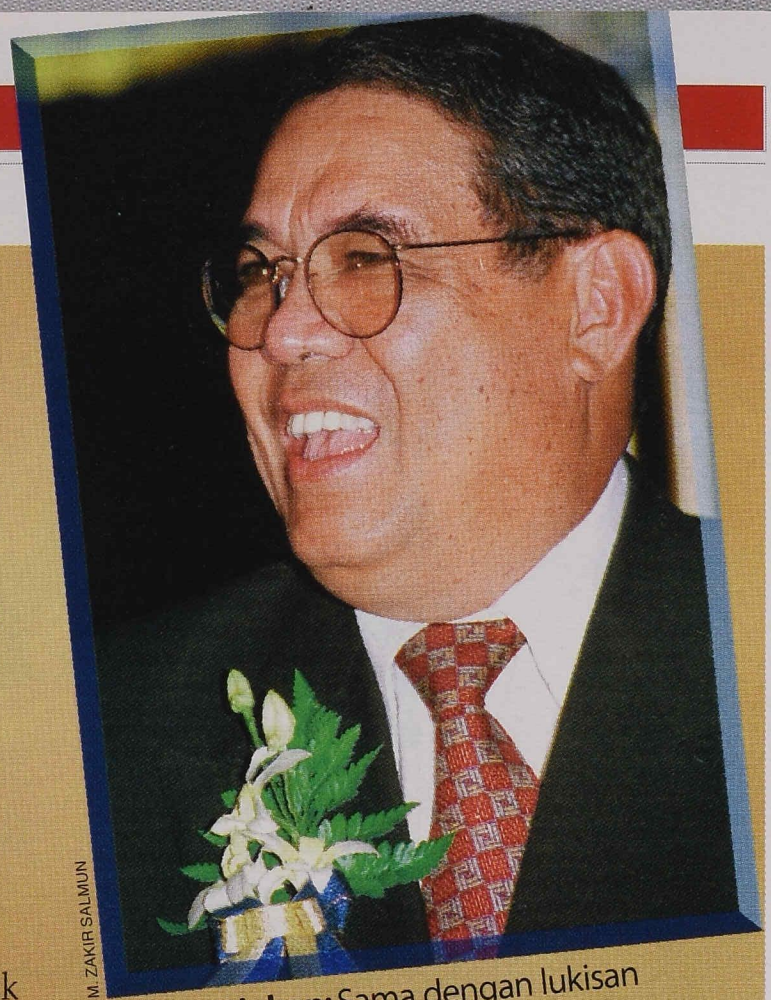
Robby Djohan: Sama dengan lukisan

La Rose: Terinspirasi Megawati

ARIADI

Novelis kawakan **La Rose** punya obsesi menulis novel tentang Megawati Soekarnoputri. Soalnya, kata La Rose, kehidupan Ketua Umum PDI-Perjuangan ini, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, terlebih setelah berada di tengah pergulatan perebutan kursi kepresidenan, adalah sesuatu yang amat menarik untuk dicermati. "Saya bisa berempati pada Mega. Saya melihat kisahnya dengan penuh kasih dan pengertian," kata La Rose kepada Mas'ad T. dari *Panji*.

Bagi pemilik radio *La Rose* yang juga aktif mengurusi Litbang Perpustakaan Masjid Indonesia ini, kisah hidup Mega kecil sewaktu di Istana hingga akhirnya terdepak memberikan inspirasi yang memikat. "Waktu kecil, dia menari di Istana Negara. Kemudian ia harus melihat ibundanya, Fatmawati, keluar dari sana. Betapa sakitnya. Bayangkan kalau kini ia kembali ke sana," ujarnya sembari menerawang. Novelis papan atas ini memang bertekad menambah satu lagi karyanya yang bernuansa politis, setelah menelurkan *Negeri Antah Berantah*, novel yang bercerita tentang pemerintahan yang didominasi kaum feminis.■

Dewi Yull: Tanpa target

Tak ada target apa pun ketika **Dewi Yull** berniat mempelajari berbagai tembang etnis klasik. Ia cuma ingin menggali kekayaan budaya Indonesia. Pemeran Jeng Sri dalam sinetron *Losmen* ini lantas ke Bali, belajar *tembangan* kuno Bali pada seorang *bapa*. "Saya jatuh cinta mempelajari *tembangan* Bali karena keunikannya," kata Dewi saat berbincang dengan Almaidha Sitompul dari *Panji*. Selesai belajar *tembangan* Bali, Dewi melirik *mocopat*, seni tembang dari Jawa. "Cukup lama. Soalnya, belajar lagu kuno tak semudah mempelajari lagu pop," ujar Dewi, yang mengaku menghabiskan waktu enam bulan untuk belajar *mocopat*.

Eh, ternyata, ilmu *tembangan* dan *mocopat* itu terpakai juga. Ceritanya, Palang Merah Internasional meminang Dewi Yull menjadi bintang iklan layanan masyarakat, yang rencananya bakal ditayangkan serentak di 12 negara. Di situ Dewi didaulat melantunkan *tembangan* Bali sebagai musik latarnya, menggusur *violist* Vanessa Mae dari Singapura. Akan halnya ilmu *mocopat*, tanpa dinyana menolong penampilan Dewi pada acara musik di Amerika dan Eropa. "Penyelenggara melarang peserta membawa alat musik elektronik," ungkapnya. Untunglah Dewi sudah jago *mocopat* dengan hanya bermodal bambu.■

ARIF ARIADI

Seorang wanita muda nan jelita tampak berlari-lari di atas panggung. Gaun merah bergaya *strapless* yang terkesan glamor kian memantulkan kecantikannya. Dialah Rosalind, tokoh utama dalam lakon *As You Like It* yang diperankan bintang tenar **Gwyneth Paltrow** di festival teater Williamstown. Rosalind adalah seorang pahlawan wanita yang paling disayang, bijaksana, jenaka, dan mempesona, sekaligus seorang wanita yang tegar dan mampu mengatasi segala problemnya sendiri.

Tampaknya, para pengagum Gwyneth amat antusias dengan penampilan idolanya dalam lakon komedi karya Shakespeare itu. Buktinya, meski pementasan Gwyneth baru diselenggarakan pada Minggu lalu, tiket pertunjukannya ternyata sudah ludes jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, permainan peraih Academy Award dalam film *Shakespeare In Love* ini memang selalu memikat. Tak heran jika para pengagum selalu menantikan Gwyneth unjuk kebolehan.■

INTERNET

Gwyneth Paltrow: tampil di teater

Angin reformasi ternyata belum dirasakan seniman **Butet Kertaredjasa**. Buktinya, album monolognya yang berjudul *Raja Rimba Jadi Pawang* dicekal Lembaga Sensor Film (LSF), dengan alasan dapat mengganggu ketahanan nasional. Monolog itu dipresentasikan menggunakan idiom-idiom fabel, yang berkisah tentang seekor raja rimba, macan kecil serta burung beo. Keberatan LSF terletak pada karakter suara mirip Soeharto, Habibie, dan Harmoko, yang diciptakan seniman yang jago menirukan suara berbagai tokoh ini dalam albumnya. "Saya *ge-er* menyangka negeri ini sudah berubah," ujarnya kecewa kepada wartawan *Panji*, Elly Burhaini Faizal.

Memang *sih*, itu bukan barang baru bagi Butet. Ia sudah dua kali kena cekal seperti itu pada masa Orde Baru. *Pertama*, saat pementasan *Patung Kekasih* bersama Teater Dinasti pada 1984. *Kedua*, saat bergabung dengan *Kyai Kanjeng*-nya Emha Ainun Nadjib pada 1994. *Toh*, Butet mengaku tak kapok dan menganggap pencekalan bukan cuma urusan pribadi. "Publik punya hak untuk menerima informasi estetis untuk memperkaya batinnya sehingga pencekalan sosialisasi karya ini sama dengan perampasan hak publik," kata saudara kandung Djaduk Ferianto ini.■

Butet: Saya ge-er

SATARI

Saka Guru Hukum Islam

Resensi: *Al-Muwatta'* diakui sebagai kitab hadis dan fikih yang terpenting. Dirujuk oleh Bukhari, Muslim sampai Imam Syafi'i.

Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, Cet. I, xxxvi + 595 halaman

Pada 147 H, Imam Malik ibn Anas ditangkap dan disiksa penguasa Dinasti Abbasiyah di Madinah. Peristiwa yang menimpa pendiri mazhab Maliki—salah satu dari mazhab-mazhab Islam—ini terjadi setelah ia mengeluarkan fatwa bahwa *bay'ah* (sumpah) yang diberikan secara paksa dianggap tidak sah. Dan, fatwa ini dijadikan pegangan bagi kaum syiah untuk menentang kekuasaan Abbasiyah di Madinah.

Namun, khalifah kedua Bani Abbasiyah di Bagdad, Abu Ja'far al-Mansyur, saat menunaikan ibadah haji, berlapang dada untuk cepat meminta maaf dan membebaskan Malik. Malah, Khalifah al-Mansyur memohon kesediaan Malik mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah agar dapat dijadikan pegangan umat Islam. Permintaan Khalifah tidak segera dikabulkan karena Malik merasa keberatan—walau akhirnya ia melaksanakan tugas suci itu. Maka, terwujudlah kitab *Al-Muwatta'*. Inilah cermin hubungan harmonis antara umara dan ulama, yang sangat jarang diikuti penguasa dan pemimpin umat Islam Indonesia.

Tak terbayang, bagaimana seandainya sang khalifah tidak bijak memahami masalah rakyatnya. Dan, bagaimana bila Imam Malik tetap bersikeras hati tidak menerima permintaan maaf, pembebasan, dan permohonan sang khalifah yang telah membuatnya menderita dalam penjara. Jika kedua panutan umat ini tidak bijak, maka kemungkinan besar, umat Islam tidak akan pernah membaca hadis-hadis yang diterima Imam Malik.

Al-Muwatta' mulai ditulis Imam Malik pada masa Khalifah al-Mansyur (754-775 M) dan selesai pada masa Khalifah Muhammad al-Mahdi (775-785 M). Ketika menjadi khalifah, Harun al-Rasyid (786-809 M) berusaha menjadikan buku ini sebagai kitab hukum, tetapi Imam Malik tidak menyetujuinya. Dan, Malik hanya bisa mempersembahkan kitabnya kepada khalifah dan umat Islam karena ia meninggal dunia pada 795 M—10 tahun setelah Harun al-Rasyid berkuasa.

Kini, umat Islam Indonesia bisa membaca terjemahan kitab Imam Malik yang diterjemahkan dari edisi Inggrisnya, *Al-Muwatta' of Imam Malik ibn Anas, The First Formulation of Islamic Law*. Sayang, selain karena buku ini diterjemahkan bukan dari karya aslinya yang berbahasa Arab, dalam terjemahan ini pun tidak disertai teks hadis-hadis bahasa Arab sehingga kita merasa kurang sreg membacanya.

Kitab-kitab kuning: Merujuk *Muwatta'*

SATARI

Karya Imam Malik ini menjadi karya terbesar pada masanya, terbaik pengaturan dan pemilihan judul-judulnya. Karya inilah yang tetap bertahan hingga kini sebab buku-buku lain yang ditulis dalam waktu bersamaan telah punah. Dalam *Ensiklopedia Islam* disebutkan, *al-Muwatta'* merupakan kitab hadis sekaligus kitab fikih karena berisi hadis-hadis yang disusun sesuai dengan bidang-bidang (*bab*) kitab fikih. Tidak semua hadis dalam *al-Muwatta'* memiliki sanad yang bersambung, tapi juga memuat fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in.

Memang, Imam Malik hanya menerima hadis dari para ahli hadis dan *siqah* (orang tepercaya). Juga, ia menerima hadis-hadis yang *matan* (redaksi atau kandungan)-nya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ia hanya meriwayatkan hadis-hadis makruf dan mensyaratkan pula matan hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah—ibu kota ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hadis.

Menurut Aisha Abdurrahman Bewley—dalam pendahuluan buku ini, Malik dipandang oleh para ulama sebagai satu tiang dan salah satu benteng pengetahuan. Malik tidak diragukan ketakwaannya, kuat ingatan, benar dalam meriwayatkan, dan mampu memberi fatwa. Ia termasyhur pula karena tindakannya menjauhi para *khalif* dan raja-raja yang memberi (menyogok) uang kepada ulama.

Kecuali itu, Imam Malik juga memiliki kelebihan lain. Misalnya, usianya panjang, otaknya panjang, dan daftar periwayatannya luas. Kesepakatan para imam, ia adalah bukti tentang kekuatan periwayatan. Sementara agama Malik, kebijaksanaan, dan kepatuhannya kepada sunnah sangat kuat. Lalu, keutamaannya dalam fikih, fatwa, serta dasar argumentasinya juga kuat. Karena itu, wajar kalau Al-Dzahabi memasukkan biografi Imam Malik ke dalam salah satu bagian bukunya, *Tarikh al-Kabir*.

Untuk itu, tak heran bila Imam Malik dijadikan oleh para ulama sebagai sumber periwayatan. Kitab-kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim, *Sunan* al-Baihaqi, *Musnad* Imam Ahmad, *al-Umm* dan *al-Risalah* Imam Syafi'i dimulai dengan kata-kata, "Malik menyampaikan kepada kami".

Itu artinya, para ulama—mungkin juga kita—telah belajar kepada Imam Malik walau secara tidak langsung melalui bukunya. Dengan demikian, murid-murid Malik cukup banyak. Bahkan Aisha berani mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada seorang ahli syariah Islam pun yang bukan murid Imam Malik. Alasan Aisha, seseorang tidak dapat dianggap ahli syariah Islam jika ia tidak mempedulikan *al-Muwatta'*, seperti beberapa para ulama tersebut. ■

IDRIS THAHA,
PEMERHATI MASALAH SOSIAL-KEAGAMAAN

khas

No. 19 Tahun III 25 Agustus 1999

Bintang Zaman
Teungku Muhammad Daud Beureu'eh
Dari Aceh untuk Bangsa

Muzakarah
Komisi dan Debt Collector

Tafsir
Taqwa yang Bagaimana

Tasawuf
Ketika Abege Tertarik Tarekat

Nia Zulkarnaen
Nikmatnya Menuntun Suami Muallaf

LEMBAR KHUSUS, PANJI

8 72440 27332 0 73

Tenggara Timur yakni sebanyak 1.616 kasus per

Genangan air : Jadi sarang nyamuk
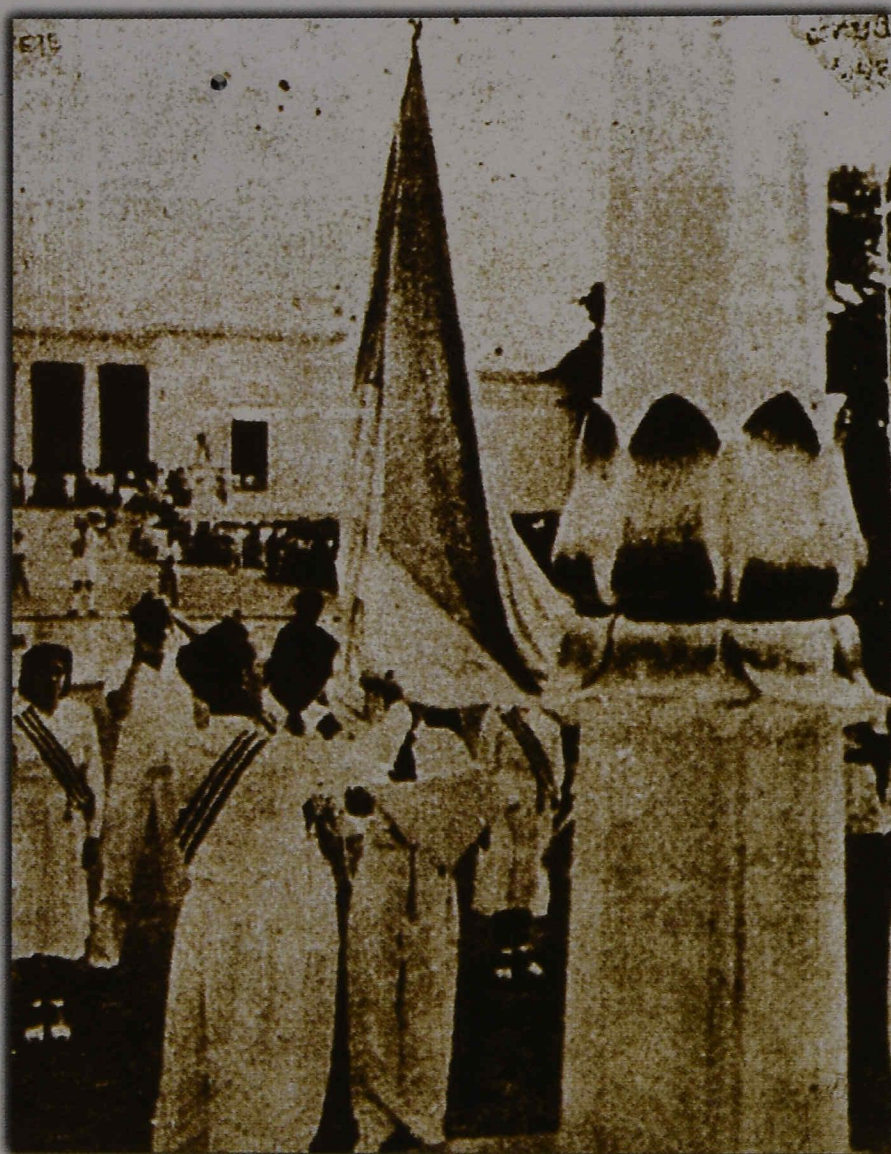
PASKIBRA PERTAMA

Baru pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia menikmati arti kata merdeka dari penjajah. Segala bentuk rongrongan Belanda mulai dari agresi militer hingga upaya pembentukan negara-negara bagian lewat Republik Indonesia Serikat (RIS)—hasil Konferensi Meja Bundar, bisa digagalkan. Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Duet proklamator ini kembali menjadi presiden dan wapres RI. Dan, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dicita-citakan pada 17 Agustus 1945.

Hari kemerdekaan yang kelima pun diperingati secara besar-besaran di seantero negeri. Untuk pertama kalinya, Istana Merdeka yang berdiri megah di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, digunakan sebagai tempat peringatan. Tradisi pengerekan bendera Merah Putih oleh pasukan khusus pengibar bendera pusaka (Paskibraka) pun mulai digelar. Itulah Paskibraka pertama yang dimiliki Indonesia. ■

Teks Foto: Dodi Kusmajadi
Sumber: Lukisan Revolusi

D. Zawawi Imron
Kolumnis dan budayawan

KEMERDEKAAN SEBAGAI RAHMAT

Bangsa yang hidupnya tidak enak alias melarat tentunya bangsa yang dijajah. Contohnya bangsa Indonesia yang pernah dijajah bangsa Belanda. Kemerdekaan dirampas, kemakmuran negeri dikuras untuk kepentingan penjajah, dan rakyat kecil diperas. Kaum penjajah dan antek-anteknya yang memaksa dan memerkosa hak-hak rakyat seperti itu agaknya tanpa perasaan berdosa.

Setelah penjajah Belanda bertekuk lutut kepada Jepang, kekuasaan di negeri ini berpindah tangan ke bawah keperkasaan Jepang. Dengan runtuhnya penjajahan Belanda, orang-orang menyangka Jepang akan berbuat lebih baik dan lebih sopan dari Belanda karena mereka mengaku "saudara tua". Nyatanya, "walang sangit makan ketan, pergi demit datang setan".

Jepang, meski berkuasa sebentar, tak kalah kejam dari Belanda. Sebagian bangsa kita dijadikan romusha untuk melakukan kerja paksa, sebagian kaum wanitanya dijadikan *yugun ianfu*, di samping saat itu sangat sulit mencari sembako. Ada lagi penyiksaan yang dilembagakan, yaitu *kempeitai*. Pada saat itu kelaparan merajalela di mana-mana. Orang-orang miskin banyak berpakaian yang dibuat dari karung goni akibat sulit dan mahalnya kain.

Maka, sangat wajar kalau para pemimpin Indonesia saat itu sangat berkepentingan Indonesia segera merdeka. Mereka tidak tahan melihat bangsanya dijajah, diperkosa hak-haknya, disiksa, dan hidup dalam penderitaan dengan cucuran air mata berkepanjangan. Perjuangan demi perjuangan dilakukan. Kalau perlu dengan angkat senjata sambil melakukan perlawanan secara fisik.

Semua itu dilakukan karena menghargai kemerdekaan, yang pada intinya menghargai kemanusiaan. Tidak mustahil di antara para pejuang itu ada yang ditangkap penjajah dan meringkuk dalam penjara selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang harus mati ditembus peluru serdadu penjajah saat terjadi kontak senjata. Mereka telah rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan.

Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan memang tak kunjung berhenti dari generasi ke generasi. Puncak dari perjalanan sejarah yang penuh romantika itu, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Anak-anak di seluruh negeri bernyanyi lagu *Indonesia Raya* dan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang tak boleh dilupakan, kemerdekaan adalah "rahmat Allah".

Rahmat, artinya karunia dari Tuhan, yaitu bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya. Pada rahmat, terdapat hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jika kemerdekaan itu rahmat Allah, maka buah dari kemerdekaan yang berupa kemakmuran tanah air itu harus diupayakan untuk memberi kebahagiaan kepada seluruh manusia yang ada di Indonesia. Tak satu pun mengancam yang lain.

Karena kemerdekaan itu rahmat Allah, maka tidak benar kalau ada seseorang atau segelintir golongan tiba-tiba menguasai kemakmuran tanah air ini sampai manusia Indonesia lainnya tak kebagian dan menderita. Orang-orang yang serakah seperti itu jelas tidak memahami secara substansial arti kemerdekaan sebagai rahmat Allah. Kemakmuran Indonesia itu untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk seseorang atau sebagian golongan saja.

Artinya, siapa yang bertindak rakus dan serakah, berarti menjegal datangnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berhak untuk menikmati hasil dan buah dari kemakmuran negeri tercinta ini. Orang-orang yang berbuat demikian sudah tentu telah menyelewengkan amanat dan rahmat Allah yang seharusnya membahagiakan seluruh bangsa Indonesia. Tindakan seperti itu tak ada bedanya dengan perbuatan penjajah Belanda yang menguras kekayaan Indonesia.

Saya teringat ketika salah seorang paman saya pada 1950-an hendak ikut pemilihan kepala desa. Kakek saya menasihati paman. Katanya, "Belanda yang berkulit putih sudah pergi, kalau nanti kamu terpilih, tolong hormati rakyatmu. Kamu jangan jadi Belanda berkulit coklat, yang menyakiti dan memerkosa bangsamu sendiri".

Tanpa rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia yang begitu mendalam, kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok bisa lebih diutamakan dari kepentingan bangsa. Bendera partai atau golongan bisa lebih dipentingkan dari bendera merah putih yang telah disepakati menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam memenuhi kepentingan diri atau kepentingan golongan, kita bisa meremehkan kepentingan orang lain dan kelompok lain, padahal orang lain dan kelompok lain itu adalah bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri yang tidak boleh dikhianati.

Namun, jika kita memandang kemerdekaan sebagai rahmat, kita akan saling berlapang dada untuk berbagi kemakmuran dan kebahagiaan dengan seluruh bangsa Indonesia. Kita tidak akan serakah dan sewenang-wenang karena kita tidak mau disebut Belanda. Kita harus berupaya menjadi rahmat bagi bangsa sendiri. Bahkan juga rahmat bangsa lain di seluruh permukaan bumi. ■

Rubrik ini terbuka bagi Anda untuk mengirim tulisan sendiri menyangkut pengalaman religius apa saja, disertai foto-foto, juga memungkinkan kerjasama penulisan dengan Redaksi

NIA ZULKARNAEN

NIKMATNYA MENUNTUN SUAMI MUALLAF

DOK. PRIBADI

Bersama suami: Ada ketergantungan

Menjadi istri seorang yang baru masuk Islam (muallaf) sungguh tak mudah. Anda harus sabar, telaten, juga tekun. Tapi, artis Nia Zulkarnaen, yang bersuamikan Ahmad Iskandar Zulkarnaen, menemukan butiran-butiran hikmah yang mengharu biru dan membahagiakan. Ada rasa syukur yang tak terhingga. Ada kenikmatan yang sulit dilukiskan. Apalagi keislaman suaminya itu berkat dirinya, setelah melihat Nia bersujud di kantornya. Berikut pengalaman religiusnya dalam menuntun suami, seperti dituturkan kepada Akmal Stanzah dari *Panji*.

Saya menggigil ketika Alexander David Siahaan menyatakan keinginannya masuk Islam. Saya tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati saya berguman, "Ya Allah, terima kasih sekali."

Nama David bukan sesuatu yang asing bagi saya. Selain menjadi rekanan usaha, kebetulan kantor perusahaan yang saya pimpin, PT Adini Prima Multimedia, berdekatan dengan kantor tempat ia bekerja sebagai ahli konstruksi. Hanya berbeda ruangan. Jadi setiap saya mengambil air wudhu, berjalan dengan wajah basah dan celana panjang tersingsing, ia tahu saya hendak salat.

Suatu ketika, ia datang ke ruangan kantor saya. Ia ingin memberi laporan tentang pekerjaan yang kami lakukan bersama. Diketuknya pintu beberapa kali, tak ada jawaban. Kebetulan pintu tidak terkunci. Jadi dia masuk saja. Sampai di dalam, ia bengong melihat saya salat. Saya sedang bersujud kala itu.

Setelah peristiwa tersebut, kami lama tak bertemu, sampai saya melakukan umrah pada 1997. Saya ingat betul, tak lama setelah kepulangan saya, ia menelepon. Kami ngobrol *ngalor ngidul*. Dia cerita baru ditinggal pacarnya. Kebetulan saya juga mengalami hal yang sama. Saya ditinggalkan Ymot. Mungkin kesamaan ini yang membuat kami makin dekat.

Sejak itu, kami sering saling bertelepon. Kami pun saling menyatakan suka—ya biasalah. Sampai pada akhirnya David menyatakan keinginannya berdampingan dengan saya. Saya bilang mau, tetapi dengan syarat segera menikah karena saya sudah lelah berpacaran. Habis, selalu putus.

DOK. PRIBADI

Di tengah anak yatim: Pembentukan karakter Islam

Pada kesempatan lain, David menelepon lagi. Dia bilang, sudah sejak lama ia tertarik dengan Islam. Terutama setelah ia melihat saya bersujud tempo hari, merendahkan diri kepada Allah. Sayangnya dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa tentang Islam.

Lalu saya tanya kenapa dia mau masuk Islam. "Yah, *nggak* tahu, ingin saja," jawabnya simpel. *Wow*, ini sungguh kejutan. David, yang sejak terlahir beragama Kristen dan hidup dalam lingkungan keluarga yang taat pada agamanya, hendak memeluk Islam? Seketika muncul dalam pikiran saya, "Wah mungkin ini sudah panggilan."

Sebenarnya saya masih belum yakin betul. Sebab, bisa saja David becanda atau sekadar iseng. Lalu saya tanya lagi, "Mungkin kamu pernah mimpi untuk memeluk Islam?" Jawabnya, "Tidak. Mungkin tempat saya memang agama Islam."

Kebetulan bapak angkat saya, KH Mahfud Nahrowi dari Jember, datang ke Jakarta. Saya temui dia dan menceritakan tentang keinginan David memeluk Islam. Tentu saja dia senang dan siap mengislamkan.

Kejutan Kedua. Bang David kembali mengejutkan saya. Ia meminta saya menuntunnya saat mengucapkan dua kalimah syahadat. Dia juga meminta saya membimbingnya melaksanakan salat. Bagaimana tidak kaget, pacar bukan, suami juga bukan, *kok* meminta saya yang membimbing.

Agar tidak mengecewakannya, saya pun mengiyakan. Tapi, saya juga bilang, untuk salat tidak mungkin karena sebagai perempuan saya tidak bisa menjadi imam untuk dia. Eh, ia terus mendesak. Maka kami sering melakukan salat dengan posisi sejajar. Karena tidak bisa saya lakukan seterusnya, di atas selembar karton saya tuliskan ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca ketika salat.

Mengingat David memeluk Islam dalam usia dewasa, sukar bagi saya meyakinkannya bila ada ajaran yang tidak bisa diterima akalnya. Misalnya bacaan sujud, *subhaana rabbial a'laa wabihamdih"*. Menurut dia, percuma dia sujud kalau tidak mengerti apa yang ia minta.

Kepadanya saya menekankan agar ia selalu membaca tafsir Al-Quran supaya mengetahui makna ayat yang dibaca ketika salat. Juga tentang di mana ayat itu diturunkan, dan untuk apa, sehingga akal pikirannya dapat menerima.

Karena kami sering bertemu dan salat bersama, akhirnya ada ketergantungan di antara kami. Lebih kurang tiga bulan memeluk Islam, David meminta saya menjadi istrinya. Sampai 10 kali, baru saya tanggapi. Tepat pada 19 Mei 1998 kami menikah, dan namanya berganti menjadi Ahmad Iskandar Zulkarnaen.

Karakter Islam. Sekarang satu tahun sudah usia rumah tangga kami. Dengan pengetahuan agama yang saya miliki, saya tetap berupaya semaksimal mungkin membimbing dia. Terutama dalam beribadah. Saya menilai faktor yang satu ini sangat penting guna mencetak kepribadian Islam.

Bila ada masalah lain di luar ibadah, kami selalu berdiskusi. Kalau saya tidak menemukan jawabannya secara
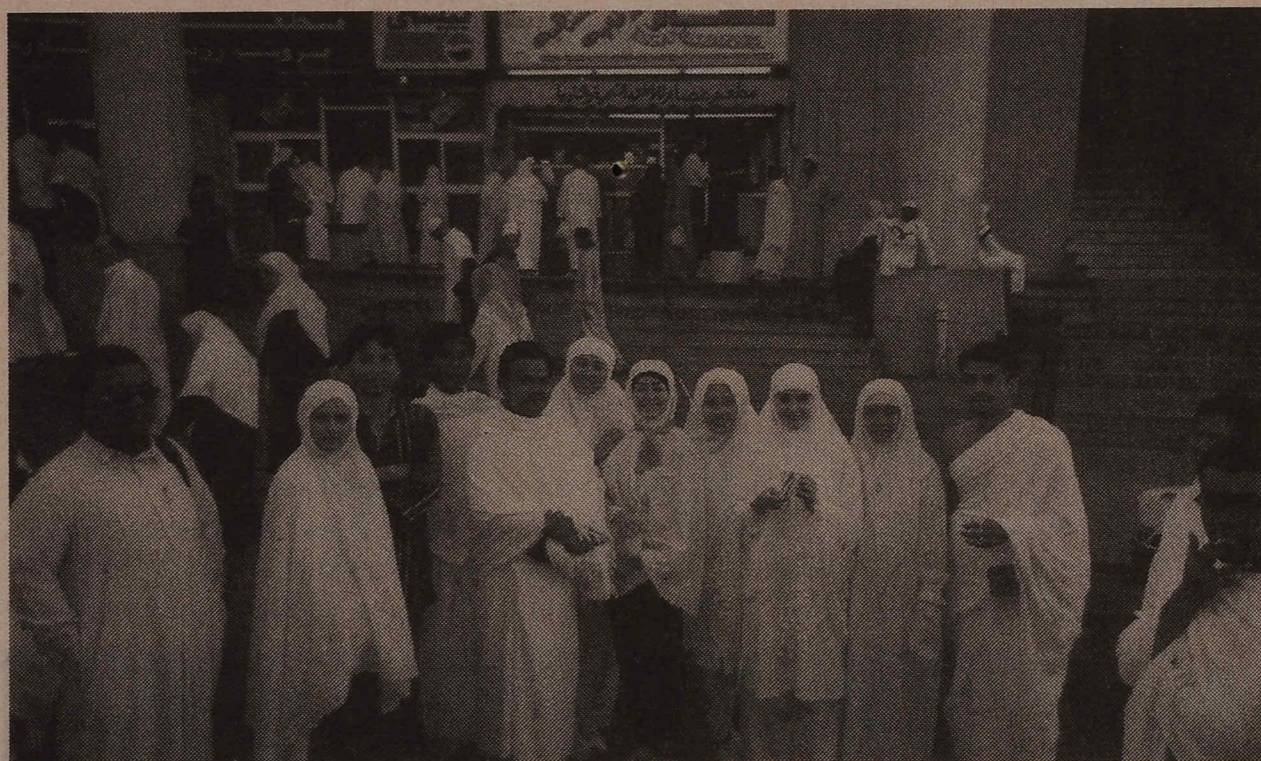
Saat umroh: Menerima telepon kemudian

DOK. PERIBADI

pasti, saya upayakan mencari lewat buku-buku bacaan. Atau bertanya kepada teman dan guru agama. Maklumlah ilmu agama saya kan pas-pasan.

Suatu ketika muncul pertanyaan yang simpel, polos. Saat sedang asyik menonton televisi, dia bertanya kenapa Ka'bah harus dikelilingi jamaah haji sebanyak tujuh kali sambil membaca *labbaikallahumma labbaik*. Sederhana kan. Tapi, kalau saya tidak siap kan bisa gelagapan menjawabnya. Untung saya banyak dibantu teman sesama artis maupun sanak famili. Mereka memberi saya hadiah tafsir Al-Quran dan buku-buku bacaan mengenai agama sehingga saya bisa menjawab walaupun mungkin dalam penjabarannya masih belum sempurna.

Saya yakin, apa yang ia terima dari saya masih belum memuaskan. Namun, untuk tahap awal, paling tidak ia sudah memahami makna salat. Ia pun sudah paham mana yang wajib dan mana yang sunnah.

Mungkin yang sangat berat adalah melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, selama 35 tahun lidahnya tidak pernah dipakai mengucapkan hal seperti itu. Betapa sukarnya membimbing dia. Bila tidak sabar, pekerjaan itu akan sia-sia, sulit untuk melihat hasilnya. Untunglah ia punya kemauan yang kuat. Walaupun perlahan, sekarang ia mulai berani melakukannya sendiri. Tadinya untuk salat Jumat saja ia harus ditemani adik saya atau rekan sekantornya.

Sekarang sedikit demi sedikit ia mulai memahami agama Islam dan saya yakin proses akan membuat kami makin dewasa dan dapat memahami ajaran Islam.

Alhamdulillah, prinsip-prinsip yang tadi kental perbedaannya di antara kami makin hari makin menipis. Ketika saya mencoba mengingat apa yang telah kami lalui selama ini, bisa saya simpulkan bahwa pengalaman itu merupakan jalan menuju kedewasaan yang nikmatnya mungkin terasa belakangan. Sulit untuk mengucapkannya dengan kata-kata. Tak ada kalimat yang sepadan untuk merangkainya. Tidak ada analogi yang cocok sebagai gambarannya, kecuali rasa syukur.

Bagi saya sendiri, sungguh ini merupakan bimbingan dari Allah karena sejak kecil tidak pernah terbayangkan untuk menjadi pembimbing seorang muallaf. Awal-awalnya, saya sering merenung kenapa Bang Ahmad memilih saya sebagai orang pertama untuk mengemukakan keinginan menukar agama. Persoalan ini kan bukan perkara ringan. Oleh karena itulah, usai salat, saya selalu bertanya kepada Allah, apakah ini memang kehendak-Nya. Makin sering saya bertanya, bertambah mantap hati saya untuk bisa membimbing sang suami dan diri saya menuju pada satu kesepakatan menjadi muslim yang baik.

Saya menyadari, punya suami seorang muallaf bukanlah pekerjaan enteng. Sebagai seorang yang lebih dahulu menjadi muslim ketimbang suami, saya harus lebih banyak mempelajari ilmu agama, apakah lewat konsultasi dengan orangtua atau lewat buku agama. Bila suami bertanya dan saya tidak mengetahui jawabannya, saya tidak mau sok tahu. Lebih baik saya bertanya kepada ahli agama ketimbang memberi jawaban yang belum jelas kebenarannya. Ini merupakan tantangan yang mengharuskan saya terus-menerus mencari ilmu dan berbuat yang lebih baik.

Saya akui memang tidak mudah membimbing suami yang muallaf, apalagi untuk mengubah karakternya dalam waktu cepat. Untuk itu, mau tidak mau saya lebih banyak memberi contoh ketimbang memaksa. Sekali sepekan saya mendatangkan guru mengaji ke rumah. Tapi, tidak pernah saya mengharuskan suami ikut mengaji karena saya ingin kesadaran itu datang dari dirinya sendiri. Bukan karena dipaksa atau faktor lain. Saya sadar orang yang sudah berusia 35 tahun sulit untuk dipaksa. Sepulang kerja, sering ia melihat saya berkerudung, sedang mengaji. Satu-dua kali tak ada reaksi. Tapi lama-lama timbul keinginan padanya untuk ikut mengaji bersama. Nah, di situlah sering terjadi diskusi antara kami dan guru mengaji. ■

Biodata

Nama	: Nia Zulkarnaen
Lahir	: 19 Mei 1970
Pendidikan	: SD, SMP, dan SMA di Jakarta
Suami	: Ahmad Iskandar Zulkarnaen
Menikah	: 19 Mei 1998
Ayah	: Dicky Zulkarnaen
Ibu	: Mieke Wijaya
Usaha	: PT Advertising Bif, butik Mania, dan MZ
Profesi	: Artis film, Sinetron, dan Penyanyi
Bidang Sosial	: Pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Aliyah dan Al-Fatah

Rubrik ini terbuka bagi partisipasi Anda, apakah itu berupa tulisan kolom atau feature. Semua harus berkait dengan tasawuf

Ketika Abege Tertarik Tarekat

Jamu Taqwa kini makin terbuka. Bisa diikuti siapa saja, termasuk kaum muda.

Banyak dari kita mengelus dada melihat berita tentang anak-anak baru gede, alias *abege.* Yang terlibat obat terlaranglah, yang larut dalam kegiatan seks bebaslah, dan macam-macam. Di Jombang ada berita bagus. Makin banyak *abege* yang kini ikut kegiatan tarekat Jamu Taqwa di Pesantren Darul Ulum: dari pelajar kelas III SMP hingga lulusan SMA.

Jumlah mereka, menurut HM Mudjib Mustain, mursyid atau pembimbing Jamu Taqwa, tak kurang dari 1.000-an. Kebanyakan dari Ponorogo, Magetan, dan Madiun. "Sebagian karena ingin mendapatkan ketenangan, sebagian karena ingin mengendalikan hawa nafsu, sebagian agar mendapat petunjuk ke jalan lurus," tutur lelaki yang biasa dipanggil Gus Mudjib ini.

Ikut tarekat bukan perkara sederhana. Begitu seseorang dibaiat, disumpah setia, ia harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, di bawah bimbingan sang mursyid. Makanya, hanya mereka yang sudah lanjut usia yang bisa diterima Jamu Taqwa. "Takut bablasnya jauh," jelas Gus Mudjib tentang mengapa anak muda tak diterima. "Kalau anak muda, nanti mereka sudah dibaiat, masih mau nonton film juga."

DOK. PANJI

Gus Mudjib pada acara haul: Sekarang terbuka

Itu dulu. "Sekarang yang muda bisa masuk," kata Gus Mudjib. Hanya saja, mereka tidak dibaiat. Mereka juga tidak harus mengikuti ritual mingguan setiap Senin. Boleh membolos. Kepada mereka hanya diajarkan metode dasar tasawuf: tentang bagaimana menambah salat dan cara menghitung kesalahan. Wiridnya pun yang ringan-ringan saja.

Sebab, kalau mengikuti wirid yang standar, mungkin mereka tak tahan. Ritual setiap Senin, misalnya, berlangsung selama tujuh setengah jam, yaitu dari pukul 09.30 hingga pukul 17.00. Dalam rentang waktu itu, ada zikir fida sebanyak 70.000 kali, salat tasbih dan salat-salat sunnah lain, *istighatsah*, dan masih banyak lagi. Hanya setengah jam mereka istirahat, pada waktu zuhur.

"Dulu pintu (masjid) ditutup," kata Gus Mudjib. Hanya anggota yang sudah dibaiat yang boleh ikut. Sekarang pintu dibuka, siapa pun boleh bergabung. "Biasanya para pejabat dan orang-orang muda ikut yang sore, sehabis salat asar."

Mungkin karena itu nama tarekat ini sekarang disingkat dengan akronim yang rada ngepop, yaitu Jamu Taqwa. "Selain agar mudah dikenal khalayak dari segala lapisan, juga dimaksudkan untuk mendandani, memperbaiki akhlak manusia yang mabuk dunia sehingga lupa akhirat," kata Gus Mudjib.

Nama panjangnya: Jamaah Mujahadah Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sudah berdiri di Pesantren Darul Ulum sejak abad ke-19, Jamu Takwa kini merengkuh puluhan ribu anggota yang tersebar di berbagai kota. Umumnya, mereka dari kalangan menengah ke bawah, dari desa-desa. Tapi sekarang sudah banyak muslim kota yang ikut, meski tidak dibaiat.

Seperti tampak pada namanya, tarekat ini merupakan penggabungan dari Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Dua tarekat yang, meski sama-sama terlahir di Bagdad (Irak), memiliki cara beribadah yang berbeda. Tarekat pertama beribadah dengan suara keras, sedang yang kedua suka melakukan ritual dengan pelan, tanpa suara. Nah, pada tarekat gabungan ritual pada bacaan-bacaan tertentu yang dilakukan dengan suara keras, dan pada bacaan-bacaan tertentu lainnya dibaca tanpa suara, hanya dalam hati.

Zikir selepas baiat umpamanya. Mula-mula sang anggota baru membaca sejumlah doa, salawat, istighfar, dan tahlil ("*la*" dibaca panjang, ditarik dari pusar lewat rongga terus menuju ke otak, lalu "*ilaaha ...*" dibuang ke dada kanan, dan "*... illallah*" dibuang ke dada kiri) dengan keras. Kemudian ia membaca "*Allah!*" 1.000 kali tanpa suara, hanya di *lathifatul qalb* (di hati yang lembut), yaitu kurang dua jari di bawah puting susu. Pada saat membaca ini, ia harus menundukkan kepala, mulut tertutup rapat, lidah dibalik ke belakang, mata terpejam. Duduknya seperti duduk *tahiyat* pada rakaat terakhir. Hanya saja, kalau pada *tahiyat akhir* telapak kaki kiri ditindih betis kanan, pada ritual tarekat ini jemari kaki kanan menyembul dari balik betis kiri. Sementara itu, tasbih terus diputar, mengikuti suara hati tadi. ■

Hamid Ahmad dan Imam Bukhori (Jombang)

Di Dalam Cahaya Al-Quran

oleh Syu'bah Asa

Takwa yang Bagaimana

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai muslim (Q.S. 3:102)

Ini ayat pertama dari satu rangkaian, yang secara berturut-turut akan mengajarkan tiga hal dasar yang merupakan kesatuan. Yakni: takwa, persatuan, dan misi. Puncaknya tentu saja yang terakhir itu—misi, yang dikempalkan dalam istilah yang sudah demikian populer, yang tampaknya sederhana tetapi mengandung arti yang luas, yakni *amr ma'ruf nahy munkar* (ayat 104, diulangi dengan 110). Dilihat secara begitu maka ayat 102 di atas—tentang takwa—memberikan landasan, sementara ayat 103 nanti akan mengajarkan pemeliharaan kondisi.

Definisi takwa yang mudah dan populer, sudah sering sekali kita dengar: "menunaikan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang diharamkan" (Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, I:450). Definisi lain, yang masyhur di kalangan mufasir, datang dari kalangan sahabat: Abdullah ibn Mas'ud, Amr ibn Maimun, Ar-Rabi' ibn Khaitsam, dan As-Suddi, seperti diriwayatkan Thabari. "Sebenar-benar takwa", menurut mereka, adalah menjadikan Allah "ditaati dan tidak disanggah, diingat dan tidak pernah dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari (*yuthaa'a falaa yu'shaa, wa yudzkaru falaa yunsaa, wa yusykaru falaa yukfar*)".

Adapun contoh *tindakan* takwa (yang benar-benar itu) diriwayatkan Thabari dari sumber pertama Ali ibn Abi Thalib, dari Ibn Abbas, r.a.: "Berjihad di jalan Allah sebenar-benar jihad, tidak dipengaruhi, demi Allah, oleh celaan tukang cela, dan berdiri untuk Allah dengan sikap proporsional (*bil-qisth*), walau terhadap diri sendiri, bapak, maupun anak." Dalam *Ad-Durrul Mantsur*, dalam pada itu, dimuat hadis Anas r.a.: Bersabda Rasulullah s.a.w., "Tidak akan seorang hamba bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa sampai ia sadar bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset dari dia, dan apa yang luput dari dia memang tidak akan mengenainya."

> Ketika kanker di lambungnya sudah merambah liver, dalam keadaan tak sadar ia melakukan gerakan-gerakan seperti silat. Tapi sebenarnya bukan.

Hapus-menghapus. Disetujui, "sebenar-benar takwa" itu bukan hal yang ringan. Karena itu Ibn Zaid, mengenai turunnya ayat itu, berkomentar: "Sudah datang perkara yang sungguh berat." Lalu, tuturnya, "Orang-orang berkata, 'Siapa yang tahu batasnya ('sebenar-benar takwa' itu), atau yang bisa mencapainya?'" Begitu pula pendapat Qatadah r.a.

Karena itu, menurut keduanya, Allah lalu menurunkan peringanan dan kemudahan—dan itulah ayat "Bertakwalah kepada Allah sejauh kalian mampu" (Q.S. 64:16). Qatadah sendiri (bersama Ibn Zaid, Ar-Rabi' ibn Anas, dan As-Suddi) lalu menganggap ayat ini "dihapus" (*mansukh*). Dengan kata lain, tetap merupakan bagian Quran, tapi kandungannya sudah digantikan ayat lain. Dalam kasus ayat "sebenar-benar takwa" ini, penghapusnya (*nasikh*) tak lain ayat kedua ("sejauh kalian mampu") itu. Tapi Ibn Abbas r.a. menolak. Juga Thawus (Thabari, *Jami'ul Bayan*, IV:28-30).

Penyelesaian yang bagus datang dari Zamakhsyari (w. 538 H). Bagi pengarang *Kasysyaf* ini, takwa dalam ayat "sebenar-benar takwa" di atas sama sekali bukan jauh lebih berat dibanding takwa dalam ayat "sejauh kalian mampu". Sebab, "Bertakwalah kepada Allah sejauh kalian mampu" (Q.S. 64:16) berarti: bertakwalah "sedemikian rupa, sehingga kamu tidak meninggalkan satu hal pun yang sebenarnya kamu mampu" (Zamakhsyari, *loc. cit.*). Sama saja.

Penafsiran itu dipuji Rasyid Ridha—yang menyatakannya sebagai terbit dari "cita rasanya yang sehat dan pemahamannya yang halus". Sambil tidak mempercayai riwayat tentang Ibn Mas'ud yang dikatakan turut serta dalam definisi tentang "sebenar-benar takwa" sebagai, antara lain, menjadikan Allah "diingat dan tidak pernah dilupakan", Rasyid menyatakan: "Itu berarti pembebanan sesuatu yang tidak bisa dipikul. Dan itu tidak bisa jadi" (Lihat: *Bagaimana Menghapus Ayat*).

Dua Pengertian Islam. Itu poin pertama. Sementara itu, untuk teks asli yang kita terjemahkan menjadi "Jangan sekali-kali kalian mati kecuali *sebagai* muslim," Zamakhsyari memberikan makna: "Jangan sampai engkau mati kecuali *dalam ihwal* Islam." *Dalam ihwal* (*'alaa haal*) tidak sejelas *sebagai*. Tapi bisa memuat kedua-dua arti kata *islam*. Pertama, sebagai agama. Seperti kalau orang yang sakit meminta agar didoakan supaya dapat mati "di dalam iman Islam", alias bukan mati kafir.

Kalau begitu, "dalam ihwal Islam" berarti *sebagai muslim*, seperti terjemahan kita; atau *sebagai muahhid*, orang yang berpegang pada tauhid (Al-Jalalain, *Tafsirul Quranil Azhim*, 52). Itulah makna yang dipakai mayoritas mufasir—termasuk, di Indonesia, A. Hassan, Hamka, Departemen Agama.

Tetapi *islam* juga berarti, seperti dipakai minoritas, menyerahkan atau berserah diri. Karena itu *muslim* dalam ayat ini adalah orang yang "mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sama sekali tidak kepada yang lain" (Al-Burusawi, *Ruhul Bayan*, II:71; Al-Qasimi, *Mahasinut Ta'wil*, IV:169). Itu sama dengan salinan Mohammed Marmaduke Pickthall (*The Meaning of the Glorious Koran*, 70): *who have surrendered (unto Him)*. Begitu juga Hasbi Ash Shiddiqy (*An-Nur*, I:632).

Sandaran untuk itu ditunjukkan Al-Qasimi (*loc. cit.*): "Dan siapakah yang lebih bagus keberagamaannya dari orang yang menyerahkan (*aslama*) wajahnya kepada Allah..." (Q.S. 4:125). Jadi, menurut pengertian ini, penutup ayat di atas mestinya diterjemahkan: "Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai orang-orang yang pasrah." Kedua-duanya benar. Hanya, Muhammad Abduh memberi alasan untuk pilihan *sebagai muslim* itu: kata *muslim* dalam ayat itu datang setelah firman mengenai kaum kitabi, hanya dua ayat di atasnya: "... mereka membalikkan kamu setelah beriman menjadi kafir" (Rasyid, *loc. cit.*).

Baiklah. Tapi mengapa diterjemahkan "*sebagai* orang-orang yang pasrah", dan bukan "*dalam keadaan* pasrah"?

Kalau begitu, ayatnya akan berbunyi: *Wa laa tamuutunna illaa muslimiin*. Karena Islam (dalam arti apa pun) di situ berstatus *keadaan*, ia tidak bersifat tetap (Qasimi, *loc. cit.*). Orang bisa kafir sebelumnya, atau muslim dan kafir berganti-ganti, lalu ketika mati berada *dalam keadaan* muslim atau pasrah. Makanya, ayatnya tidak begitu. Karena itu pula Ibn Katsir memberi makna penutup ayat itu: "Peliharalah Islam baik-baik pada dirimu, dalam keadaan kamu sehat dan selamat, agar dapat kamu mati di dalamnya." Sebab, diterangkannya: "Siapa yang hidup di dalam sesuatu, mati di dalamnya. Siapa yang mati di dalam sesuatu, dibangkitkan di dalamnya" (Ibn Katsir, *Tafsirul Quranil 'Azhim*, I:388).

Itu berarti, yang disebut *husnul khatimah* (akhir yang baik), dalam hidup manusia, logikanya bukan sesuatu yang mendadak. Ada satu cerita, yang menyangkut seorang saudara. Di saat kanker yang menyerang lambungnya sudah merambat ke liver, di pembaringannya, dalam keadaan kesadarannya sudah putus hubungan dengan dunia luar, saudara kita itu, yang kebetulan adik ipar penulis ini, sering sekali melakukan gerakan-gerakan seperti pencak silat. Istrinya sampai menangis melihatnya.

Tetapi, setelah diamati, ternyata bukan gerakan silat. Tangannya seperti berusaha meraih wajah. Secara terputus-putus, ia tampak seperti mencoba menyingsingkan lengan baju—yang kelihatan bagai gerakan silat. Layaknya kadang-kadang teringat, kadang-kadang terlupa, ia berjuang mengangkat kaki—seperti sedang berusaha menggapai ujungnya. Itu semua gambaran gerakan wudu.

Rupanya, dari bawah sadarnya, di tengah erangan-erangan yang tak jelas akibat rasa sakit luar biasa, ia, jiwanya, bolak-balik berwudu. Ia tak pernah belajar silat. Tapi kebiasaan dalam hidupnya, yang selalu berusaha memelihara kesucian dengan berwudu, yang begitu *mencintai* wudu, mengantarkan ruhnya sampai ke akhir hayatnya. Allah menerimanya dalam rahmat-Nya. Amin. Itulah salah satu contoh, bagi kita, dan salah satu tafsir yang cocok untuk "Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai muslim." ■
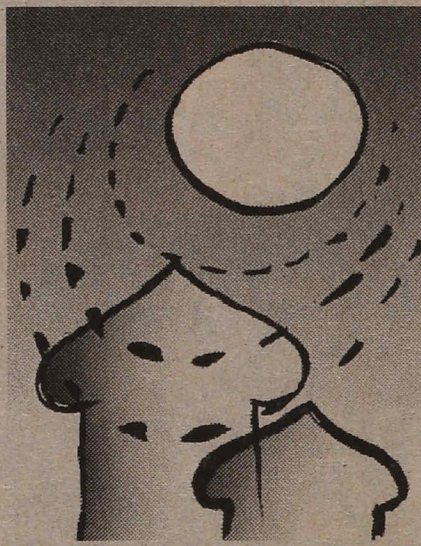
BAGAIMANA MENGHAPUS AYAT

Ini memang sebuah ide yang khas: teori hapus-menghapus. Kenyataan yang bagi orang luar bisa terasa aneh ini sebenarnya menunjuk ciri Al-Quran sebagai himpunan wahyu-wahyu yang (meskipun tidak seluruhnya, dan tidak yang menyangkut akidah atau simpul keimanan) diturunkan mengikuti dinamika perkembangan sosial, khususnya perkembangan umat di masa Nabi s.a.w. Q.S. 2:106 menyatakan, "Ayat mana pun yang Kami hapuskan atau Kami buat terlupakan, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya."

Itu lalu menimbulkan teori tentang ayat-ayat yang kelihatan bertentangan (hanya karena orang tidak melihat dinamika tersebut), yang lalu diselesaikan dengan merunut kronologi masa turun masing-masing, kemudian ditentukan: mana yang menghapuskan (*nasikh*) dan mana yang dihapuskan (*mansukh*).

Yang khas ialah ini: ilmu itu mulai tumbuh sepeninggal Nabi s.a.w. Itu, di samping menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan ilmu-ilmu dari bibit-bibit warisan beliau, juga merupakan titik lemahnya: masalah *nasih-mansukh* itu tidak sempat dicekkan kepada Nabi. Semuanya hanya asumsi para sahabat yang mulia, kemudian para tabiin. Makin "jeli" seseorang, makin banyak ia bisa mendapati ayat-ayat yang "bertentangan". Lihatlah kasus Q.S. 2:102 dan Q.S. 64:16 itu sendiri: bagaimana ayat tentang "sebenar-benar takwa" bisa dipandang bertentangan dengan ayat "bertakwalah semampu kamu".

Karena itu, bangkitlah di belakang hari pendapat yang menolak *nasikh-mansukh* (juga untuk ayat-ayat hukum), yang menganggap pemilah-milahan seperti itu tak lain hasil pendekatan parsial. Bukan global, dengan mempertimbangkan konteks ayat dalam rangkaian. Sesuatu yang global, kita katakan, mengandung nuansa, tebal-tipis, kuat-lemah. Justru dari situlah dimungkinkan potensi tafsir yang, sambil mengingat konteks masa Nabi, berdialog dengan konteks aktual.

Takwa buat Imam

Adapun "tingkat-tingkat takwa" (lihat: *Bagaimana Menghapus Ayat*) itu rekaan Thabathaba'i sendiri. Mufasir ini percaya bahwa "sebenar-benar takwa" dalam arti "menaati Allah dan tidak membangkang, mensyukuri-Nya dan tidak kufur, dan selalu ingat, tidak pernah lupa" (yang dikatakan Rasyid Ridha sebagai "pembebanan sesuatu di luar kemampuan", dan itu tidak ada dalam Islam; lihat: *Takwa yang Bagaimana*) bisa diwujudkan, tapi hanya oleh "orang-orang top".

Pengertian seperti itu, menurut Thabathaba'i, memang tidak bisa ditarik dari ayat "Bertakwalah kepada Allah sepanjang kalian mampu". Sebab kemampuan manusia bertingkat-tingkat. Sering, satu tahap dari sekian tahapan takwa orang-orang spesial itu tidak cocok dengan pemahaman umum, yang lalu menganggap tahapan itu mustahil—sementara orang-orang puncak itu justru acap meninggalkan ukuran umum untuk "menghadapi, dengan minat besar mereka, hal-hal yang lebih berat dan lebih sukar" (Lih. Thabathaba'i, *Al-Mizan*, III:405).

Kata-kata seperti itu sudah sering kita dengar dari tokoh-tokoh sufi atau kalangan dekat tasawuf, yang karenanya sering, dengan maksud-maksud tertentu, disama-samakan dengan syiah. Jalannya, bisa jadi, ya. Tapi di dalam syiah, penanaman keyakinan seperti itu (gerak sebaliknya dari yang ditempuh kaum "tajdid", pembaruan keagamaan, yang mendakwahkan egalitarianisme keagamaan) diperlukan untuk mendukung sistem keimaman yang maksum (imam-imam yang tidak mungkin berbuat dosa, keliru, bahkan lupa), yang dijadikan salah satu dari lima rukun iman mereka dan identitas agama mereka.

> Menurut Saidina Ali, konon, tidak ada yang mengamalkan "sebenar-benar takwa" kecuali ahlul bait. Padahal Ali r.a. tidak pernah menyombong.

Lihatlah: Thabathaba'i menukil riwayat dari seseorang bernama Abdu Khair, yang mengaku bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib r.a. mengenai ayat "sebenar-benar takwa" itu. Jawab Saidina Ali, "Demi Allah tidak ada yang mengamalkannya kecuali *bait* Rasulullah. Kami mengingat-Nya, tidak melupakan-Nya..." dan seterusnya (Thabathaba'i, *ibid.*, 416).

Bait dalam kutipan di atas adalah *ahlul bait* (keluarga) Nabi s.a.w., yang oleh kaum syiah diberi pengertian hanya sebagai Ali, Fathimah, r.a., dan keturunan mereka. Dugaan bahwa "hadis" ini dibuat belakangan didasarkan pada pemakaian ungkapan "ingat dan tidak lupa" dan seterusnya itu, yang sudah lebih dulu populer. Andaikata Ali r.a. sendiri pernah mengucapkannya, tidak boleh tidak semua tafsir Sunni akan mencatatnya dengan girang.

Juga ucapan "tidak ada yang mengamalkannya kecuali *bait* Rasulullah" tidak ada dalam tafsir sunni. Selain pernyataan itu tentu saja tidak mengandung kebenaran, tidak pernah sebuah kitab hadis atau tafsir di kalangan Islam percaya bahwa dari Ali r.a. bisa keluar sebuah kalimat sombong, yang justru menunjukkan bahwa yang mengucapkannya bukan orang takwa. ■

Dari kacamata para penolak teori *naskh* itu (termasuk Abduh; lihat Rasyid Ridha, *Al-Manar*, IV:19), ayat yang berbunyi ("Ayat mana pun yang Kami hapuskan ..."; Q.S. 2:106—lihat di atas) itu pun bisa dilihat konteksnya dalam rangkaian. Dan itu tak lain pembicaraan tentang keyakinan antaragama. Sehingga "ayat yang dihapuskan" lebih cocok dipahami sebagai bukti-bukti kebenaran, atau mukjizat nabi-nabi, yang sudah diganti dengan bukti kebenaran Muhammad s.a.w. Atau, bicara antarkitab (lihat Q.S. 2:105), ungkapan "ayat yang lebih baik" dalam Q.S. 2:106 itu cocok dipahami sebagai Al-Quran. Jadi, bukan hapus-menghapus di dalam Quran sendiri.

> Makin "jeli" seseorang, makin banyak ia bisa melihat ayat-ayat yang "bertentangan". Tapi betulkah?

Namun, teori *naskh* itu, sebagaimana semua yang "lebih mudah dipegang", sudah merambah sedemikian rupa. Ja'far Shadiq, misalnya, salah satu guru Syafi'i, yang oleh umat Syi'ah 12 Imam dijadikan imam ke-6, mereka riwayatkan sebagai juga menganggap ayat "sebenar-benar takwa" di atas dihapuskan ayat "sepanjang kalian mampu". Yang menarik, Husain Thabathaba'i agaknya mewakili sebuah perkembangan—ketika ia mencoba meyakinkan bahwa penghapusan (*naskh*) yang dimaksudkan Imam Ja'far "bukan seperti yang dinukil dari para mufasir itu, yakni makna yang jelas ditolak zahir Al-Kitab". Yang dimaksudkan Imam, katanya, adalah "tingkat-tingkat takwa" (lihat: *Takwa buat Imam*).

Begitu susah rupanya pembaruan tafsir di kalangan umat yang, tidak seperti kita, sudah membuat sistem keimaman yang "maksum". Thabathaba'i sudah tentu tidak berani melepaskan diri. Yang berani ia lakukan adalah takwil dalam arti penyeret-nyeretan kalimat Ash-Shadiq, satu kebiasaan yang kemudian tidak mengherankan pemakaiannya dalam menafsirkan Quran sendiri. Masalahnya, yang dikatakan Ja'far, seperti yang diriwayatkan, jelas: "Sudah dihapus (*mansuukhah*)." Penghapusnya? Jawab beliau: "(Ayat) Bertakwalah kepada Allah sepanjang kalian mampu" (Thabathaba'i, *Al-Mizan*, III:417). ■

Ketokohannya adalah "jangkar" pemberontakan yang meletus di Aceh pada September 1953. Dialah Daud Beureu'eh, yang memproklamasikan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya sebagai bagian Negara Islam Indonesia. Sejarah panjang pergolakan di Aceh menunjukkan, betapa militan dan nasionalisnya orang Aceh. Hamid Ahmad dan Iqbal Setyarso dari *Panji* menyajikan fragmen-fragmen kiprah tokoh Aceh ini berdasarkan sejumlah bahan sekunder dan wawancara.

DOK. PRIBADI

Teungku Muhammad Daud Beureu'eh

Dari Aceh untuk Bangsa

Daud Beureu'eh keluar menemui kami, tersenyum dan tampil rapi dengan celana panjang ketat, kemeja putih, dan peci beludru hitam. Kami segera duduk mengelilingi meja teh. Sembari memperkenalkan diri, saya memandangi dua permadani dinding bergambar dari Arab, beberapa gambar kecil masjid, dan ruangan yang sangat bersih. Ruangan ini memperlihatkan kesederhanaan, kesejahteraan, dan disiplin.

Daud Beureu'eh lebih tampak sebagai pensiunan perwira militer ketimbang ahli agama, yang ditandai oleh gelar teungku-nya. Tubuhnya yang kurus dan kuat tegak tapi santai di kursinya. Dari bawah pecinya tersembul rambut kelabu yang dipangkas pendek, kontras dengan wajahnya yang muda dan coklat kemerahan. Bicaranya lugas, tapi tatapan matanya tampak kurang yakin, seperti orang awam yang menghadapi problem membingungkan. Tiba-tiba ia mengungkapkan pikirannya dengan kegairahan yang nyaris kekanak-kanakan. "Anda harus tahu bahwa kami di Aceh ini punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh menjadi negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern. Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu."

Kutipan di atas adalah secuil catatan perjumpaan peneliti Barat, Boyd R. Compton dengan Daud Beureu'eh pada Juli 1953. Perjalanan plus perburuan data yang memakan waktu sekitar 10 hari itu membuatnya berkesimpulan, keinginan Aceh terhadap kemerdekaan tidaklah sebesar hasratnya akan otonomi pemerintahan lebih luas dan pengembangan ekonomi lebih pesat. Kata Boyd, sukar membayangkan apa yang akan terjadi seandainya keinginan-keinginan ini tak terpenuhi. Ketidakpuasan dan kekecewaan terlihat jelas di Aceh dan homogenitas internal daerah ini memungkinkan hasrat akan kemerdekaan segera diterjemahkan menjadi aksi terorganisasi.

Daud mengesankan seorang berpandangan modernis. Tengok saja anggapannya soal guru tempo dulu. Daud menyalahkan para guru agama yang masih percaya takhayul, yang berpandangan bahwa potongan rambut dan pakaian ala Barat haram menurut hukum Islam. Menurut dia, tidak semua kebiasaan orang Barat itu terkutuk. Semua itu tak lain karena kejumudan berpikir dalam hukum Islam. "Kemajuan di tahun-tahun ini menjadikan mereka tampak dungu."

Daud Beureu'eh, yang lahir pada 1899 di Desa Beureu'eh, tepatnya di Distrik Keumangan (kini bernama Mutiara), dekat Sigli, mula-mula adalah seorang tengku, seorang kiai, seorang ahli agama. Sejak kecil ia memang bergelimang dengan pendidikan agama di *dayah-dayah*, yaitu lembaga tradisional yang memberikan pengajaran agama Islam. Dia pun sempat pula mengajar di sejumlah *dayah* di Pidie dan Aceh Utara, sebelum akhirnya ia mendirikan Madrasah *Sa'adah Abidiyah* di Pidie.

Madrasah adalah nama sekolah Islam jenis baru yang memadukan metode tradisional *dayah* dengan metode modern, seperti yang ada di sekolah-sekolah Belanda. Para

DOK. PRIBADI
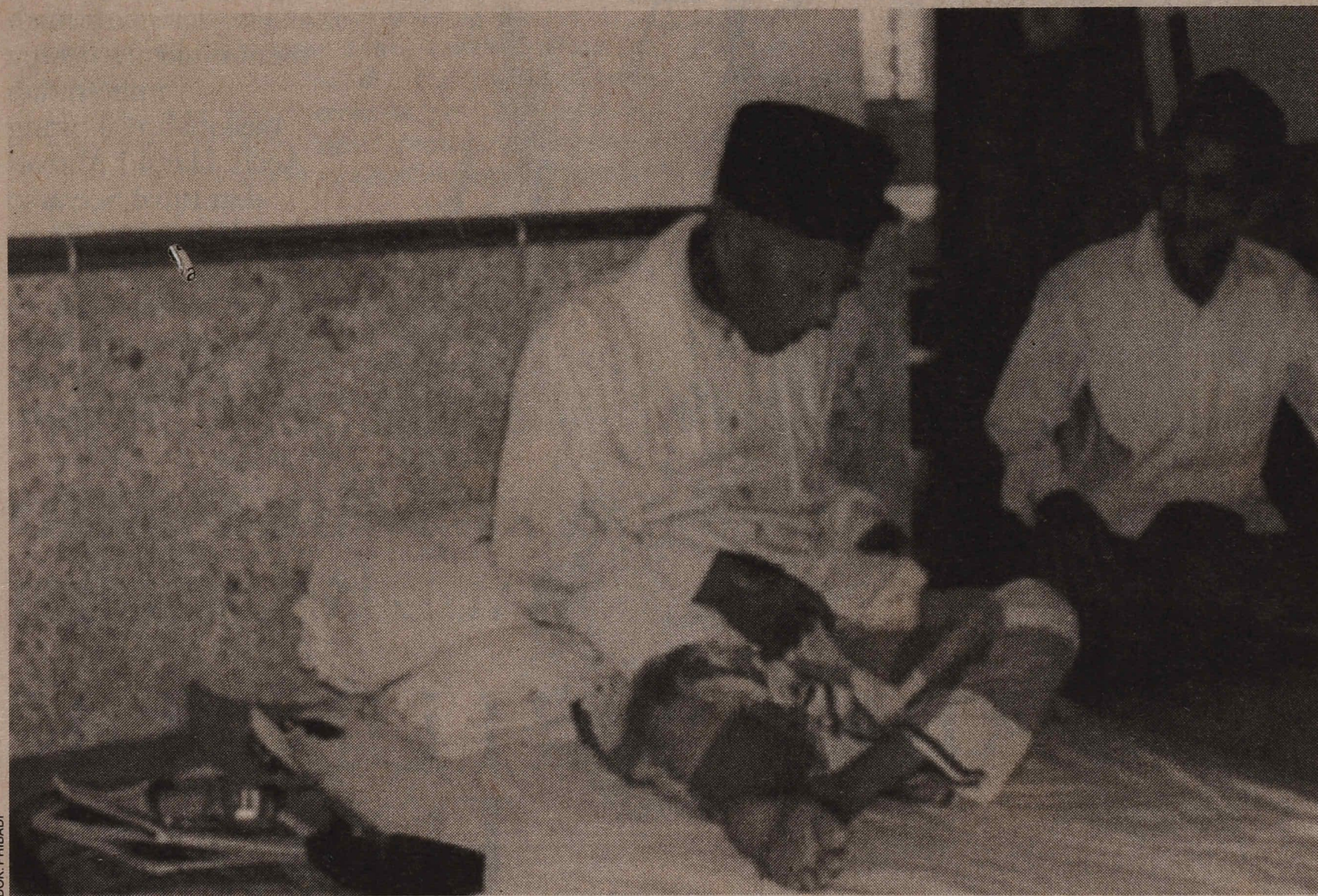
Teungku Muhammad Daud Beureu'eh (kiri): Demi syariat Islam di Aceh

DOK. PRIBADI
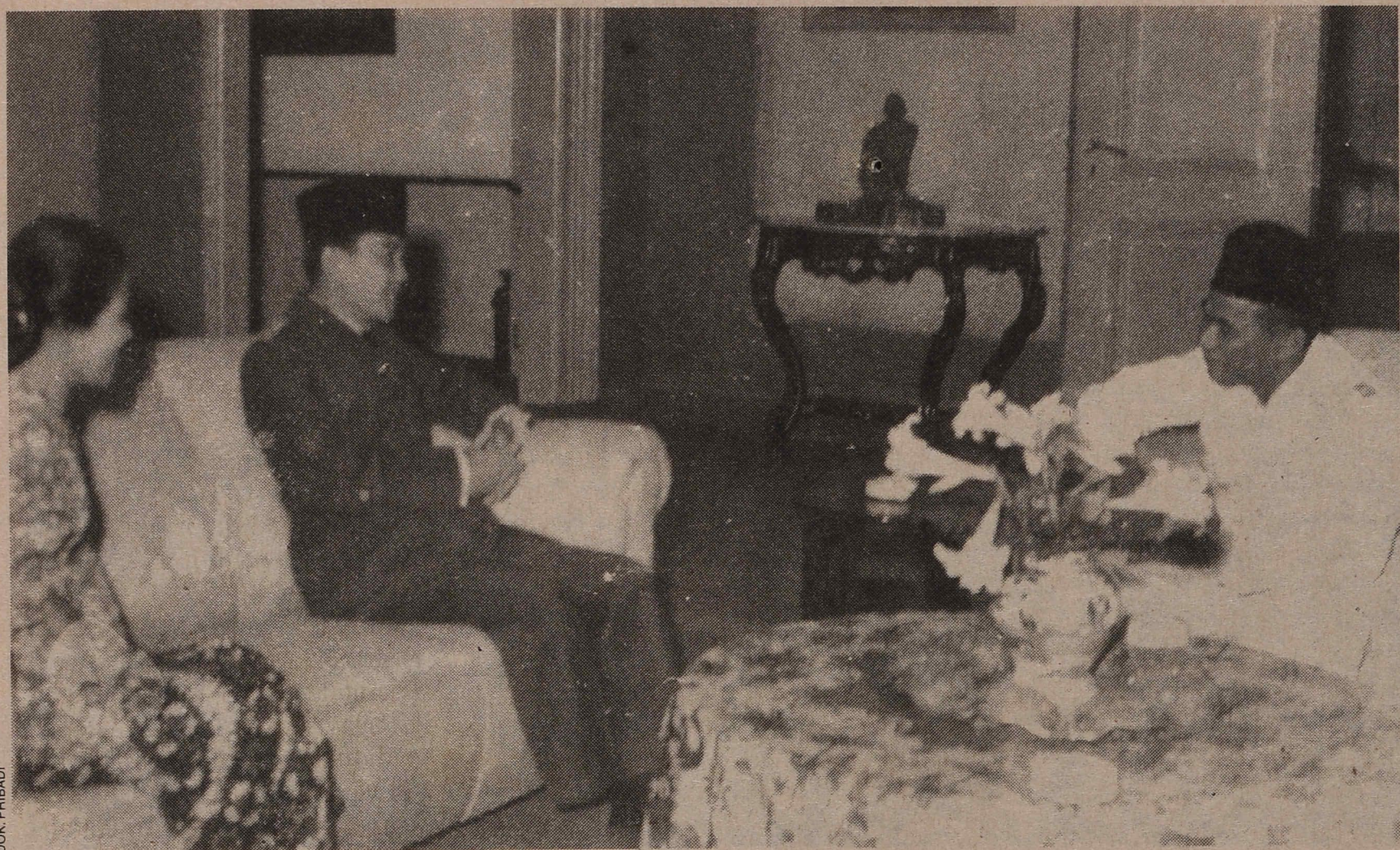
Bersama Bung Karno: Janji berbumbu tangis

gurunya diambil dari alumni lembaga pendidikan di Sumatera Barat.

Madrasah yang didirikan Daud bukan yang pertama kali ada di Aceh, karena sekolah demikian sudah ada pada 1920-an. Bahkan pada akhir dasawarsa itu sudah mulai menggantikan *dayah-dayah* yang bersifat tradisional tadi.

Madrasah juga fenomena. Fenomena dari gerakan pembaruan Islam di Aceh, satu gerakan yang mulai merambah Indonesia pada umumnya sejak awal abad ini. Seperti halnya Muhammadiyah dan Persatuan Islam di Jawa, para ulama pembaru di Aceh juga menginginkan pemurnian Islam dari segala macam bid'ah, khurafat, dan takhayul. Mereka pun menyerang praktek pemujaan kepada orang-orang suci, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tak cuma mendirikan madrasah, kaum reformis Islam Aceh juga kerap menyelenggarakan rapat-rapat umum yang besar di seluruh Aceh. Seruan mereka menghubungkan cita-cita dan tujuan reformis Islam dengan pembaruan sejarah masyarakat Aceh. Mereka berbicara tentang zaman keemasan yang diidentikkan dengan Kesultanan Aceh pada puncak kekuasaannya. Bagi mereka, hanya hukum Islam yang bisa mempersatukan seluruh umat Islam dan kemerosotan yang mereka alami selama ini tidak lain karena tiadanya kepatuhan terhadap hukum agama mereka ini.

Daud Beureu'eh bukan hanya bagian tapi pemimpin gerakan. Ketika memasuki gelanggang politik lewat Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikannya pada 1939, ia membangun cita-cita dan konsep kenegaraannya atas dasar ideologi keagamaan.

Dikecewakan. Daud Beureu'eh adalah contoh orang yang kecewa karena merasa loyalitasnya bukan cuma tak dihargai, tapi juga telah dipermainkan. Sejak awal ia telah mengikatkan dirinya secara teguh kepada cita-cita kemerdekaan nasional Republik Indonesia. Dia, seperti halnya para ulama lainnya, merasa Aceh sebagai bagian dari Indonesia secara keseluruhan, meski daerah ini memiliki keunikan sendiri karena dibanding bagian Indonesia lainnya, Aceh paling singkat dijajah pemerintah asing.

Dukungan terhadap Republik Indonesia itu, misalnya, tampak pada pernyataan ulama seluruh Aceh yang dia tanda tangani bersama tiga ulama terkemuka lainnya (satu pemimpin PUSA, dua lainnya ulama konservatif) pada 15 Oktober 1945. Pernyataan ini menyerukan kepada rakyat Aceh agar bersatu di belakang "pemimpin besar kita Soekarno" dalam perjuangan melawan kembalinya Belanda ke "tanah air kita Indonesia". Bahkan, ketika pada 1949 ada usul yang memungkinkan Aceh membentuk pemerintahan sendiri dalam sistem negara federal yang didukung Belanda, komitmen Daud terhadap Republik tetap tak tergoyahkan. "Tidak ada perasaan kedaerahan di Aceh. Jadi kami tidak mempunyai niat untuk mendirikan Negara Aceh Besar karena kami berjiwa republikan," katanya menanggapi usulan itu.

Daud bersama PUSA-nya juga beraksi. Menyusul proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, di Aceh pecah revolusi sosial. Para pemuda PUSA bergerak mengganyang para *uleebalang* (kepala-kepala adat yang kekuasaannya dihidupkan kembali oleh penjajah Belanda dulu) karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Eric Morris, peneliti Barat, menulis dalam *Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam*, setelah hengkangnya Jepang, para *uleebalang* cenderung mengharapkan kembalinya Belanda bersama sekutu guna mengembalikan supremasi mereka. Pada kenyataannya, aksi-aksi peng-

DOK. PRIBADI

Bersama Jajaran Gubernur Militer: Untuk Indonesia merdeka

ganyangan oleh para pemuda PUSA, yang mendapat dukungan penuh dari Daud, ternyata berhasil mencegah Belanda, yang sudah bercokol di Sabang, untuk masuk lebih jauh ke Aceh.

Aceh pun menjadi wilayah yang tak terjamah kembali oleh penjajah ketika Jawa dan daerah-daerah lain diduduki oleh Belanda. Kenyataan ini memungkinkan para pedagang Aceh melakukan aktivitas bisnis dengan mengekspor berbagai hasil bumi (karet, minyak kelapa sawit, kopra, buah pinang, dan lain-lain) ke Malaya. Berkat pengawasan PUSA yang ketat, perdagangan ini dapat berlangsung mulus meski ada blokade Belanda di Selat Malaka sejak 1947. Dan tentu saja, perdagangan ini memberi keuntungan yang sangat besar mengingat tingginya harga komoditas tersebut di negeri seberang. Keuntungan itu kemudian, oleh para pedagang Aceh, disumbangkan untuk membantu perutusan Republik ke luar negeri dan pada 1948 memberikan devisa untuk membeli dua pesawat terbang.

Tapi itulah. Sebenarnya sejak awal Daud dan kawan-kawan memiliki posisi yang pada dasarnya berbeda dengan para pemimpin Republik di pusat yang rata-rata nasionalis sekuler. Ketika cita-cita negara Islam makin meredup prospeknya, apalagi ketika jabatan-jabatan tinggi banyak diisi oleh orang-orang yang mereka golongkan sebagai kaum kiri, mereka mulai kecewa. Lebih-lebih, seperti dicatat Eric Morris, setelah Daud dan para eksponen revolusi sosial lain mulai disingkirkan dari pemerintahan daerah, digantikan oleh para *uleebalang*. (Karena, di satu pihak, para *uleebalang* menguasai bahasa Belanda dan di pihak lain ada perbedaan "bahasa" antara Daud yang terdidik secara tradisional dan orang-orang pusat yang terdidik secara Barat).

Daud merasa beberapa kali dikhianati. Misalnya, pada 1947, Soekarno datang ke Aceh, menjumpai para tokoh Aceh, mengajak mereka bergabung dengan Republik Indonesia. Daud menyatakan setuju sambil mengajukan syarat: berlakukan syariat Islam, minimal di wilayah Aceh, dan perjuangan harus selalu dilandasi Islam. Soekarno tak berkeberatan. Malah menguatkannya dengan mengucapkan "*wallahi, billahi*", atau "demi Allah", dengan suara yang mantap. Dia pun berjanji akan memberikan hak kepada Aceh untuk mengatur wilayahnya berdasarkan syariat Islam.

Daud lalu minta Soekarno menuliskan janjinya pada selembar kertas. Yang diminta dengan diplomatis mengatakan, "Ah, masa Kakanda tidak percaya, untuk apa saya jadi presiden?" sembari sesenggukan dan memeluk Daud. Yang dipeluk pun langsung luluh, hilang keinginannya meminta pernyataan tertulis. Ia sudah keburu iba dan percaya tak mungkin Soekarno yang muslim nasionalis itu ingkar janji. Lantas hanya berpegang janji lisan itu, keesokan harinya Daud mengumpulkan ulama seluruh Aceh untuk menyerukan fatwa perjuangan dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Tapi Soekarno ingkar janji. Aceh yang seharusnya menjadi provinsi otonom, akhirnya melalui UU No.10/1948 bertanggal 5 April 1948, bersama Sumatera Timur dan Tanah Karo, dilebur menjadi Provinsi Sumatera Utara. Sebelum itu pun, teritorium militer Aceh dibubarkan, dilebur ke dalam teritorium Bukit Barisan Sumatera Utara. Bahkan sesudah itu, pemerintah RI menangkap beberapa tokoh pejuang Aceh dan mengambil paksa kendaraan dinas mantan Gubernur Militer/Gubernur Sipil Daud Beureu'eh.

Sejauh itu, Daud Beureu'eh masih bisa bersabar. Selaku

Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, ia diundang pada konferensi suku bangsa Sumatera, saat Belanda menguasai Yogya. Forum tertutup ini menyerukan ajakan untuk tak percaya pada Republik Indonesia. Ada tiga opsi yang ditawarkan: menerima ajakan bergabung dalam negara boneka, mendirikan sendiri negara Aceh, atau tetap bergabung dalam Republik Indonesia. Daud memilih opsi ketiga. "Hanya ada satu negara: negara Republik Indonesia dan hanya ada satu perang: perang sabil, membela Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Jangan Mengelabui. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri M. Natsir, pada 28 Desember 1950, ia menulis, "Mereka (abdi negara RI) sanggup bersabar sesuai pesan Yang Mulia. Akan tetapi mereka tetap berpendirian akan meletakkan jabatannya bila tuntutan otonomi Aceh tidak dipenuhi." Daud tetap konsisten, tak hendak menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian Sumatera Utara. Sejauh itu, Daud masih seorang yang menaruh harapan atas adanya sikap bijak pemerintah RI. Pada 8 Oktober 1951, Daud menyurati Presiden Soekarno, menyoal adanya penangkapan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh. "Jikalau mau pemerintah menangkap serta membunuh kami, tak usah mengemukakan alasan-alasan bohong dan mengelabuhi mata....bahwa dalam dada tiap rakyat Aceh ada tiga tingkatan pikiran sebagai pusaka pribadi turun-temurun: sabar, tak menghiraukan, dan melawan."

Tapi pada 1953 Soekarno dalam pidatonya menyatakan ketidaksukaannya akan ide pemberlakuan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam bergantung pada hasil Pemilu 1955. Ini sudah jelas bertolak belakang dengan janji kepada "kakandanya" tadi. Apalagi, Daud melihat, RI sudah condong ke kiri sehingga Daud dengan keras menyebut Indonesia sebagai Republik Indonesia Komunis (RIK).

Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Kesatuan, 1951, Daud ditawari jabatan gubernur kehormatan dan diminta menetap di Jakarta sebagai penasihat di Kementerian Dalam Negeri, tapi ia menolak. Ia bahkan tak mau datang ke Jakarta. Kemudian, setelah memimpin Musyawarah Ulama Medan yang berlangsung pada April 1953, ia melakukan perjalanan keliling Aceh, memberikan ceramah-ceramah provokatif bernada mendukung ide negara Islam. Daud akhirnya kembali ke desanya, Beureu'eh. Di tempat inilah Daud ditemui oleh Compton, peneliti tadi.

Di Beureu'eh, Daud tetap aktif mengisi hidupnya dengan amaliah nyata. Pintu rumahnya selalu terbuka bagi mereka yang bermaksud silaturahmi, sekadar berbincang atau meminta Daud membantu memecahkan masalah-masalah pelik kemasyarakatan, perselisihan, dan soal keagamaan. Ia masih seorang teungku yang cahayanya menerangi sekitar. Wibawanya amat besar di mata warga desa dan ulama Aceh.

Kesibukan hidupnya terutama dicurahkan untuk mengunjungi desa-desa tetangga dan menerima delegasi dan tamu-tamu di desanya sendiri. Hidup semacam itu memang merangsang sorot kebahagiaan tersendiri dalam raut wajah Daud Beureu'eh, ketimbang menjadi orang terhormat di Jakarta, yang teramat jauh dari kampungnya, dari rakyat Aceh. Apalagi, selama di Jakarta konon Daud dilarang berhubungan dengan masyarakat Aceh.

DOK PRIBADI
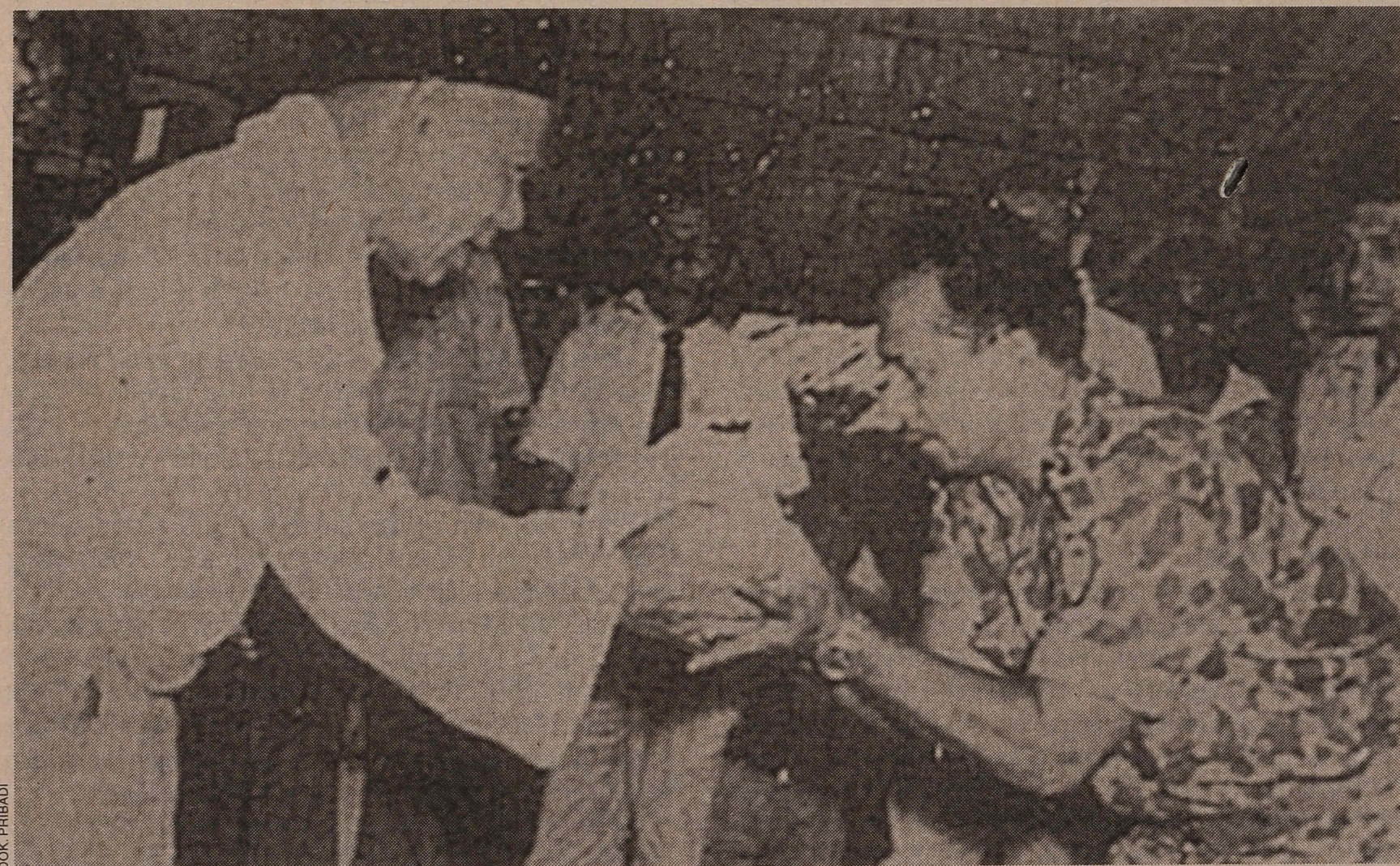
Kembali ke pangkuan RI: Setelah mengirim surat "dakwah"

Tenggara Timur yakni sebanyak 1.616 kasus per

Genangan air : Jadi sarang nyamuk

DOK. PRIBADI

Mengecek pasukan meriam: Romantisme Iskandar Muda

sekolah lama yang dikelola para anggotanya. Tampak, pembaruan semacam ini sudah berpengaruh di Aceh sebelum penyerbuan Jepang. Kekalahan Jepang membuat langkah perubahan menjadi lebih cepat lagi.

Selain mendorong perluasan wawasan rakyat Aceh, PUSA punya kesungguhan berkuasa selama revolusi sosial berdarah dan singkat, yang meletus di Aceh tak lama setelah Jepang menyerah. Selama masa penjajahan, Belanda memecah kekuasaan Sultan Aceh yang kalah dan membagi-bagikannya kepada sejumlah perwira militer yang kurang menonjol (hulubalang).

Belanda memerintah secara efektif melalui tuan-tuan feodal kecil ini. Rakyat Aceh merasakan dirinya di bawah tindasan langsung oleh orang Aceh sendiri. Ketika Jepang menyerah, terjadi pembebasan sejumlah besar pembangkang yang disekap. Para pemimpin agama di Aceh, sebagian besar adalah anggota PUSA, menangkap momentum ini.

Lokomotif Para Teungku. PUSA didirikan Daud pada Mei 1939, bersama tokoh Islam Aceh seperti Teuku Haji Chik Djohan Alamsjah, Teuku Mohammad Amin, dan Teungku Ismail Jacub. PUSA berkembang menjadi sentral para *teungku* dalam perjuangan mereka melawan elite tradisional—kepala wilayah atau *uleebalang*—yang menggunakan gelar *teuku*.

PUSA awalnya bukanlah institusi ekstrem anti-Belanda atau anti-*uleebalang*, karena di antara pengelola atau penasihatnya terdapat juga *uleebalang*. Namun, situasi berkembang terus, sampai pada suatu titik, PUSA menjadi organisasi nasionalis radikal. Pada hari-hari akhir Hindia Belanda ia tumbuh menjadi organisasi nasionalis murni, yang tujuannya tidak hanya mengusir Belanda, tetapi juga para kepala adat setempat, *uleebalang*, yang digunakan pemerintah kolonial menjadi alat untuk memerintah daerah itu. PUSA pada masa itu menjadi satu-satunya gerakan nasionalis yang sangat berarti di Aceh.

Dari segi organisasi, PUSA merupakan federasi longgar yang meliputi sebagian besar guru dan tokoh agama pedesaan Aceh. Sumber kekuatannya adalah wibawa para anggotanya di desa-desa mereka dan, sampai batas tertentu, kekayaan anggota seperti Daud Beureu'eh, yang memiliki sejumlah toko atau giat berbisnis.

Sebelum perang, PUSA mengupayakan tujuannya terutama di bidang pendidikan. Di bawah kepemimpinan Daud, organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah agama baru, yang meliputi pengajaran ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum, dan mulai memperbarui kurikulum

Sosok Sabar. Menilik kerasnya benturan sosial di Aceh, orang akan mengira, Daud Beureu'eh itu seorang temperamental dan kurang sabaran. Siapa pun yang pernah bersua dengannya akan berkomentar lain. Daud Beureu'eh justru seorang yang memiliki kesabaran dan ketenangan, kata Boyd, yang nyaris sempurna. Ia terang-terangan mengecam pemerintah Indonesia atas perbuatannya terhadap persoalan warga Aceh. Ia juga menyarankan sangat blak-blakan tindakan untuk memperbaiki situasi ini. *Toh*, ia tak sedikit pun memperlihatkan kobaran hasrat. Ia cuma sering berucap, "Yah, kita lihat saja nanti".

Gaya bertutur Daud, dalam suasana yang normal, sesungguhnya amat menarik. Ia bisa membuat pendengarnya tersenyum, misalnya saat menceritakan kisah mengenai guru-guru agama masa silam yang pemikirannya terbelakang.

Situasi di Aceh mudah sekali menjadi rawan karena sikap pemerintah Indonesia yang masih belia. Orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat revolusi dan keadaan ekonomi yang mengecewakan, mempertajam perasaan tak puas di Aceh. Pemerintah pusat tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa PUSA berkemampuan mengendalikan dan memanfaatkan sentimen rakyat ini. Perlu pula diingat bahwa pimpinan puncak PUSA telah kehilangan posisi kekuasaan yang mereka pegang selama revolusi.

Seberapa seriuskah kerawanan sosial di Aceh pada 1950-an itu? Daud Beureu'eh mengatakan, mencuatnya desas desus ketidakpuasan yang pecah di Aceh diembuskan kaum feodal yang kehilangan kekuasaan selama

DOK PRIBADI

Bersama keluarga: Sosok nan sabar

revolusi. Meski begitu, orang akan heran, mengapa para tokoh kuat PUSA menyingkir ke pegunungan untuk melancarkan kampanye gerilya melawan pemerintah. Padahal posisi runding mereka dalam berhadapan langsung dengan pemerintah pusat sekarang ini cukup kuat untuk menegaskan keinginan mereka secara damai.

Al Chaidar, penulis buku *Aceh Bersimbah Darah* mengatakan, kehidupan Aceh, termasuk dalam kurun "kepemimpinan pemberontakan" Daud Beureu'eh, adalah karena Aceh punya kaum intelektual yang menjadi "sumur *watershed*", sumber berbagai inspirasi. Di samping kelompok kaum cendekiawan yang merupakan sumber pemikiran politik.

Persaingan, dalam konteks perpolitikan sebagaimana diekspresikan RI atas Aceh, membuat pejuang, kaum mujahidin memilih lapangan perjuangan *glee* (hutan rimba) dan orang-orang-orang yang melakukan perjuangan ini dinamakan *ureung glee* (orang yang bergerilya di hutan).

Pertempuran di gunung itu hampir tak menyiratkan konsep wacana ideologi apa yang mereka perjuangkan. Mungkin sekadar menyimplikasikan persoalan, maka konsep negara yang dikehendaki Daud Beureu'eh dan pengikutnya adalah sesuatu yang jauh berbeda atau berlawanan dengan konsep yang selama ini dijalankan oleh Republik Indonesia. Dari situ perlawanan menjadi tahan lama.

Tentang Pemberontakan. Berbeda dengan pemberontakan lain yang diilhami Darul Islam, pemberontakan yang khusus ini berakhir secara damai melalui musyawarah ketimbang kekalahan militer. Hal ini terjadi sesudah pemerintah pusat pada 1959 akhirnya memenuhi tuntutan yang gigih dari rakyat Aceh dan memberikan daerah itu status Provinsi Istimewa, dengan otonomi di bidang agama, hukum adat, dan pendidikan. Tokoh besarnya, Daud Beureu'eh, merupakan salah seorang pemberontak terakhir yang turun gunung pada 1962 dan bergabung kembali ke pangkuan RI, setelah tuntutannya agar Aceh dijadikan "daerah istimewa" dengan menjalankan syariat Islam sudah ditanggapi.

Tuntutan Daud itu tercantum dalam surat "Dakwah"-nya dengan kop Wali Negara Republik Islam Aceh, tertanggal 5 November 1961. Salah satu alasan yang dijadikan dasar bagi tuntutan tersebut adalah "janji presiden sebagai panglima tertinggi di hadapan para alim ulama Aceh di Kutaraja pada 1947 yang akan memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk hidup dan mengatur kehidupan kemasyarakatannya sesuai dengan syariat agama mereka". Alasan lainnya: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Seperti ditulis tabloid *Aliansi Keadilan* (edisi 9-15 Agustus 1999), pada 4 Maret 1980 Daud berkirim surat kepada Presiden Soeharto. Surat ini berisi protes karena ia telah dibawa ke Jakarta oleh alat negara RI setelah disuntik bius yang melewati dosis. Ia juga menyoal ketidakjelasannya selama dua tahun: sebagai tahanan rumah atau orang bebas.

Menurut kesaksian Nur-el Ibrahimy, Daud diculik lantaran kecurigaan pemerintah atas keterlibatannya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Tiro. Untunglah surat itu ditanggapi oleh Pangkopkamtib Sudomo sehingga ia bisa kembali ke Aceh dan wafat di sana. ■

Rubrik ini terbuka bagi pembaca untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah Islam dan kemasyarakatan. Pertanyaan dapat dikirim melalui surat, faksimile, dan internet. Jawaban akan diberikan oleh tim muzakarah *Panji*.

KOMISI DAN DEBT COLLECTOR

Setiap hari kita sekarang disuguhi berita tentang skandal Bank Bali. Koran, majalah, tabloid, televisi. Begitu menggebunya sehingga berita-berita itu seperti mengepung kita, menggedor-gedor kesadaran batin kita. Ada banyak tanya yang lantas mencuat, di sela-sela kegusaran kita. Di tengah krisis ekonomi yang mencekik leher kita, leher rakyat kebanyakan, ternyata ada segelintir orang yang berpesta. Begitukah cara mereka, selama ini, menghambur-hamburkan kekayaan bangsa ini untuk kepentingan golongan tertentu, untuk kelanggengan kekuasaan mereka?

Ada juga beragam tanya menyangkut hukum Islam, dan itulah yang hendak saya mintakan jawabnya pada kesempatan ini. Ustadz, bagaimana Islam memandang praktek "surat sakti" pejabat pemerintah dalam urusan utang-piutang sehingga ada kucuran kredit yang sebagiannya kemudian menjadi bagian komisi si pejabat? Atau, si pejabat menyokong praktek debt collector *yang untuk jasa itu dia juga mendapat komisi? Bolehkah menagih utang dengan cara paksa, seperti dijalankan para* debt collector?

Nana
Ciputat, Tangerang

JAWABAN
DR. H. FATHRURRAHMAN DJAMIL
DEKAN FAK. AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Kita mulai dari proses utang-piutang. Dalam wacana Islam, utang-piutang termasuk hal yang harus diselesaikan. Al-Quran mengingatkan, kalau kita bertransaksi utang-piutang, hendaknya dicatat. Kalau tidak, harus ada saksinya. Hadis Nabi menyatakan, orang yang kaya, atau berkecukupan tetapi mengulur-ulur utang termasuk kategori zalim. Dalam hal ini yang berkewajiban adalah kreditor kepada debitor. Bahwa ada proses perantara yang mengembalikan, dalam Islam ada yang disebut *khiwalah*, yakni mengalihkan utang kepada orang lain, tetapi yang mendapat alihan utang memang punya kewajiban kepada yang bersangkutan. Misal: si A berutang pada si B, si B berutang kepada si C, sedangkan si A berutang kepada si C atau sebaliknya. Si A yang berkewajiban membayar utang kepada si B mengalihkan kewajibannya kepada si B. Pada dasarnya, langsung atau tidak langsung, penyelesaian utang-piutang itu boleh dalam Islam, asal kewajiban terselesaikan. Masalahnya menjadi lain, kalau dikaitkan dengan posisi pemerintah yang menjadi "komisioner pengalihan utang".

Harus juga dipahami, tugas pemerintah, pejabat di Departemen Keuangan misalnya, adalah mengendalikan keuangan negara. Dia tidak punya hak sama sekali mencari keuntungan dari sana. Justru dia berkewajiban menyelesaikan berbagai urusan menyangkut keuangan negara. Bahwa dia mendapat upah, gaji sesuai tugas pokoknya, tak ada masalah. Tetapi kalau dalam urusan pencairan dana, buat perbankan misalnya, dia memperoleh sesuatu atau bahkan berusaha memperbanyak perolehan, ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Ini tidak bermoral. Islam melihatnya sebagai perbuatan *bathil* (tak benar). Bayangkan saja, orang yang mestinya bertugas mengendalikan keuangan malah memperkaya diri, katakanlah dengan dalih membantu atau menjadi *debt collector* dan sejenisnya, ini tidak bisa dibenarkan.

Hadiah hanya bisa disebut legal, atau halal dalam pengertian Islam kalau tak ada hubungan tertentu dengan tugasnya. Misalnya karena prestasi yang bersangkutan. Tetapi kalau ada indikasi bisnis dengan yang bersangkutan, bisa masuk kategori *risywah*, suap, dan ini dilaknat.

Khalifah Umar ibn Abdil Aziz, seorang penguasa yang sangat adil dan bersih di awal abad ke-2 H, pernah menolak hadiah seseorang. "Bukankah Rasulullah dulu berkenan menerima hadiah dan menganjurkan kita agar tidak menolak pemberian orang?" orang itu bertanya. "Benar. Pemberian waktu itu memang murni hadiah, tapi sekarang itu *risywah*," jawab sang Khalifah.

Umar ibn Abdil Aziz amat selektif menerima sesuatu dari siapa pun. Dia sampai mengatakan kepada pejabat-pejabatnya, "*Min aina laka haadzaa* (Dari mana harta yang kamu peroleh itu)?" Ini demi membersihkan pejabatnya dari praktek korupsi dan kolusi. Kalau ada yang memperoleh tambahan di luar gaji, dia akan segera mempertanyakannya.

Soal *debt collector*, apalagi dengan kekerasan dalam melakukan penagihan, harus dipahami bahwa utang itu masalah perdata. Dia tak ada hubungannya dengan kekerasan. Pemerintah menegakkan aturan main, misalnya *ruislaag* dalam bahasa Belanda, atau sita jaminan. Dalam urusan pinjam-meminjam Al-Quran menganjurkan ada jaminan yang bisa diserahterimakan. Kalau yang berutang meleset atau melalaikan, jaminannya bisa diambil. Ini bisa dipaksa, sebatas proses sita jaminan. Kalau menggunakan kekerasan, Islam tidak membenarkannya. ■

PROSPEK YANG TERLAMBAT DISADARI

Setelah menyadari prospek bisnisnya, Mardani pun serius menekuni bisnis kerupuk kulit. Bermodalkan Rp3 juta dari YAU, ia bisa meraih omzet Rp1,4 juta per hari.

Semula, usaha kerupuk kulit itu, bagi Mardani, 46, sekadar sambilan saja. Maklum, objekannya cukup banyak menghasilkan uang sehingga usaha kerupuk pun hanya sekadar tambahan penghasilan. Dengan memanfaatkan halaman samping rumahnya untuk tempat produksi, bisnis kerupuk kulit Mardani seperti jalan di tempat sejak tiga tahun lalu.

Modalnya memang terbatas, di samping dia sendiri tidak serius. Bahkan, penanganan usaha itu lebih banyak diserahkan kepada adiknya. Maka wajar saja bila omzetnya tidak berkembang dari tahun ke tahun, hanya berkisar pada angka Rp300.000-an per hari. Dari omzet ini ia paling-paling cuma meraih keuntungan bersih Rp10.000.

Belakangan Mardani mulai menyadari prospek bagus bisnis kerupuk kulit itu. Permintaan dari restoran dan pasar meningkat dari hari ke hari. Maka Mardani pun membuat keputusan bisnis besar: menghentikan segala kegiatannya yang lain dan serius menangani usaha kerupuk kulit.

DOK. YAU

Mardani menjemur kerupuk kulit: Keputusan yang tepat

Namun, ganjalan klasik menghadang: soal modal. Untunglah ada jalan keluar. Seseorang memberitahukan padanya kemungkinan pinjaman modal kepada Yayasan Amanah Ummat (YAU) yang memiliki progran Pundi-Pundi Umat bekerja sama dengan *Panji*. Lewat proposal sederhana Mardani mengajukan pinjaman sebesar Rp3 juta. Proposal ini disetujui dan dia harus mengangsur sebesar Rp200.000 per bulan. Oke, Mardani setuju dan siap berusaha mati-matian di bisnis ini.

Hasilnya memang nyata. Jika sebelumnya hanya menghabiskan dua lembar kulit kerbau sebagai bahan baku, kini ia memerlukan enam lembar kulit setiap harinya. Omzetnya pun melejit menjadi sekitar Rp1,4 juta per hari. Setelah dikurang biaya produksi, ia bisa mengantongi Rp105.000 per hari. Sebulan ia bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp2,6 juta. Maka cicilan sebesar Rp200.000 sebulan tak berat baginya. Mardani pun makin semangat menggarap bisnisnya.❐

A. NORI

PUNDI-PUNDI UMAT

Zakat-Infaq-Sadaqah (ZIS) — **Sampai 13 Agustus 1999**

No	Nama	Nilai (Rp)
	Jumlah sampai minggu sebelumnya	**405.985.800**
1.	**Hamba Allah,** Gd. Batavia, Jakarta	4.000.000
2.	**Iwansayah Wibisono,** Melbourne, Australia	25.000
3.	**Rizal Munawar,** Irian Jaya	200.000
4.	**Pujayanto,** Wisma Adhi Graha Lt. 5, Gt. Subroto, Jakarta	50.000
5.	**Ibu Ani,** Jakarta	35.000
6.	**Irawati Wardani,** Jakarta	150.000
7.	**Hamba Allah,** Jakarta	25.000
8.	**Soehari Sargo,** Jakartal	50.000
9.	**Deni,** Jakarta	50.000
	Jumlah	**410.570.800**

Surat-menyurat dan sumbangan:
1. Yayasan Amanah Ummat: Gedung Bank Pacific, Lt 16. Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8 Jakarta 10220 Telp. 5720590
2. Redaktur Amanah Ummat, Majalah Panji Masyarakat: Jln Kemang Selatan Raya 111H Jakarta 12730 Telpon. 7182943/6

Sumbangan Anda bisa dikirimkan ke Yayasan Amanah Ummat Nomor rekening: 301.00235.15 Bank Muamalat Indonesia, Kantor Pusat Arthaloka Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakar ta 10220

Rubrik ini merupakan kerja sama antara Yayasan Amanah Ummat, Yayasan Bina Pembangunan, dan Majalah Panji

Mampu Bertahan pada Saat Krisis

Don Babai sungguh cermat. Pakar perbankan dari Havard University ini pernah menyatakan bahwa prospek bank Islam pada masa mendatang sangat cerah. Ia bahkan berani mengatakan, sistem ini cenderung menggantikan pola perbankan klasik yang tengah berjalan. Salah satu buktinya ia merujuk kepada perolehan Citibank Bahrain—yang memiliki produk Islamic Window—yang cenderung lebih tinggi ketimbang produk konvensional. Itulah yang menyebabkan Citibank mengeluarkan produk baru dengan nama Citi Islamic Investment.

Ramalan tersebut memang terlihat di Indonesia. Bank syariah tenyata mampu bertahan dibanding perbankan konvensional. Hantaman krisis nilai tukar rupiah yang berlanjut kepada krisis perekonomian nasional sejak 1997, membuat ratusan perbankan konvensional terpaksa menanggung beban bunga terlalu tinggi. Mereka harus beroperasi dengan mengantongi *negative spread*, dan terpaksa kolaps. Beberapa bank beraset lebih dari Rp2 triliun—yang pada mulanya kelihatan begitu meyakinkan—terpaksa harus jatuh ke tangan BPPN. Sementara bagi bank syariah, kondisi krisis nasional ternyata tidak banyak memberikan implikasi negatif. Bank syariah sampai tahun ketiga krisis nasional tetap memperlihatkan *positive spread*, CAR di atas 10%, LDR di atas 70%, sehingga tetap berperan sebagai *agent of development*.

Sama seperti lembaga keuangan modern lainnya, dalam syariah Islam lembaga semacam ini juga berfungsi ganda: Sebagai *financial intermidiary*, lembaga keuangan Islam juga menyerap sektor yang memiliki dana untuk disalurkan kepada sektor yang membutuhkan dana. Sebagai *business entity* ia berperan sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan dari bisnis yang dijalankannya.

Konsep tersebut merupakan turunan dari konsep *baitul maal* yang dijalankan dengan baik pada zaman Rasulullah s.a.w. maupun Khalifah Umar. *Baitul maal* saat itu setara dengan Federal Reserve di USA atau gabungan dari Bappenas, Ekowasbang, dan Dewan Moneter di Indonesia. Tugasnya mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, di antaranya mengumpulkan zakat, menetapkan *kharaj* (pajak atas tanah yang dikelola nonmuslim) *khumus, sawafi, fai diya.*

Konsep lembaga keuangan dan perusahaan lain dalam fikih disebut *syakhsyiyyah mu'tabarah 'alaa thariqii syirkah*, yaitu entitas abstrak dengan sikap dan perilaku dianggap sebagai individu, walaupun merupakan hasil musyarakah beberapa pemegang saham. Dengan demikian ia berhak melakukan aktivitas bisnis komersial dan mengambil keuntungan. Kalaupun ia melakukan pekerjaan *baitul maal* seperti pengumpulan zakat, maka itu merupakan aktivitas pilihan sendiri dengan syarat dibolehkan negara.

Aktivitas yang dilakukan dan dikembangkan di lembaga keuangan Islam juga mengacu kepada pola bisnis dasar yang ada dalam Islam, seperti jual beli, *ijarah, musyarakah, mudharabah*, dan sebagainya. Demikian pula objek bisnis yang dijadikan pusat nonprofit harus sesuai dengan syariah Islam.

Sebagai entitas individu, lembaga keuangan Islam juga bersifat inklusif sehingga tetap bisa saja berhubungan dengan nonmuslim, selama *frame-work* syariah di atas dipegang dan diikuti. Dalam sejarah, ini dibuktikan oleh Rasulullah sendiri dan para khulafaur rasyidin. Misalnya, Khalifah Umar diriwayatkan mengenakan semacam tarif bagi pedagang, yang nilainya tidak ia bedakan antara pedagang muslim dengan nonmuslim.

Lembaga keuangan Islam modern saat ini memang masih dini. Bisa disebut di antaranya bank, asuransi takaful, dan lembaga investasi. Khusus di Malaysia sudah dikembangkan lembaga pegadaian Islam Ar Rahn dan lembaga sekuritas Islam. Karena sifatnya swasta, maka orientasi pada keuntungan menjadi motif utamanya. Mengingat dana yang diamanahkan kepadanya merupakan dana komersial maka ia dituntut untuk memberikan profit yang tinggi. Hal ini tentu mendatangkan kritik bahwa lembaga keuangan Islam cenderung elite dan tidak turun ke bawah membantu umat yang duafa. Namun kritik tersebut rupanya salah alamat. Sebagai lembaga komersial, yang seperti disebutkan di atas, prioritas utamanya tentu mencari untung, sedangkan peran sosialnya tidak juga ditinggalkan. Hal ini berbeda dengan lembaga pembangunan yang mengutamakan peranan sosial.

Pada lembaga perbankan syariah, produk bagi hasil menuntut para nasabah/mitra usaha untuk membolehkan ikut serta dalam manajemen usaha, atau pengawasan akuntansinya. Hal ini untuk menghindarkan wanprestasi yang mengakibatkan sikap saling curiga dan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Dengan demikian berbisnis dengan lembaga keuangan Islam secara tidak langsung meningkatkan kualitas para nasabah dalam hal pengetahuan akuntansi dan manajemen. Ini berbeda dengan lembaga keuangan biasa yang cenderung membebaskan nasabah tetapi dengan mematok pendapatan yang harus disetor tiap bulan.

Keberadaan lembaga keuangan Islam mengharuskan perusahaan yang mendapatkan bantuan dana untuk membuka diri, siap diperiksa, dan diberikan opini audit dari akuntan publik. Ini juga berlaku bukan saja untuk pengelolaan dana komersial, tetapi juga dana nonkomersial seperti zakat, infak, dan sedekah. Melalui dana ZIS, usaha sektor ini akan membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Insya Allah. ■

Tulisan ini hasil kerja sama Majalah Panji dengan Bank Muamalat

Biar Aman Pakai Kelambu

Malaria: Wabah penyakit ini kembali merebak. Daerah yang sebelumnya bebas malaria kini menjadi endemis malaria. Apa penyebabnya?

Hati-hati mereka yang suka begadang di tempat terbuka. Selain kesehatan bisa terganggu, mereka juga bakal menjadi sasaran nyamuk malaria yang kini berjangkit kembali. Seperti halnya nyamuk demam berdarah yang dapat merenggut nyawa, nyamuk malaria yang senangnya keluyuran malam hari ini pun bisa menyebabkan kematian.

Bukan menakut-nakuti. Tetapi wabah malaria yang tengah melanda di sejumlah kota di Indonesia memang telah merenggut korban jiwa. Tengok saja di Lombok Timur, puluhan penderita malaria meninggal akibat terlambat mendapat pengobatan. Juga di Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, tercatat 283 warga positif menderita malaria. Dua di antaranya meninggal dunia. Lantas di Ujungpandang tercatat ratusan warga juga terkena wabah malaria. Hanya saja para penderita malaria di kota ini cepat ditangani sehingga tak sampai jatuh korban jiwa.

Kendati begitu bukan berarti keadaan sudah aman. Bagaimanapun ancaman penyakit malaria ini masih potensial. Bahkan menurut Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dr. Achmad Sujudi, daerah-daerah yang sebelumnya bebas malaria sekarang pun ada yang menjadi endemis malaria, seperti di Irian Jaya, Batam, atau Kepulauan Singkep. Penyebabnya, kata Sujudi, antara lain karena terjadinya pemanasan global dan perilaku manusia.

Mobilitas penduduk yang tinggi, keluar-masuk dari daerah malaria ke daerah bebas malaria juga menjadi penunjang timbulnya penyakit ini. Dalam dua tahun terkahir ini kasus penyakit malaria cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, penyakit malaria di Jawa-Bali (kecuali DKI Jakarta) tahun 1998 rata-rata tiga kasus per 10.000 penduduk. Tertinggi terjadi di Yogyakarta, yakni 35 kasus per 10.000 penduduk. Sedangkan terendah di Bali, 0,2 kasus per 10.000 penduduk.

Di luar Jawa-Bali, rata-rata terdapat 215 kasus per 10.000 penduduk. Tertinggi di Nusa Tenggara Timur yakni sebanyak 1.616 kasus per 10.000 penduduk. Sedangkan terendah di Sumatera Barat 25 kasus per 10.000 penduduk. Pada tahun 1999 tercatat kejadian luar biasa, yang terjadi di 62 tempat dengan jumlah penduduk 197.763 jiwa. Jumlah kasusnya mencapai 18.812 orang dengan kematian 21 orang.

Makin banyaknya penderita malaria, selain karena faktor perubahan lingkungan dan perilaku manusia, juga diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi. "Sekarang ini banyak pemilik tambak udang yang usahanya terpuruk. Akibatnya tambak tak terurus dan menjadi sarang nyamuk," ujar Sujudi. Parahnya lagi, daya beli masyarakat merosot drastis menyebabkan banyak warga kurang gizi sehingga mudah terkena malaria.

Seperti halnya Achmad Sujudi, Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moelok pun mengindikasikan terjadinya pemanasan global dan perubahan perilaku manusia ikut mendorong meningkatnya penyebaran penyakit ini. Namun ia juga mengakui, semua itu tak lepas dari kesalahan strategi di bidang kesehatan. "Konsep kita selama ini kan paradigma sakit, bukan paradigma sehat," katanya. Nah, selama 52 tahun, program pembinaan kesehatan belum bersifat preventif dan promotif. Jadi lebih banyak usaha mengobati daripada mencegahnya.

Apa yang diutarakan Menkes, menurut ahli penyakit malaria pada Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dr. Soesanto Tjokrosonto, benar adanya. Selama ini program kesehatan tidak menerapkan pola preventif dan promotif sehingga penyakit seperti malaria bisa sewaktu-waktu berjangkit kembali. Hanya saja dia kurang sependapat jika munculnya penyakit malaria karena pemanasan global, tetapi lebih karena pengaruh perilaku manusia, seperti tak peduli terhadap lingkungan dan membiarkan bekas penambangan menjadi genangan air tempat bersarangnya nyamuk. "Dan jangan lupa, kelalaian program penanggulangan juga turut memicu menyebarnya penyaki ini." Sebenarnya Indonesia sejak tahun 1960 sudah punya program penanggulangan malaria yang baik. Hanya saja, menurut Soesanto, karena sudah terlalu lama atau kurang dana program ini tak berjalan lagi.

Jika ditelusuri, beberapa penyebab merebaknya kembali penyakit ini memang bisa bermacam-macam. Hanya saja, menurut Soesanto dan dr. Sudibjo Juwono, kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, faktor utamanya tampaknya lebih karena usaha pencarian kasusnya menurun. Faktor lainnya bisa jadi karena pengobatannya juga kurang baik. Misalnya, untuk mengobati penyakit malaria diperlukan obat-obatan minimal untuk tiga-empat hari, tapi acap kali baru dua-tiga hari obat sudah habis. Padahal untuk penyakit seperti ini pengobatannya harus tuntas. Tapi begitulah yang sering terjadi. Obat sudah habis dan biaya terkuras, penyakit masih bertahan.

Nah, langkah yang cukup aman agar penyakit malaria tak merebak, kata Soesanto, sebaiknya dilakukan penyemprotan secara kontinu. Tapi jika hal itu belum bisa dilakukan karena terganjal persoalan dana, ada cara lain yang cukup aman: jangan begadang di tempat terbuka dan pasang kelambu bila tidur. ■

M. ZAKIR SALMUN

Genangan air : Jadi sarang nyamuk

PUJI IRWANTO DAN ABDUL RAHMAN MA'MUN (YOGYAKARTA)

Nyaman Berbelanja di Mal Elektronik

Teknologi Informasi: Dengan dukungan dunia perbankan, kehadiran mal elektronik di Indonesia segera terwujud. Apa manfaatnya bagi pengusaha kecil?

Impian Ali Mudrik, pengusaha furnitur asal Bandung, rupanya belum jadi kenyataan. Semula, dengan memasang toko virtual di internet, Ali membayangkan bisa mendapat limpahan order. Tetapi setelah enam bulan berlalu, "Jangankan ada yang beli, yang membuka *website* kami pun tidak ada," keluh Ali. Padahal, supaya tokonya tidak digusur ia sudah mengeluarkan uang tidak sedikit—guna membayar *internet service provider* (ISP)—penyedia jasa internet yang memfasilitasi toko virtualnya.

Nasib serupa juga menimpa teman Ali. Kendati telah membuka *website*, pelanggan baru belum juga berdatangan. "Pembeli di sini hampir semuanya merupakan pelanggan lama yang sering datang ke galeri kami," tutur Farida Zuraida pemilik Unique Galleri yang sudah setahun membuka toko virtual.

Lalu, untuk apa ramai-ramai membuka *counter* di internet? Soalnya, peluang bisnis melalui *e-commerce* kerap disebut-sebut sangat menjanjikan. Memang, jika melihat prediksi pertumbuhannya cukup mengagumkan. Bayangkan, pada akhir tahun 1998 transaksi bisnis melalui internet baru mencapai US$20 miliar. Namun melihat kecenderungannya sampai pertengahan 1999, maka tahun 2002 nanti angkanya diperkirakan membengkak menjadi US$350 miliar. Sungguh menggiurkan.

Masalahnya, bisakah peluang bisnis tersebut diraih pengusaha dalam negeri? Sebenarnya bisa, hanya saja tidak mudah karena jumlah toko virtual makin berjibun. Siapa yang mau menengok sebuah *website* tak terkenal di tengah hiruk pikuknya dunia sibernetika? Tapi jangan kecil hati. Astra Graphia Information Technology (AGIT) mencoba mencari solusi dengan memprakarsai berdirinya *elektronic mall* atau mal elektronik. "Sejak awal, kami sudah berpikir bagaimana agar pengusaha kecil dan menengah (PKM) yang jumlahnya sangat banyak bisa kita wadahi, sehingga mereka bisa dengan mudah merambah pasar global," kata Bambang Patrap, manajer senior sistem integrasi AGIT.

Caranya, bisa memanfaatkan web Astra yang berfungsi sebagai *electronic mall*. PKM cukup menyewa satu *counter* di web Astra dan selanjutnya tinggal memasok produk. Dengan cara ini, ada banyak keuntungan yang bisa di raih. PKM atau perusahaan besar yang ingin bergabung tidak perlu membangun infrastruktur sendiri, baik untuk keperluan sistem, *network*, maupun pemeliharaannya. Mereka cukup memanfaatkan infrastruktur milik Astra. Dengan begitu, mereka diuntungkan oleh nama besar dan promosi yang dilakukan Astra sehingga lebih mudah dikenal di pasar global. Maklum, selain melalui media cetak dan elektronik, promosi juga dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. "Kami bekerja sama dengan ISP World Wide untuk memasang *banner* kita di tempat mereka," ujar Aulia Prima, *system engineer* AGIT.

Tampaknya *brand name* dan promosi inilah yang tidak disadari oleh Ali dan Farida sehingga *website* yang mereka bangun sedikit pun tak dilirik orang. Bagaimana mau dilirik kalau dikenal saja tidak. "Banyak orang beranggapan, kalau sudah bikin *website* di internet, maka produknya akan diketahui atau dilihat calon pembeli. Ini anggapan yang keliru," ucap Andre, alumnus teknik informatika ITB yang saat ini dipercaya menangani departemen teknologi informasi di sebuah bank pemerintah.

Sebuah toko virtual yang baik, tambah Andre, selain isinya harus bagus dan menarik, juga harus *easy to use*—mudah mencarinya, mudah memilahnya, perintah untuk mencari detail produknya pun tidak rumit. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembayarannya. Untuk yang satu ini kerap jadi kendala. Tapi AGIT dan beberapa bank sedang membahas mekanisme pembayaran melalui internet. Nantinya, verifikasi untuk calon pembeli akan dilakukan secara elektronis. Yakni dengan menggunakan fasiltas ATM yang *interface*-nya dipindahkan ke internet, dengan demikian bisa dilihat di web.

YUSNIRSYAH SIRIN

Belanja di toko maya: Serba mudah

Jadi, kalau ada orang ingin belanja di mal elektronik, masuk saja ke web Astra, lalu lihat menu transaksi. "Barang apa yang mau dibeli, tinggal pilih. Pembayarannya mau pakai kartu kredit atau kartu debet. Kartu debetnya dari bank mana, tinggal pilih. Kemudian diklik. Setelah itu, masukan PIN Anda, maka transaksi terjadi dan uang pun langsung didebet," jelas Aulia.

Bagi produsen, yang menitipkan barangnya di mal virtual, selain bisa jualan *on-line* secara murah dan aman, duitnya juga langsung masuk ke rekening mereka. Tetapi, untuk bisa berjualan di mal, tidaklah gampang. Mereka harus memenuhi kualifikasi tertentu, terutama menyangkut kualitas barang dan komitmen pengirimannya. Hal ini penting karena sangat erat kaitannya dengan citra mal elektronik yang harus dijaga. "Jangan sampai si pembeli kapok karena tidak jelas pengirimannya atau kualitas produknya rendah," tutur Bambang. ■

MAHFUD AHMAD

Segalanya Cukup dengan Telepon

Telepon Selular: Teknologi Bluetooth, WCDMA, GSM, dan Symbian mampu mengubah fungsi telepon selular secara drastis. Dari sekadar alat komunikasi lantas menjadi PC dan *remote control*.

Dunia ada di genggaman Anda. Janji produsen telepon selular itu kini bukan lagi sekadar jargon iklan. Dengan teknologi generasi ketiga telepon selular yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Eropa, AS, dan Jepang, fungsi telepon genggam tak lagi sekadar untuk mengirimkan suara, tetapi bisa mengirim dan menerima data serta gambar dengan kecepatan tinggi.

Semua itu dapat diwujudkan berkat dikembangkannya teknologi Bluetooth, WCDMA (*Wideban Code Division Multiple Access*), GSM (*Global System Mobile*), HSCSD (*High Speed Circuit Switched Data*), dan Symbian. Teknologi tersebut kini terus diperbarui dan dikembangkan oleh Eropa maupun AS yang diwakili perusahaan-perusahaan raksasa telepon selular kelas dunia seperti Nokia, Ericsson, dan Motorola. Perkembangan teknologi telepon selular itu diperkirakan bakal mengubah fungsi telepon selular secara radikal.

Jepang pun tak mau ketinggalan. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi negara itu diketahui sangat bersemangat mengembangkan teknologi lanjutan telepon selular. Vinton Cerf, *senior vice president for internet architecture and technology* pada MCI Worldcom (sebuah perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi di AS) sampai-sampai berujar, "Bukan tidak mungkin Jepang akan mengembangkan telepon selular menjadi komputer pribadi, atau sebaliknya telepon selular dapat berfungsi sebagai komputer yang dilengkapi fasilitas internet."

Rambahan teknologinya tak hanya sampai di situ. Telepon selular juga dapat menampilkan berbagai bentuk gambar, termasuk kartun. Bahkan telepon selular yang bentuknya nanti semakin mungil dan gaya itu kelak dapat mengirim dan menerima *video clips* baik untuk sahabat, keluarga, klien, atau siapa pun yang dituju. Pemilik telepon genggam dapat berkreasi membuat pesan-pesan khusus.

Perkembangan telepon selular yang begitu cepat sangat dimungkinkan berkat teknologi WCDMA generasi ketiga. Teknologi ini mampu mempercepat pengiriman data dari sebelumnya hanya 144 kbits per detik menjadi 512 kbits per detik dengan lebih efisien dan lingkup yang luas. Kecepatannya sebenarnya masih bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 2 Mbits per detik. Tengok saja teknologi yang dikembangkan oleh NTT's Mobile Communications Network atau yang dikenal NTT DoCoMo—sebuah proyek kerja sama perusahaan operator telepon selular Jepang dengan perusahaan telepon selular dari Eropa maupun AS. Kerja sama ini mampu mengembangkan telepon genggam yang bisa menampilkan gambar sekualitas video karena kecepatannya yang sangat tinggi. Maka telepon genggam kelak bak televisi mungil dengan gambar yang sangat jernih.

Di samping berbagai kecanggihan yang disebutkan sebelumnya, telepon genggam juga dapat berfungsi sebagai *remote control* yang dapat digunakan untuk menstater mesin mobil, memutar audio-video, *microwave*, AC, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Bahkan, "Dengan telepon seseorang bisa mengoperasikan mesin pabrik dari jarak jauh," ujar Direktur Ericsson Indonesia Susanto Soesilo. Tentu saja semua itu bisa dilakukan jika seluruh peralatan telah menggunakan Bluetooth—teknologi jaringan berdasarkan gelombang radio—sehingga dapat saling berkomunikasi.

Tentu saja, bukan hanya karena keberhasilan pengembangan teknologi WCDMA dan Bluetooth yang membuat telepon genggam makin pintar. Keberhasilan pengembangan teknologi GSM, HSCSD, dan Symbian yang dilakukan Nokia dan perusahaan-perusahaan telepon selular di dunia memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, juga gambar dan rekaman video melalui telepon genggam. Jalan menuju sarana multimedia bagi telepon selular tampaknya sudah di depan mata.

HSCSD pertama kali diperkenalkan pada 1998 dengan kecepatan mentransfer data mencapai 14,4 kbits per detik. Kecepatan ini mampu mengungguli telepon selular digital konvensional yang hanya 9,6 kbits per detik. Lebih dari itu, empat saluran dapat sekaligus dikombinasikan dalam satu panggilan tanpa mengganggu panggilan lainnya, dengan kemampuan pengirimannya yang dapat ditingkatkan menjadi 57,6 kbits per detik. Maka, dengan perkembangan teknologi telepon selular ini, kelak segalanya jadi serba mudah dan cepat. ■

PUJI IRWANTO DAN MAHFUD AHMAD

ERICSSON

Perancangan di laboratorium: Menuju multimedia

Mengaduk Laut Menebar Petaka

Pencemaran: Sebagian perairan Pulau Bangka berubah warna menjadi coklat. Terumbu karang pun banyak yang rusak. Benarkah akibat penambangan PT Timah?

Sebagian pantai di Pulau Bangka yang jernih kini berubah warna. Tak lagi biru dan dipenuhi ikan, tetapi kecoklatan nan keruh. Ikan dan binatang laut berusaha menyingkir. Nelayan pun terpaksa kerja keras karena harus melepas sauh jauh ke tengah laut. Jengkel karena makin sulit mencari ikan, para nelayan pun melayangkan protes kepada PT Timah.

Mengapa kepada PT Timah? Perusahaan penambangan timah milik pemerintah ini dituding sebagai biang keladi kerusakan terumbu karang dan abrasi pantai. PT Timah yang memiliki 22 kapal keruk setiap hari mengaduk-aduk pasir yang mengandung timah pada kedalaman 30 meter sampai 35 meter di bawah permukaan laut. Dasar laut terkupas dan terbentuk lubang-lubang raksasa di sana. Akibatnya, sejumlah pantai di sekitar lokasi tambang rusak berat karena gerusan ombak yang menjadi liar karena lubang-lubang besar itu. Kerusakan tampak nyata di Pantai Parai, Pantai Rebo, Tanjung Pesona, Pasir Padi, Teluk Tenggiri, dan beberapa pantai lainnya.

Kerusakan pantai bukan saja membuat kesal nelayan, tetapi juga pengelola hotel di sekitar pantai. Akibat pembuangan lumpur bekas galian tambang timah di darat ke laut, warna laut yang jernih tinggal kenangan. Para penyelam tidak bisa lagi menikmati keindahan terumbu karang. "Sebagian terumbu karang di sini sudah rusak akibat tertutup lumpur," kata Djoko Pramono, ketua umum Perhimpunan Olahraga Selam Indonesia (POSSI). Pramono yang juga menjabat Irjen Pariwisata ini sangat menyesalkan hancurnya potensi wisata di daerah tersebut.

Parahnya lagi, lumpur yang menutupi terumbu karang akan merusak proses fisiologis dan biologis. Sementara timah hitam dan lumpur kromium yang dihasilkan dari limbah tambang merupakan racun mematikan bagi organisme karang. Padahal untuk memulihkan karang yang rusak diperlukan waktu cukup lama. Dalam keadaan normal saja, untuk tumbuh sepanjang satu meter, terumbu karang memerlukan waktu 20 tahun hingga 50 tahun.

"Ya, keberadaan PT Timah bagi kita bak buah simalakama," kata Staf PPLH Universitas Sriwijaya Dr. Lida Zulkifli. Di satu sisi, devisa dari penjualan timah diperlukan untuk membantu mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi, tetapi di sisi lain kehadirannya sangat mengganggu nelayan.

M. ZAKIR SALMUN

Kapal keruk: Mengaduk isi pantai

Ironis memang. Sebagai peraih sertifikat ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, BUMN ini justru menuai banyak kritik dari rakyat setempat karena dinilai kurang memperhatikan lingkungan. Padahal, menurut Ramdhan, humas Departemen Pertambangan dan Energi, penerima sertifikat ISO 14001 jumlahnya bisa dihitung dengan jari.

Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, boleh jadi Pulau Bangka akan sama nasibnya dengan Pulau Singkep yang kini berubah menjadi "pulau hantu". Inilah yang dikhawatirkan oleh Prof. Machmud Hasjim, pakar metalurgi yang juga mantan rektor Unsri. Maklum, dalam 20 tahun mendatang cadangan timah di Bangka akan habis dan setelah itu ditinggalkan investor. Maka tidak mustahil pulau yang telah mengalami kerusakan lingkungan ini benar-benar tak lagi punya daya tarik.

Hal tersebut tentu membuat penduduk setempat prihatin dan menuntut segera dilakukan rehabilitasi. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), berniat memperkarakannya ke pengadilan jika PT Timah tak segera melakukan langkah-langkah perbaikan. "Perusakan ekosistem akibat penambangan merupakan kejahatan besar terhadap lingkungan." kata Ucok Abdul Wahib Situmorang, koordinator advokasi Walhi Sumatera Selatan.

Terhadap gugatan Walhi, PT Timah yang tahun lalu mengantongi keuntungan bersih Rp182,1 miliar ini menanggapi dengan serius. "Silakan tuntut kami, tapi harus dengan data yang benar," kata Erry Riyana Hardjapamekas, dirut PT Timah. Erry membantah terumbu karang di laut sudah banyak yang rusak akibat beroperasinya BUMN tersebut. "Kami juga punya penyelam khusus (untuk mengamati terumbu karang, *Red.*). Mungkin data mereka berbeda dengan kami," kilah Erry.

Meski demikian, Thobrani Alwi, direktur umum PT Timah, tak menyangkal terjadinya kerusakan terutama di Pantai Rebo yang disebabkan oleh proses penambangan lepas pantai. Thobrani mengatakan pihaknya tak bermaksud lepas tangan. Untuk membuktikan kepeduliannya terhadap kerusakan lingkungan, PT Timah, bekerja sama dengan bagian Oceanografi LIPI, telah menyiapkan tim yang bertugas merehabilitasi Pantai Rebo. ■

AZIMI ASNAWI (PALEMBANG)

Politik Uang Jajak Pendapat
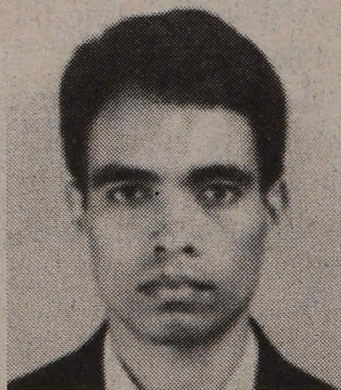
Julio Tomas Pinto
Aktivis DPP IMM Jakarta

Secara mayoritas, rakyat Timor Timur adalah masyarakat yang belum mengenal membaca dan menulis dengan baik. Secara keseluruhan, 80% masyarakat Timtim buta huruf. Dari persentase itu 90%-nya petani tradisional. Pada zaman Portugal, tak banyak kesempatan pendidikan. Dari sekitar 600.000 penduduk, hanya 10% yang dapat membaca dan menulis bahasa Portugis. Selain buta aksara, rakyat Timtim adalah petani tradisional yang belum mengetahui cara-cara bercocok tanam modern.

Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDBR) ekonomi Timtim periode 1994-1997, pertumbuhannya rata-rata 8,13% per tahun. Ini masih lebih tinggi dibanding pendapatan tingkat nasional yang mencapai Rp2.028.887 per tahunnya. Pada 1997 pertumbuhan ekonomi Timtim menurun sampai tingkat terendah, yakni 4,14% per tahun. Padahal pada 1996 masih pada level 10,81%.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi secara rasio tak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang makin bertambah. Konsekuensinya adalah rendahnya pendapatan per keluarga masyarakat. Masyarakat setempat juga kebanyakan hidup sederhana. Menurut data pemerintah, mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kelemahan ekonomis ini akan menimbulkan peluang terjadinya politik uang dalam jajak pendapat akhir bulan ini.

Jika ditelaah, faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya politik uang adalah, *pertama*, masyarakat lemah secara ekonomis. Di berbagai kehidupan masyarakat, kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki andil dalam menciptakan budaya politik uang. Dalam konteks masyarakat Timtim, kita jumpai kehidupan yang cukup mengandalkan hasil pertanian tradisional. Sehingga kecenderungan mengarah pada bagaimana dapat hidup layak tanpa menghiraukan pentingnya hak yang dimilikinya.

Persoalan ini biasa berlaku dalam program jajak pendapat. Kemungkinan politik uang dalam jajak pendapat tak hanya terjadi di wilayah Timtim saja, juga di beberapa tempat di mana menetap sebagian warga Timtim. Keterbatasan tempat yang tersedia dalam melaksanakan jajak pendapat memungkinkan terjadinya politik uang.

Gejala politik uang itu mulai terjadi dalam masa pendaftaran peserta jajak pendapat. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tempat jajak pendapat di luar Timtim, terutama di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Ujungpandang, dan Bali. Sedang warga Timtim yang memiliki hak berpartisipasi dalam jajak pendapat tersebar di seluruh Indonesia, terutama Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jarak yang jauh antara tempat menetap dan tempat pendaftaran merupakan peluang transaksi politik uang oleh kelompok yang berkepentingan.

Beberapa pakar memberi batasan politik uang sebagai sebuah transaksi—atau rencana transaksi—bermotif politik dengan menggunakan uang, yang bertujuan mempengaruhi si penerima untuk melakukan kehendak politik si pemberi uang. Akhirnya pilihan politik warga tidak didasarkan pada hati nurani. Kondisi ini diperparah oleh tak tersedianya anggaran untuk sarana transportasi bagi warga yang tinggal di daerah-daerah tersebut di atas menuju tempat jajak pendapat. Transaksi politik uang ini akan berakibat pada distorsi kemurnian jajak pendapat itu sendiri.

Kedua, ambisi berkuasa atas orang lain. Pergeseran kepentingan politik antara kelompok prointegrasi dan kelompok prokemerdekaan, pada gilirannya akan memunculkan keinginan untuk menerapkan budaya politik machiavelis: kelompok yang bertikai cenderung menghalalkan segala cara demi memenangkan pilihan politiknya. Di kalangan akar rumput yang menginginkan keamanan dan keselamatan, persoalan jujur dan adil akan sulit tercipta dan terancam dengan politik uang. Demi uang, mereka bisa mengorbankan suara demi keutuhan keluarganya.

Budaya transaksi politik uang hanya akan dilakukan oleh kelompok yang secara kultural sering melakukan hal yang sama dalam kasus yang berbeda. Sehingga perilaku tersebut merupakan kebiasaan sehari-hari yang sulit dikendalikan. Harapan akan terciptanya kejujuran dan keadilan dalam jajak pendapat akan sirna jika mekanisme *check and balance* tak berjalan. Ketidakefektifan tersebut berdampak pada merajalelanya politik uang dalam berbagai komponen masyarakat Timor Loro Sae.

Untuk mengatasi persoalan politik uang dalam jajak pendapat, harapan masih terletak pada bagaimana Unamet menciptakan mekanisme kontrol dalam melaksanakan pemungutan suara. Selain itu, faktor krusial dalam menjaga kemandirian jajak pendapat adalah netralitas NGO baik yang dikoordinasi beberapa lembaga dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Lembaga-lembaga pemantau tersebut diharapkan melaksanakan mekanisme kontrol secara efektif dan profesional.

Netralitas adalah faktor yang sangat menentukan. Kehadiran NGO tertentu tidak membawa misi yang menguntungkan salah satu pihak baik itu otonomi maupun kemerdekaan. Fenomena tidak netralnya berbagai NGO telah menjadi gejala umum dalam persoalan Timtim. Kelompok prointegrasi telah melayangkan protes keras terhadap Unamet dan beberapa NGO tentang netralitas tersebut. Penyerangan Besi Merah Putih (BMP) terhadap beberapa NGO di Liquisa merupakan bukti risiko tersebut.

Karena itu, rencana pemberangkatan pemantau dalam negeri dalam beberapa pekan ini diharapkan tetap konsisten sebagai duta kemanusiaan di Timtim untuk menciptakan penegakan demokrasi dan keadilan dalam jajak pendapat. Media massa baik dalam maupun luar negeri memiliki peran penting sebagai pengontrol dan pengamat kritis. Media dapat mengungkap berbagai kecurangan, baik dalam masa pendaftaran peserta, menjelang hari H-1, maupun saat hari H-nya. ■

Wiwin dan Kaum ya

ARIF ARIADI
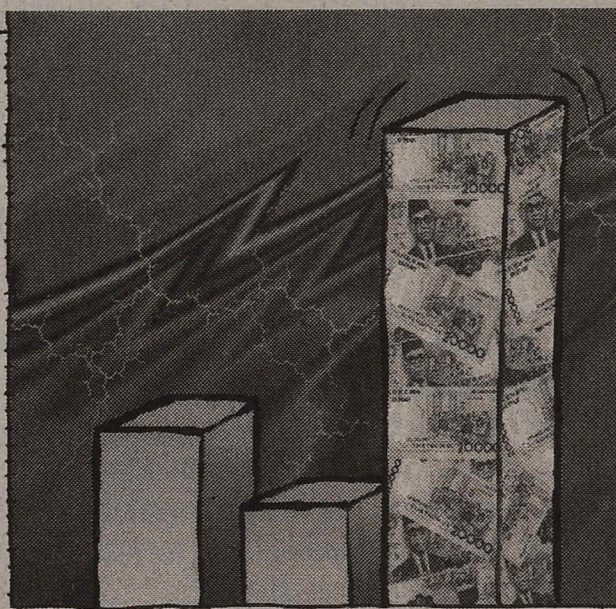
Keluarga menyambut jenazah Wiwin di bandara: Tak ada firasat

Atma Wirya berdiri dengan wajah tegang. Ditatapnya barang-barang kargo yang berdatangan. Sebenarnya, bukan barang yang tengah ia nantikan, tapi anak sulungnya, Wiwin Widaningsih, 20, yang menurut berita hendak tiba Sabtu, 14 Agustus, itu dengan pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SV 822.

Berombongan ia datang menjemput Wiwin. Keluarga besarnya dari Desa Palumbonsari, Karawang, turut serta. Juga Yesi Yustiani, 3, putri Wiwin satu-satunya, yang selama ini tinggal bersama embahnya. Datang dengan beberapa mobil, mereka juga membawa serta sebuah ambulans. Ya, ambulans. Karena hanya jasad Wiwin yang akan tiba. Ruhnya telah dipanggil Yang Kuasa, di Jeddah, di tempat ia bekerja. *Innda lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun.*

Wanita yang hanya lulus SMP itu dikabarkan jatuh dari lantai empat rumah majikannya, Hamud Abdul Aziz Hamud Asy-Samary, di Jeddah. Masih gelap mengapa Wiwin sampai jatuh, atau ia menjatuhkan diri? Entahlah. Hanya pada surat keempat yang ia kirim—selama lebih sembilan bulan ia di sana—yang bisa menjadi pertanda. "Umi," demikian tulisnya, "di sini, Teteh sedang ada masalah." Ia menyebut dirinya Teteh, julukan kakak bagi adik-adiknya. Lalu, ia bercerita bahwa majikan prianya, yang tidak bekerja, berkali-kali memintanya memijit, tatkala majikan wanita pergi bekerja, mengajar. "Jangan Wan, haram," Wiwin berusaha menolak. Di akhir suratnya, ia minta didoakan karena mau berhaji.

Mendengar berita seperti itu, segera surat balasan dikirim untuk menenangkan. Dan alhamdulillah, kemudian ada kabar, masalah itu tak terulang. Hanya, majikannya kini menjadi kasar.

Namun, seperti disambar petir, pada 28 Juli silam Atma mendapat telepon dari seorang TKI, Syamsuri namanya, kawan dekat anaknya yang mengabarkan bahwa Wiwin telah tiada. Duh Gusti. Maka dalam kegalauan itu Atma akhirnya mengikhlaskan agar Wiwin dimakamkan saja di Saudi. Keputusan itu ia ambil setelah mendengar dari Syamsuri bahwa untuk membawa pulang jenazah itu pihak keluarga harus merogoh kocek sekitar US$5.000, sekitar lima kali lipat gaji Wiwin yang selama ini telah dikirim ke keluarganya.

Untunglah, belakangan, dengan bantuan kenalannya di Solidaritas Perempuan, Atma bisa juga membawa jasad Wiwin ke Karawang. "Saya juga belum tahu soal biayanya bagaimana," ujar Atma. Di kampung, tahlil dan salat gaib sudah dilakukan. "Kami sudah menyiapkan semuanya," ujarnya kepada *Panji.*

Kepergian Wiwin berakhir tragis. Padahal, sebelumnya, wanita yang sempat nyantri di sebuah pesantren di Majalaya, Bandung, itu sudah bekerja di SMPN 4 Karawang, sebagai staf tata usaha honorer. Tapi, dengan alasan ingin mencari pengalaman, ia nekat berangkat. "Ingin cari pengalaman, mumpung masih muda," ujarnya. Namun, bukan pengalaman hidup yang ia peroleh akhirnya, melainkan sebuah perjalanan yang sangat panjang….

Nasib Buruk. Derita selama bekerja di rantau, yang kemudian berakhir tragis, agaknya bukan hanya milik Wiwin. Menurut catatan Solidaritas

...yang Gagah Berani

Derita TKI:

Satu lagi tenaga kerja tewas misterius. Telah 69 orang, tahun ini, mengalami nasib serupa. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, yang sebagian besar wanita, masih mengkhawatirkan.

AKHMAD SUPRIYATNA

TKW di penampungan Konjen Jeddah: Mau bagaimana lagi

Perempuan, tahun ini saja sudah 69 orang meninggal.

Belum lagi sejumlah cerita duka, meski tak sampai meninggal, yang tak kalah mengenaskan. Pasangan Hasyim-Sukini misalnya, pun ditimpa nasib yang tak mengenakkan. Hasyim menginjakkan kaki untuk kedua kalinya di Tanah Arab. Ia datang bersama istrinya, Rukini. Bocah, buah hati, terpaksa mereka tinggalkan di kampung, Desa Jati Lor, Kecamatan Gondang, Grobogan, Jawa Tengah. Tidak pada orang lain, anaknya mereka titipkan pada kakaknya. Sebagai imbalan, ia berjanji akan memberi uang Rp2 juta kalau kelak kembali.

Namun, yang ditemui kali ini sungguh berbeda. Baru tiga bulan bekerja pada seorang majikan di Jeddah, ia terpaksa membawa kabur istrinya ke Kantor Konsul Jenderal RI di kota itu. "Kami tak tahan dengan fitnah dan siksanya," ujar Hasyim kepada *Panji* yang menemuinya di tempat penampungan, di *basement* Kantor Konjen RI di Jeddah. Untung saja, mereka masih punya tempat berlindung. Paling tidak, makan ala kadarnya, tersedia, tak perlu mengemis. "Uang, saya sama sekali *nggak* punya," ujar Hasyim. "Untung kemarin ada kawan yang meminjami untuk ongkos," ujarnya sambil memperlihatkan sisa ongkos lembaran satu real, dua lembar.

Pulang? "Tidak. Bagaimana kami harus membayar utang buat ongkos, Rp7 juta, upah mengurus anak, dan malunya itu," ucap Sukini. Mereka berdua bertekad mencari majikan baru. Dan, dengan gagah berani mereka mengaku tak akan pulang sebelum berhasil.

Di ruang penampungan ketika itu, pertengahan Mei, ada tak kurang 70-an orang yang bernasib serupa. Sebagian besar wanita. Pria hanya tak kurang tujuh orang saja. Hampir semuanya kabur dari rumah majikan. Alasannya macam-macam. Sebagian besar adalah karena upah yang tidak dibayar, disiksa, dan *astaghfirullah*, diperkosa.

Rodiyah, asal Sukabumi, sudah lima tahun bekerja. Gajinya yang empat tahun sembilan bulan, senilai 34.200 real atau sekitar Rp64 juta belum dibayar. Ia tak tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Satu-satunya jalan, ya kabur ke kedutaan. Tairah asal Madura juga bernasib sama. Setelah bekerja empat tahun enam bulan, baru gaji tiga bulan pertama yang dibayar. Sisanya 30.600 real tak jelas.

Gaji adalah persoalan paling menonjol. Sejak mereka tiba di sana, masalah yang satu ini sudah mencurigakan. Lazimnya, pada tiga bulan pertama, tenaga kerja tidak dibolehkan menerima gaji. Ini semacam "masa percobaan" yang harus dilalui. Alasannya, itu hak perusahaan pengerah tenaga kerja alias PJTKI. Sejak sebelum berangkat, mereka memang diwanti-wanti, "Jangan menanyakan soal gaji pada tiga bulan pertama." Alasan yang dikemukakan, "Itu ujian buat kamu." Karena tingkat pendidikan mereka pas-pasan, rata-rata ya manut saja. Bahkan, akhirnya, karena tidak berani, bukan cuma tiga bulan, ada yang sampai tahunan tak menerima gaji.

Nasib Suprapti asal Malang lebih tragis. Bekerja setahun serasa kerja rodi. Majikan wanita yang ia layani sungguh ringan tangan. Sedang yang pria, berulang kali menggagahinya. Ia tak tahan. Ketika ada kesempatan, Suprapti langsung kabur. Carsia asal Pekalongan, juga terpaksa meloncat dari jendela di lantai dua karena tak tahan dengan siksaan majikannya. Bahkan, Poniah, yang usianya masih *abege*, 14 tahun, pun harus mengalami nasib serupa. "Saya tak menyangka mendapat nasib begini," ujar gadis asal Lampung itu memelas sambil meminta *Panji* memasang fotonya agar orangtuanya di kampung bisa mengetahui nasibnya. "Ya, beginilah nasib kami," ujar Poniah.

Ketika nasib buruk menimpa mereka, ke-

dutaan adalah satu-satunya tempat mereka mengadu. Setiap harinya, menurut Gulfan Afero, yang ketika itu menjadi kepala bidang tenaga kerja di Konjen RI di Jeddah, ada saja yang datang ke kantornya. Pada tahun ini saja, setiap minggunya rata-rata 41 orang yang kabur dari majikan. Dari jumlah itu sekitar 62% akhirnya dikirim ke *tarhil* (penjara imigrasi), sisanya ada yang bekerja kembali atau pulang dengan biaya sendiri. Dari yang diproses di konsul, sebagian masalahnya bisa selesai. Hak milik yang bisa diselamatkan, seperti upah yang tadinya tidak dibayar lalu dibayar, mencapai Rp976 juta.

Pada tahun sebelumnya, jumlah yang kabur 1.619 orang. Sekitar 56% di antaranya dikirim ke *tarhil*. Berarti, setiap minggu kedutaan kedatangan "tamu tak diundang" rata-rata 25 orang.

Jumlah yang kabur, biasanya mencapai frekuensi yang tinggi manakala musim haji tiba. Mereka bukan hanya datang ke kedutaan tapi juga ke wisma haji yang ada di Jeddah, Mekah, dan Madinah. *Panji* sendiri menyaksikan dua wanita berjilbab hitam, sambil menangis, datang ke Wisma Haji di Mekah ketika sedang ramainya musim haji. Mereka mengaku kabur karena tak tahan disiksa. "Setiap musim haji, kami selalu menemui kasus seperti itu," ujar Achmad Baidlowi, kepala Daerah Kerja Haji di Mekah.

Itu pun masih boleh dibilang beruntung. Mereka bisa sampai ke kedutaan dengan selamat. Tidak sedikit yang keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Mereka kabur dari majikan bermasalah, kemudian nyasar ke pangkuan "mafia" tenaga kerja. Berpura-pura mau mengantar ke Konjen, sopir taksi yang jahat bisa malah membawa TKW bingung itu ke sarang mafia. Lalu, dijuallah dia ke majikan lain. Ini pun masih untung, sebab bisa juga malah terjerumus ke dunia hitam legam.

Benar-benar nasib buruk. Ya, mereka menganggap siksaan itu sebagai nasib yang jelek. Kalaupun ada yang disalahkan adalah PT—mereka menyebut perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka dengan sebutan PT. "Pak, saya sudah menghubungi PT (ia menunjuk satu nama di lembar Perjanjian Kerja, *Red.*), tapi mereka tak mau bertanggung jawab," ujar Nonoh asal Majalengka yang kabur karena setelah habis kontrak, 2,5 tahun, tak jua dipulangkan. Gajinya selama setahun juga belum diberi. Hasnawati asal Sumbawa juga mengeluhkan ulah PT-PT itu yang tak mau bertanggung jawab, tak mau mengurusi ketika mereka mengalami nasib yang memilukan.

Tatkala para tenaga kerja mengalami nasib buruk, PT-PT itu memang tak banyak diharapkan. Juga agennya—kalau ada—di Arab, tak banyak membantu. Kontak telepon ke pihak yang mengirim mereka di Tanah Air, diakui hanya menghabiskan uang saja. Hasilnya nol besar. "Kalau sudah begini, ya kami yang repot," ujar Gulfan. Pihak kedutaan memang mau tak mau harus mengurusi mereka. Bagaimanapun, yang datang adalah warga Indonesia.

Lalu, pihak kedutaanlah yang mencoba menyelesaikan kasus mereka satu per satu. Langkah yang mereka tempuh, pertama, adalah mengontak majikan untuk diminta menyelesaikan persoalannya. Kalau tak mau datang, dan menyangkut penyiksaan, bisa langsung diadukan ke polisi setempat. Namun, sebisa mungkin persoalan mereka diselesaikan di sini. Kalau itu mentok juga, mau tak mau mereka harus dipulangkan ke Tanah Air. Biayanya? Dari pemerintah Saudi. Cuma, prosedur pemulangan inilah yang bikin banyak orang ketar-ketir. Sebab, mereka ha-

Demo anti kekerasan terhadap wanita: Seluruh irtansi terlibat

Saleh Alwaini

Wawancara: Banyak instansi terlibat dalam pengerahan tenaga kerja Indonesia ke mancanegara. Siapa yang paling bertanggung jawab?

Jangan Kami Dituduh

Musibah yang dialami tenaga kerja Indonesia di mancanegara, termasuk Arab Saudi, sudah cukup banyak. Dari yang hanya gaji tak dibayar, disiksa, diperkosa, hingga mengalami nasib tragis, tewas tak jelas mengapa. Memang mengurusi persoalan ketenagakerjaan cukup kompleks. Banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pihak perusahaan pengerah tenaga kerja hingga berbagai instansi pemerintah.

Namun, sorotan paling tajam diarahkan kepada pihak perusahaan pengerah tenaga kerja. Karena merekalah yang melakukan "bisnis" di bidang ini. Merekakah yang mestinya bertanggung jawab? Untuk mengetahui jawabannya, wartawan *Panji* Dudi Rahman mewawancarai Saleh Alwaini, mantan ketua umum Apjati yang juga presdir Grup Binawan, sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Berikut petikannya.

Kasus kematian TKI secara misterius kembali terjadi. Menurut Solidaritas Perempuan, tahun ini jumlahnya 69 orang. Yang terakhir akhir Juli lalu, seorang TKW korban diduga mati karena tindakan pelecehan seksual. Bagaimana menurut Anda?

Sudah banyak musibah yang dialami TKI kita di luar negeri. Termasuk puluhan kasus yang dikabarkan bunuh diri. Kita ingin mempertanyakan kenapa mereka bunuh diri. Tentu ini sesuatu yang perlu didalami, dilakukan investigasi agar tidak terulang.

Kenyataannya, TKI yang hilang atau meninggal, dari tahun ke tahun terus meningkat, mengapa?

Itu juga perlu diinvestigasi. Karena, dari laporan yang saya baca, ada juga TKI yang berangkat tanpa diketahui PJTKI-nya ataupun *agency*-nya. Bagaimana? Nah, makanya perlu ada pembenahan mekanisme. Selama ini, masih banyak WNI bisa bekerja di sana tanpa mekanisme yang ada. Dan pemerintah Arab Saudi terkesan membiarkan. Padahal, kehadiran tenaga ilegal ini mengancam tenaga legal dari berbagai aspek. Aspek hukum, biaya perekrutan, dan biaya mendatangkan. Sementara yang legal mahal, majikan tentunya akan memilih yang *cost*-nya murah. Jadi, selama

rus terlebih dahulu masuk ke penjara imigrasi. Di sinilah mereka akan tinggal, bercampur dengan orang dari berbagai bangsa, sekitar 40 hari sebelum dipulangkan. Sungguh mengenaskan.

Akan halnya kasus Wiwin, pihak keluarga sendiri merasa kaget, bercampur gembira, karena akhirnya jenazah bisa dipulangkan. "Soal ajal, itu takdir Yang Mahakuasa, tapi kami hanya menuntut pihak PT (PJTKI, *Red.*) mengembalikan jasad Wiwin ke sini. Itu saja," ujar Atma. Syukurlah atas kerja sama berbagai pihak, Solidaritas Perempuan, Depnaker, dan Konjen RI di Jeddah, jenazah Wiwin bisa dipulangkan.

Lalu bagaimana tanggung jawab PJTKI? "Semua proses kepulangan jenazah Wiwin menjadi tanggung jawab Alverdi," kata Fauzi, yang mewakili pihak P.T. Alverdi Surya Buana, PJTKI yang mengirim Wiwin ketika menyambut jenazah. Sayangnya, ia tak mau menjelaskan lebih jauh soal bentuk tanggung jawab itu. Sementara Abdullah Umar, pemilik PT Alverdi yang juga ketua umum Apjati, tidak tampak.

Dalam kasus demikian, siapa sebenarnya yang mesti bertanggung jawab? Taty Krisnawaty, ketua departemen advokasi buruh migran perserikatan Solidaritas Perempuan, melihat berdasarkan aturan, posisi tanggung jawab berada di tangan agen pengerah tenaga kerja. Hal itu terungkap dalam Kepmenaker No. 44/1994. "Tapi itu perlu diperjelas, bagaimana bentuk tanggungjawabnya," ujarnya.

Namun, Saleh Alwaini, mantan ketua umum Apjati, menolak jika itu semata-mata tanggung jawab PJTKI. "Kami, pihak swasta tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya. Jangan sampai, menurut Saleh, PJTKI lantas dituduh tidak bisa melakukan mekanisme pengiriman yang berakibat mereka telantar. Padahal, banyak juga TKI kita yang ilegal datang tanpa prosedur. "Makanya, kami berharap persoalan ketenagakerjaan, terutama yang menyangkut proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini harus dibenahi."

Wahyu Susilo, humas Solidaritas Perempuan, menilai bahwa pemerintah mestinya melakukan perjanjian bilateral soal perlindungan TKI itu. Hanya saja, pihak Arab Saudi tidak mau perjanjian bilateral karena Indonesia sering melanggar ketentuan. Misalnya, menggunakan paspor hijau untuk haji nantinya dipakai untuk kerja di Arab Saudi.

Selain itu, TKI di Arab Saudi itu diurus oleh departemen sosial, bukannya oleh departemen perburuhan. Karena ini menyangkut tenaga kerja, mestinya kan hukum-hukum perburuhan yang digunakan. "Arab Saudi sendiri menyebut *nggak* ada perlindungan untuk buruh migran karena mereka bukan buruh," kata Wahyu. Karena itu dia berharap, dengan dubes Baharudin Lopa—yang orang komnas HAM—soal perjanjian bilateral ini bisa ditingkatkan.

Dirjen Binapenta Depnaker Din Syamsuddin tak mengelak masih banyaknya kasus mengenaskan yang dialami tenaga kerja Indonesia di mancanegara. Namun, beberapa langkah perbaikan, menurut Din, terus dilakukan pemerintah. Misalnya, setiap tenaga kerja yang dikirim harus dilengkapi dengan perjanjian kerja.

Yang Sukses. Ya, mungkin nasib baik tak berpihak pada Wiwin, juga Poniah dan kawan-kawan. Sebab, tak kurang juga mereka yang bernasib mujur. Meski hanya berbekal ijazah SD, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mereka bisa mengantongi gaji 600 real sebulan. Kalau

ARIF ARIADI

yang ilegal ini dibenarkan oleh Arab Saudi, tetap saja yang legal susah untuk dibenahi.

Kalau yang saya lihat, salah satu penyebabnya adalah sementara ini pihak pemerintah Indonesia, dan pemerintah Arab Saudi, belum ada kesepakatan mengenai mekanisme masuknya warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja di Arab.

Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab dalam perlindungan TKI di luar negeri?

PJTKI dan Apjati *nggak* bisa bekerja sendiri. Ini kan melibatkan semua pihak. Jika berurusan dengan kepolisian, interpol yang maju. Untuk masalah-masalah diplomatik, KBRI yang maju. Untuk masalah-masalah yang lebih tinggi lagi, Deparlu yang maju. Untuk masalah-masalah ketenagakerjaan, Depnaker yang maju. Apjati hanya akan berusaha aktif, agar semua instansi ini melakukan upayanya optimal. Kami kan swasta, *nggak* punya apa-apa. Kami hanya punya semangat untuk melindungi. Dan itu yang selalu saya anjurkan. Mari kita berkoordinasi selalu dalam menghadapi setiap permasalahan yang perlu kita atasi bersama.

PJTKI tidak bisa melakukan penempatan tanpa kerja sama dengan berbagai instansi dalam berbagai bidang, misalnya pelatihan, angkutan, kesehatan, juga instansi pemerintah mulai dari lurah dan camat dalam penyiapan dokumen jati diri seorang calon TKI, hingga Depnaker yang melakukan seleksi, imigrasi dalam urusan dokumen paspornya, kemudian Deplu yang terkait di sana. Jadi, pada prinsipnya semua sektor di pemerintahan itu terkait.

Persoalan yang menyangkut TKW sebetulnya bukan hal baru menimpa WNI yang kerja di luar negeri, bahkan di Arab Saudi kasusnya sangat banyak. *Kok* tidak ada perbaikan?

Itulah masalahnya. Kita harus sama-sama membenahi semua ini.

Akar masalah kan sebenarnya berpangkal pada mekanisme perekrutan tenaga kerja oleh PJTKI. Artinya, PJTKI sendiri tidak memberi penjelasan kepada calon tenaga kerja mengenai situasi dan kondisi serta kultur kerja di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia. Bahkan banyak PJTKI yang melanggar.

Ya, itu harus kita akui memang, ini menjadi masalah kita saat ini. Tapi, Apjati berupaya memberikan pembinaan kepada anggota mengenai mekanisme seharusnya yang harus dilaksanakan PJTKI dalam perekrutan dan pengiriman calon tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah sendiri kan telah memberi peringatan bagi PJTKI yang melanggar aturan.

Tapi buktinya, masih ada TKI kita yang sampai telantar di luar negeri. Ada yang disiksa dan dianiaya tanpa mendapat perlindungan dari PJTKI dan Apjati. Bagaimana?

Kami ini swasta, pihak yang mengirimkan calon tenaga kerja ke luar negeri sesuai ketentuan. Kemudian terjadi kasus seperti di beberapa negara yang menimpa TKI, selama ini yang dituduh kan PJTKI dan Apjati. Mana nih tanggung jawab PJTKI atau Apjati? Sementara itu, kita tidak punya kewenangan dalam masalah hukum di luar. Ini kan menyangkut persoalan yang sangat kompleks. Jadi jangan kami yang lantas dituduh tidak bisa melakukan mekanisme pengiriman secara benar sehingga banyak TKI yang telantar di sana. Banyak juga TKI kita yang ilegal masuk ke negara tujuan tanpa prosedur, dan, kita lagi yang dituding. Karena itu, Apjati berharap persoalan ketenagakerjaan, terutama yang menyangkut proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini harus dibenahi. Departemen Tenaga Kerja sendiri saya lihat baru belakangan berupaya membenahi mekanisme ini. ■

dikurs ke rupiah sekarang, sekitar Rp1,2 juta. Jauh mengalahkan *starting salary* para sarjana baru. Bahkan, kalau ketemu majikan yang baik, gaji itu diterima bersih. Makan dan pakaian biasanya diberi lagi. Kalau tanpa sandang pangan, 400 real *net* masih bisa dapat. Sedangkan untuk pria, yang biasanya menjadi sopir atau tukang kebun, gajinya bisa 800 real.

Amri misalnya, tampak ceria bekerja sebagai pelayan sebuah toko swalayan, tak jauh dari Wisma Haji Jeddah. "Ayo Pak, silakan pilih. Kalau untuk oleh-oleh, yang ini lebih murah dan bagus. Kalau untuk makan sendiri cobalah kurma nabi," ujarnya *nyerocos* melayani tamu Indonesianya yang tengah mengamati aneka kurma. Ia mengaku sudah lima tahun tinggal di kota itu. Istri dan anaknya bahkan ikut pula. "Dua tahun sekali, setiap Lebaran, saya sekeluarga diberi tiket pulang-balik ke Indonesia," ujar pria asal Kalimantan itu. Anaknya, yang jejaka, bahkan sudah sekolah di kota itu. "Mungkin kehidupan saya di sini," ujarnya.

Nurdin pun bernasib baik seperti Amri. Ia bekerja di sebuah perusahaan, juga di Jeddah. Betah tentu saja. Dan, yang membuat makin kerasan, setiap musim haji, ia dibolehkan cuti. Lalu ia melamar sebagai pekerja musiman di Kantor Haji Jeddah. Ia jelas terbilang yang beruntung. Gaji? "Sangat lumayan," ujarnya sembari tersenyum.

Yang wanita tak kalah. Tak sedikit kisah sukses yang sudah ditulis di mana-mana. Wati, buruh tani di Desa Gembog, Pati, Jawa Tengah, tak pernah membayangkan bakal punya rumah permanen yang dilengkapi listrik dan pesawat televisi. Itu semua hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu menjadi kenyataan setelah Sutarti, anaknya, bekerja di Saudi. Ia benar-benar menjadi OKB alias orang kaya baru. Walaupun untuk membesarkan anak bungsunya itu, ia terpaksa menjual satu-satunya harta benda miliknya, seekor sapi.

Yuyun, sebut saja begitu, tak muncul dalam ujian akhir di sekolah lanjutan tingkat pertama, karena keburu berangkat ke Saudi. Ia tergiur melihat sukses teman-teman wanitanya, yang kembali dari bekerja di Arab. Mereka, di kampung, di Kecamatan Pontang, Serang, Jawa Barat, di saat krisis seperti ini, mampu membangun gedung dengan pagar *stainless steel*. Wah.

Beberapa daerah kantong tenaga kerja wanita, banyak yang kini sudah berubah wajah. Tulungagung, seperti pernah diungkapkan bupatinya, A. Boedi Soesetyo, mengandalkan pembangunannya dari tenaga kerja di mancanegara. Kuningan dan Cianjur di Jawa Barat, Madura, berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, menjadi kantong-kantong tenaga kerja wanita.

Agaknya bukan hanya daya tarik real yang membuat mereka tertarik magnet Tanah Arab. Kesempatan berhaji, adalah alasan lain. Ajib, misalnya, sudah enam bulan bekerja di perusahaan telekomunikasi. Kontraknya hanya setahun. Sebagai lulusan STM dengan keahlian di bidang telekomunikasi, ia mendapat gaji lumayan. Per bulannya, ia terima 1.500 real. Selevel gaji manajer di Indonesia. *Nggak* betah? "Yang penting saya bisa berhaji," ujarnya. Tiga teman yang bersamanya juga mengungkap alasan serupa. "Habis kontrak ini kami akan pulang," ujarnya.

Derita Tiada Ujung. Bekerja di negeri orang memang ibarat mengundi nasib. Ada dua kemungkinan yang bisa ditemui. Nasib baik, yaitu menemukan majikan yang baik, menerima gaji yang cukup dan rutin, atau sebaliknya, bertemu nasib sial, majikan kejam, gaji tak dibayar, eh si majikan suka berlaku tak senonoh. Keduanya ibarat pilihan yang, mau tak mau, harus dilewati.

AKHMAD SUPRIYATNA

Pasangan Hasyim dan Sukini: Tak berniat pulang

Perjudian sebenarnya sudah diawali sejak berangkat. Proses keberangkatan mereka harus melewati jalan berliku. Pertama, mereka harus menyediakan dana yang tidak sedikit. Kepada orang yang mengajaknya, ia harus bayar. Angkanya amat bervariasi. Mulai ratusan ribu hingga jutaan. Lalu, barulah mereka diboyong ke suatu tempat yang mereka sebut balai latihan kerja, untuk dididik berbagai keahlian.

Namun yang terjadi kerap menyeleweng. Mereka ditempatkan di tempat penampungan yang nyaris disekap. Dalihnya tinggal menanti keberangkatan. Kadang ruang seluas sembilan meter persegi dihuni sampai belasan orang. Terbayang ditumpuk bak ikan pindang.

Fakta yang pernah terjadi di Jalan Kosambi Cengkareng, tak bisa dilupakan begitu saja. Sekitar 200-an orang disekap berbulan-bulan dalam ruangan berpintu besi. Keluarga Heni Rohaeni yang datang ke PT Intracaraka, perusahaan yang merekrut Heni, untuk membebaskan Heni, diminta menyetor Rp4 juta sebagai biaya lepas kontrak. Untunglah beberapa pihak peduli pada nasib para TKW, dan akhirnya mereka bisa bebas.

Nah, kalaupun, keberangkatan mereka lancar, lalu selama di sana bernasib baik, belum tentu berhasil. Ketika kembali ke Tanah Air, mereka juga tak lepas dari persoalan yang pelik. Di bandara, ketika pesawat dari Jeddah tiba, mereka sudah menjadi incaran sindikat "penggarap TKI". Barang mereka ditarik sana-ditarik sini, akhirnya lenyap entah ke mana. Tak jarang, uang hasil kerja bertahun-tahun, lenyap seketika itu juga.

Toh, kisah tragis yang dialami Wiwin, pasangan Hasyim-Sukini, dan Heni Rohaeni tak menyurutkan niat banyak orang untuk berangkat ke Tanah Seberang. Antrean TKW di Bandara Soekarno Hatta terus saja mengalir.

Sayangnya, tak ada data yang jelas berapa sebenarnya jumlah TKI kita di Arab Saudi. Pihak konsul sendiri tak punya data akurat. Baru mulai Oktober 1998, data-data TKI mulai ditata. Itu tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap tenaga kerja yang datang dilengkapi dengan perjanjian kerja alias PK. Nah, informasi dalam PK inilah yang menjadi acuan. Hingga awal April misalnya, jumlah tenaga kerja Indonesia di Tanah Arab yang telah terdata mencapai 15.813 orang atau sekitar 2.000 orang per bulannya. Dari jumlah itu, 93% di antaranya adalah pembantu rumah tangga. Mereka dikirim oleh 56 perusahaan pengerah tenaga kerja. Yang paling banyak mengirim adalah Amri Margatama mencapai hampir 2.000 orang. Menyusul Avida Aviaduta 1.600 orang.

Dari jumlah itu paling banyak bekerja di Jeddah sekitar 6.000 orang. Menyusul Mekah (3.600 orang), Abha (1.460), dan Taif (1.390). Sedangkan di ibu kota negara, Riyadh, tercatat hanya sembilan orang. Begitu pula di Dahran, sebuah kota penting lainnya tercatat hanya lima orang. Selain identitas tenaga kerja yang masuk, atase tenaga kerja mencatat lengkap perusahaan PJTKI, agen di Arab, dan nama majikan. Dengan begitu, mudah melacak di mana keberadaan seorang TKI. Semua itu, menurut Gulfan, dilakukan untuk menekan kasus-kasus yang mengenaskan.■

AKHMAD SUPRIYATNA, A. SURYANA SUDRAJAT, DAN DUDI RAHMAN

Yang Resmi dan yang Nekat

Pengiriman TKI: Pemerintah memperketat syarat perjanjian kerja bagi setiap tenaga kerja ke luar negeri. Tapi, banyak juga yang menyelinap.

Berapa jumlah tenaga kerja kita di Arab Saudi? Tak gampang menjawab pertanyaan ini. Bahkan, pihak kedutaan sendiri tak punya angka pasti. "Angka yang kami punya hanya kira-kira," ungkap Muhammad Jusuf, konsul Indonesia di Jeddah. Alasan ini agaknya bisa dipahami. Mereka yang kini bekerja di tanah Arab itu masuk dengan beragam cara. Ada yang resmi datang sebagai tenaga kerja yang dilengkapi dengan perjanjian kerja dan visa kerja. Namun, tidak sedikit juga yang datang dengan visa umrah, visa ziarah, bahkan visa haji.

Nah, inilah yang belakangan menjadi masalah. Pemerintah Arab Saudi sudah mencegah masuknya tenaga kerja tak resmi melalui pemeriksaan paspor yang ketat. Selama musim haji, misalnya, pemegang paspor hijau diawasi lebih ketat karena dikhawatirkan mereka tinggal lebih lama untuk bekerja. Namun, tetap saja banyak TKI yang nekat. Terbukti ketika pemerintah Indonesia menyetop pengiriman tenaga kerja beberapa bulan silam, yang datang tetap saja tak putus.

Saleh Alwaini, mantan ketua umum Apjati, menganggap persoalan tenaga kerja ilegal ini sebagai persoalan serius. Kehadiran mereka jelas mengganggu pengiriman tenaga kerja yang legal. "Mereka mengancam tenaga ilegal dari berbagai aspek," ujarnya. Mulai dari aspek hukum, biaya rekrutmen, pun biaya untuk mendatangkannya.

Kendati demikian, Saleh melihat itu sebagai persoalan dilematis. Karena, di satu sisi, banyak orang Indonesia yang butuh kerja, sementara di sisi lain, tenaga legal lebih mahal ketimbang yang ilegal. "Selama yang ilegal ini diakomodasi, tetap saja yang legal susah untuk dibenahi," tegasnya.

Hal inilah yang kini tengah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Upaya ke arah pendataan yang lebih akurat memang telah dimulai. Sejak Oktober 1998, data-data TKI mulai ditata. Itu tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap tenaga kerja yang datang dilengkapi dengan perjanjian kerja alias PK. Nah, informasi dalam PK inilah yang menjadi acuan pendataan. "Kami memperketat syarat PK itu untuk membenahi pengiriman tenaga kerja," ujar Gulfan Afero, ditemui beberapa waktu lalu sebagai kepala bidang tenaga kerja KJRI Jeddah.

Di dalam PK itu memang terdapat informasi yang lengkap tentang tenaga kerja. Mulai dari identitas pribadi, tempat tinggal dan alamat yang mudah dihubungi, serta perusahaan pengirim dan agennya di Arab Saudi. Juga tempat bekerja, nama majikan, besarnya gaji, dan lamanya kontrak. Dengan PK, tak sulit bagi pihak pemerintah (kedutaan setempat) untuk mengetahui keberadaan tenaga kerja. Jika terjadi sesuatu akan mudah melacaknya.

AKHMAD SUPRIYATNA

Gulfan Afero: Menumpuk

Hasil pendataan itu memang menggembirakan. Dengan pendataan melalui komputer, pada periode Oktober-April, misalnya, jumlah tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi mencapai 15.813 orang atau sekitar 2.000 orang per bulannya. Dari jumlah itu, sekitar 14.700 orang adalah pembantu rumah tangga. Mereka dikirim oleh 56 perusahaan pengerah tenaga kerja. Dan, sebagian besar, 6.000 orang bekerja di Jeddah.

Sayangnya, pemberlakuan PK ini dalam prakteknya tidak gampang. Apjati, organisasi perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI), menerapkan mekanisme yang rada *njlimet*. Tengok misalnya dalam surat Apjati kepada seluruh perusahaan pengerah tenaga kerja pada Maret silam. Isinya tentang mekanisme pengesahan PK.

Pertama, PK terlebih dahulu harus ditandatangani oleh pengguna jasa (majikan) dan perusahaan jasa tenaga kerja asing alias PJTKA di Arab Saudi. Lalu bersama visa asli dan wakalah asli dikirim ke PJTKI di Indonesia dengan melampirkan fotokopi ID majikan. Lalu dibuat beberapa berkas dan dibawa ke Apjati untuk pengecekan dan pemberian nomor registrasi. Di sini, setiap PK dibebani biaya Rp50.000, dengan alasan untuk biaya legalisasi di KBRI atau KJRI. Kemudian berkas dikirim kembali ke Arab Saudi oleh Apjati. Barulah KBRI atau KJRI di Arab Saudi melakukan legalisasi. Setelah dilegalisasi, berkas PK dikirim kembali ke Tanah Air untuk diserahkan ke PJTKI melalui Apjati. Lumayan berbelit. Berkas perlu dua kali bolak balik dan itu tentu memakan waktu.

Mekanisme ini, menurut Gulfan, terlalu berbelit. Apjati mestinya bisa lebih mempercepat proses, tak perlu berkas bolak balik. Selain lama, juga membuat biaya makin besar.

Begitupun dengan tertatanya PK, sudah menggembirakan. Maka, tak heran tiap hari tumpukan PK terus menggunung sejalan dengan melonjaknya jumlah tenaga kerja yang datang.

Apjati sendiri optimistis mampu mengirim satu juta orang per tahun untuk ditempatkan ke mancanegara. Dari jumlah itu, nilai devisa yang bisa diraih sekitar US$5 miliar per tahun. Angka ini, menurut Saleh, cukup moderat dan realistis. Manfaat kepergian mereka juga akan terasa. Saleh mengungkap rasio 1:5. Satu orang TKI yang bekerja di luar negeri akan memberikan peluang kerja lima orang di Tanah Air. Langkah ini akan mampu mengurangi pengangguran. Terlebih di tengah krisis.■

AKHMAD SUPRIYATNA

Sumber Duit Tim Sukses

Tim Sukses Habibie: Kasus Bank Bali melibatkan sejumlah orang di lingkaran pertama Habibie. Juga kasus di sebuah proyek infrastruktur. Dari mana saja sumber uang mereka?

Djoko S. Tjandra, Manimaren, Setya Novanto, dan Baramuli, empat nama ini tengah ngetop belakangan ini. Tak ubahnya bintang koran. Merekalah yang banyak disebut-sebut tersangkut kasus Bank Bali, di samping tokoh utama, Rudy Ramli. Bukan hanya karena terkait langsung, empat nama itu juga punya hubungan dekat dengan Pesiden B.J. Habibie. Bahkan, dalam rangka mengegolkan Habibie sebagai presiden nama mereka disebut-sebut masuk daftar Tim Sukses Habibie. Djoko, Manimaren, dan Novanto, berada dalam Tim Khusus, sedangkan Baramuli sebagai koordinator operasional.

Lalu apa kaitannya dengan Tim Sukses Habibie? Nah, ini yang bikin seru. Semula tuduhan diarahkan ke Partai Golkar. Partai yang dipimpin Akbar Tandjung itu diduga menikmati uang hasil "penjarahan" itu sebagai dana politik. Namun, dari hasil verifikasi, seperti diungkapkan ketua tim verifikasi Golkar, Fadel Muhammad, "Tak ada yang masuk ke Golkar," katanya. (Lihat: *Ada Dua Kemungkinan*).

Maka, kalau bukan ke Golkar, duit panas Bank Bali itu bukan tak mungkin masuk ke kocek mereka. Hanya ada dua kemungkinan. Sebagai hasil usaha pribadi atau untuk Tim Sukses. Logikanya begitu. Sayangnya, berapa uang yang mereka kantongi, ini yang belum jelas. Hanya BPPN dan Bank Indonesia yang sudah punya data pasti. Namun, ada yang berbisik, Djoko mengantongi paling banyak. Lalu, Manimaren dan Setya. *Wallahu a'lam.*

Modus penggalangan dana ala Bank Bali ini memang empuk. Tanpa bersusah payah, sekali gebrak, setengah triliun langsung masuk kocek. Hasilnya, setara dengan sumbangan pemilu untuk partai politik dari 3.500 perusahaan atau 33.500 orang. Padahal, caranya cukup dengan memberi sedikit tekanan pada pihak-pihak terkait untuk segera mengucurkan duit.

Ada modus lain yang mirip-mirip kasus Bank Bali. Garukannya tak kalah wah: US$70 juta. Kalau dikurs sekarang, sekitar setengan triliun rupiah juga. Nah, *ndilalah*, si pelaku, yang juga berada dalam lingkaran kubu Habibie, juga menyebut bahwa duit itu akan diserahkan untuk kepentingan mengegolkan calon presiden. Yang ini tekniknya begini.

SATARI

Orang-orang dekat Habibie: Sedikit tekanan

Sebuah proyek infrastruktur kini tengah menjadi sorotan. Proyek yang sudah separo jalan itu akan mendapat bantuan dana dari pihak asing. Namun, sebagaimana lazimnya proyek infrastruktur, di dalamnya padat modal, berjangka panjang, ada unsur pemerintah, dan di masa lalu lekat nuansa KKN. Sehingga posisi tawar pemilik terhadap pemerintahan baru sangat lemah.

Nah, kondisi ini memudahkan pihak yang tahu untuk memeras. Untuk mengganggu proses negosiasi, pihak pesaing memasukkan penawaran harga lebih rendah ke pemerintah. Selisihnya US$100 juta. Karena merasa menawar lebih rendah, ia minta prosesnya didahulukan. Padahal, proyeknya sama sekali belum ada realisasi, masih di atas kertas. Lagi pula, sebenarnya ia tak punya daya untuk melanjutkan proyek.

Siapa yang tidak ketar-ketir. Apalagi, si pesaing, pengusaha kondang di dalam negeri, membawa-bawa nama tokoh superpenting. Ujung-ujungnya, ia menawarkan jalan keluar. Ia minta, 70% selisih itu diserahkan ke mereka, yang sebagian katanya, akan disetorkan ke pundi-pundi kas seorang calon presiden. Kalau *deal*, pesaing akan menarik penawarannya, dan proses untuk proyek pertama bisa berlangsung tanpa gangguan.

Nah, sayangnya, belum terungkap jelas nama proyek yang tengah diincar itu. Namun, kalau dicermati, salah satu proyek infrastruktur yang mungkin tengah menjadi incaran itu adalah proyek listrik Tanjung Jati B. Pasalnya, ia sudah berjalan setengah jalan sementara pesaing di bidang yang sama cukup banyak. Lagi pula, ia akan mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang.

Dua modus itu agaknya bakal menggembungkan kantong uang orang-orang di sekitar Habibie. Dan, masih ada lagi sumber duit yang bisa menarik uang. Yakni lewat perusahaan-perusahaan milik keluarga Habibie. Harap maklum, banyak perusahaan—yang paling terkenal adalah Grup Timsco—tercatat sebagai milik keluarga Habibie. Dengan sentuhan kekuasaan, perusahaan-perusahaan itu bisa menangguk duit banyak.

Upaya penggalangan dana oleh kubu Habibie ini memang cukup gencar. Muhammad S. Hidajat, wakil bendahara Golkar, mengaku mendengar ada upaya penggalangan dana oleh Tim Sukses Habibie. Dan cukup santer. "Tapi saya tak bisa menemukan buktinya," ujar bos Grup Puteraco itu.

Pengamat politik J. Kristiadi pun tak menam-

Fadel Muhammad, Bendahara Umum Golkar

Tak ada dana kasus Bank Bali masuk ke Golkar. Kubu Habibie menghimpun dana sendiri.

Ada Dua Kemungkinan

Anda ditugasi DPP Golkar sebagai ketua tim verifikasi kasus Bank Bali. Bagaimana hasilnya?

Saya kan mendapat tugas untuk melakukan verifikasi. Media massa menyebut ada indikasi keterlibatan DPP Golkar. Kemudian, saya mengambil langkah untuk melihat apakah ada aliran dana yang masuk dari PT EGP. Ternyata tidak ada. Lalu kami mengecek kepada pihak yang disebut-sebut media massa, yakni Novanto, Manimaren, dan Baramuli. Manimaren dan Novanto bahkan kami minta bikin pernyataan tertulis. Mereka menyatakan tidak pernah mengerjakan hal itu.

Tapi ada yang menyebut Setya Novanto telah menyumbang ke Golkar Rp2,3 miliar pada Mei lalu?

Saya tidak menemukan angka itu. Bahkan, ada juga yang mengatakan Rp4,1 miliar, ada yang bilang Rp1,9 miliar. Isunya berbeda-beda. Ini kan jadi membingungkan.

Namun Setya sendiri mengaku?

Kalau dia menyumbang Golkar itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Sebagai kader, pengusaha, wakil bendahara, pasti ada *dong*. Dari *company* dia ada Rp150 juta. Dari kelompok usahanya juga ada. Dan dia juga memberikan bantuan kepada teman-temannya dalam kapasitasnya sebagai caleg, saya pikir tetap ada. Saya tidak bisa mengatakan tidak dalam soal ini. Tapi kalau dalam jumlah Rp2,3 miliar, itu tidak ada.

Tapi terkait dengan banyak orang Golkar, seperti Baramuli, Manimaren, Novanto dan Djoko?

Itu yang sebenarnya harus saya hindari. Kita harus hindari kasus ini menjadi kasus politik. Mengapa? Karena, pertama ini adalah kasus yang tidak benar yang terjadi di Bank Bali. Kalau kita angkat ke permukaan, maka akan menjadi masalah kebijakan. Menurut saya bukan masalah kebijakan yang keliru, tapi pelaksana kebijakan yang keliru. Untuk itu oknum-oknum yang terlibat harus diberhentikan.

SATARI

Fadel: Bisa memahami

Dalam kasus Bank Bali, orang lalu menghubungkan Baramuli yang ujung-ujungnya ke Habibie?

Saya *nggak* bisa memberi komentar banyak. Karena saya juga punya bukti-bukti yang autentik mengenai hal itu.

Jadi menurut Anda, bagaimana keterlibatan orang-orang Habibie dalam berbagai kasus tersebut?

Menurut saya, jangan bermain-main dengan uang. Sekali ketahuan, maka nama baik presiden itu akan cacat untuk selama-lamanya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita tidak tahu siapa kawan dan lawan dalam konteks permainan politik. Bisa saja orang itu mengatakan pada kita bahwa dia membela Habibie, sambil minta duit. Terus setelah terima duit dia bilang-bilang kalau dia menerima uang dari kubu ini. Nah....

Lepas dari apa pun, berarti keberadaan Tim Sukses Habibie di luar tim sukses resmi dari DPP Golkar memang ada?

Kalau media massa memberitakan hal yang seperti itu, *nggak* mungkin *dong* ada asap kalau tidak ada api. Mengapa saya harus mengatakan tidak ada. *Nggak* apa-apa itu. Jangan diharamkan! Cuma menurut saya mereka itu tidak boleh formal. Yang boleh formal adalah DPP Golkar.

Mungkin saja mereka juga menghimpun dana?

Ya, terserah mereka. Kami *nggak* tahu.

Apakah dalam kasus Bank Bali ini membuat Presiden Habibie menjadi gerah?

Saya kira Pak Habibie juga menjadi risih dengan hal ini. Beliau kan manusia biasa. Kalau dibawa-bawa nama beliau risih. Cuma kalau beliau tidak merasa menerima uang Rp540 miliar kan perlu dibantah. Bahwa itu tidak benar. Dan beliau kan membantah lewat Mensesneg.

Dalam skandal Bank Bali tidak mungkin jaminan BPPN bisa cair tanpa tekanan atau lobi dari orang yang sangat berpengaruh. Spekulasi politis menyebut Habibie atau Baramuli. Bagaimana?

Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena ada orang dalam yang ikut bermain. Kemungkinan yang kedua, ada lobi-lobi yang sangat keras dari luar.

Berarti larinya ke politik?

Kemungkinan... baik dari Djoko, Rudy, atau yang lain. Bisa juga.

Tapi spekulasinya kan lobi-lobi itu dilakukan oleh kubu Habibie?

Itu hak orang berspekulasi.Itu hak dia.

Kalau benar ada Tim Sukses Habibie yang tidak resmi, apakah ini bisa dikatakan telah terjadi dualisme Tim Sukses?

Bukan hanya dualisme. Tapi "epuluhisme" DPP Golkar punya Tim Sukses formal. Kemudian ada sembilan tim sukses lain di luar yang resmi. Ada tim Teknologi, Tim ICMI, Tim Kelompok Islam, dan Tim ini-itu.

Bukankah tim sukses, seperti di Amerika tetap harus diaudit?

Nggak! Hanya tim kampanye presiden yang diaudit. Sebagai kasus, di Filipina, kan Presiden Estrada mempunyai banyak sekali tim sukses dalam pencalonan beberapa waktu lalu. ■

---
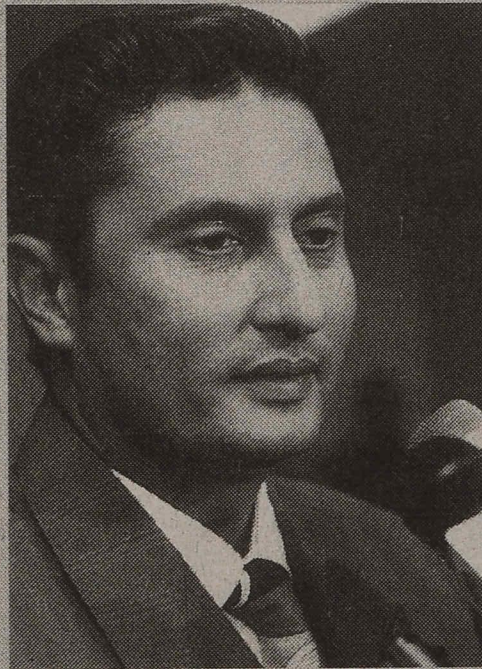
pik ada permainan semacam itu di pentas politik. "Kekuasaan di mana pun selalu berbau *money politics*," ujarnya.

Terbukti ada juga yang menolak. Adhi Satriya, dirut PLN menganggap kasus Tanjung Jati B murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan Habibie. Harga proyeknya, lanjut Adhi, hanya US$870 per kilowatt. Jauh lebih rendah dibandingkan Suralaya milik PLN yang mencapai US$1.265 per kilowatt, bahkan dibandingkan rata-rata dunia yakni US$1.120 per kilowatt. "Jangan termakan fitnah. Orang yang ngomong begitu, mau cari popularitas," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Sammy Supit, *vice president* PT HI Power Tubanan I, pengelola proyek Tanjung Jati B. "Ini wajar bisnis *kok*," tegasnya.

Penolakan juga dilontarkan adik Habibie, Sujatim Abdulrachman Habibie, yang selama ini dikenal mengelola Timsco. "Timsco sudah tutup. Sejak abang saya menjadi presiden, perusahaan-perusahaan itu saya *failure*," ujarnya dalam pembicaraan per telepon dengan *Panji*. Alasannya, lanjut Timmy, panggilan akrab Sujatim Abdulrachman, baik secara bisnis maupun politis tidak lagi menguntungkan. "Insya Allah tahun 2000 saya akan kembali berbisnis," ujarnya. Ia mengaku kini hanya mengurusi tiga media yang dimilikinya, Tabloid *Ibu & Anak*, *Eva*, dan *Libero*. Lalu soal keterlibatannya dalam Tim Sukses bagi kakaknya, Timmy juga mengelak. "Saya tidak tahu. *Ia am not in that cycle*. Tapi saya yakin kakak saya bersih," ujarnya.

Ya, tapi bagaimanapun, soal fulus, selalu menjadi masalah sensitif. Maka perlu kontrol yang lebih tegas. ■

A. Supriyatna
Laporan: *Elly Burhaini Faizal, Mas'ad T., dan Rini Susanti*

Ketika Mega Turun Gunung

Mega-Akbar: Setelah bertemu Akbar Tandjung, Megawati bertandang ke Matori Abdul Djalil. Penjatahan kursi menteri mulai terdengar. Akan terbentuk blok politik PDI Perjuangan-Golkar-PKB?

Ada yang berubah dari diri Megawati Soekarnoputri. Boleh dibilang cukup mencolok. Pertama, ia yang dulu lebih suka diam, kini mulai banyak berceloteh. Dengar saja komentarnya soal pidato Habibie. "Banyak mencontoh pidato PDI Perjuangan," katanya. Kedua, ia tak sungkan-sungkan lagi turun gunung, menyambangi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Bahkan, kalau perlu lawan politik ia datangi.

Nah, soal sambang-menyambangi itu, Megawati tampaknya bergerak cepat. Seakan mengejar ketinggalannya yang dulu. Setelah bertemu Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, di Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis pekan lalu, pimpinan PDI Perjuangan ini bertamu ke Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Matori Abdul Djalil di kantor DPP PKB, Senin (16 Agustus) lalu. Kabarnya, Megawati akan melanjutkan acara turun gunung ini ke pimpinan partai peraih kursi DPR/MPR lainnya.

Jadi pertanyaan juga, mengapa Mega mendadak gesit mendekati elite partai lain. Bisa jadi, itu merupakan reaksi atas munculnya poros tengah. Mungkin kubu Mega agak panik, ketika nama Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, muncul sebagai kandidat presiden dari poros tengah. Tokoh yang dikenal sebagai pendukung Mega—sekaligus potensial sebagai teman koalisi—tahu-tahu berdiri sebagai pesaing.

Tentunya Mega harus mencari kawan baru. Soalnya, sebagai pesaing, bisa jadi Gus Dur lebih 'berbahaya' ketimbang pesaing satunya, Habibie. Ketua umum PBNU itu disebut tokoh reformis—stempel paling pas untuk jadi presiden—dan juga lebih diterima banyak kalangan. Di atas kertas, kalangan partai Islam mungkin lebih suka menjatuhkan pilihan ke Gus Dur, ketimbang pada Mega atau Habibie. Sementara Golkar, sangat boleh jadi lebih naksir Gus Dur ketimbang Mega. Jadi, kalau demikian adanya, Mega memang perlu kawan baru.

Menurut Faisal Basri, sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), manuver Amien Rais memunculkan nama Gus Dur sebagai capres dari poros tengah memang dimaksudkan untuk menggertak Mega. "Bagi Amien, poros tengah itu menggertak kekuatan yang selama ini membeku. Itulah yang membuat Megawati cepat keluar dari sarangnya," ujar Faisal.

Menyimak penuturan Faisal, ada kemungkinan pencalonan Gus Dur tak serius benar. Dalam artian, tak benar-benar menginginkan Gus Dur menjadi presiden. Yang bersangkutan sendiri cuma berkomentar enteng atas pencalonan itu. "Saya sebenarnya tak ingin hidup di dunia politik. Jadi tak akan pernah mencalonkan diri," kata Gus Dur. Tapi, kalau dicalonkan? "Ya, mau," ucapnya.

Bibit Koalisi? Tidak tahu juga, apa benar sikap Mega itu terpengaruh oleh kehadiran poros tengah. Sehingga, ketika Badan Kontak Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (HMI) menggagas pertemuan dengan Akbar, Mega langsung setuju. Maka, ketemulah dua seteru bebuyutan itu di satu meja. Duduk bersanding selama 1,5 jam dalam acara silaturahmi yang berlangsung akrab dan penuh *guyon* itu. Walaupun masih ada kesan formalnya juga.

Tak ada, memang, semacam kesepakatan politik yang lahir dari pertemuan itu. Namun, bisa jadi itu merupakan bibit-bibit terbentuknya poros baru. Ini diakui sendiri oleh Muchyar Yara—alumni GMNI yang duduk di departemen hukum DPP Partai Golkar—pemrakarsa acara tersebut. Muchyar berharap, melalui silaturahmi tersebut kedua tokoh itu bisa menjalin kerja sama yang lebih jauh. Dengan dukungan moral tokoh senior alumni HMI Dahlan Ranuwihardjo dan alumni GMNI Sri Sumantri Marto Soewignyo, rencana acara gandeng tangan Mega-Akbar tampaknya berlangsung mulus.

Mega bertemu Akbar: Dipoles

Sri Sumantri dan Dahlan, yang selama acara duduk di sisi Megawati dan Akbar, seolah-olah memprovokasi kedua pimpinan partai itu supaya mau bekerja sama. Secara tegas Sri Sumantri mengharapkan agar kedua ketua partai bisa berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden. "Dengan terwujudnya pasangan ini, disintegrasi bangsa bisa dielakkan," kata Sri Sumantri. Sokongan dari Dahlan tak kalah kuatnya. "Karena PDI Perjuangan meraih kursi paling banyak maka Megawati layak duduk di kursi nomor satu sedang Akbar menduduki kursi nomor dua," ujar Dahlan sembari mengharapkan Habibie mundur dari pecalonan presiden. Potongan kalimat kedua tokoh ini disambut yel-yel hadirin, Mega presiden-Akbar wakil presiden.

Akbar membuka pembicaraan dengan mengungkap kembali kenangannya ketika sama-sama sekolah di SMP Perguruan Cikini dengan Megawati. "Waktu muda Mega lebih cantik," tutur Akbar. Setelah sedikit berbasa-basi, baru Akbar mengurai kata-kata politis yang dimulai dengan ucapan selamat atas

kemenangan PDI Perjuangan. "Partai Golkar yang meraih 120 kursi maupun PDI Perjuangan yang memperoleh 154 kursi merupakan poros politik yang penting. Kami dari Partai Golkar siap bekerja sama," ujar Akbar. Nah, ini poinnya.

Cuma, walau Akbar sudah blakblakan begitu, Mega tampaknya belum sepenuh hati menerima ajakan kerja sama Akbar. Ia malah mengeluarkan kalimat bernada sindiran. Saat ini, kata Mega, banyak yang berupaya mendekati dirinya. "Saya sendiri heran, saat saya dizalimi pemerintahan Orde Baru, semua orang yang dulu menjadi teman di masa kecil tidak ada yang berani mendekat. Tapi sekarang, setelah PDI Perjuangan meraih kemenangan, semua orang ingin mendekat. Jadi orang itu jangan suka berpoles, memoles, dan dipoles," ujar Mega dengan tegas. Ada nada kegeraman dalam kalimatnya. Mungkin juga dendam.

ARIF ARIADI

Mega dengan Matori: Jatahnya tiga menteri

Kursi Kabinet. Apakah itu berarti Mega menolak uluran tangan Akbar? Tampaknya tidak. Satu sumber di DPP PDI Perjuangan menuturkan kepada *Panji*, sudah ada bentuk kerja sama yang disiapkan Partai Banteng Bulat ini. Wujudnya adalah pembagian pos-pos kekuasaan. Akbar ditawari posisi wakil presiden dan lima jabatan menteri untuk kader Golkar lainnya.

Bagi-bagi kursi kabinet itu juga ditujukan kepada partai lain. PKB mendapat jatah tiga kursi di kabinet, menteri agama untuk Said Agil Siradj, menteri urusan wanita untuk Khofifah Indar Parawansa, dan menteri dalam negeri untuk Matori Abdul Djalil. Jatah tiga jabatan menteri itu, katakanlah, sebagai balas jasa Mega atas dukungan PKB. Wajar.

Tengok saja, dalam Musyawarah Pimpinan (Muspim) PKB, yang berlangsung pada Ahad (15 Agustus) lalu, partai berbasis massa NU itu secara resmi menyatakan mendukung calon presiden dari partai peraih suara terbanyak. "Sudah selayaknya partai yang tidak memenangkan pemilu memberikan kesempatan kepada partai yang memenangkan pemilu," ujar Matori. Dan, itu berarti Mega. Sehari setelah Muspim, datanglah rombongan Megawati—yang disertai Mochtar Buchori, Soetardjo Soerjogoeritno, Saefullah Yusuf, dan Alex Litaay—ke kandang PKB, untuk menemui Matori.

Sementara itu, PAN dapat dua jatah menteri. Kabarnya, Amien Rais tersinggung karena hanya dijanjikan jabatan menteri. PPP diberi jatah menteri investasi dan menteri pangan. Atas nama Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra diplot sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara. Partai Keadilan tidak luput sebagai pihak yang diajak bekerja sama. Partai berasas Islam ini dijanjikan memperoleh satu kursi menteri. Adapun TNI, tanpa diajak bicara pun konon dijatah dua kursi menteri. "Kita belum tahu reaksi apa yang akan ditunjukkan TNI karena mereka tidak diajak bicara," ujar sumber *Panji* itu.

Masih menurut sumber yang tadi, inti dari *policy* PDI Perjuangan dengan bagi-bagi kursi kabinet adalah untuk mengakomodasi kelompok Islam. "Ketimbang jika nanti Habibie yang jadi," ujar si sumber. Karena itu, banyak kader-kader PDI Perjuangan yang berbasiskan ormas Islam, menjadi anak emas Megawati. Sebut saja Saefullah Yusuf, ketua GP Ansor yang juga calon jadi PDI Perjuangan dari DKI Jakarta. Ia dipastikan akan mengisi kursi dirjen jika Megawati jadi presiden. Posisi yang sama juga akan diterima orang-orang seperti Zulvan Lindan. Sekadar catatan, Taufik Kiemas, Saefullah, dan Zulvan adalah sayap PDI Perjuangan untuk mendekati kelompok Islam.

Pastinya, tawaran dari kubu Banteng Bulat jadi dilema sendiri bagi Partai Beringin. Khususnya buat Akbar. Sebab, jika ia menerima tawaran itu, jelas Golkar akan cerai-berai. Faksi pendukung Habibie, seperti Slamet Effendi Yusuf, Marwah Daud, Fadel Muhammad, dan kelompok Iramasuka, tentu tak akan tinggal diam. Cuma, kalau Akbar bersikukuh mendukung Habibie, ia akan mendapat cap Golkar Hitam. Apalagi nama Habibie ikut terbawa-bawa kasus Bank Bali yang tersembul dari tim suksesnya.

Akbar sendiri, tampaknya punya cara berkelit dari dilema itu. Ia mengatakan, secara formal ia tetap menghormati putusan rapim untuk mencalonkan Habibie. Tapi dia mengatakan, tak menutup kemungkinan Golkar mengganti calon presidennya. "Langkah mengganti calon presiden akan diambil bila nama Habibie tidak mendapat dukungan signifikan untuk menjadi pemenang dalam Sidang Umum MPR nanti," ujar Akbar. Saat ini, Golkar masih berupaya 'menjual' Habibie ke partai-partai lain.

Adapun Habibie, yang sebelumnya juga sudah bagi-bagi kursi, tak tampak merasa dibokong Akbar, ia menilai pertemuan Mega-Tandjung sebagai hal yang positif karena menandai dimulainya kerja sama dan komunikasi antara pimpinan partai besar. "Habibie menilai pertemuan ini baik untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Saifullah Yusuf, usai bertemu Habibe bersama Pimpinan Pusat Pemuda Anshor, Jumat pekan lalu.

Pertemuan Mega dan Akbar yang mengejutkan itu, memang memancing reaksi sejumlah kalangan. Arbi Sanit, pengamat politik dari UI, tak kuasa menahan geram. "Saya menentang sekeras-kerasnya, dan tidak akan mengakui kalau pemerintahan (koalisi PDI Perjuangan dan Golkar) itu jika terbentuk," kata Arbi. Menurutnya, rencana kerja sama itu mengabaikan makna reformasi.

Di mata pengamat politik Syamsuddin Haris, pertemuan Mega dan Akbar tak lebih dari upaya memuluskan jalan Mega ke kursi presiden. "Saya melihatnya demikian," ujar Syamsuddin Haris. Menurut pengamat politik dari LIPI ini, untuk memperluas dukungan, mestinya Megawati tidak hanya berkomunikasi dengan Golkar dan PKB saja. Tetapi juga dengan partai-partai lain. Artinya, Mega jangan hanya sekadar ringan berkomentar atau gemar bertandang. Harus bisa juga melepaskan diri dari kendali orang-orang di sekelilingnya. ■

RIFWAN HENDRI
LAPORAN: AGUNG Y. ACHMAD DAN ELLY BURHAINI FAIZAL

Monumen Bermasalah

Monumen PDRI: Masyarakat Gadut, Sumatera Barat, menolak pembangunan monumen PDRI. Alasannya karena dibangun di atas tanah ulayat. Ada kepentingan untuk suksesi Habibie?

Niat Pemda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memiliki monumen PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) agaknya mesti ditunda dulu. Sebab, pembangunan yang rencananya bakal dimulai pada 20 Agustus ini mendapat tentangan keras dari para ninik mamak dan pemangku adat se-Kenagarian Gadut, Agam. "Kami sudah siap mati untuk mempertahankan hak adat kenagarian Gadut," kata Dt. Nagari Basa, salah seorang tokoh adat setempat.

Pokok soalnya adalah perselisihan tanah. Para pemangku adat kenagarian Gadut mengklaim, lahan yang rencananya dipakai untuk monumen adalah tanah ulayat kaum. Kalaupun hendak dipakai, mestinya berunding dulu dengan para pemangku adat, termasuk, misalnya, soal nilai ganti yang memadai.

Namun, di lain pihak, Pemda Kabupaten Agam bersikukuh bahwa lahan tersebut milik TNI AU (dulunya AURI). Sebab, lahan seluas 114 hektare itu tadinya adalah lapangan terbang perintis milik TNI AU, hasil pampasan perang Jepang. Jadi, pihak Pemda merasa tak perlu membayar ganti kepada masyarakat. Walaupun di atas lahan itu banyak dibuat sawah dan ladang milik penduduk setempat.

Saling klaim itu membuat suasana di Gadut, lima kilometer sebelah utara Bukittinggi, Sumbar, menjadi agak tegang. Warga masyarakat, disokong para pemangku adat, memasangi bendera merah. Di bawahnya ditulisi 'tanah milik rakyat, bukan AURI'.

Benarkah itu lahan milik adat? Begitulah. Setidaknya demikian pengakuan Dt. Panduko Sati, salah seorang pemangku adat Gadut. Ceritanya begini. Ketika Jepang masuk dulu, mereka memaksa penduduk menyerahkan tanah garapan untuk dijadikan lapangan terbang. Memang ada ganti rugi. Tapi jumlahnya tak seberapa. "Untuk mengganti tanaman dan rumah yang digusur saja tidak cukup. Apalagi untuk tanahnya," ujar Panduko Sati. Ia termasuk pemilik tanah yang mendapat ganti rugi.

Ketika Jepang terusir dari bumi Indonesia, otomatis lapangan terbang itu dikuasai AURI. Cuma, lapangan terbang tersebut beroperasi hanya sampai 1952 untuk selanjutnya ditutup. Karena itulah warga kemudian masuk lagi dan mengolah lahan menjadi pesawahan dan ladang. Bahkan, di situ tumbuh permukiman penduduk. Tercatat ada lima desa yang masuk dalam kawasan bekas lapangan terbang ini.

Pada 1997 mulai timbul perselisihan. Ketika itu, Pemda berniat mendirikan monumen pesawat Avro Anson. Pesawat itu bekas digunakan PDRI, hasil sumbangan masyarakat Sumatera Barat. Warga tak setuju tanah garapan diambil begitu saja. Tapi, pembangunan berjalan terus. Dan kini, monumen Avro Anson berdiri tegak.

NITA INDRAWATI

Lahan yang jadi masalah: Sudah siap mati

Lalu, kini, sebagian lahan—sekitar lima hektare—mau dipakai untuk membangun monumen PDRI. Warga pun tahu, Jenderal Besar (Purn.) A.H. Nasution, selaku penasihat Yayasan 19 Desember 1948, sudah meminta Presiden Habibie untuk meletakkan batu pertama, tanda pembangunan dimulai, pada 20 Agustus nanti.

Itulah yang membuat para pemangku adat bereaksi sengit. Soalnya, alih-alih mendapat ganti rugi, diberi tahu dan diajak berembuk pun tidak. Makanya, mereka yang tergabung dalam KAN, membuat pernyataan sikap, yang ditandatangani 38 ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, dan bundo kandung se-Kenagarian Gadut. Intinya, mereka menolak pembangunan monumen.

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, pihak Pemda menugasi DHD'45 untuk merundingkan masalah itu dengan warga. Cuma, kata Sekretaris DHD'45 Azwar Datuk, tak ada kesepakatan dalam perundingan. "Mereka (ninik mamak) minta syarat yang tak mungkin dipenuhi," kata Azwar. Mantan Komandan Kompi di Batalion Singa Harau pada zaman PDRI ini menuturkan, sebenarnya lahan itu memang milik TNI AU.

Berhubung tak ada kata sepakat, Azwar menyiratkan, kemungkinan pembangunan monumen akan dialihkan ke tempat lain. Kabarnya, alternatif tempat yang dipilih adalah daerah Baso. Masih di Kabupaten Agam juga. Di situ, kata Azwar, ada tanah yang sudah diserahkan oleh ninik mamak setempat kepada pemerintah yang dulu sedianya bakal dibangun Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Namun, penolakan rupanya tak hanya datang dari kalangan pemangku adat. Keluarga Mr. Syafruddin Prawiranegara (presiden PDRI), pun protes keras atas pembangunan monumen. "Kami tidak rela bila PDRI dicatut untuk kepentingan politik praktis," kara Farid Prawiranegara, salah seorang putra Syafruddin. Maksudnya? Menurut Farid, pembangunan monumen sebenarnya tak lepas dari upaya Habibie untuk meraih kembali kursi kepresidenan.

Dugaan itu, lanjut Farid, didasari oleh berbagai faktor. Misalnya, kenapa memilih pembangunan pada 20 Agustus, bukan 22 Desember. "Pemerintahan darurat kan terbentuk pada 22 Desember. Jadi, cocokkan *dong* dengan sejarahnya," ujar salah seorang ketua DPP Partai Bulan Bintang ini. Lagi pula, sebenarnya PDRI bertempat di Koto Tinggi, bukan di Agam. "Jadi kalau mau membangun, dirikan di sana," ucap Farid.

Farid mengaku tak dihubungi siapa pun dalam hal perencanaan pembangunan monumen. "Pihak keluarga tak dihubungi. Kami tak tahu-menahu," ujarnya. Ia malah mempertanyakan keberadaan Yayasan 19 Desember 1948, yang tahu-tahu mengurusi pembangunan monumen. "Apa urusannya mereka dengan PDRI? *Kok* tiba-tiba getol mengurusi monumen PDRI," ujar Farid tajam. ■

AULIA HS

LAPORAN: *NITA INDRAWATI (PADANG)*

Ambon, Masih Saja

Kerusuhan: Sudah seratus lebih korban jiwa dalam kerusuhan tahap dua di Ambon. Sebagian mati kena tembakan. Ada pula provokator berseragam aparat yang tertangkap tangan.

Ambon ibarat hutan yang terbakar. Dari satu titik api, dengan cepat menyebar menjadi kebakaran luas. Bermula dari bentrokan di kawasan Perumnas Poka, Kota Madya Ambon, kerusuhan dengan cepat menjalar ke seantero kota. Bahkan merembet ke daerah pinggiran. Hingga saat ini, tercatat paling tidak 104 nyawa melayang dan 400 lebih luka berat dan ringan. Insiden terakhir dilaporkan terjadi pada Jumat petang pekan lalu. Bentrokan antarkelompok putih dan kelompok merah meledak di kawasan Gunung Malintang, Sirimau, Ambon.

Pada insiden di Gunung Malintang, pihak aparat mencatat, paling tidak ada 12 warga sipil tewas. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari itu, mengingat ada sejumlah korban yang belum dievakuasi. "Kemungkinan masih ada korban di kolasi kejadian. Belum dievakuasi karena lokasinya sulit dijangkau kendaraan," kata Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodalops) Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease Kapten (Pol.) Marthen Johanis, sehari setelah bentrokan meledak.

Insiden kali itu juga mengakibatkan puluhan rumah terbakar. Hancur dibakar massa. Menyusul terjadinya keributan, kantor-kantor dan pertokoan langsung tutup. Seluruh karyawannya pulang mengamankan diri. Hari itu, Kota Ambon seperti dalam suasana perang. Tak ada penduduk yang keluar. Yang ada cuma pasukan aparat keamanan bersenjata lengkap yang berkeliling mengamankan kota.

Memang, sejak kerusuhan kedua meletup pada 27 Juli lalu, terasa benar ketegangan di Ambon. Seperti dituturkan Kadispen Mabes Polri Brigjen (Pol.) Togar Sianipar, keadaan Ambon benar-benar genting dan mencekam. Kedua kelompok yang bertikai—kelompok putih (muslim) dan kelompok merah (nonmuslim)—sepertinya saling mengincar. Sedikit saja aparat lengah, bentrokan segera berkobar. Dan, tak jarang membawa korban jiwa.

Belakangan, marak pula aksi culik-menculik. Ketua Yayasan Al-Fatah Ambon, Abdullah Soulisa, mengatakan, hampir setiap hari ada saja yang jadi korban penculikan. Di Teluk Ambon, dalam beberapa hari ini kerap ditemukan mayat terapung. Hanya, soal culik-menculik ini, "Kita harus selidiki kebenarannya," kata Togar.

Pada kerusuhan tahap dua itu, tak sedikit korban yang tewas akibat luka tembak. Inilah yang kemudian memunculkan isu bahwa ada aparat yang ikut bermain. Apalagi ada korban yang melihat orang berseragam Brimob ataupun tentara berdiri di salah satu kelompok. Korban yang bernama Adja Pelu mengungkapkan, ia dan kelompoknya ditembaki orang-orang berseragam aparat. "Jelas itu perbuatan aparat. Kami ditembaki dengan senjata organik," kata Adja, yang kini terbaring di RS Al-Fatah.

Kebetulan pula, dalam kasus itu, yang ditembaki adalah kelompok putih. Seperti dituturkan sejumlah korban dari kelompok putih, serangan balik dilakukan karena mereka diserang terus oleh kelompok merah. Nah, ketika menyerang balik itulah tahu-tahu mereka disambut berondongan peluru. Dan, seperti kesaksian Adja, ada orang berseragam aparat terlihat menembaki penyerbu.

Cuma, tudingan itu langsung dibantah Kapolda Maluku Kol (Pol.) Bugis M. Saman. Bugis yang baru bertugas beberapa bulan di Maluku menyatakan, kontak senjata itu bukan dilakukan aparat Brimob. "Barangkali dilakukan orang-orang sipil atau preman dari Jakarta," kata Bugis. Sementara itu, Pangdam XVI Patimura Brigjen Max. M. Tamaela berjanji akan menindak setiap aparat yang terlibat dalam bentrokan.

Lantas, kalau bukan tentara atau Brimob, lalu siapa? Kembali keterlibatan provokator disebut-sebut. "Ini tidak lepas dari provokator," ujar Gubernur Maluku M.S. Latuconsina. Dan, mungkin pula ada kaitannya dengan konstelasi politik nasional. Melihat fakta-fakta yang terungkap, mungkin ada benarnya. Misalnya, pada Kamis pekan lalu, warga yang hendak unjuk rasa ke Mapolda Maluku, tahu-tahu ditembaki orang tak dikenal yang menggunakan mobil kijang berwarna hijau.

Selain itu, sudah ada pula provokator yang tertangkap tangan. Namanya M. Rumelus. Anak muda ini dipergoki beberapa kali berada di lokasi kerusuhan. Terkadang berada di kelompok putih, lain waktu di kelompok merah. Ia ditangkap ketika hendak melemparkan bom rakitan. Dari dalam tasnya, petugas menemukan telepon genggam serta daftar nama tokoh Islam dan Kristen. Cuma, bagaimana nasib Rumelus selanjutnya tak diketahui lagi.

Sebenarnya tak hanya Rumelus yang tertangkap. Ada empat provokator lain yang juga ditangkap saat terlibat pertikaian massa. Dari tangan mereka, aparat menyita telepon genggam dan *handy talky*. Alat itu digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya dalam mengompori massa. Bahkan, mereka memakai seragam aparat, lengkap dengan pangkatnya. Tapi tentu saja palsu.

Pertanyaannya, benarkah peluru yang merobohkan para korban berasal dari para provokator? Ini yang belum jelas. Cuma, santer beredar isu, ada senjata gelap sebanyak 12 peti kemas, masuk ke Ambon dua pekan lalu. Benarkah? Kapuspen TNI Mayjen Syamsul Ma'arif mengatakan, hingga saat ini Kodam Patimura dan Polda Ambon masih menyelidiki kebenaran isu tersebut. ■

AULIA HS
LAPORAN: *IQBAL SETYARSO*

AP

Suasana Ambon: Dalihnya ulah provokator

ARIF ARIADI

Habibie berpidato: Masih berisi janji

Menebar Jargon Ala Habibie

Pidato Presiden: Tak banyak hal baru dalam pidato Presiden Habibie. Pengusutan KKN, misalnya, masih dinilai sebagai *lips service.*

Dua kali sudah Presiden B.J. Habibie berpidato di MPR dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI. Yang pertama, dilakukan tahun lalu, saat belum lama kelimpahan jabatan presiden dari Soeharto yang memutuskan *lengser*. Ketika itu, Habibie banyak memberi janji dan tekad. Nah, kali kedua ini, pidato Habibie diharapkan bakal menjawab semua janji dan tekad itu. Tapi?

Ah, ternyata tak jauh beda dengan pidato pertamanya. Juga tak ada *greget*, seperti yang diharapkan banyak orang. Khususnya dalam menjawab pidato Megawati yang disampaikan beberapa waktu lalu. Padahal Mensesneg Muladi pernah mengatakan, Habibie bakal menjawab 'kecaman' Ketua PDI Perjuangan itu terhadap pemerintahannya. "Mungkin dalam pidato 17 Agustus atau SU MPR, yang jelas akan dijawab secara berbudaya," kata Muladi ketika itu. Namun, jawaban yang dinantikan kali ini tak muncul. Malah, Megawati menyebut pidato Habibie cuma mencontoh pidatonya.

Pidato Habibie, yang memakan waktu sekitar dua jam, sebagian besar memang masih berisi janji dan tekad. Penanganan masalah Aceh misalnya. Ia hanya mengatakan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. "Kedatangan saya ke Aceh disertai hati yang tulus dan euh...," Habibie sempat tersendat di sini, sebelum melanjutkan, "Ikhlas, begitu," ucapnya. Lalu ada tekadnya yang lain. Pemerintah bertekad memecahkan persoalan Aceh tidak lagi dengan pendekatan keamanan, tetapi dengan pendekatan terpadu secara struktural dan kultural," papar presiden.

Lalu, terhadap berbagai praktek KKN, Habibie meminta seluruh rakyat bersabar menunggu hasil kerja pemerintahannya. Ia memaparkan kinerja para pembantunya dalam mengusut KKN. Dalam periode 1 April hingga 31 Maret 1999, penyelidikan kasus KKN naik 595%, penyidikan naik 349%, dan penuntutan naik 321% dibanding tahun sebelumnya. "Dari sejumlah kasus KKN yang sudah ditangani itu, temuan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp7,2 triliun," urainya.

Soal krisis ekonomi? Dengan bangga presiden mengatakan, perekonomian Indonesia kini dalam tahap pemulihan. Indikasi yang digunakan antara lain nilai tukar rupiah yang sampai awal Juli lalu terus menguat, produk domestik kotor yang terus positif hingga triwulan kedua 1999, harga berbagai kebutuhan yang relatif stabil, serta tingkat inflasi yang rendah. Dan itu, bukan karena faktor eksternal saja. "Di situ ada kerja dari pemerintah," ucap Habibie.

Namun itulah, pidato yang disampaikan Habibie dengan menggebu—seperti ciri khasnya kalau berbicara—memang masih sebatas *lips service*. Penyelesaian damai di Aceh hingga saat ini masih sebatas janji di Senayan. Sementara di Aceh, penyelesaian masalah masih menggunakan senjata.

Akan halnya niat memberantas KKN, juga masih diragukan. Koordinator Badan Pekerja *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Teten Masduki mengatakan, kasus-kasus KKN yang saat ini tengah diusut pemerintah hanyalah kasus-kasus kecil, bukan megakorupsi yang dilakukan elite penguasa. Sehingga, "Laporan pemerintah itu sekadar *lips service* dan manipulatif," ucap Teten.

Ketua Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total (Bappertal) Syafril Sofyan punya pendapat sama. Syafril menilai, pemerintah Habibie tak berniat menyelesaikan KKN secara tegas dan tuntas. "Terbukti dalam pidatonya ia sama sekali tak menyinggung perkembangan kasus KKN Soeharto, Andi M. Ghalib, BPPN, Bank Bali serta berbagai kasus megakorupsi lainnya," tandasnya.

Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi UGM Revrisond Baswir, mengeritik pidato Habibie dalam hal pemulihan ekonomi. Revrisond menilai, Habibie justru tak menyentuh persoalan riil meski nilai tukar rupiah menguat dan inflasi terkendali. "Sektor riil dan perbankan yang hancur lebur tidak disentuh. Termasuk soal utang apakah ada penjadwalan atau pengampunan," katanya. Baswir menilai, yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas stabilisasi kurs. Belum ke arah pemulihan. "Buktinya dalam seminggu terakhir stabilitas kurs kembali goyah," ujar Baswir.

Meski berpandangan serupa dengan Baswir, *toh* Wakil Ketua Dewan Ekonomi PAN Marjanto Danusaputro juga melihat kebenaran ucapan Habibie. "Memang benar saat ini perekonomian kita sudah melewati *bottom* dan sedang menuju *up*," katanya. Namun ia mengingatkan, indikator ekonomi tak cukup hanya dilihat dari tingkat inflasi dan menguatnya nilai tukar rupiah. Tapi, juga harus melihat praktek KKN yang masih menggurita dan hancurnya sektor perbankan. Sehingga, sektor riil yang sesungguhnya belum bergerak justru dilupakan presiden.

Lantas, kapan Habibie akan menjawab semua janji yang sudah terucap itu? ■

YUNITA TRIHANDINI
LAPORAN: AGUS SATMOKO ADI DAN DENNY R. SECAATMADJA

STEMBUS ACCORD

Berkutat Soal Rumusan

Delapan parpol Islam yang mendapatkan tambahan kursi melalui *stembus accord* tampaknya belum bisa menikmati hasil. Pasalnya, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) belum juga menetapkan mekanisme penghitungan sisa suara. Jadi, kedelapan parpol Islam itu belum tahu persis berapa kursi yang berhasil digaet lewat *stembus accord*.

Tersendatnya penghitungan sisa suara itu tak lepas dari tindakan Ketua PPI Jakob Tobing, yang mengeluarkan radiogram yang berisi rumusan penghitungan sisa suara kelompok *stembus accord*. Jakob mengeluarkan kebijakan penghitungan suara *stembus accord* dengan menggabungkan menjadi satu kelompok kemudian baru membaginya dengan bilangan pembagi pemilih. Ini bertentangan dengan radiogram KPU No. 145, yang menyebutkan, pembagian kursi hasil *stembus accord* dilakukan dengan merujuk petunjuk teknis yang disepakati partai peserta *stembus accord*. Menanggapi hal itu, Nur Mahmudi Ismail, presiden PK, protes keras. "Itu bertentangan dengan filosofi dasar *stembus accord*," ucapnya. Radiogram itu akhirnya memang dicabut. Tapi, penghitungan sisa suara masih belum jelas.■

ARIF ARIADI

Stembus accord partai Islam: Belum menikmati hasil

SIDANG UMUM

Tak Boleh Ada Suporter

Terpolarisasinya masyarakat pada dua kekuatan politik pemenang pemilu, membuat Panglima TNI Jenderal Wiranto mengambil sikap waspada. Terlebih ketika terdengar kabar bakal ada pengerahan massa dari parpol pada Sidang Umum MPR mendatang. Makanya, Wiranto menegaskan, sidang umum tak boleh diramaikan oleh pengerahan massa. "Sidang umum hanya diikuti 700 orang wakil rakyat. Tidak ada peraturan yang menyebutkan sidang umum diikuti anggota MPR yang diperkuat suporternya," tegas Wiranto.

Menurut jenderal bintang empat ini, upaya pengerahan massa seperti itu cuma bertujuan menekan dan meneror kelompok lainnya. Walhasil, sidang umum tak akan berjalan dengan benar. Wiranto juga berpendapat, upaya pengerahan massa merupakan pelaksanaan demokrasi yang tidak etis, tidak bermoral, dan tidak terhormat. "Apa pun hasilnya hanya akan menimbulkan pro dan kontra yang memperpanjang upaya penyelesaian masalah bangsa. Karena itu saya akan mencegahnya dengan landasan hukum," ujar Wiranto menandaskan.■

KORUPSI

Rudini Kena Tuding Juga

Ada berita paling gres dari dugaan korupsi di tubuh KPU. Berita yang dilansir *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada Jumat pekan lalu itu menyebut keterlibatan Ketua KPU Rudini, di samping Agus Miftach, dalam tindakan tak terpuji itu. "Rudini dan Agus Miftach terlibat penyalahgunaan kekuasaan sehingga muncul kasus korupsi itu," ujar Koordinator Pekerja ICW Teten Masduki kepada wartawan.

Data itu didapat dari hasil investigasi dan wawancara sejumlah sumber di KPU serta perusahaan rekanan. Terungkap, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Rudini saat tender penyediaan tinta pemilu. Tender tinta senilai Rp7,5 miliar itu dibayar dengan uang APBN. Padahal, dana pengadaan tinta sudah disediakan UNDP. Sedangkan Agus, terlibat dalam manipulasi pencetakan kertas suara. ICW juga menemukan *mark up* harga kertas suara dari Rp70 per lembar menjadi Rp111 per lembar.■

UTUSAN DAERAH

Pasukan Pengaman Habibie

Partai Golkar memutuskan untuk menerjunkan sejumlah menteri dan mantan menteri untuk memperkuat posisi mereka di MPR. Rakornas X Golkar pekan lalu memutuskan Menpora Agung Laksono (Sulawesi Tengah), Menaker Fahmi Idris (Kalimantan Selatan), Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat), Menpera Theo L. Sambuaga (Sulawesi Utara), mantan menaker Abdul Latief (Sumatera Barat), Abdul Gafur (DI Aceh), Marzuki Darusman (NTT), dan Tuswandi (NTB) untuk menjadi utusan daerah. "Kehadiran mereka di MPR kita tetapkan untuk memperkuat fraksi kita di lembaga itu terutama menghadapi SU mendatang," ucap Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung.

Golkar yang memenangkan pemilu di 14 provinsi, terutama di luar Jawa, memang berpeluang mendapatkan kursi tambahan dari wakil Utusan Daerah (UD). "Perkiraan kami setidaknya Golkar akan mendapat tambahan tiga sampai empat kursi dari Utusan Daerah," ujar fungsionaris Golkar Slamet Effendi Yusuf. Peluang itulah rupanya yang dipakai untuk membangun pagar betis demi mengamankan Habibie di bursa capres pada SU kelak.■

Ketika Rupiah Berulah

Gejolak Kurs: Faktor politik dan ekonomi secara bersama memperlemah rupiah. Skandal Bank Bali menjadi pemicunya. Bagaimana dengan soal penurunan suku bunga?

Wahyono tidak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah membaca koran pagi itu. Di sana tertulis, rupiah pada perdagangan Selasa, 10 Agustus lalu, telah anjlok nilainya terhadap dolar AS sebesar Rp295 dibanding hari sebelumnya sehingga nilainya menjadi Rp7.340. Saking kesalnya, dibantingnya koran itu dan ia pun terduduk lesu.

Kekesalannya bisa dimaklumi. Seminggu sebelumnya, Wahyono—pemilik usaha bengkel pengerjaan logam di Pondok Gede, Jakarta Timur—baru saja menandatangani kontrak pemasokan subkomponen di satu pabrik alat berat senilai Rp120 juta. Komponen yang akan dibuatnya itu, semacam dudukan kabel pada sistem elektrik alat berat, 60% bahan bakunya masih harus diimpor. Celakanya, ketika membuat proposal pengajuan harga sebulan lalu, Wahyono masih memakai perhitungan nilai tukar Rp7.000 untuk setiap dolar AS. Ia khawatir dalam minggu-minggu ini—saat dia mesti membeli bahan baku—rupiah terus melemah. Bisa-bisa keuntungan yang sudah di depan mata amblas ditelan melemahnya nilai tukar.

Kekhawatiran Wahyono memang menjadi kenyataan. Sepanjang perdagangan minggu lalu rupiah terus melemah. Sebenarnya melemahnya rupiah sudah dimulai sejak awal Agustus, namun tidak terlalu nyata. Misalnya saja pada 2 Agustus, rupiah berada pada posisi Rp6.870 per dolar AS dan terus melemah hingga Rp7.015 pada Jumat, 6 Agustus. Kemudian minggu berikutnya, dimulai dengan Rp7.045 per dolar AS pada Senin, 9 Agustus, anjlok menjadi Rp7.340 pada 10 Agustus dan terus merosot hingga Rp7.890 pada penutupan perdagangan Jumat. Bahkan Rabu, pada sesi perdagangan siang, rupiah sempat melewati level Rp8.000, namun bisa ditekan lagi di bawah angka psikologis itu setelah diintervensi Bank Mandiri.

Skandal Bank Bali. Kalangan analis tidak melihat masalah fundamental ekonomi menjadi penyebab melemahnya rupiah. Mereka meyakini faktor politik dan ekonom—termasuk ricuh di KPU, kepastian sidang umum, siapa calon presiden, dan kasus Bank Dwipa—secara bersama telah membuat para pelaku pasar uang mulai ragu pada prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Sebagian besar dari analis menunjuk berlarut-larutnya kasus Bank Bali, yang merembet pada masalah politik di tingkat elite menjadi pemicu anjloknya rupiah. Ini bisa dipahami mengingat sebelum ada kasus itu rupiah masih bertahan cukup stabil di bawah Rp7.000 untuk setiap dolar AS. "Mereka menduga kasus serupa Bank Bali juga terjadi di bank-bank lain yang sedang menjalani rekapitalisasi," ujar Felia Salim, pengamat bursa dan pasar uang, yang juga mantan direktur Bursa Efek Jakarta. Skandal itu, di mata pelaku pasar uang, menunjukkan proses penjaminan Bank Indonesia ternyata tidak berjalan seperti yang dijanjikan. Ini tentu saja memperburuk citra perbankan nasional kita.

Skandal Bank Bali, di mata Sri Adiningsih, pengamat ekonomi dari FE UGM, telah membuat pelaku pasar makin tidak percaya pada program restrukturisasi perbankan. Keberhasilan Bank Bali menggaet mitra asing, Standard Chartered Bank, selalu ditonjolkan oleh Departemen Keuangan dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai salah satu keberhasilan program rekapitalisasi. "Tapi nyatanya yang diunggulkan itu juga menyimpan banyak masalah. Akibatnya pasar jadi tidak percaya," ujarnya.

Miranda Goeltom, deputi gubernur Bank Indonesia, pun mengakui bahwa kasus Bank Bali memang ikut berperan, bahkan menjadi pemicu sehingga menciptakan sentimen pasar yang berakibat *panic buying* (pembelian dolar yang membabi buta). "Namun, saya melihat melemahnya rupiah lebih banyak disebabkan *panic buying* dari pelaku pasar yang kurang memahami itungitungan. Selain itu masih banyak penyebab lain baik dari dalam maupun luar negeri, misalnya melemahnya baht Thailand, yang mendorong terjadinya *panic buying*," katanya.

Penurunan Suku Bunga. Selain kasus Bank Bali, tudingan penyebab melemahnya rupiah juga mengarah pada upaya penurunan suku bunga yang kelewat cepat. Ini, jika mau dicari kambing hitamnya, tak lepas dari dosa IMF. Pertengahan Juli lalu, Hubert Neiss, direktur IMF untuk Asia Pasifik, pernah mengatakan bahwa bukan tidak mungkin suku bunga dalam negeri akan mencapai angka di bawah 10%. Neiss mendasarkan ucapannya pada keberhasilan BI menurunkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia)—diprediksikan mencapai 11% pada akhir tahun ini—dan tingkat inflasi yang rendah pada tahun ini. Sinyal dari Neiss itu membuat investor waspada. Suku bunga yang sudah mendekati suku bunga dolar AS, oleh Anton B.S. Hudyana, dirut Bank Artha Graha, memang dinilai bisa membawa bahaya. "Jangan-jangan orang malah beralih ke dolar dan kemudian rupiah terpuruk lagi," ujarnya pekan lalu. Dan, akhirnya itulah yang mungkin terjadi pekan ini.

Keinginan BI menurunkan suku bunga secara cepat sesungguhnya bisa dipahami. "Karena kalau suku bunga tinggi, biaya rekapitalisasi perbankan pun menjadi lebih besar akibat pemerintah harus membayar bunga obligasi yang tinggi," ujar Sri Mulyani Indrawati. Namun, penurunan yang terlalu cepat, dilihat oleh pengamat ekonomi dari LPEM UI ini justru bisa menimbulkan krisis kepercayaan lagi. "Orang masih belum percaya pada kemampuan rupiah menjaga dirinya, mengingat pengalaman masa lalu," kata Sri Mulyani. Apalagi kemudian muncul isu, Federal Reserve, bank sentral AS berniat menaikkan suku bunga untuk mencegah terjadi ekonomi yang memanas. Bisa jadi isu ini ikut memicu pembelian dolar secara besar-besaran karena

Kurs Rupiah terhadap Dolar

Tanggal	Rp/US$
2/8/99	6870
3/8/99	6885
4/8/99	6910
5/8/99	6963
6/8/99	7015
9/8/99	7045
10/8/99	7340
11/8/99	7770
12/8/99	7885
13/8/99	7890

Rupiah: 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 8000
Tanggal: 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8
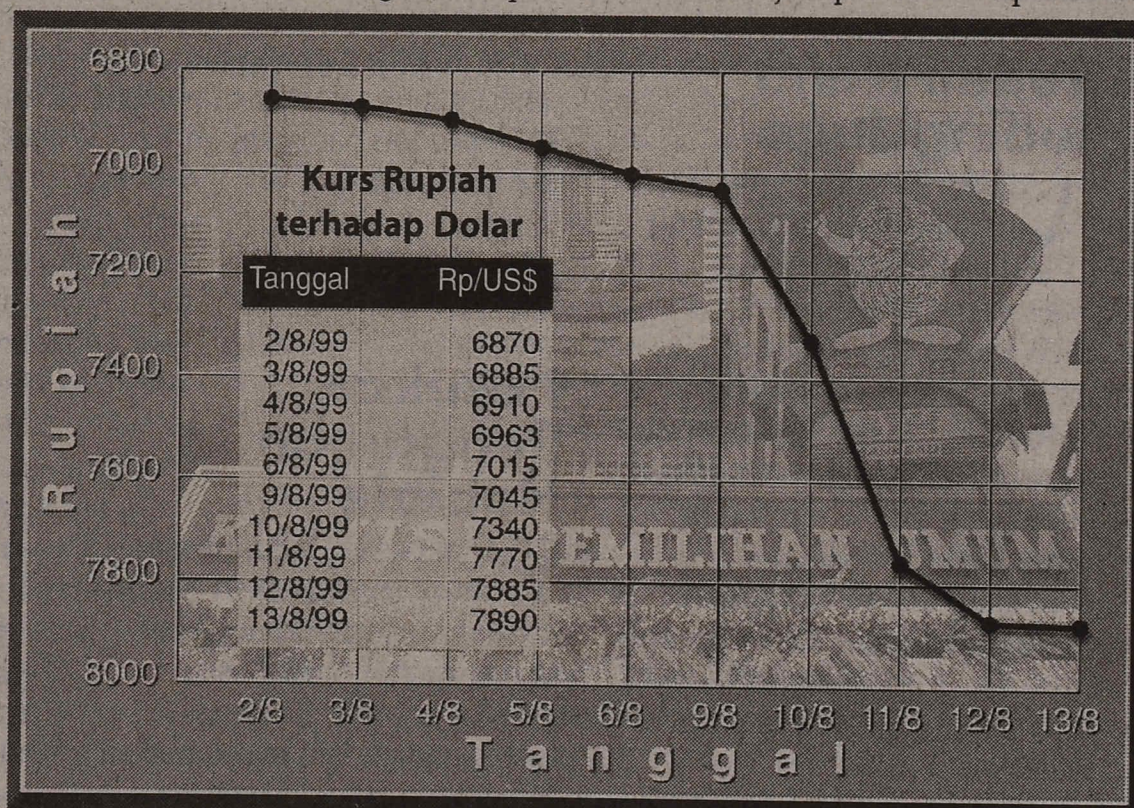
M. ZAKIR SALMUN

Penjualan eceran: Inflasi mulai membayang

bila suku bunga AS naik maka dolar pun akan makin menguat.

Di mata Farial Anwar, seorang pengamat valas, keinginan untuk mencapai suku bunga dalam negeri sebesar satu digit sungguh tidak realistis. "Coba kita bandingkan dengan AS," katanya. Instrumen pengendali suku bunga di Indonesia adalah SBI yang saat ini bunganya 13%. Di AS instrumen semacam itu disebut *treasury bond* yang bunganya 6% saat ini. Dari sini terdapat selisih 7%. Bila inflasi di Indonesia bisa ditekan dalam satu digit atau taruhlah untuk amannya sampai 10%, maka rata-rata inflasi di AS sebesar 4%. Selisih antara keduanya 6%. "Jika dilihat dari angka-angka ini, rasanya memang cukup pas suku bunga SBI sebesar 13%. Perbedaan suku bunga rupiah dan dolar sudah seimbang dengan perbedaan tingkat inflasinya," kata Farial.

Namun ia mengingatkan, ketika seorang investor menanamkan uangnya ia tentu melihat faktor risiko suatu negara. Sudah pasti *country risk* Indonesia jauh lebih tinggi dibanding AS. Nah, pada risiko yang tinggi inilah perlu ada bunga yang tinggi sebagai pemikat. "Repotnya di Indonesia, suku bunganya ditekan, namun tingkat risikonya masih sangat tinggi. Akibatnya rupiah tidak lagi menarik sebagai sarana investasi," kata Farial. Itulah yang membuat Farial beranggapan otoritas moneter tak punya konsep dalam memainkan instrumen suku bunga. Menurut dia, batas aman adalah bunga 15%. Di bawah angka ini, antara perolehan dan risiko sudah tidak seimbang lagi. "Buktinya lelang SBI pun sudah tak lagi menarik bagi investor," katanya.

Siapa pun, kecuali spekulan, tak suka nilai rupiah terhadap dolar AS bergejolak. Ekspor jelas terganggu, padahal devisa dari kegiatan ekspor sangat diharapkan dalam proses pemulihan ekonomi. "Ekspor akan berjalan baik bila nilai rupiah stabil dalam jangka waktu lama. Kalau berfluktuasi begini sulit bagi eksportir membuat kalkulasi," kata Djoko Moeljono, dirjen Perdagangan Luar Negeri. Sebenarnya kalau barangnya sudah siap ekspor, tidak terlalu masalah karena eksportir bisa mendapat rupiah yang lebih banyak, setidaknya untuk sekali ekspor itu. Namun kalau barangnya belum siap, ini yang repot. "Saat eksportir membeli bahan baku, rupiah pada posisi Rp8.000. Tapi waktu mengekspor rupiah menguat lagi menjadi Rp7.000. Dari situ saja dia sudah rugi Rp1.000 untuk setiap dolar yang diperolehnya," ujarnya.

Itu pula yang ditakutkan Wahyono, pemilik bengkel tadi. Ia jadi kesulitan mengkalkulasi bisnisnya karena gejolak rupiah. "Kemarin kan sempat lama rupiah pada posisi Rp6.800. Maka saya berani mengajukan penawaran harga pada perkiraan Rp7.000. Eh, baru saja ditandatangani tahunya malah begini," ujarnya memelas. Ia bahkan sempat berpikir untuk tidak melanjutkan proyek. Namun, ia gamang juga karena selain harus membayar penalti dia pun tentu bakal kehilangan kredibilitas.

Setelah menikmati deflasi selama lima bulan berturut-turut, kelihatannya bayang-bayang inflasi mulai tampak. Dipicu melemahnya rupiah, sangat wajar bila harga-harga kebutuhan pokok, dimulai dari produk impor, mulai merambat naik. Dalam bahasa para pengecer, situasi rupiah yang melemah itu disebut sebagai jual untung, beli rugi. "Artinya ketika kami menjual produk yang ada sekarang memang kami masih untung. Tapi hasil yang diperoleh sudah tidak memadai lagi untuk kulakan barang," kata Kustarjono Projolalito, direktur eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia. Tentu saja ini membuat para pengusaha eceran merasa bingung, harus menaikkan harga atau tidak. Namun Kustarjono menjamin, anggota asosiasinya tidak akan menaikkan harga barang sepanjang pemasok tidak menaikkan harga. Repotnya, siapa yang menjamin pemasok takkan menaikkan harga.

Paling penting, sebenarnya saat ini adalah membuka peluang pergerakan sektor riil, sembari membawa rupiah ke tingkat aman bagi banyak pihak. Sejumlah pengamat menyebut angka nilai tukar Rp6.000 per dolar AS. Untuk menghidupkan ekonomi, Sri Mulyani menyarankan, ketimbang menurunkan suku bunga secara cepat, ia lebih berharap bila perbedaan antara bunga kredit dan bunga pinjaman yang diperkecil. "Ini akan lebih sehat bagi dunia perbankan dan usaha," katanya.

Namun, teknis ekonomis saja tentu tak cukup buat menjawab soal ini. Sepanjang pergolakan politik belum juga usai, skandal demi skandal akan bermunculan, digunakan untuk saling menjatuhkan lawan politik. Bila itu masih berlangsung, siapa pula yang berani investasi di Indonesia. ■

BUDI SETYANTO
LAPORAN: *ALMAIDHA SITOMPUL DAN AGUS SATMOKO ADI*

Kemelut yang Tak Juga Usai

Tata Niaga Gula: Importir dan petani tebu protes atas kebijakan pemerintah menataniagakan gula. Ada kepentingan apa?

Gula memang manis, tetapi ternyata pahit saat mengurusnya. Setelah sekian lama adu urat leher antara produsen dan Menperindag Rahardi Ramelan soal perlu tidaknya diterapkan bea masuk (BM) impor, akhirnya Pak Menteri punya jalan keluar yang agak di luar dugaan: atur saja tata niaganya. Bila sebelumnya importir umum (IU) boleh mendatangkan gula, maka kini, lewat aturan tata niaga baru itu, hanya importir produsen (IP) saja yang boleh mengimpor gula. Dalam hal ini yang disebut IP adalah pabrik gula di Jawa.

Reaksi pun bermunculan. Reaksi pertama datang dari Ginsi (Gabungan Importir Nasional Indonesia). Keputusan yang bakal memunculkan monopoli baru gaya Bulog itu jelas merugikan anggotanya. Menurut Amiruddin Saud, ketua umum Ginsi, dana-dana pabrik gula yang seharusnya untuk membeli tebu dari petani, kini bakal dipakai untuk impor. Dan, kebijakan baru yang tertuang dalam SK No. 364/MPP/Kep/8/1999 itu akan memunculkan peluang KKN di lingkungan pabrik gula.

Kemungkinan adanya penyimpangan juga diutarakan oleh Siswono Yudohusodo, ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) "Bukan tidak mungkin yang mengimpor tetap IU, namun menggunakan bendera IP," ujar Siswono. Ia menganggap kebijakan itu sebagai bentuk arogansi pemerintah yang biasa melakukan *trial and error*. Buat pemerintah memang tidak masalah, karena yang bakal menjadi korban adalah konsumen dan petani tebu. "Ini kesalahan fatal (pemerintah). Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah malu untuk mundur," kata mantan menteri di era Soeharto ini (lihat *Wawancara*).

Faruk Bakrie, ketua umum Asosiasi Gula Indonesia (AGI), menganggap langkah penyelesaian masalah pergulaan nasional melalui tata niaga tidak akan efektif. Pengenaan tarif BM yang ia usulkan nilainya 65% adalah cara yang paling mendasar dan paling murah karena menguntungkan semua pihak, termasuk negara. "Saya pikir itu yang terbaik dan ini telah melalui analisis dari segala segi. Teman-teman di dalam dan di luar negeri semua mengatakan demikian. Dan ini (pengenaan bea masuk) merupakan solusi terbaik," katanya.

Yang perlu dicermati dari keputusan Menperindag itu, kata Faruk, *pertama* adalah batas waktu berlakunya kebijakan yang hanya sampai 31 Desember 1999. Itu berarti kebijakan ini

M. ZAKIR SALMUN
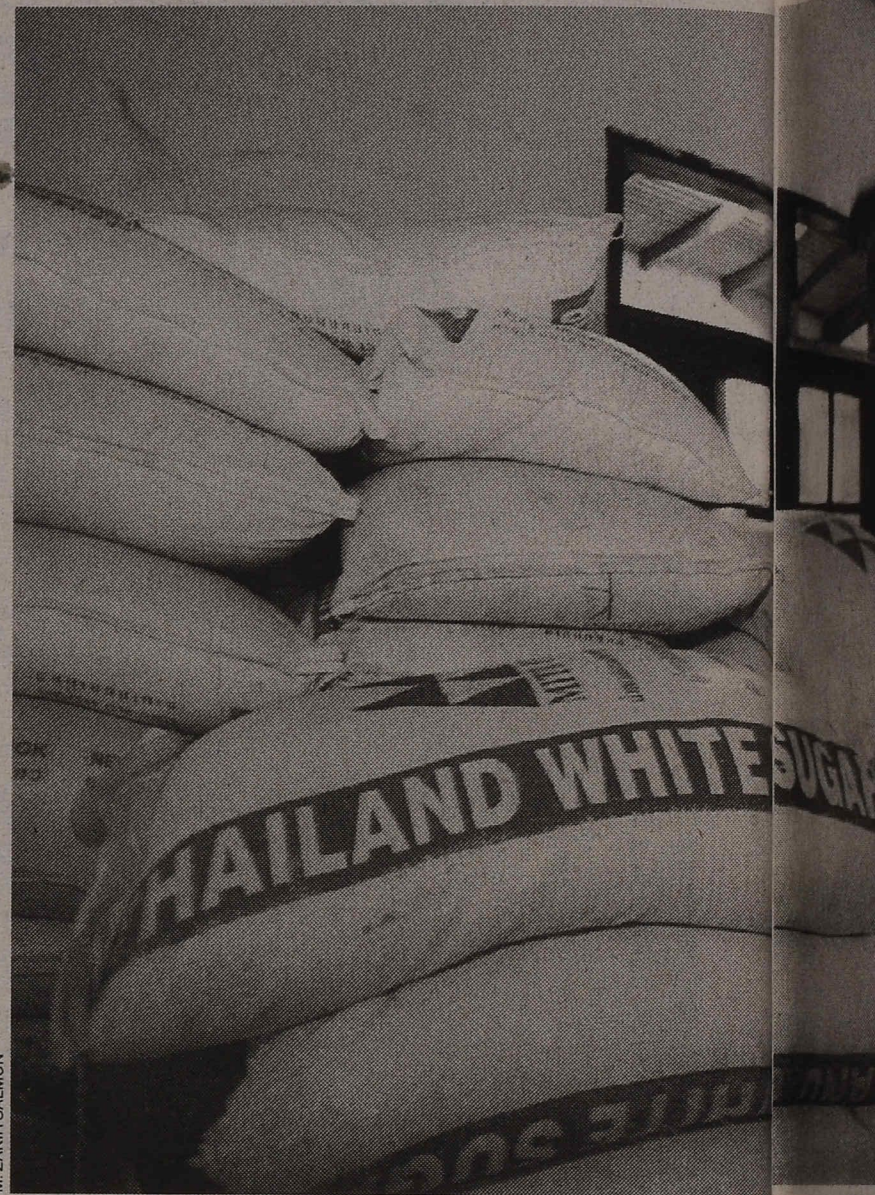
Tumpukan gula pasir: Cair lebih dulu

Siswono Yudohusodo
Itu Kebiasaan Trial And Error

Wawancara: Keputusan menperindag tetap mempertahankan bea masuk impor gula nol persen diprotes. Importir spekulan mendompleng nama petani?

Sebelum Soeharto *lengser*, Siswono Yudohusodo sudah *lengser* lebih dulu. Mantan pengusaha realestat ini sempat menjadi pembantu presiden sebagai menteri negara perumahan rakyat serta menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Setelah tidak lagi menjadi menteri, namanya muncul memperjuangkan petani gula melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia menjadi ketua umum di organisasi petani itu. "Kebijakan Menperindag sekarang ini tidak profesional," katanya. Berikut ini petikan wawancara Imam Setyobudi dari *Panji* dengan Siswono di Hotel Cipta, Jakarta.

Menperindag telah memutuskan tata niaga gula. Bagaimana menurut Anda?

Ini menunjukkan pemerintah melakukan kebiasaan *trial and error*. Dulu kan sudah ditetapkan importir tunggal, yaitu Bulog. Menurut hemat kami, kebijakan Menperindag Rahardi Ramelan membebaskan importir umum dengan bea masuk nol persen itu kesalahan fatal. Itu menunjukkan arogansi dari kebijakan pemerintah.

Apa HKTI akan tetap memperjuangkan agar bea masuk gula 65%?

Terus terang, saya sangat menyesalkan, apa yang diperjuangkan HKTI dikecilkan artinya oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. HKTI menuntut BM 65%. Padahal yang kami perjuangkan lebih luas dan besar daripada sekadar itu. Ini menyangkut upaya untuk membangun dan memberdayakan potensi bangsa secara kesuluruhan.

Bagaimana dengan pasar bebas dalam rangka WTO dan AFTA yang sudah menjadi komitmen Indonesia?

HKTI sudah bertemu pejabat-pejabat kita di IMF dan WTO. Memang menjadi hak kita untuk menentukan sepanjang masih dalam batas banding tarif yang ditentukan WTO. Dalam hal ini 120%. Yang jadi masalah adalah pemerintah sudah telanjur menandatangani bea masuk nol persen. Ini kan kesalahan kita sendiri.

Jadi, sikap HKTI bagaimana?

HKTI memandang kebijakan itu tidak tepat. Sebab tidak sesuai dengan WTO. Tak boleh lagi ada seleksi-seleksian. HKTI juga memandang masih ada kerawanan.

Kerawanan apa?

Jangan-jangan nanti yang disebut dengan

hanya bersifat tambal sulam. *Kedua*, rakor kabinet beberapa waktu lalu pernah memutuskan impor gula hanya dilakukan oleh produsen atau pabrik. Tetapi IMF (Dana Moneter Internasional) menolak. Kenapa sekarang Menperindag memutuskan demikian? *Ketiga*, dalam pelaksanaannya dikhawatirkan akan melenceng ke mana-mana. Kalau SK ini ditujukan untuk menaikkan harga, mustahil tercapai. Sebab, stok gula di dalam negeri sudah menumpuk, sementara harga di luar negeri sedang anjlok.

Bagi Faruk sungguh sulit untuk menerima alasan pemerintah, kenapa tidak mengubah bea masuk menjadi 65%. Semua sudah tahu bahwa Indonesia akan memasuki pasar bebas dunia, termasuk di kawasan ASEAN pada 2003 dan Asia Pasifik pada 2020. Dalam waktu yang terbatas itu, pemerintah harusnya membangun dan memberdayakan potensi bangsa untuk memperkuat diri menghadapi pasar bebas. Sebenarnya, Indonesia masih diperbolehkan mengenakan tarif bea masuk hingga 110% sampai tahun 2004. Maka Faruk pun mempersoalkan kenapa kesempatan itu tidak dioptimalkan.

Lihat saja, masih banyak negara yang mengenakan bea masuk impor gula setinggi-tingginya. Di India masih berlaku bea masuk impor gula sampai 120%, Filipina 55%, Thailand 104%, Amerika Serikat 155%, dan negara-negara Eropa rata-rata mengenakan bea masuk impor gula sebesar 240%. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri, Indonesia masih harus impor 1,8 juta ton setahun. Bila harga gula impor Rp1.700 per kg, maka pemasukan pemerintah dari bea masuk mencapai Rp2 triliun setahun. Lumayan kan?

Kebijakan tata niaga ini sebenarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dihadapi produsen gula, sejak bea masuk impor ditetapkan nol persen pada September tahun lalu. Sejak itulah pasar dibanjiri gula impor yang harganya hanya Rp1.900 per kilogram di tingkat konsumen. Padahal, produsen diwajibkan membeli gula dari petani pada tingkat harga Rp2.500. Tentu saja produsen lokal tak akan bisa melawan gula impor ini karena selisihnya saja sudah Rp600 per kilogram, belum ditambah ongkos distribusi ke pasar.

Perbedaan harga itulah yang akan ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi. Besarnya sekitar Rp1,7 triliun, suatu angka yang cukup besar di saat negara dalam situasi sulit seperti sekarang. Meski akhirnya uang subsidi itu tak juga cair, inilah yang menjadi peluru importir dan pabrik gula untuk mendesak pemerintah agar menerapkan BM sebesar 65%. Tapi pemerintah bergeming dan tetap mempertahankan BM impor gula nol persen.

Alasan yang dikemukakan Rahardi Ramelan, bahwa bea masuk nol persen sudah menjadi kesepakatan dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan pejabat-pejabat tinggi ASEAN. Untuk mengubahnya harus terlebih dulu membicarakannya dengan pejabat WTO dan ASEAN. Yang pasti akan membutuhkan waktu lama. "Jangan-jangan gula petani sudah mencair lebih dulu," kata Djoko Moeljono, dirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag. Maka akhirnya munculah jalan tengah itu tadi, tata niaga impor.

Namun masalahnya belum usai juga. Produsen gula tetap tak puas, sementara harga di tingkat konsumen mulai merambat naik. Tinggallah para importir besar yang sudah menyetok gula di gudangnya tersenyum lebar. Soalnya, mereka bakal menikmati margin yang lebih besar lagi. ■

RIZAGANA
LAPORAN: *JOHANSYAH DAN IMAM SETYOBUDI*

importir produsen pabrik itu juga bekerja sama dengan importir umum. Hanya sekadar pakai nama. Hanya menambah rantai dengan meminta komisi dan lain-lain. Lalu muncul KKN baru.

Menurut Anda, pemerintah harus bagaimana?

Untuk kepentingan jangka panjang sebaiknya jangan lakukan tata niaga impor gula melalui badan-badan tertentu. Apakah itu produsen gula yang mayoritas milik pemerintah atau Bulog. Ini kan main-main saja. Lebih baik serahkan kepada importir umum. Sebab itulah yang akan dianut dunia. Instrumen yang akan mengaturnya adalah bea masuk. Kebijakan Menperindag sekarang ini tidak profesional, kebijakan bunuh diri. Karena sebentar lagi akan memasuki pasar bebas.

Pantas saja Ginsi protes.

Ginsi ini kan importir. Saya 10 tahun menjadi menteri. Saya tahu betul betapa sulitnya mengeluarkan suatu kebijakan. Karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak. Yang satu sama lain itu bukan saja berbeda. Bahkan antagonistis, bertentangan secara diametral. Petani ingin harga gula cukup baik. Pabrik gula ingin harga gula bagus. Pabrik permen atau pabrik susu ingin murah, kalau perlu impor. Ujung-ujungnya supaya untung. Bagi pedagang tidak soal, harga tinggi atau murah, sepanjang dia mendapat wilayah yang bagus. Lalu Ginsi, anggotanya tak bisa lagi impor. Mereka dirugikan.

Kalau harga gula naik berarti menjadi beban konsumen?

Sekarang kita lihat harga gula kini di pasar Rp2.300. Kalau dikenakan bea masuk 65%, harga gula menjadi Rp3.200 atau naik Rp900 per kg. Tapi orang makan gula itu cuman berapa sendok sehari. Hanya delapan kg per kapita per tahun atau 0,67 kg per bulan atau Rp600. Orang Sunda barangkali cuman Rp300 perak per bulan. Sepuluh tahun jadi menteri saya tidak pernah memanipulasi data untuk membodohi rakyat. Apalagi sekadar mencari popularitas. Malu kita.
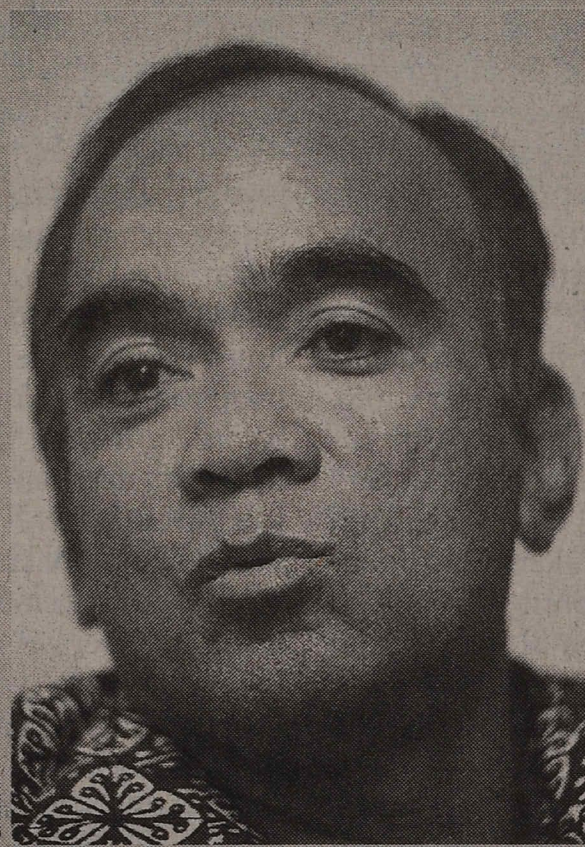
SATARI

Siswono Yudohusodo: Fatal

Tetapi kenapa pengamat ekonomi Didik J. Rachbini mensinyalir importir spekulan yang sudah menimbun stok mendompleng HKTI?

Saya enggan mengomentari pertanyaan ini. Sebab, kenapa tidak dipersoalkan, berapa besar keuntungan importir umum, pada waktu import dibebaskan. Yang menimbun itu kan dampak dari dibebaskannya importir umum tanpa bea masuk atau nol persen. Kenapa sekarang setelah diubah baru dipersoalkan. Siapa yang mendompleng atau siapa didomplengi, ini perlu dibuktikan secara jelas. ■

Arti Lobi Empat Mata

Bank Dwipa: Untuk bisa mencairkan dana eks nasabah bank terlikuidasi, oknum pejabat di Bank Indonesia meminta agar dilakukan dengan lobi khusus.

Belum lagi tuntas kasus percaloan di Bank Bali yang berbau politis, muncul lagi kasus Bank Dwipa. Bank yang telah ditutup dua tahun lalu itu masih memendam bau yang tak sedap. Banyak dana nasabah yang nota bene dijamin pemerintah ternyata tak bisa dibayar. Alasannya karena banyak dana pihak ketiga yang tidak tercatat di pembukuan bank milik Bambang Samiyono itu. Sejak bank ditutup si pemilik sudah kabur, entah ke mana. Maka tinggallah deposan merana menanti uang tabungan yang dulu dijanjikan berbunga tinggi.

Tak pernah terbayangkan oleh Tee Suprapto, ketika pertengahan 1997 ditawari Bank Dwipa agar menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Maka seluruh uangnya di tabungan sebesar Rp20,177 miliar dipindahkan ke bank yang dulu berkantor di gedung megah di Jalan Jenderal Sudirman, Koey Prince. Eee, tak tahunya, pada November 1997, pemerintah mengetukkan palu godam likuidasi. Enam belas bank ditutup, termasuk Bank Dwipa. Seketika itu juga Tee tak pernah lagi melihat uang itu.

Ada secercah senyum ketika pemerintah mengumumkan bahwa dana-dana deposan di bank-bank yang ditutup itu dijamin pemerintah. Tee dan ribuan deposan berbinar-binar lagi. Kenyataannya uang deposito itu tak pernah bisa cair hingga detik ini. Setiap ditanya kepada pejabat BI dan tim likuidasi, dibilang, deposito atas nama orang Surabaya itu tidak tercatat alias masuk kategori *unrecorded*. "Mana kita tahu kalau dana itu tercatat atau tidak tercatat di bank," kata Johan Susanto, putra Tee Suprapto.

Anehnya, meski deposito itu termasuk *unrecorded*, tetapi tim likuidasi Bank Dwipa, konsultan hukum (Gani Djemat), dan akuntan publik (S. Mannan Sumantri & Rekan) yang ditunjuk BI menyatakan bahwa deposito tersebut sah untuk dibayar. Tetapi kenapa BI tetap ngotot untuk tidak mau mencairkan deposito milik Tee. Sudah belasan surat dilayangkan kepada BI, tapi jawabnya nihil. Sudah banyak pejabat BI tempat Tee dan anaknya, Johan, mengadu, tapi tak juga didengar. "Ah, BI tidak pernah mau bicara apa-apa. BI itu sangat arogan, sangat tidak membantu nasabah," katanya.

Lebih aneh lagi, kata Johan, ada 110 rekening giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito di Bank Dwipa yang dinyatakan *unrecorded*. Ternyata ada tiga deposito masing-masing atas nama Thomas Paraga, Andreas, dan Lindawati bisa menerima pembayaran kembali. Anehnya lagi, "Deposito itu dibayar secara tunai. Padahal seharusnya menggunakan cek," kata Johan yang ditemui di kantor pusat Bank Swansarindo. Thomas sendiri, ketika dihubungi *Panji* untuk mengkonfirmasikan informasi dari Johan itu, menurut seorang kerabatnya, sedang ke luar negeri.

Memang, jumlah dana deposito tidak tercatat milik tiga orang itu tidak sebesar milik Tee. Tetapi Johan penasaran dan mencari tahu, apa gerangan yang membuat deposito atas nama tiga deposan itu bisa cair dan dibayar secara tunai. Johan bertemu seorang staf BI setingkat kepala urusan, Wiwid Sudibyo, dan menanyakan perihal pencairan dana deposito di Bank Dwipa atas nama tiga orang yang katanya tidak tercatat itu. "Mungkin karena adanya lobi empat mata," kata Wiwid seperti ditirukan Johan. Wiwid tidak sendirian, tetapi ditemani dua temannya lain yang juga staf BI, yakni Sri Rahayu dan Soehadianto.

Lobi empat mata? Kata-kata itu membuat Johan berpikir. Awalnya ia tidak tahu apa yang dimaksud lobi empat mata itu. Barulah diketahuinya setelah mengetahui ada nama Suherman, yang mengaku-ngaku staf ahlinya Sjahril Sabirin, gubernur BI, yang siap dilobi empat mata oleh deposan. "Bisa banyak calo-calo, ini kan gawat *banget*," kata Johan. Tapi, jawaban dari Gubernur BI kurang mengenakkan. Sjahril bukan hanya membantah semua tuduhan itu, tetapi juga berniat membawa tuduhan itu ke pengadilan. "Saya sudah tanya langsung kepada yang bersangkutan tentang tuduhan itu. Tidak benar itu," kata Sjahril.

Tawaran lobi empat mata itu, kata Johan, terjadi pada Januari 1999. Setelah kasus itu dilaporkan ke pejabat BI yang lain, Wiwid Sudibyo "dihukum". Hanya saja hukumannya tidak terlalu berat, yakni sejak April 1999 "dibuang" ke Bandung sebagai pejabat sementara pimpinan BI di Kota Kembang itu. Sewaktu dihubungi *Panji*, Wiwid hanya berkomentar pendek. "Bapak silakan menghubungi urusan hukum BI," katanya berkali-kali.

MORIZAP./DOK. PANJI
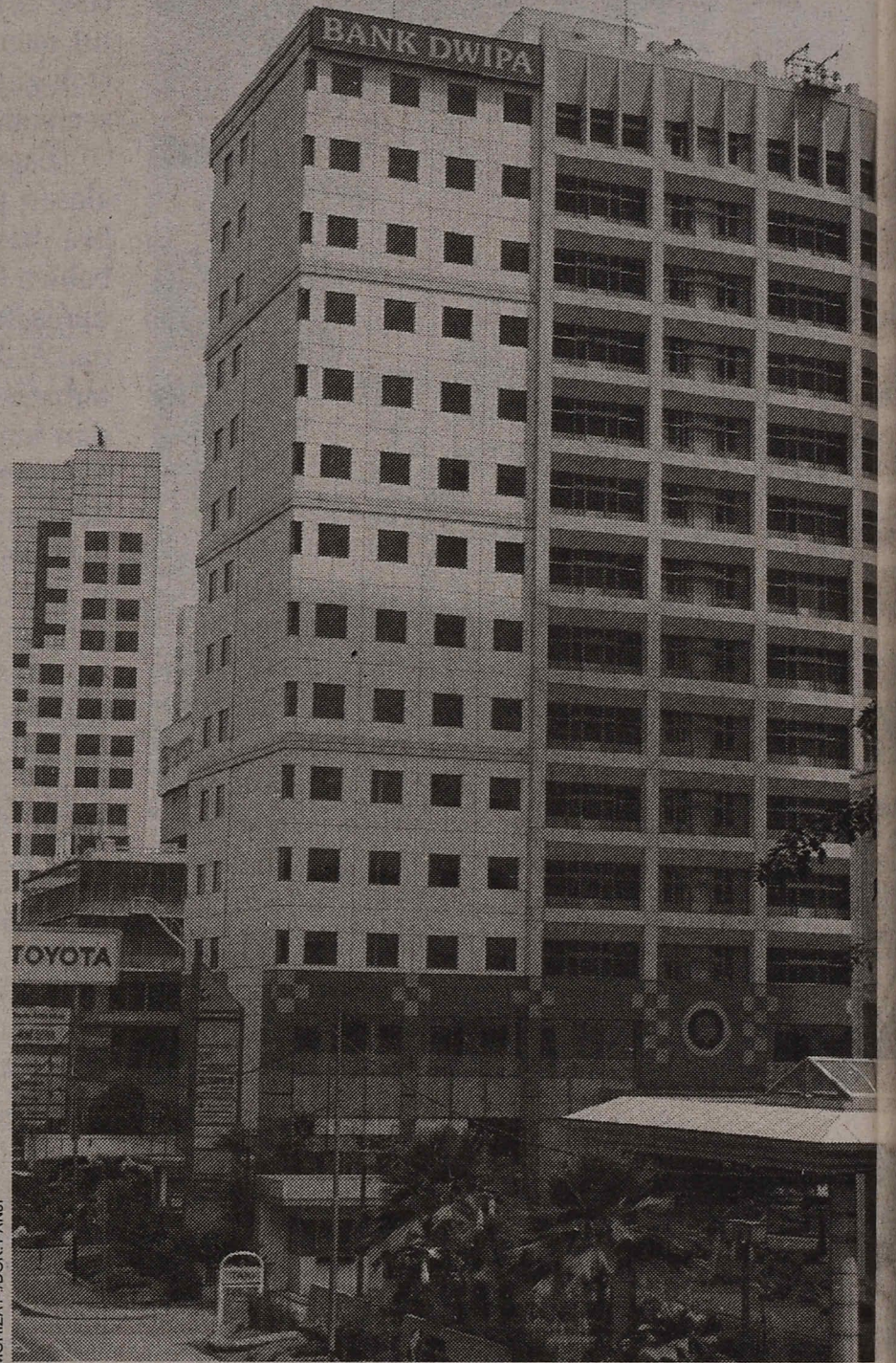
Kantor Bank Dwipa: Menggertak

Anwar Nasution, deputi senior Gubernur BI yang pernah menyebut BI sebagai sarang penyamun, belum bisa berbuat apa-apa. "Itu kan kasus lama. Saya juga belum sampai ke situ," katanya. Ia juga belum secara khusus mengikuti kasus Bank Dwipa yang menyebut empat anak buahnya itu. Namun, guru besar Universitas Indonesia yang belum genap sebulan menjabat wakil gubernur BI itu meyakinkan bahwa siapa pun yang berani main mata atau bertindak sebagai calo di BI pasti kena sikat. Tanpa pandang bulu.

Pernyataan Anwar lebih menyegarkan ketimbang komentar Gubernur BI. Meski begitu, Johan tidak gentar, malah balik menggertak. "Jangan menutup kesalahan dengan menggertak. Seharusnya dia (Sjahril Sabirin) bertanya kepada tiga orang deposan yang sudah menerima uangnya kembali itu. Bagaimana mereka bisa dibayar, sedangkan kami belum dibayar," kata Johan. Ah, seandainya Johan bisa menerima tawaran calo itu.... ■

JOHANSYAH
LAPORAN: *RINI SUSANTI*

Bibit-Bibit Penghasil Uang

Bisnis Pembibitan: Peluang usaha di bidang penyediaan bibit tanaman memiliki prospek yang cukup baik di tengah berkembangnya bisnis agroindustri.

Memang bukan perkara mudah mengembangkan jenis usaha baru. Apalagi kalau jenis usaha itu membutuhkan masukan teknologi yang cukup tinggi. Selain belum ada yang bisa ditiru, seorang pionir di usaha baru itu juga mesti siap idenya digarap orang lain yang memiliki modal jauh lebih besar.

Itulah yang terjadi pada bisnis penyediaan bibit tanaman dengan teknologi kultur jaringan. Semula bisnis ini hanya ditekuni oleh sedikit orang. Namun ketika prospeknya terlihat menarik, sejumlah konglomerat pun coba memasukinya. Bisa disebut di sini: Grup Astra dengan PT Pagi, Bob Hasan mengelola PT Inagro, dan Grup Kodel mengembangkan PT Poly Tani. Namun rupanya modal besar saja tak cukup. Mereka pun berguguran karena kurang tekun menggarap bisnis yang gampang-gampang susah ini.

PT Fitotek Unggul adalah salah satu perusahaan yang masih bertahan hingga kini. Perusahaan yang didirikan pada Oktober 1987 ini telah mampu menghasilkan bibit tanaman mulai dari tanaman kehutanan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman pangan, hingga tanaman hias. Semua bibit tanaman itu diproduksi dengan teknik kultur jaringan, suatu teknik menghasilkan bibit dengan cara rekayasa bioteknologi. Boleh dibilang, perusahaan ini pionir. Sehingga dalam tiga tahun pertama berdirinya melulu melakukan riset untuk menemukan formula yang tepat sebagai media pembibitan tanaman.

Menurut Yudistira Hayat, *assistant director* PT Fitotek Unggul, formula media pembiakan merupakan bagian terpenting dari pengembangan pembibitan dengan kultur jaringan. Media yang tepat akan menghasilkan tanaman dengan kualitas terjamin. Setelah itu barulah menghasilkan bibit tanaman. Awalnya, hampir semua tanaman dikembangkan, termasuk bibit pohon jati. Eee, ternyata kurang diminati karena pengusaha kehutanan lebih suka membeli bibit alami. Pertimbangannya apa lagi kalau bukan soal harga yang lebih murah.

Melihat kenyataan itu, lanjut Yudistira, manajemen Fitotek terus mencari tahu tanaman yang paling layak secara ekonomis dan teknis untuk dikembangkan, sekaligus bisa diterima pasar. Maka dicobalah pengembangan bibit tanaman hias (anggrek) dan perkebunan (pisang). Waktu itu, kebetulan sedang ramai ekspor pisang cavendish. Grup Sinar Mas milik taipan Eka Tjipta Widjaja malah secara khusus membangun perkebunan pisang jenis ini seluas 1.500 hektare di Pulau Halmahera, Maluku, sejak sembilan tahun lalu. Perkebunan pisang ekspor—karena di dalam negeri kurang digemari—itu dikelola secara khusus oleh anak perusahaannya, PT Global Agronusa.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Hutan Tanaman Industri: Banyak memerlukan bibit

Sinar Mas minta agar Fitotek menyediakan bibitnya. "Padahal untuk satu hektarenya dibutuhkan tak kurang dari 1.600 pohon pisang," kata Yudistira. Hitung-hitung, dibutuhkan tak kurang dari satu juta bibit pisang cavendish. Tentu saja tidak mungkin menyediakan bibit sebanyak itu dalam waktu satu tahun, 1990-1991, kalau hanya mengandalkan pembibitan secara alami atau konvensional melalui bonggol pisang. Apalagi Global Agronusa minta bibit yang umurnya seragam agar masa panennya kelak juga seragam. Untunglah Fitotek telah menguasai teknologi kultur jaringan dan sukses menyediakan sejuta bibit pisang cavendish itu.

Dengan Sinar Mas, Fitotek meraih kontrak senilai Rp700 juta. Sukses ini membuat Departemen Pertanian terkesima dan meminta mereka terus memproduksi bibit pisang kesukaan orang Jepang itu untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. Selain itu, perusahaan perkebunan yang besar-besar pun ikut bisik-bisik kepada pengelola Fitotek, siap-siap bila kelak membutuhkan bibit tanaman dalam jumlah besar. Fitotek pun mulai mencari tahu, bibit apa yang paling banyak dibutuhkan.

Demi efisiensi, Fitotek hanya memfokuskan diri pada pengembangan empat jenis komoditas, seperti tanaman jati, kentang, pisang carvendis, dan abaca. "Keempat komoditas ini permintaannya besar," ujar Yudistira. Bibit tersebut dijual dengan harga berkisar Rp2.000-Rp5.000 per batang dengan umur rata-rata antara dua sampai tiga bulan. Bibit jati yang semula tidak diminati kini mulai diincar BUMN Kehutanan seperti PT Inhutani V, Lampung, Perum Perhutani, dan PT Kaltimex pemegang HPH (hak pengusahaan hutan) di Kalimantan Timur. Malah sebuah pondok pesantren di Indramayu, Al-Zaitun, telah memesan satu juta bibit jati untuk ditanam di lahan seluas 1.000 hektare. Dari pesanan terakhir saja setidaknya uang Rp1 miliar bakal masuk ke kas Fitotek.

Sekarang Fitotek sedang menggarap permintaan PT Bumindo Hasta Jaya, perusahaan milik Ishak Jumhana yang baru coba-coba menekuni bidang agroindustri. Perusahaan ini minta sejuta bibit pisang abaca, tanaman yang di Jepang dan Amerika seratnya dipakai untuk bahan kertas uang. Petani-petani bunga pun—yang selama krisis amat diuntungkan—mulai melirik Fitotek sebagai penyedia bibit. "Kami menargetkan untuk tahun 1999-2000 akan menghasilkan sekitar lima juta bibit," kata Elda Adiningrat, direktur PT Fitotek Unggul. Dan, seluruh bibit tanaman tersebut dihasilkan dari lahan seluas 4.000 meter yang terletak di selatan Jakarta dengan 100 orang pekerja. ■

JOHANSYAH
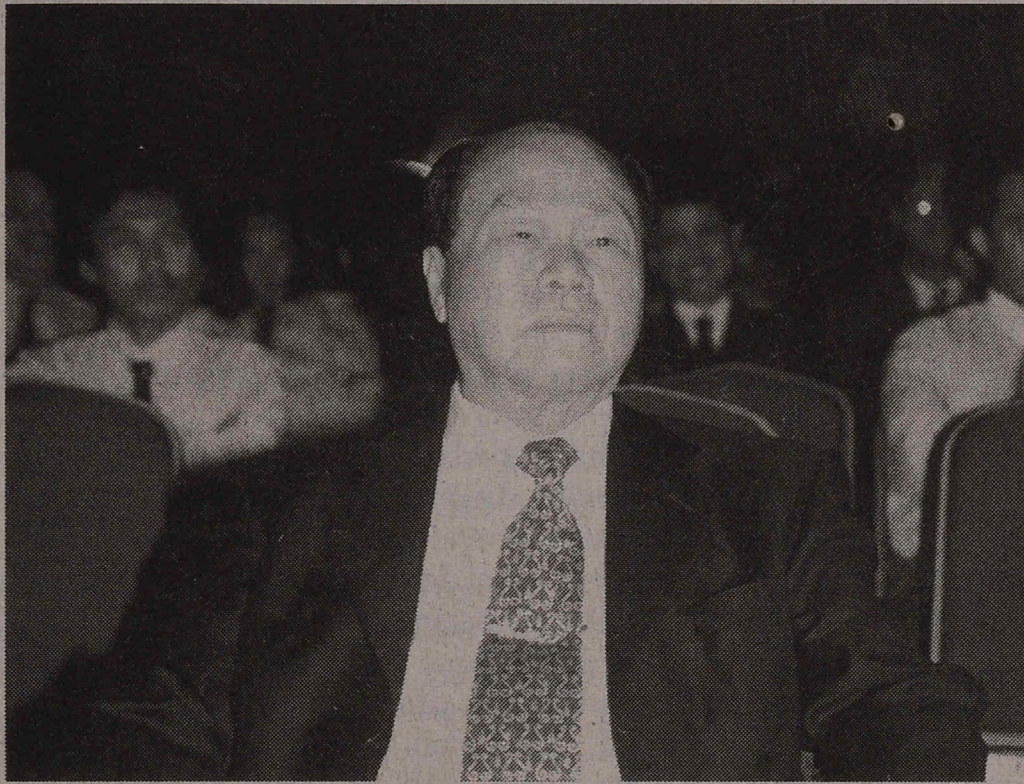
Eka Tjipta Widjaja: Tersingkir

Tiga Bankir Asing Mengelola BII

Bank Indonesia telah menyetujui susunan pengurus baru Bank Internasional Indonesia (BII). Semua keluarga Eka Tjipta Widjaja tersingkir, kecuali Djafar Widjaja yang duduk sebagai komisaris. Anggota komisaris lainnya adalah Soengkowo Prijoredjo dan Suryadi Purnama. Di dewan direksi, Indra Widjaja yang disebut-sebut sebagai putra mahkota kerajaan bisnis Grup Sinar Mas di divisi finansial ini juga terdepak. Mereka dianggap tidak lulus uji kepantasan sebagai bankir (*fit and proper*).

Susunan direksi baru BII kelak hanya empat orang. Tiga bankir asing dan satu bankir lokal, yakni Ronny Suyanto, bekas direktur BI yang sudah malang melintang di BII. Menurut Ronny, bankir asing itu adalah Timothy Djon yang pernah menjadi penasihat di Bank Panin, dan Yap Cay Sun, eks bankir Citibank dan pernah di Grup Astra. "Mereka sudah disetujui BI. Sedangkan pengganti Indra Widjaja sebagai dirut belum diputuskan. Kayaknya bankir asing," kata Ronny kepada *Panji*. Setelah disetujui BI, susunan direksi dan komisaris baru itu tetap harus disahkan melalui RUPS (rapat umum pemegang saham) yang akan berlangsung pada 1 September 1999. Meski keluarga Eka Tjipta tak lagi menjadi pengurus BII, tetapi tetap menjadi pemegang saham. Kehadiran bankir asing bukan mengindikasikan BII telah jatuh ke pelukan asing.

Telkom-1 Menggeser B2R

Setelah tertunda beberapa kali akhirnya Satelit Telkom-1 berhasil diluncurkan pada Jumat (13 Agustus) pukul 05.52 WIB. Satelit milik PT (Persero) Telkom itu diluncurkan dari landasan peluncuran milik Arianespace di Kourou, Guyana, Prancis. Satelit Telkom-1 nantinya akan ditempatkan pada posisi orbit 108 Bujur Timur, yang kini masih ditempati satelit Palapa B2R. Berhasilnya satelit Telkom-1 menempati orbitnya, berarti Palapa B2R akan digeser ke posisi 107 Bujur Timur.

Menteri Perhubungan Giri Suseno, Meneg PBUMN Tanri Abeng, Dirjen Postel Sasmito Dirdjo, dan Dirut PT Telkom A.A. Nasution ikut menyaksikan siaran langsung peluncuran satelit bernilai US$191 juta itu dari gedung Divre II Telkom Jakarta. Dibanding satelit generasi sebelumnya, satelit Telkom-1 ini memiliki banyak keunggulan. Jumlah transponder mencapai 36 buah dengan umur 15 tahun dan memiliki kemampuan dalam multimedia. Luas cakupan Telkom-1 juga jauh lebih besar, meliputi seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, Hong Kong, Taiwan, Papua Nugini, dan Australia Utara. "Ini membuka pasar tersendiri bagi satelit Telkom-1," kata A.A. Nasution.

Ericsson T10s: *Funky*

T10s untuk yang Funky

Setelah sukses dengan T18s, Ericsson kembali meluncurkan telepon genggam seri T yang terbaru: Ericsson T10s. Produk ini didesain untuk pribadi yang dinamis dan ingin tambil beda. T10s adalah telepon genggam *dual band* untuk jaringan GSM 900 dan 1800, memiliki tampilan layar tiga baris dan dilengkapi tanda panggil getar. "Kami meluncurkan telepon genggam seri T kedua di Indonesia, karena besarnya permintaan pelanggan akan telepon yang mencerminkan identitas mereka," kata Susanto Sosilo, direktur pruduk konsumen Ericsson Indonesia.

T10s memiliki lima macam warna yang dipilih untuk mencerminkan vitalitas dan jiwa muda. Ada biru yang *juicy*, kuning *mustang*, merah muda yang *shocking*, ungu yang *funky*, dan biru kehijauan yang *crispy*. Pantas saja kalau Robby Tumewu, perancang mode yang juga bintang sinetron, ini kagum dengan tampilan produk baru Ericsson itu. "Ericsson telah berhasil memilih warna yang memberikan karakteristik yang pas bagi mereka yang berjiwa muda," katanya.

Armada Express Compaq

Untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna komputer portabel *Armada*, Compaq Indonesia memberikan servis istimewa yang disebut Armada Express. Dengan program ini, seluruh produk *Armada* yang dibeli mulai 12 Agustus hingga 30 September akan mendapat paket servis gratis selama satu tahun. Servis itu meliputi dukungan telepon delapan jam sehari, empat jam pengambilan produk dari lokasi pembeli serta dijamin kembali dalam 24 jam. Pelanggan akan memperoleh pinjaman *Armada* baru selama *Armada*-nya diservis.

Untuk mendapatkan layanan itu, pelanggan cukup mendaftarkan unit *portable*-nya ke Compaq, 14 hari setelah pembelian. "Compaq sepenuhnya mengerti betapa besarnya kerugian yang muncul akibat rusaknya komputer dan lamanya masa perbaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami ciptakan Program Armada Express," kata Elisa Lumbantoruan, direktur pemasaran PT Compaq Indonesia.

Jam Tangan Alarm dari Guess?

Guess?, perusahaan garmen asal Amerika Serikat, ternyata tidak hanya mampu memproduksi pakaian bermutu. Perusahaan ini juga bisa memproduksi jam tangan canggih yang diperkenalkan dengan nama Turn 'N' Pull, jam tangan nondigital yang dilengkapi dengan alarm. Nama Turn 'N' Pull diambil dari metode tari dan putar untuk mengaktifkan mesin alarm. Ada dua *bezel* untuk mengatur alarm. Nah, untuk memudahkan cara mengoperasikannya, maka semua instruksinya digrafir di bagian belakang jam. Jam ini juga dilengkapi indiglo, lampu yang menyinari permukaan jam. Jam yang baru diproduksi untuk pria ini tampil dengan *case* berwarna silver atau *two tone*. Rantai atau tali jam bisa dari kulit atau *bracelet metal*. ■

Bank Bali dan Dilema Skema Penjaminan

Masyhud Ali
Pengamat perbankan

Banyak orang menduga kasus Bank Bali (BB) akan kandas. Kambing hitamnya pastilah oknum salah prosedur dan bertindak di luar kepatutan bernuansa politis, serta menjurus pada pencemaran nama baik. Itulah sisa-sisa "mantra Orde Baru" yang masih dipandang ampuh, walau dalam kondisi terpepet. Apalagi masih ada "iktikad baik" para aktor utama untuk mengembalikan dana sebesar Rp540-an miliar ke rekening BB.

Namun, kandasnya kasus BB akan melahirkan dilema baru, justru ketika restrukturisasi perbankan berada pada tahap menentukan. Seperti dimaklumi, penjaminan pembayaran klaim atas kewajiban pasar uang antarbank (PUAB) merupakan salah satu unsur program penjaminan (*blanket guarantee*) dalam program restrukturisasi.

Dilema implementasi program penyehatan perbankan nasional itu selanjutnya terletak pada dua pilihan yang sulit. *Pertama*, praktek *rent seeking* harus diberantas dengan menghentikan Keppres No. 26 Tahun 1998 yang telah menempatkan pemerintah sebagai "bandar teraniaya". Bayangkan, hanya dengan pembayaran premi penjaminan, pemerintah terikat untuk menjamin dana simpanan dan kreditor bank. Padahal jumlahnya besar, tak kurang dari Rp800 triliun. Yang terdiri atas simpanan pihak ketiga (pada Januari 1998) sekitar Rp412,6 triliun, pinjaman yang diterima Rp307,9 triliun, belum termasuk garansi dalam *off balance sheet* sebesar Rp225,9 triliun.

Cakupan penjaminan pun cukup luas. Mulai dari dana talangan untuk kreditor, termasuk simpanan pihak ketiga dan pinjaman yang diterima BDL (bank dalam likuidasi), BBO (bank beku operasi), dan BTO (bank *take-over*); pembayaran klaim yang ditimbulkan dari kesepakatan Frankfurt untuk *trade finance* dan *interbank debt*; dan klaim berupa kegagalan transaksi PUAB serta *negotiable certificate deposit*. Jadi kemungkinan terjadinya *moral hazard* berupa pemberlakuan penjaminan pada bank-bank *insolven* merupakan risiko yang harus dipikul.

Namun, kini, keppres itu tak bisa dicabut begitu saja, karena tak dapat melepaskan pemerintah dari kewajibannya membayar klaim dari penjaminan itu. Yang paling gawat, pencabutan keppres itu justru dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat kembali ambruk. Justru di tengah kondisi ketika benteng untuk mencegah *capital flight* berupa beda suku bunga rupiah dan dolar AS semakin menipis.

Pilihan *kedua*, tetap memberlakukan keppres *blanket guarantee* itu. Tapi tak otomatis bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional (dan pemerintah). Namun skema peminjaman itu pada dasarnya tindakan darurat dalam mengatasi krisis perbankan yang sistemis. Selayaknya hanya berlaku untuk jangka waktu yang sangat terbatas.

Berapa lama program itu dipertahankan, lalu menggantinya dengan *deposit protection* atau *insurance scheme*? Pengalaman negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dll.) memberlakukan *scheme* ini langsung saat terjadinya *banking rush*, tanpa melalui skema *blanket guarantee* yang boros itu. Sedang negara-negara lain (seperti Meksiko) mengganti skema penjaminan ke *insurance scheme* secara bertahap. Pemerintah Meksiko menyusun rencana *phasing out* itu pada Mei 1998 untuk kemudian dalam jangka 5-10 tahun menerapkan program asuransi simpanan model AS. Thailand yang sejak 1997 telah memberlakukan *temporary blanket guarantee*, kini telah pula menjajaki kemungkinan menggantinya dengan *limited insurance scheme*. Hal yang sama dilakukan Korea. Melalui Korea Deposit Insurance Corporation sejak pertengahan 1998, cakupan asuransi depositonya dibatasi hanya sampai 20 juta won untuk setiap nasabah penyimpan.

Sesungguhnya program penjaminan di Indonesia memiliki beberapa batasan. *Pertama*, jangka waktu berlakunya hanya dua tahun, sampai 31 Januari 2000. Selanjutnya akan diubah menjadi *deposit protection* atau *insurance scheme*. *Kedua*, jenis deposito yang dijamin terbatas hanya deposito yang tingkat suku bunganya tak lebih tinggi dari tingkat suku bunga pinjaman, yang ditetapkan BI secara mingguan. *Ketiga*, penjaminan atas bunga nominal PUAB dibatasi hanya sampai sebesar tingkat suku bunga penjaminan.

Namun tak dapat disangkal, cakupan skema penjaminan ini cukup luas sehingga mendorong bank-bank yang *overliquid* untuk menempatkan dana surplusnya pada PUAB. Di samping penempatan ini cukup aman karena dijamin, juga karena sektor riil masih berada dalam kondisi *stand still*. Ekspansi kredit dalam periode krisis di samping mengandung risiko tinggi, juga nyaris tak ada debitor yang *eligible* dan mau memikul beban bunga yang demikian tinggi.

Demikianlah konsekuensi yang perlu diperhitungkan bila ingin melanjutkan, membatasi, atau bahkan menghentikan program penjaminan. Namun, menerapkan *deposit protection* atau *insurance scheme* pada awal Februari 2000 tampaknya belum siap, mengingat stabilitas ekonomi makro, sektor riil maupun perbankan saat ini. Buletin *Ekonomi Moneter dan Perbankan* yang diterbitkan oleh BI (Vol. 1/No. 3, Desember 1998) menyebut beberapa prakondisi yang diperlukan bagi pemberlakuan *deposit protection scheme*. Perlunya *revisioning* atas konfigurasi sistem perbankan ke arah bank-bank pascarekapitalisasi yang lebih terkonsolidasi dengan atmosfer yang kompetitif, aman, dan menguntungkan serta berpegang pada manajemen yang hati-hati.

Sasaran pengawasan yang hingga kini dilakukan untuk perlindungan perekonomian nasional, perlu ditingkatkan gradasinya ke arah sasaran kepentingan publik, dengan mengefektifkan penerapan pengawasan yang terkonsolidasi. Faktor kecukupan modal (CAR) yang tinggi merupakan prasyarat pula dalam rangka pembentukan skim asuransi deposito. Penciptaan jaring pengaman yang menyeluruh untuk meminimalisasi adanya *moral hazard* dan untuk mengurangi risiko *operational bank*, juga merupakan aspek yang tak boleh diabaikan.

Jaring pengaman yang dimaksud adalah berupa iklim perbankan yang sehat, yang ditandai oleh struktur perbankan yang solid, regulasi yang menciptakan bank yang *prudent* serta pengawasan bank yang efektif. Informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi suatu bank diperlukan untuk memudahkan deposan dan pemilik bank memonitor perkembangan usaha serta perkiraan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan demikian, restrukturisasi operasional individual bank termasuk aspek audit internal wajib dibenahi pula. Namun, pertanyaannya tetaplah klasik: kapan? ■

Aib di Ranah Minang

Kristenisasi: Belum tuntas kasus pengkristenan Wawah di Padang, masyarakat kembali dikejutkan kitab Injil berbahasa Minang. GPIB membantah terlibat.

Prinsip hidup orang Minang yang terkenal, *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* (adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran dan Hadis) mulai tercoreng. Ini menyusul munculnya kasus pembaptisan Wawah yang hingga kini masih diusut pihak berwajib dan, dalam waktu yang hampir bersamaan, tersebarnya kitab Injil berbahasa Minang. "Kami telah dibuat malu oleh Yanwardi," tutur seorang pemuda Lubukbasung gemas.

Yanwardi Koto, ketua Persekutuan Kristen Sumatera Barat (PKSB), adalah salah seorang yang ditahan pihak kepolisian gara-gara kasus Wawah. Ia didakwa melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pemalsuan identitas Wawah alias Khairiyah Enniswah, siswa Madrasah Aliyah 2 Padang. Selain Yanwardi, yang diduga sebagai otak pelaku, masih ada sembilan orang lain yang juga sudah ditangkap aparat Polda Sumbar. "Tersangkanya memang 10 orang dan Yanwardi sudah ditahan. Kami akan terus melanjutkan kasus ini," tegas Kapolda Sumbar Kol. Pol. Drs. Dasrul Lamsuddin.

Kasus Wawah. Rangkaian peristiwa ini berawal dari perkenalan Wawah dengan Aurelia Fitria, yang juga mengenakan jilbab, pada Maret 1998. Menurut pengakuan Wawah, setelah sebulan berkenalan, Lia—panggilan Aurelia—mengunjungi tempat dia dan kakaknya, Wardah, yang indekos di Surau Balai Anduring. Sejak itu kedua gadis ini sering saling mengunjungi.

Meski belum lama kenal, suatu ketika Lia tanpa malu-malu memperlihatkan foto-foto telanjangnya. Lia juga mengaku sudah pindah ke agama Kristen Protestan. "Akidah Islam itu sangat jelek," kilahnya. Dan, begitu ia menggambarkan, betapa nikmatnya menjadi orang Kristen. Ujung-ujungnya, Lia mengajak Wawah pindah agama.

Wawah kaget bukan kepalang. Simpatinya kepada Lia luntur seketika. Namun, suatu malam, Lia mengajak Wawah jalan-jalan. Tak dinyana ia dibawa ke Gereja Protestan Indonesia Barat (GBIP) Efrata di Jalan Bagindo Aziz Chan Padang. Di bawah ancaman, Wawah dipaksa melepaskan jilbabnya, mandi, dan ikut kebaktian yang dipimpin Pendeta Willy. Setelah itu, oleh Yanwardi, Wawah dititipkan di keluarga anggota jemaat GBIP Salmon Ongirwalu dan Zuriana di Teluk Bayur. Wawah mengaku tak bisa berbuat apa-apa, termasuk saat Salmon memperkosanya!

Sejak diajak Lia, puteri Damri Harahap itu tak pernah pulang. Lia sendiri tak terlihat lagi batang hidungnya. Sambil terus mencari, keluarga Wawah melapor kepada polisi—meski sempat didiamkan selama empat bulan. Hingga suatu saat, Abu Samah Siregar, paman Wawah, mendengar kabar bahwa Wawah kini belajar di SMU Kristen Kalam Kudus tanpa jilbab. Namun saat dilacak, tak ada nama Khairiyah Enniswah di sana. Rupanya, nama Wawah telah diubah menjadi Indah Fitria. Atas desakan Kepolisian Teluk Bayur, Kepala SMU Kalam Kudus Robert akhirnya mengaku, karena takut ketahuan, ia telah memindahkan Wawah ke Malang.

Pada Agustus 1998, Wawah kembali ke rumah. Ia menuturkan, setelah dibaptis secara paksa, ia disekap di bawah pengawasan yang sangat ketat. Dan kalau keluar ke sekolah, ia dikawal dan diawasi sehingga tak punya pilihan lain kecuali menuruti kemauan mereka.

Namun setelah itu kasus ini kembali terpendam. Baru pada Desember 1998, saat jabatan Kapolda Sumbar dijabat Dasrul Lamsuddin, menggantikan Boedi R. Koestono yang dilapori para ketua adat, kasus ini kembali terangkat. Dasrul segera bertindak dan menangani kasus itu. Hanya saja, ia mewanti-wanti, "Mohon dipisahkan, yang kami usut adalah penculikan, pemerkosaan, dan pemalsuan identitas. Jangan ada sidang di luar pengadilan."

Mirip Quran. Walaupun Dasrul sangat khawatir jika terjadi pertentangan SARA dalam kasus ini dan para pemimpin agama juga sudah turun tangan untuk menenangkan massa, aroma kristenisasi masih cukup kuat tercium oleh masyarakat. Menurut sumber koresponden *Panji* di Padang, kasus Wawah hanyalah satu dari sekian peristiwa kristenisasi di Sumbar. Kabarnya, beberapa pelajar MAN dan MTsN di sana juga pernah menerima rayuan serupa. Beberapa orang, termasuk pemeluk agama Buddha, mengakui pula keluarga atau kemenakannya pernah dipaksa pindah agama.

NITA INDRAWATI
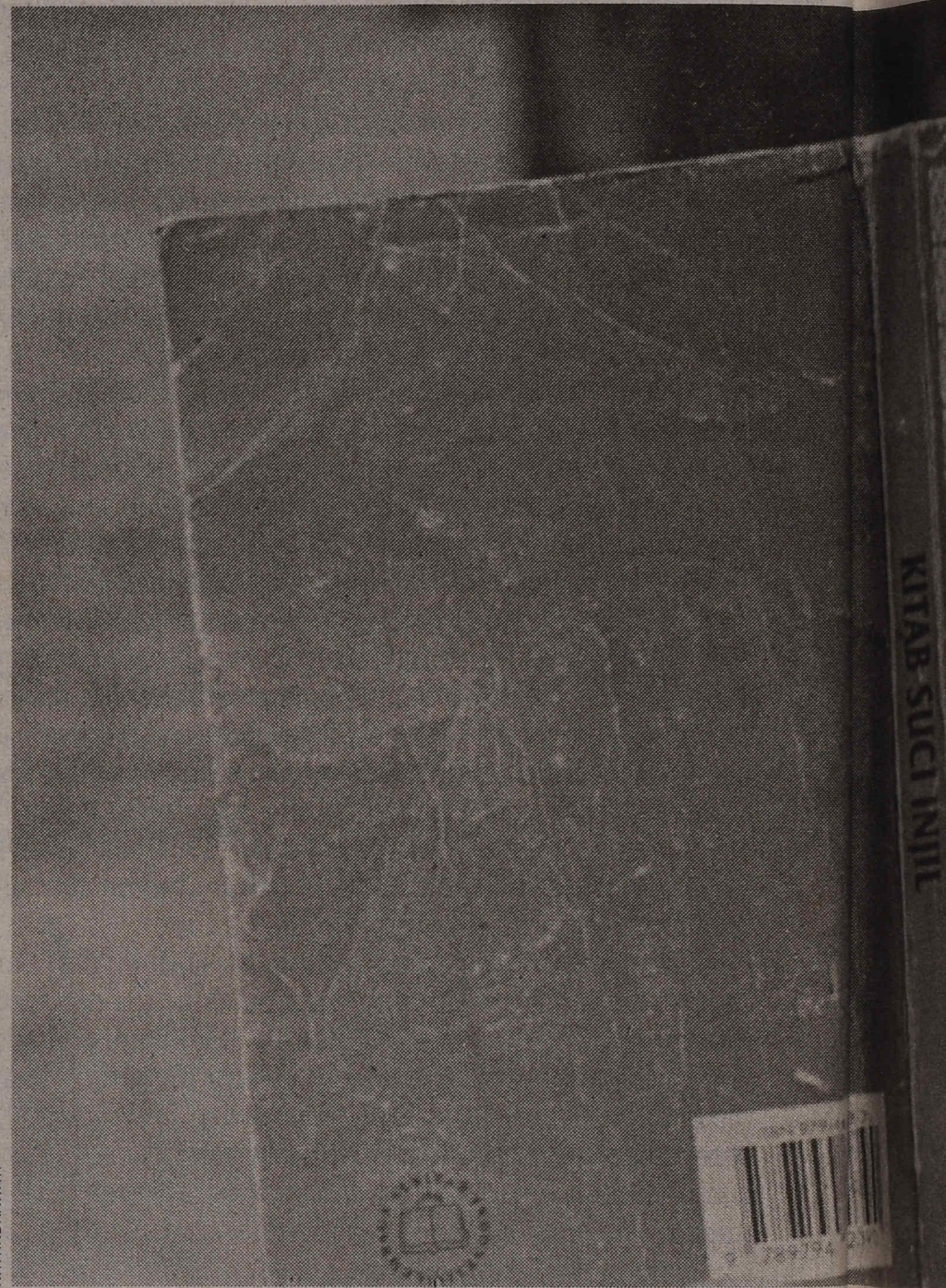
Injil berbahasa Minang: Sudah tersebar lama

Aroma kristenisasi makin kuat terembus dengan beredarnya kitab Injil berbahasa Minang di Sumbar. Injil yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) Jakarta pada 1996 itu sebetulnya sudah ditemukan sejak lama. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar pun, setelah mengetahuinya, juga sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak keamanan. Namun, mereka sukar menariknya kembali lantaran telanjur beredar luas.

Sekilas, Injil itu tampak seperti tafsir Al-Quran dengan panjang 17 cm, lebar 11 cm, dan tebal 1,5 cm. Warna kulitnya pun didesain sama berwarna hijau dengan tulisan Kitab Suci Injil. Sementara di bagian dalam, di bawah teks Kitab Suci Injil, tertulis Perjanjian Baru Bahaso Minang. Untuk kata pengantar di bagian pertama masih digunakan bahasa Indonesia, tapi

di halaman berikutnya tertera kata pengantar dalam bahasa Minang dengan judul *Pa Anta Kato* (Kata Pengantar). Hanya saja kata-kata Allah ditulis ALLAH. Sesekali disertai dengan ALLAH Subhanahu Wata'ala. Di penutup kata Amin ditambahkan Amin ya Rabbal'alamin layaknya dalam agama Islam.

Entah bagaimana caranya, peredaran Injil tersebut diam-diam mencuat kembali bersamaan dengan hangatnya kasus Wawah. Menurut satu sumber *Panji* di Ditsospol Sumbar, dua tahun silam pihaknya pernah menarik dari perederan sebagian kitab Injil tersebut yang menurutnya berasal dari GBIP. Drs. Rustam, S.H., kajari Muaro Sijunjung yang mantan jaksa penuntut umum, pernah ditugasi kajati untuk memeriksa seorang bule asal Amerika yang sudah berwarga negara Indonesia, R. Charles Lewis JR, pada 13 Januari 1997 sebagai pengedar Injil berbahasa Minang.

Dalam pemeriksaan itu, Lewis mengaku memesan dan menerima Injil tersebut dari LAI Jakarta. Ia mendapat kiriman dari seorang pemuda GBIP yang tak dikenalnya. Bahkan ia pernah mengambil sendiri ke gereja GBIP sebanyak 10 dus berisi 500 eksemplar kitab Injil. Kitab itu ia terima dari pendeta GBIP bernama MAX. Laki-laki pengusaha swasta itu mengaku telah memberikan sebanyak 100 eksemplar Injil kepada orang lain termasuk umat Islam di Minang.

GBIP Membantah. Ketua Majelis Jemaat GBIP Efrata Pendeta M. Tetelepta membantah keterlibatan gerejanya dalam program kristenisasi. "GBIP tak pernah merencanakan dan jadi pusat jaringan kristenisasi. Kalau kebetulan ada oknum tertentu dari anggota GBIP, ya itu pribadinya. Begitu juga soal Injil berbahasa Minang. Tak ada program GBIP untuk mencetak Injil berbahasa Minang. Warga kita semua ada di Indonesia, ya kita pakai bahasa Indonesia," katanya kepada *Panji*.

PA ANTA KATO

Bakcando nan lah dikatokan di dalam Kitab Ibrani pasal 1 ayaik 1, sajak dari jaman saisuak. ALLAH Subhana. Wataala lah mangecek jo babagai-bagai caro, malalui nabi-nabi, sarato jo pisuruah-pisuruah-Nyo. Tapi, biyapun baitu, apo nan dimukasuik, sarato jo apo nan dirancanakan ALLAH, tatap sajo samo, iyolah kasalamatan (babaliak ka Sarugo) untuak kasadonyo umaik manusia. Dek karano di doso, nan lah mamutuihkan ubuangan antaro manusia jo ALLAH, iyolah dikutiko Adam jo Hawa, manusia partamu, inyo bi malangga apo nan ditagah dek ALLAH, ALLAH lah managah inyo, supayo jan dimakan buwah pangatawuan baiak jo pangatawuan jahek, (buwah kuldi) (Kitab Kajadian pasal 3). tapi dimakannyo juwo. Sabagai ukunannyo iyolah mauik, itulah baban nan indak dapek di ilakkan dek satiyok manusia, satiyok urang musti ma adok-i pangadielan Tuhan (Kitab Kajadian pasal 2 ayaik 16-17; Kitab Yakobus pasal 1 ayaik 15; Kitab Ibrani pasal 9 ayaik 27). Tapi, dek rahmaik ALLAH nan sangaik gadang kabake manusia, ALLAH namuah juwo lai bamurah ati manyatokan kahandak-Nyo kabake manusia nan banyak doso, sarato banyak kakurangan. Puji syukur kito sambahkan kapado ALLAH Nan Sangaik Bijaksano tu, dek karano Baliau lah mambarikan kabake kito firman-Nyo nan lah tatulih, iyolah Alkitab. Di dalam Alkitablah kito dapek mangatawui apo kahandak ALLAH nan bana. Ikolah kiniko Alkitab nan lah sampai ka tangan dunsanak-dunsanak pambaco, tapi iko baru kitab INJIL, atau na biaso dinamokan juwo kitab Pajanjian Baru.

Tantu sajo maso sarato jo caro mancataik firman ALLAH ko, mamakan wakatu nan panjang. Pado jaman saisuak, ALLAH acok bafirman sacaro lansuang kabake pisuruah-pisuruah-Nyo, bakcando nan dialami dek Nabi Musa di Gunuang Sinai (Kitab Kaluaran pasal 19-20). Ado pulo masonyo ALLAH bafirman jo parantaroan malekaik nan di utuih-Nyo, saroman jo bakcando ALLAH nan lah mangecek kabake Siti Maryam, nan lah malayiekan Isa Almasih (Kitab Lukas pasal 1 ayaik 26-38). Ado pulo ALLAH manyampaikan firman-Nyo malalui bimbiangan ROH ALLAH, nan mamimpin ati sarato jo pikieran urang-urang nan manjadi pisuruah-Nyo, nan diparentahkan untuak manulihkan apo nan dipasankan ALLAH untuak umaik manusia (Kitab Duwo Petrus pasal 1 ayaik 21). Sabagai Nan Manjadikan bumi jo langik sarato jo isinyo. ALLAH pun dapek pulo manyatokan diri malalui alam nan dijadikan-Nyo (Kitab Zabur pasal 19 ayaik 1-7). Nan labiah lai daripado itu. ALLAH malah lah manyatokan kahandak-Nyo. malalui riwayaik kajadian-kajadian nan dialami dek umaik-Nyo sandiri. Nayiak turunnyo surang rajo. kalah manangnyo banso dalam paparangan. sarato babagai-bagai kajadian lainnyo manggambarkan karajo ALLAH dibaliak sagalo kajadian tu. Jo c baitu, dek karano ALLAH Mahakuwaso. Baliau dapek bafirma

Lalu bagaimana dengan kitab *Kaba dari Lukas*, kitab yang senada dengan Injil yang juga dibahasaminangkan? Lagi-lagi Tetelepta membantah. "Saya tidak pernah lihat, saya tidak tahu. Yang menjadi soal kalau Injil berbahasa Minang itu diberikan kepada umat Islam dengan maksud mempengaruhi. Itulah yang tidak benar, bertentangan dengan ajaran Nabi Isa. Dia tidak pernah mengajarkan untuk memaksa seseorang menjadi pengikutnya. Karenanya, umat kristiani tak pernah melakukan pemaksaan."

Anehnya, Tetelepta menyatakan bahwa dia sudah minta maaf dalam acara konsultasi umat beragama. Dan, katanya, kalau memang ada pihak GBIP yang menurut hukum benar-benar melakukan apa yang dituduhkan dan bersalah, ia menyerahkannya kepada pihak berwenang. "Namun yang jelas, GBIP telah difitnah. Kita sudah terbuka. Ini kan soal dunia dan akhirat, tak perlu macam-macam. Tuhan akan menguntuk bila GBIP berbohong. Ini masalah agama, bukan soal kayu ilegal."

Mengenai soal Wawah, Tetelepta mengatakan, justru gadis itu sendiri yang datang ke GBIP dan bertemu dengan Yeni dan Fajar, pegawai di situ. Yeni menyarankan agar Wawah ke Yanwardi. "Jadi tidak betul kalau Wawah diculik, apalagi sampai dibaptis Willy. Itu fitnah," tegasnya.

Apa pun persoalannya, masalah ini memang harus diusut tuntas. Dan bagi masyarakat Minang sendiri, ini tentu saja satu aib, mengingat betapa dekatnya hubungan antara adat dan agama di sana. Hingga kini, pihak polda Sumbar telah menahan 10 tersangka. Selain Yanwardi, kesembilan tersangka itu adalah Salmon dan istrinya Zuriana (sudah diadili dalam kasus penculikan dan pemerkosaan); Robert (kepsek SMU Kalam Kudus) dan istrinya; Pendeta Billy (masih buron); Lia (yang menjebak Wawah); Fajar, Yeni, Nita, dan Daci (jemaat GBIP).

Akhirnya, patut direnungkan komentar ahli adat Minangkabau Yus Datuk Parpatieh soal kasus ini. Menurut dia, kasus ini terutama disebabkan oleh longgarnya hubungan *Mamak-Kemenakan*. "Seharusnya hubungan *Mamak-Kemenakan* lebih digalakkan kembali. Jelas sekali ada hal yang berkurang dalam jalannya adat di masyarakat Minang. Selain itu, adat pun dapat ditinjau kembali kesesuaiannya dengan masa sekarang. Penyempurnaan ini dilakukan terus oleh ajaran Islam dari waktu masuknya Islam, sekarang, hingga sampai kapan pun," ujarnya. ■

NASRULLAH ALIEF
LAPORAN: *NITA INDRAWATI (PADANG)*

Cukup Tiga Bulan Saja

Rusia: Pemecatan PM Sergei Stepashin dinilai akan makin memperburuk berbagai krisis di negara ini. Sanggupkah penggantinya, Vladimir Putin, mewujudkan keinginan Yeltsin?

Di tengah sakitnya yang tak kunjung sembuh, Presiden Rusia Boris Nikolayevch Yeltsin masih menunjukkan kekuatannya. Dari tempat peristirahatan presiden di kawasan hutan sebelah barat Moskow, secara mengejutkan Yeltsin mendepak perdana menterinya, Sergei Stepashin, yang praktis baru bertugas selama tiga bulan. Yeltsin sepertinya ingin membalikkan pandangan umum dan lawan-lawan politiknya bahwa dia masih berkuasa dan tak bisa diutak-atik.

Memang bukan hal baru jika Yeltsin tiba-tiba memecat PM-nya. Sudah empat perdana menteri yang dia geser karena dianggap tak becus memperbaiki perekonomian yang morat-marit, utang luar negeri yang membengkak, dan krisis politik di dalam negeri. Yang tak kalah pentingnya mengapa Yeltsin kerap memecat perdana menterinya, karena ia merasa dijauhi dan keselamatan keluarga beserta kelompoknya terancam.

Karena itu, Yeltsin kerap bertindak di luar norma atau praktek ketatanegaraan. Ia menjadi sangat takut jika perdana menteri atau para menterinya mulai berseberangan pandangan. Untuk mengamankannya, ia harus berkali-kali mengganti kabinet dan memecat perdana menterinya. Bayangkan, dalam tempo 17 bulan terjadi pergantian perdana menteri sebanyak empat kali (Yevgeny Primakov, Viktor Stepanovich Chernomyrdin, Sergei Kiriyenko, dan Sergei Stepashin). Rata-rata seorang PM hanya diberi kesempatan memerintah selama empat bulan. "Mana mungkin dalam waktu yang singkat mereka bisa segera membenahi perekonomian dan krisis politik di dalam negeri?" ujar salah seorang pengamat politik di Moskow.

Yeltsin sepertinya tak peduli apa kata orang. Ia tetap saja suka bongkar-pasang kabinet. Sebagai ganti Sergei Stepashin yang sebenarnya juga termasuk orang kepercayaan Yeltsin, ditunjuklah Vladimir Putin. Pria kelahiran St. Petersburg ini dikenal sebagai sekutu dekat tokoh reformasi ekonomi Rusia, Anatoli Chubais, dan sebagai seorang analis politik. Baik Stepashin yang pernah menjadi menteri dalam negeri maupun Putin merupakan dua pribadi yang cukup disegani. "Saya berharap ia (Putin, *Red.*) akan sukses. Sebuah sukses yang luar biasa. Ia tidak punya pilihan lain," ujar Stephasin.

Yeltsin tampaknya menaruh kepercayaan sekaligus harapan yang sangat besar dari orang kepercayaannya ini. Tengok saja, sebagaimana dimuat kantor berita *Reuters*, Yeltsin tak hanya mengumumkan Putin sebagai PM, tapi sekaligus mendukungnya sebagai presiden Rusia mendatang. Menurut orang nomor satu di Negeri Beruang Merah ini, Putin dinilai mampu mempersatukan masyarakat berdasarkan kekuatan politik yang paling luas guna memastikan reformasi tetap dijalankan di Rusia. "Dia mampu mempersatukan mereka yang bertekad memperbarui Rusia Raya pada abad ke-21," ucap Yeltsin yang menyatakan akan mundur setelah pemilu tahun 2000.

Banyak pengamat menilai, penunjukan Putin sebagai PM sebenarnya dalam rangka mempersiapkan pemilu tahun 2000. Yeltsin sangat berkepentingan calonnya dapat menjaga dan meneruskan program reformasi bagi Rusia. Oleh karena itu, jika ada sedikit kebijakan PM-nya yang dianggap melenceng dia tak segan-segan untuk menyingkirkannya. Pada pemilu mendatang diperkirakan persaingan antara kubu komunis, garis keras, dan nasionalis bakal sangat ketat. Maka, Yeltsin berusaha agar calonnya benar-benar siap dan bisa dipercaya.

Sebenarnya banyak yang mengkhawatirkan, penggantian PM pada saat terjadi multikrisis sangat membahayakan Rusia. Kendati begitu, baik AS dan sekutunya tak banyak berkomentar dan membiarkan saja tingkah laku Yeltsin yang kerap membubarkan kabinetnya dan memecat perdana menterinya tanpa hasil yang jelas. Bagaimanapun AS lebih percaya kepada Yeltsin daripada harus menghadapi kekuatan komunis pimpinan Genandy Zyuganov yang menguasai mayoritas parlemen. Oleh sebab itu, meski upaya pemulihan ekonomi belum menunjukkan hasil, IMF masih terus dipacu untuk mengucurkan dana sebesar US$4,5 miliar. Pemulihan ekonomi Rusia penting artinya agar wilayah ini tak hancur. Terutama sekali bagi AS, Rusia jangan sampai jatuh ke tangan kekuatan komunis. Siapa pun yang menjadi PM sepertinya tak masalah bagi AS sepanjang masih segaris dengan kebijakan Yeltsin.

AP

Vladimir Putin dan Boris Yeltsin: Tetap saja berat

Hanya saja tidak sedikit yang menilai penunjukan Putin menandakan Rusia belum beranjak dari pola lama Uni Soviet, yakni badan intelijen menjadi gerbang menuju posisi tertinggi di bidang politik. Seperti pendahulunya, Putin yang kini berusia 46 tahun menghabiskan 20 tahun usianya di badan intelijen. Karier awalnya dari KGB yang kemudian berlanjut ke Badan Keamanan Federasi setelah Uni Soviet bubar.

Lamanya berkarier di badan intelijen itu

Ujian Pertama Putin

Baru sehari menjabat perdana menteri, Vladimir Putin sudah dibebani setumpuk tugas berat. Bukan hanya soal kemelut ekonomi yang tak kunjung teratasi, juga soal politik dalam negeri. Pernyataan kemerdekaan gerilyawan Dagestan untuk memisahkan diri dari Federasi Rusia tentu saja membuat pening Putin. Maklum, Presiden Boris Yeltsin yang sakit-sakitan itu tak sanggup lagi menangani sendiri masalah pergolakan di kawasan Kaukasus. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Putin untuk menyelesaikannya.

Mantan anggota dinas rahasia Uni Soviet, KGB, itu memang punya segudang pengalaman di bidang intelijen. Namun menghadapi krisis ekonomi dan politik, serta perlawanan gerilyawan muslim di Dagestan, ia mungkin masih seorang pemula. Ketika menghadapi pergolakan di Chechnya saja Rusia sempat mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Maklum, Rusia tak mampu membiayai pertempuran karena di dalam negeri sendiri lagi kesulitan dana. Jika krisis Dagestan juga dihadapi dengan kekuatan militer, bukan tidak mungkin Rusia akan menghadapi hal yang sama karena dana yang sudah sangat minim bakal terkuras habis.

Konflik di negara bagian Federasi Rusia itu boleh dibilang merupakan persoalan yang paling gawat bagi Negara Beruang Merah. Dagestan merupakan provinsi di Rusia yang terdiri atas tak kurang 30 etnis dengan mayoritas warga beragama Islam. Wilayah Dagestan terletak di pegunungan Kaukasus dan membentang di tepi Laut Kaspia. Seperti halnya Chechnya yang menghendaki menjadi negara merdeka lepas dari Rusia, golongan muslim yang menjadi mayoritas penduduk Dagestan juga menginginkan hal yang sama. Konflik yang terjadi di perbatasan Chechnya dan Dagestan merupakan peringatan awal bagi perjuangan menuju negara merdeka. Namun setelah Rusia menyatakan akan melakukan pembalasan besar-besaran, para pejuang muslim buru-buru memproklamasikan berdirinya negara Dagestan.

Bagi Yeltsin, persoalan Chechnya dan Dagestan ibarat duri dalam daging. Jika dilepas berarti Rusia makin kehilangan wibawa sekaligus kehilangan wilayah yang kaya akan sumber alamnya. Di daerah Kaukasus inilah terbentang kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, emas, nikel, dan sebagainya. Tetapi jika dipertahankan mereka harus mengerahkan kekuatan militer yang tentu saja akan menguras dana.

Meski begitu, Rusia bertekad akan segera membereskan pergolakan di Dagestan yang disinyalir dimotori pejuang muslim Chechnya. Pemimpin gerilyawan Chechnya, Sahmil Basayev, menyatakan bahwa ia memang berada di balik semua aksi tersebut. Dia berencana melakukan perlawanan terhadap pasukan Rusia sampai mereka hengkang dari bumi Kaukasus. "Jika Rusia hengkang dari Kaukasus dengan sendirinya kami akan mendiamkannya. Tapi jika tidak, pasukan kami akan memaksa mereka pergi. Kami memiliki pasukan dan perlengkapan yang cukup untuk melakukannya."

Pejuang Muslim Dagestan: Pilih pisah

AP

Tak mau kalah gertak, Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Igor Zubov menyatakan akan melakukan serangan balasan besar-besaran. "Kami juga memiliki pasukan yang cukup untuk menaklukkan para pemberontak," tandasnya. Pasukan Rusia, sebagaimana dilaporkan kantor berita *Associated Press*, mulai menyerang kota Tandur dan Rakhta yang diduga menjadi tempat persembunyian gerilyawan Chechnya.

Banyak yang memperkirakan Rusia akan terjebak dalam perang berkepanjangan jika terpancing melakukan serangan besar-besaran. Bila hal itu sampai terjadi, maka pertempuran akan menguras dana yang akhirnya akan memperburuk perekonomian Rusia. Bukan tidak mungkin jalan kekerasan akan semakin mengentalkan wilayah di pegunungan Kaukasus untuk segera memisahkan diri. Tumbuhnya kesadaran yang dipersatukan oleh agama yang sama, yakni Islam, membuat mereka kian kuat menghadapi dominasi Rusia. Entah jalur mana yang akan dipilih Putin agar bisa lolos dari ujian pertama ini. ■

pula yang membuat penunjukan Putin pun tak lepas dari berbagai kritikan. Seperti PM pendahulunya, Putin dinilai masih hijau dalam urusan politik Rusia yang cukup rumit. "Dia hanya seorang di antara ratusan agen biasa," ujar Igor Prelin, mantan pejabat KGB. "Ia pun tak ada artinya di kalangan personel KGB."

Memang tak banyak catatan tentang prestasi Putin. Yang jelas dia pertama kali masuk ke gelanggang politik tahun 1990 sebagai asisten Anatoly Sobchac, wali kota St. Petersburg. Tahun 1994 dia diangkat menjadi deputi pertama kepala pemerintahan kota. Namun beberapa tahun kemudian ia ditarik ke Moskow dan menjabat kepala Dinas Keamanan Federal Rusia dan sekretaris penasihat kepresidenan, sampai akhirnya ditunjuk menjadi PM.

Kendati ia dipercaya Yeltsin, masih banyak yang meragukan kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi tantangan yang harus dihadapi tidaklah ringan. Selain setumpuk persoalan ekonomi dan utang luar negeri, ia juga harus bisa membuktikan dapat menuntaskan konflik di Dagestan. Jika gagal, bukan mustahil nasibnya bakal sama dengan pendahulunya. Bagi Putin, pergolakan di Dagestan merupakan tes yang harus dilalui dengan mulus agar bisa tetap bertahan di pemerintahan.

Hanya saja, banyak yang ragu Putin dapat mengatasi pergolakan di kawasan Kaukasus yang cukup rumit itu. Pengalaman lalu telah membuktikan, Rusia gagal menangani pemberontakan di Chechnya yang akhirnya berhasil memisahkan diri karena Rusia sendiri tengah menghadapi masalah keuangan yang akut. Krisis ekonomi, politik, serta militer di Chechnya dan Dagestan memang menjadi batu sandungan sekaligus mungkin akan membuyarkan impian Yeltsin yang ingin mewudukan The Greater Russia in the Next Millennium. ■

PUJI IRWANTO

Genderang Perang Ditabuh Lagi

India-Pakistan: Insiden penembakan pesawat militer Pakistan oleh India mementahkan kembali upaya damai kedua negara itu.

Sebuah helikopter India yang membawa rombongan wartawan dari dalam dan luar negeri ke perbatasan India-Pakistan tiba-tiba saja menukik. Pesawat kemudian oleng dan berusaha berputar-putar. Untunglah tak sampai terhempas ke bumi. Puluhan wartawan yang mengikuti acara peninjauan lapangan tempat jatuhnya pesawat tempur Pakistan pun pucat pasi. "Kami sungguh terkejut. Helikopter yang kami tumpangi tiba-tiba balik arah dan kembali ke Nayila," ujar salah seorang wartawan kantor berita *AFP*.

Mereka belum tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Setelah tiba kembali di Nayila, India, dan mendapat penjelasan, barulah mereka sadar bahwa sebuah rudal Pakistan hampir menghantam pesawat yang mereka naiki. Tetapi pihak Islamabad segera membantah, bahwa rudal tersebut bukan ditujukan ke pesawat yang dinaiki para wartawan, tetapi diarahkan pada dua pesawat MIG India yang menyertainya.

Insiden yang cukup menegangkan itu terjadi sehari sebelum perayaan kemerdekaan Pakistan, 14 Agustus, dan dua hari sebelum perayaan kemerdekaan India, 15 Agustus lalu. Islamabad menuding, India berusaha mencuri reruntuhan pesawat milik Angkatan Laut Pakistan yang ditembak di perbatasan kedua negara pada tanggal 10 Agustus. Juru bicara militer Pakistan, Brigadir Rashid Qureshi, menegaskan bahwa India telah membawa reruntuhan pesawat itu ke wilayahnya untuk dipamerkan kepada wartawan bahwa pesawat Pakistanlah yang masuk ke wilayah India. "India berperilaku seperti pencuri, mereka mengambilnya untuk propaganda," tandasnya.

Insiden penembakan pesawat militer Pakistan yang menewaskan 16 awak itu telah mementahkan kembali upaya damai kedua negara akibat konflik Kashmir. Padahal, sebelumnya Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah sepakat menarik dukungan terhadap pejuang muslim Kashmir. Boleh jadi karena tekanan dalam negeri membuat Islamabad mesti mencari cara baru guna membantu pejuang Kashmir. Pengiriman pesawat militer pun mungkin maksudnya hanya untuk mengawasi dan memantau pergerakan militer India di perbatasan kedua negara.

Seperti dikatakan pengamat militer independen dari India, Jasit Singh, pesawat Pakistan itu tampaknya sedang menyelidiki sistem pertahanan udara di daerah perbatasan. Namun bukan berarti Pakistan sedang menyiapkan suatu serangan. "Saya menyimpulkan mereka tengah merencanakan sesuatu tapi entah apa bentuknya," ujar direktur Institut Studi dan Strategi Pertahanan ini.

Kendati begitu, pihak militer India tetap menuding pesawat Pakistan tersebut tengah melakukan tugas mata-mata. Menurut New Delhi, pesawat Pakistan terbang 10 kilometer dalam wilayah udara India. Pesawat militer India yang mengejar telah memberikan peringatan namun tak dihiraukan. Akibatnya, sebuah rudal menghentikan penerbangan pesawat Pakistan tersebut.

Sebaliknya Islamabad menyatakan, pesawat yang ditembak India sama sekali tak memiliki perlengkapan militer. "Tak ada alasan militer India melakukan penembakan. Aksi ini benar-benar merupakan bentuk agresi terbuka," ujar Nawaz Sharif. Menurut dia, militer Pakistan tak akan menyarankan setiap aksi agresi tapi mereka akan berusaha mengecilkan tiap kemungkinan pembicaraan dengan India terhadap sejumlah masalah, termasuk masa depan Kashmir.

Pasukan militer Pakistan: Siap tempur

Terlepas siapa yang salah dan berusaha memprovokasi, yang jelas tindakan militer India membuat proses perdamaian kedua negara mengalami kemunduran. Seorang pejabat India mengakui, insiden penembakan itu akan membuat setiap perundingan diplomatik bakal kian sulit. Ketegangan kedua negara pun makin memanas dan bukan tidak mungkin sulit dikendalikan. Mengingat sejarah masa lalu, setidaknya India dan Pakistan telah terlibat pertempuran senjata sebanyak tiga kali selama 52 tahun perjalanan kedua negara itu.

Semenjak ketegangan memanas kembali, Pakistan memutuskan untuk mengerahkan pasukannya ke perbatasan kedua negara. Hal itu tentu saja membuat cemas Washington dan sekutunya, karena konflik kedua negara itu akan berpengaruh luas di kawasan Asia Selatan. Pejabat intelijen AS di Washington bahkan menyebutkan, ada beberapa tanda baik India maupun Pakistan tengah mempersiapkan diri untuk konflik selanjutnya. Kedua negara itu telah menyiagakan pasukannya secara penuh.

Namun Menteri Pertahanan India George Fernandes menilai, tak akan ada ancaman perang antara kedua negara. Baik India maupun Pakistan sebenarnya tak menginginkan situasi menjadi kian memburuk. Jika kedua negara mengerahkan kekuatan militernya, semata untuk menjaga wilayah perbatasan. "Tapi untuk kontak senjata kami berharap tidak sampai terjadi."

Melihat gelagat yang kurang baik, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, James Rubin, segera mengusulkan agar kedua negara bisa menahan diri dengan mengamati kembali persetujuan April 1991. Dalam perjanjian tersebut, baik India maupun Pakistan telah sepakat menyangkut perjanjian larangan terbang pesawat militer atau pengintai berada dalam 10 kilometer dari wilayah perbatasan. Nah, mudah-mudahan dengan membaca kembali perjanjian itu, masing-masing menyadari kekeliruannya dan menyelesaikan masalah dengan jalan damai. ■

PUJI IRWANTO

Mengelus Putra Mahkota

Irak: Putra kedua Presiden Saddam Hussein mendapat hak istimewa mengambil alih tugas kepresidenan. Benarkah Saddam sedang mempersiapkan pengganti dan siap *lengser*?

Merasa punya musuh di mana-mana dan usianya pun tak lagi muda, Presiden Irak Saddam Hussein mulai giat membangun sistem pertahanan. Bukan dengan cara mendirikan benteng atau bunker, melainkan dengan mempersiapkan putra keduanya, Qussay Hussein, 33, guna mempertahankan kekuasaan sekaligus menyelamatkan keluarganya. Qussay dipercaya ayahnya untuk mengambil alih kekuasaan jika negara dalam keadaan darurat.

Kebijakan Saddam yang tidak populer itu tentu saja menimbulkan spekulasi bahwa Ketua Partai Baath ini sudah lelah dan bersiap-siap untuk *lengser*. Memang spekulasi tersebut masih lemah. Sebagaimana dilaporkan surat kabar *Asharq Al-Awsat*, yang berpusat di London, Saddam dinilai masih terlalu kuat. Meski mengalami kekalahan telak dalam Perang Teluk dan rakyatnya mengalami penderitaan panjang akibat embargo ekonomi oleh PBB, hal ini tak mampu menggoyang posisinya. Basis kekuasaan Saddam masih sangat kukuh sehingga penunjukkan Qussay lebih ditujukan untuk berjaga-jaga. "Perintah kepresidenan itu bukanlah bagian dari tindakan untuk mempersiapkan Qussay menggantikan Saddam," tulis *Asharq*.

Dengan hak istimewa tersebut, jika terjadi sesuatu atas diri Saddam, setiap saat Qussay bisa mengambil tindakan guna melaksanakan fungsi-fungsi khusus kepresidenan. Meski pemerintah menolak bahwa Qussay sedang dipersiapkan untuk menggantikan bapaknya, ia tetap disebut-sebut sebagai orang kuat kedua di negeri 'seribu satu malam' ini. Dalam menjalankan tugasnya, Qussay akan dibantu oleh satu komite pembuat keputusan yang beranggotakan 10 orang. Mereka dipilih dari kerabat presiden yang saat ini menduduki posisi kunci, yakni deputi perdana menteri, menteri dalam negeri dan keamanan, serta direktur-direktur intelijen yang kesetiaannya tak diragukan lagi.

Pembentukan komite tersebut dipastikan bakal lahir keputusan-keputusan penting dari tangan Qussay. Inilah yang memperkuat dugaan bahwa Saddam sedang mempersiapkan putra mahkota. Apalagi atas prestasi militernya ia lebih banyak menaruh kepercayaan kepada adik Uday Hussein, 35, putra pertama Saddam ini.

AP

Saddam: Mengamankan diri

Pada Juli lalu, misalnya, Qussay dipercaya memimpin pasukan pengawal revolusi guna menumpas kerusuhan di Irak Selatan, yang mayoritas pemeluk Syiah. Sebelumnya, satuan keamanan khusus yang dibentuk pada 1980 juga dipercayakan pada Qussay. Satuan khusus ini dibentuk untuk melindungi presiden, keluarganya, dan para pejabat tinggi negara.

Untuk mengontrol kekuatan militer serta kelompok-kelompok oposisi, Qussay diberi wewenang menguasai sebagian besar dinas militer, keamanan, dan intelijen. Dengan demikian, sebenarnya kendali negara sudah ada di tangannya. "Dia mengepalai semua pasukan keamanan dan intelijen untuk menumpas kerusuhan di Bagdad, menyusul serangan terhadap kantor-kantor pemerintah dan Partai Baath," tulis *Al Hayat*, surat kabar berbahasa Arab yang juga terbit di London.

Inilah strategi Saddam dalam mempertahankan kekuasaannya. Hanya mereka yang memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapat kepercayaan. Maka, posisi kunci di lembaga keamanan dalam negeri, militer, dan eksekutif, bahkan jaringan ekonomi dan perdagangan, selalu berada di tangan keluarga dan teman dekat presiden.

Kemudian, melalui Partai Baath yang jaringannya sampai ke desa-desa, Saddam beserta keluarganya bisa memperoleh informasi dini dari setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Partai Baath yang semula hanya berfungsi sebagai landasan ideologi, berangsur-angsur telah menjelma menjadi bagian dari aparat keamanan. Hal ini tentu akan menyulitkan kelompok oposisi untuk membangun kekuatan. Apalagi kelompok oposisi yang jumlahnya tidak banyak dan kecil-kecil justru sering bertikai sendiri. Satu sama lain saling curiga karena trauma masa lalu ketika pengkhianatan acap kali terjadi. Ini tentu sangat menguntungkan Saddam.

Sebut saja pada 1996, dua partai yang sama-sama mengatasnamakan suku Kurdi di Irak, malah saling baku hantam. Mereka lupa pada cita-cita partai, yakni membentuk negara Kurdistan yang merdeka. Mas'ud Barzani, ketua Partai Demokrasi Kurdistan, misalnya, lebih memilih beraliansi dengan Saddam guna menghancurkan kekuatan Ketua Partai Unity Kurdistan Jalal Talabani. Akibatnya, rakyat yang hendak beroposisi atau bergabung dengan penentang Saddam dibuat kapok karena para pemimpin partai ternyata hanya mengutamakan kepentingan sesaat.

Kini, pada saat hidup serba sulit akibat embargo PBB, banyak rakyat yang ogah mengambil risiko lebih jauh. Terlebih, pemerintahan Saddam akan menjatuhkan sanksi ekonomi berupa "penganaktirian pembangunan" bagi wilayah yang memberontak. Kalaupun masih ada yang nekat, anak-anak Saddam yang masih muda dan dipercaya mengendalikan badan-badan keamanan itu akan dengan cepat melakukan penumpasan. Begitulah, Saddam kini sudah mempersiapkan pelindung sekaligus penerus. ■

MAHFUD AHMAD

Lomba di Tengah Keprihatinan

LKIR: Tahun ini, peserta lomba karya antarpelajar ini lebih sedikit. Bukan cuma karena krisis moneter, tapi juga budaya penelitian yang belum tumbuh.

Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Pepatah ini tepat ditujukan kepada Adi Nugroho, lulusan SMUN 12, Jakarta Timur. Pasalnya, ketika mengikuti Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) yang diadakan LIPI bekerja sama dengan *TVRI* tahun lalu, dia gagal meraih predikat terbaik. Tapi dia tidak menyerah, tahun ini dia ikut lagi, dan berjaya sebagai juara I untuk bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan. Dia mampu menyingkirkan sembilan finalis lainnya setelah mempresentasikan karya tulis berjudul, *"Studi Pengrajin Kerang di Wilayah RW 03 Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur"*. Sosok seperti Adi, agaknya, bisa menjadi pelipur lara kita melihat maraknya kasus tawuran antarpelajar saat ini.

Sosok lainnya adalah Eddy, Emilia Sabela, dan Inna L. Mereka adalah siswa SLTP Kristen Petra 3, Surabaya, yang terpilih sebagi juara I untuk bidang Tekonologi, dengan karya tulis, *Pemanfaatan IC PAL 12L6 pada Rangkaian Penebak Tanggal Lahir dengan Penyederhanaan Rangkaian Menggunakan Karnaugh-MAP*. Sementara untuk Ilmu Pengetahun Alam diraih oleh Linda Boniarti Sitanggang, Wijaya Hasjim, dan Tutty Sasy Nelly dari SMU Kristen Trimulia, Bandung. Mereka berhasil mempertahankan karya tulis berjudul *Pengamatan Gerhana Matahari Sebagian 16 Februari 1999*.

Meskipun juara bidang Teknologi digarap oleh tiga orang, tapi untuk mempertahankannya di Jakarta hanya Eddy seorang yang diundang sebagai ketua kelompok. Dilihat dari usia yang baru rata-rata 14 tahun, karya mereka memang luar biasa. Walaupun menyisihkan para finalis lain dengan perbedaan angka yang kecil, tapi kemampuan mempertahankan karya merupakan nilai yang kuat. Begitupun dengan Kelompok Linda. Dia yang maju mempertahankan hasil penelitian mereka.

LKIR LIPI-*TVRI* ini merupakan lomba tahunan yang sudah cukup tua. Dimulai pertama pada 1969, hingga sekarang telah memasuki tahun ke-31 kalinya. Menurut Kepala Biro Pemasyarakatan Iptek LIPI Dr. Amru Hydari Nazif, tujuan lomba ini sebagai tempat saluran inspirasi para remaja yang mencintai penelitian yang hasil penelitiannya dituangkan ke dalam karya tulis. Sehingga, lomba ini menjadi semacam wadah atau ajang aktualisasi diri para remaja. Tapi, yang tak kalah penting, menurut Amru, adalah adanya nilai-nilai objektif dan kejujuran dalam diri remaja sehingga selalu memihak pada kebenaran.

ARIF ARIADI

Presentasi karya ilmiah: Tabrak lari

Sayangnya, dari catatan panitia, LKIR dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan jumlah peserta. Dahulu jumlah para peserta sempat mencapai angka 600-an, lalu 300-an, tapi tahun ini hanya 158 peserta dan hanya dari 18 provinsi dari seluruh Indonesia. Rinciannya, bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan 63 peserta, Ilmu Pengetahuan Alam 70 peserta, dan bidang Teknologi ada 25 peserta. "Padahal undangan telah disebar ke seluruh Indonesia," ujar Amru. Penyusutan jumlah peserta ini diakui oleh Rita, salah seorang panitia LIPI. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia. Sebab untuk mengadakan penelitian diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Walaupun begitu, menurut Amru, sebetulnya banyak faktor untuk menghidupkan penelitian remaja ini. Meskipun Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, namun peran guru, pemda, dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah cukup menentukan maraknya kegiatan ini. Amru Hydari mencontohkan, Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Timur setiap tahun paling banyak mengirimkan para peserta sebab mereka dibantu oleh pemda dan perusahaan daerah masing-masing. "Gubernur Jawa Timur itu paling getol mendorong para remajanya. Sehingga sudah menjadi semacam tradisi," katanya. Buktinya, tahun ini saja 34% para finalis berasal dari Jatim. Sementara dari daratan Sumatera peserta dapat dihitung dengan jari, alias hampir tidak ada.

Padahal, menurut Amru, sebenarnya soal insting penelitian para remaja di negara lain sama dengan Indonesia. Hanya saja berdasarkan pengalaman selama ini peneliti remaja kita belum benar-benar mandiri, alias banyak bantuan guru. "Soal intensitas, kita tabrak lari, sebab terlalu banyak dorongan guru sehingga independensinya belum ada," katanya. Sedangkan di Eropa, salah satu kekuatannya adalah banyaknya sumber penelitian dan digali oleh para siswa sendiri. Meski begitu, Hydari mengaku, beberapa kali LIPI diundang oleh ASEAN, APEC, dan ASEM untuk mengirimkan para pemenang LKIR mengikuti lomba di tingkat internasional.

Melihat beberapa kendala itu, tampaknya agak sulit menghidupkan kegiatan penelitian remaja di Indonesia. Hanya saja, Amru berharap, Undang-Undang Otonomi Daerah dapat menjadikan perpustakaan daerah lebih maju dan dia optimistis dapat menggelar kegiatan semacam LKIR ke daerah-daerah sehingga dapat dihasilkan generasi baru. Di samping itu, Amru punya rencana untuk menghimpun beberapa orang sukses alumni LKIR yang mau menceritakan pengalaman hidupnya hingga berhasil. Hal ini untuk memotivasi para remaja agar rajin melakukan penelitian. ■

M. RIDWAN PANGKAPI

Kalau Seniman Bikin Pesantren

Pesantren Kaligrafi: Sejumlah seniman kaligrafi menumbuhkan sebuah pesantren yang diobsesikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kesenian Islam di Tanah Air.

ISTIMEWA

Membuat kaligrafi: Khawatir tren sesaat

Kebangkitan seni kaligrafi Al-Quran di Indonesia sepertinya akan terus berlanjut. Setelah sekian lama dibina hanya secara sporadis, kini pengembangan kaligrafi bisa diharapkan lebih terencana dan terarah. Sejak Agustus tahun lalu, telah berdiri Pesantren Kaligrafi Al-Quran (PKA) di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat.

Menandai ulang tahunnya yang pertama, PKA meresmikan Taman Pendidikan Al-Quran Plus Kaligrafi, Jumat pekan lalu. Pembukaan TPA Plus ini melengkapi jenis pendidikan yang selama ini telah berjalan, yaitu *Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah* yang setingkat SLTP dan SLTA, kegiatan ibadah dan belajar di masjid, pendidikan dan pelatihan kemahiran kaligrafi, serta kegiatan ekstra siswa.

Bukan itu saja. Dua hari berselang, PKA melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Yaqin yang akan menjadi pusat peribadahan para santri dan penduduk sekitar. Hanya dalam waktu setahun, PKA telah mampu melakukan penambahan tanah lokasi (dari sekitar 1,5 hektare hasil wakaf tokoh masyarakat setempat menjadi 5,6 hektare), pembangunan tiga bangunan gedung (Gedung Terminal Ekspresi, Gedung Perpustakaan, dan Gedung Pena), dan pembuatan jalan lingkungan.

Kehadiran PKA tidak terlepas dari sosok Didin Sirojuddin A.R., pakar kaligrafi Al-Quran dari IAIN Jakarta. Didin mengaku sangat gembira melihat *booming* kaligrafi di Tanah Air dalam dua dasawarsa terakhir. Tapi, diamdiam dia mengkhawatirkan kelanjutannya. "Tanpa pembinaan yang serius, kesemarakan itu bisa-bisa tak lebih dari tren sesaat," kata penulis 27 buku tentang kaligrafi ini.

Maka, sejak 1996, Didin mulai menggagas pendirian PKA sebagai penjaga keberlangsungan pengembangan kaligrafi di Tanah Air. Selama ini, seniman dan ilmuwan kaligrafi memang lebih banyak lahir dari proses otodidak, pengajaran ekstra kurikuler di beberapa pesantren, atau paling banter kursus-kursus di beberapa sanggar kaligrafi. Meski begitu, tetap telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. "Kehadiran kampus khusus pembinaan kaligrafi tentu akan memberi dampak yang lebih luas dan dalam," ujar anggota Dewan Hakim Kaligrafi MTQ Nasional sejak 1983 ini.

Hanya sayang, gagasan itu tak serta merta mendapat sambutan berarti. Barangkali karena memang belum ada satu pesantren pun di Tanah Air yang mengambil kekhasan seperti yang Didin usulkan: kaligrafi. Selama ini, kekhasan beberapa pesantren masih terbatas pada ilmu-ilmu pokok Islam, seperti pesantren Al-Quran, pesantren hadis, atau pesantren tafsir. Pesantren kaligrafi, model seperti apa pula itu?

Makanya gagasan tersebut lebih banyak berputar di lingkungan Didin berkiprah, yaitu di Lembaga Kaligrafi Al-Quran (Lemka) yang dia dirikan pada 1985. Tak ada jalan lain, Didin dan kawan-kawan harus merangkak sendiri untuk mewujudkannya. Dan setelah sekian lama, barulah pada awal 1998 mereka menemukan titik terang. Yaitu ketika satu keluarga di Kelurahan Karamat, Sukabumi, menyerahkan hampir satu setengah hektare tanah mereka untuk dijadikan lokasi pendirian pesantren.

Sejak itulah jalan lebar seakan-akan terbentang. Gerilya Didin dan kawan-kawan ke berbagai kalangan agar mau memberi dukungan moral dan materil menjadi lebih efektif. Kemajuan pesat tadi sebagai bukti. Dan kini, di tengah suasana pedesaan kaki Gunung Gede yang asri, diiringi gemericik air sungai Cipelang yang mengalir deras, hampir seratusan santri PKA belajar untuk menjadi seniman yang agamawan atau agamawan yang seniman.

Sesungguhnyalah obsesi Didin memang tidak sebatas kaligrafi. "Ini cikal bakal pembentukan Akademi Kesenian Islam. Kita harus bisa menuju ke sana," ujarnya optimistis. Karena itu pula alumnus Pesantren Gontor Ponorogo ini sejak awal telah mencermati berbagai kemungkinan yang bisa melemahkan pesantren. Dalam urusan manajemen, misalnya, Didin memilih berbeda dari tradisi pesantren selama ini. Sebagai pengasuh pesantren, Didin membatasi diri hanya mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan ruh dan keberlangsungan pesantren. "Saya sama sekali tidak mencampuri urusan keuangan dan kepemilikan aset pesantren. Saya konsentrasi sebagai pengasuh, bukan pemilik. Pesantren ini milik umat Islam, terutama penduduk di sekitar pesantren," ujarnya.

Gambarannya, lihat saja sore menjelang magrib di lokasi PKA hari-hari belakangan ini. Belasan lelaki dan wanita separo baya yang berseliweran di sana. Mereka, para penduduk setempat, malah berkeringat dalam acara gotong royong. Sebagian mengangkut bata, sebagian lagi pasir, dari pinggir jalan ke lokasi pembangunan masjid Al-Yaqin. Mereka juga merasa sebagai pemilik. ■

MUZAKKIR HUSAIN
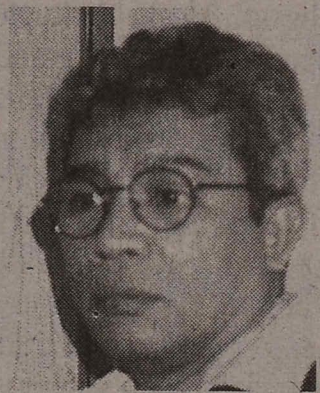
Ina Latu Megawati

Thamrin Ely
Direktur Yayasan Saniri Maluku

Masyarakat Desa Ulath di Pulau Saparua tahun lalu menganugerahi Megawati gelar adat *Ina Latu* (Ratu). Desa kelahiran Alex Litaay ini belakangan terikut dalam kerusuhan setempat. Saat kerusuhan besar pada Hari Raya Idul Fitri memuncak di Ambon, Ratu Mega diminta sekelompok masyarakat Maluku di Jakarta untuk pergi ke Ambon dengan harapan bisa meredam gejolak. Mega memang datang saat kampanye empat bulan setelah kejadian, setelah puluhan ribu orang etnis lain terusir dari sana.

Setelah kerusuhan babak kedua pecah di Ambon, Mega membacakan pidato politik menyambut kemenangan 33% partainya. *Pada dasarnya gejolak sosial di ketiga wilayah ini* (Ambon, Irian dan Aceh, *Pen.*), *berawal dari pemahaman keliru dari pemerintah Orde Baru dan penerusnya, terhadap nilai-nilai sosial budaya berikut tuntutan ekonomi masyarakat tersebut. Tidak dinikmatinya keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan politik sebagai warga negara, merupakan sumber masalah yang telah memicu terjadinya gejolak sosial,"* demikian pidato Mega.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penerus Orde Lama itu justru mempunyai pemahaman sangat keliru terhadap persoalan di Ambon sekaligus membenarkan semua tindak kekerasan yang terjadi.

Dari isu sentral yang mencuat saat kerusuhan babak pertama pecah—baik terlihat pada grafiti di dinding gedung-gedung atau yang disuarakan di tempat-tempat peribadatan—bisa disimpulkan, kerusuhan Ambon bermuatan SARA. Dengan akronim BBM (Buton Bugis Makasar) para perusuh bergerak mengharu-biru permukiman dan pasar tradisional beserta sarana perekonomian BBM, bahkan mengusir mereka keluar dari Ambon.

Artinya, ada sekelompok warga negara merasa lebih berhak menguasai wilayah yang didiami secara bersama-sama dengan warga lainnya. Padahal historika Maluku menunjukkan, masyarakat kontemporer Maluku, bersumber dari keterbukaan sistem sosial masa lalu. Maluku sebagai pusat perdagangan internasional ketika itu tidak mungkin menutup diri terhadap bangsa-bangsa dari seluruh dunia untuk melakukan transaksi bisnis cengkeh dan pala. Interaksi lintas bangsa, etnis, ras, agama itulah yang melahirkan orang Maluku sekarang lengkap dengan nilai-nilai budayanya.

Kebanggaan daerah tak bisa diklaim cuma oleh kelompok sosial tertentu. Dan seakan-akan memiliki hak *privilege* untuk melakukan tindak kekerasan mengusir kelompok lain keluar Maluku. Seolah-olah Maluku itu daerah tertutup.

Taruhlah telah terjadi ketidakadilan ekonomi. Tapi *mosok* hanya untuk menjadi tukang becak dan pedagang kaki lima diperlukan kerusuhan yang mengorbankan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Banyak yang tak paham, dalam kerusuhan Ambon babak pertama, sasarannya sarana ekonomi *wong cilik*: becak, pasar tradisional, kios, gerobak dorong, dan angkot. Kalau benar telah timbul kecemburuan sosial karena ketidakadilan ekonomi, logiskah orang cemburu pada sesuatu yang kecil: tukang becak, pedagang bakso, kaki lima, dan sopir angkot?

Jika benar telah terjadi marginalisasi keadilan sosial politik terhadap suatu kelompok, khususnya di sektor birokrasi pemerintahan, itu tak berarti kita harus membiarkan kelompok tersebut menjadi sangat dominan di instansi lain. Mari kita kembalikan pada posisi yang lebih objektif. Artinya, di instansi mana pun tak boleh ada kelompok yang dengan leluasa mengembangkan hegemoninya atas kelompok lain.

Sayangnya, di tengah dunia yang mengglobal dan mengandalkan *merit system*, kita malah kembali ke sistem primordialisme dalam rekrutmen SDM. Maka, jika seorang ketua umum partai sudah berpikir matematis eksak bahwa ketidakadilan otomatis melahirkan gejolak sosial, di balik itu tentu ada konspirasi yang merekayasa gerakan bertujuan politik.

Kota Ambon sekarang, pascakerusuhan babak kedua, bagaikan Beirut yang terbelah berdasarkan *zoning* agama. Ada pasar Nasrani, ada pasar Islam. Rute angkot dan becak terpaksa diatur berdasarkan agama pengemudi dan wilayah operasinya. Pengemudi Islam tidak akan berani melintasi wilayah Nasrani, begitu pula sebaliknya. Kecurigaan antarkelompok menjadi-jadi menyusul saling bantai yang membuat kita bertanya-tanya: agama manakah yang mentolerir pembunuhan tak berperikemanusiaan itu?

Ironisnya, baru saja dilangsungkan dialog antarumat beragama di Ambon (20-21 Juli 1999) yang diprakarsai Pusat Rujuk Sosial (PRS) Maluku, dengan rumusan hasil yang bagus: semua agama mempunyai visi yang sama terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme. Semua sepakat tak ada pertentangan doktrin agama, bahkan semua peserta sependapat agama telah dipolitisasi dan dimanipulasi dalam kerusuhan Ambon.

Tapi, mengapa setiap ada insiden selalu ditarik ke persoalan agama? Di sini dibutuhkan kecepatan antisipasi aparat keamanan maupun penegak hukum. Sehingga, jika terjadi insiden yang sifatnya individual segera diselesaikan secara hukum, bukan malah dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa. Walau kita tahu masyarakat Ambon sekarang sangat rentan terhadap isu yang diembuskan tanpa selidik dari mana dan apa motivasinya.

Berbagai upaya juga dilakukan untuk memulihkan situasi dan kondisi. Tapi rasanya selalu saja ada yang tak menghendaki suasana damai itu kembali. *Human Rights Watch* yang bermarkas di Empire State Building New York Maret lalu, misalnya, menerbitkan laporan berjudul *The Violence in Ambon* (Vol. 11, No. 1C) dengan beberapa rekomendasi. Memusatkan laporannya di sekitar konflik antarkelompok agama, dengan dukungan preman maupun dugaan campur tangan RMS, peran ABRI masih sangat dibutuhkan untuk mengungkap latar belakang serta provokatornya.

Titik lima rekomendasi tersebut tertulis, *Find and prosecute any provocateurs. If General Wiranto and other senior government leaders have enough information to acknowledge, as they have, that provocateurs played a role in the initial outbreak of violence, they have an obligation to make public the nature of their evidence and make every effort to ensure that those individuals are found and prosecuted to the fullest extent of the law.*

Sebagai Ratu, Mega tentu tak boleh diam soal Maluku. Dan karena PDI-P mendapat "berkah" kerusuhan Ambon: ada kelompok pemilih yang terusir dalam jumlah besar, dan Sekjen PDI-P Alex Litaay bisa mendapat kursi DPR RI di Senayan, menggeser kedudukan Golkar. ■

Hangat-Hangat Manis

Konser Musik: George Benson kembali menggoyang Jakarta. Meski waktu pertunjukannya molor, penonton bisa diseret dalam kegilaan Benson. Obat rindu bagi *easy listener* jaz.

Nada-nada yang meluncur dari Ibanez G310 itu ditimpali vokal jernih dalam satu notasi. Bagi pecandu jaz, tentu bukan hal susah untuk menebak pemilik suara sekaligus pemetik gitar tersebut. George Bensonlah yang punya paten. Si *Classy 'n Cool* ini, Kamis malam pekan lalu, hadir membius penonton Jakarta dengan nomor-nomor lagu yang sudah akrab di kuping.

Tidak hanya piawai meniru suara petikan gitar, Benson makin membuat kagum penonton ketika berhasil memainkan suaranya, dalam wilayah alto dan sopran, sewaktu membawakan *Unforgetable*. Lagu daur ulang ini pernah berkibar di bawah Nattalie Cole yang "berduet" dengan ayahnya, Nat King Cole, yang sudah di alam kubur. Dan Benson dengan mulus pula meniru paduan suara mereka. Penampilan Benson kali ini memang cukup mengejutkan, bahkan dia sendiri menyebutnya sebagai kegilaan. "Apakah Anda ingin melihat hal yang gila?" katanya. Kalaupun penonton di Ballroom Hotel Mulia terlalu dingin untuk ikut berjingkrak, itu memang kebiasaan penonton musik jaz kita.

Benson membakar emosi penonton sejak gong pertunjukan malam itu dibuka lewat *Inside Love (so personal)*. Jadwal pertunjukan yang sempat molor hingga satu jam pun terobati oleh *beat* pembuka yang dinamis. Maka tak berlebihan jika pria hitam asal Pittsburgh, Pennsylvania, ini layak disebut sebagai maestro panggung.

Di kancah jaz modern dan *easy listening pop*, Benson mulai menapakkan kakinya sekitar pertengahan tahun 1970-an. Kala itu musik jaz pop, juga jaz rock, menempati posisi paling berpengaruh. Seperti juga Wes Montgomery, dedengkot jaz yang menjadi gurunya, Benson menampilkan jaz dalam kehangatan dengan menggabungkan manisnya musik pop dan kepiawaiannya mengaransir jaz. Hingga kemudian melahirkan hit-hit dengan penjualan terbesar, antara lain *Kisses in The Moonlight*. Lagu ini pula yang kemudian dinyanyikannya setelah Benson usai bermetamorfose dalam *Unforgetable* tadi.

The Long and Winding Road (TLWR), salah satu lagu balada karya The Beatles, melanjutkan pesona pria yang pada 22 Maret lalu menginjak usia 56 ini. Diawali dengan improvisasi vokal yang khas, Benson berhasil mengalirkan warna jaz yang cukup kental ke dalam komposisi lagu milik grup musik legendaris itu. Dan ini tentu saja menguntungkan para pengagumnya, dan juga pecinta The Beatles yang hadir malam itu. "*....The long and winding road, that leads to your door/ Will never disappear/ I've seen the road before....*"

Sebenarnya TLWR hanyalah satu dari sekian banyak lagu The Beatles yang kerap dinyanyikan Benson. Yang lainnya taruhlah *Here, There and Every Where, Here Comes The Sun*, atau *Oh Darling*. Bahkan kemudian dia membukukan lagu-lagu karya grup asal Liverpool, Inggris, itu dalam satu album bertitel *The Other Side of Abbey Road*.

Ketika pertunjukan hampir mencapai ujungnya, *mood* penonton pun tak lagi bisa ditahan. Lantunan lagu *The Greatest Love of All*—diambil dari film biografi Muhammad Ali, *The Greatest*—yang dinyanyikannya kemudian, memaksa penonton untuk beranjak dari tempat duduknya. Mereka, yang hingga satu jam waktu pertunjukan masih malu-malu, mulai ikut bernyanyi, menyalakan api dari Zippo-nya dan melambai-lambaikan tangan mengikuti irama lagu.

Benson tak membiarkan *mood* yang sudah terbangun dengan susah payah itu menjadi kendor. Ia langsung menggedor lewat *Give Me The Night*, salah satu hitsnya yang laris jutaan keping. Komposisi lagu dengan irama cepat ini agaknya memang sangat mujarab. Sebab di alur tengah yang memisahkan tempat duduk penonton, telah tampak puluhan eksekutif muda yang turun berjingkrak-jingkrak. Hingga mereka melupakan harga tiket yang cukup mahal: Rp150.000-Rp300.000. Dan Stanley Banks, yang menjadi basis malam itu, tak lagi susah-susah mengajak penonton untuk ikut menari, seperti dialaminya pada awal-awal pertunjukan.

Sebagai lagu pamungkas, Benson memilih *On Broadway*. "Tujuh tahun lalu saya ada di Jakarta dan setelah ini, saya berharap dapat tampil di sini tahun berikutnya," ujarnya ketika berjalan memasuki ruang ganti.

Hampir sama dengan tujuh tahun yang lalu, George Benson masih tetap tampil sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Meski banyak media dunia menyanjungnya sebagai musisi jaz kontemporer paling sukses, baik di jalur jaz, pop, ataupun R&B. Dan hingga kini, pengaruh dari berbagai usahanya untuk mencampurkan jaz dengan banyak genre musik lainnya dapat didengar dalam musik-musik Earl Klugh, Stanley Jordan, ataupun Kenny G.■

DENY R. SECAATMAJA

SATARI

George Benson lagi *show*: Sukses di tiga jalur

Adegan dalam **Sri:** Pengabdian wanita Jawa

Dunia Batin Wanita Jawa

Sri: Film perdana karya kritikus Marselli Sumarno. Berkisah tentang wanita Jawa dalam mendampingi suaminya menghadapi maut. Sayang, para pemain *Sri* tampil gagap.

Sebuah episode dalam kehidupan manusia, tak lebih dari *beberan* wayang yang siap dimainkan. Tergantung Ki Dalang ingin mendongeng apa. Kali ini Marselli Sumarno menjadi dalang untuk film *Sri*. Karya perdana Marselli yang akan diputar mulai 20 Agustus nanti, dibuka dengan tiga wanita *sepuh* berkebaya melintas di antara dinding-dinding keraton yang tinggi dan pucat. Di sini Marselli, selama ini lebih dikenal sebagai kritikus film, mencoba mengikrarkan bahwa filmnya mengambil *setting* budaya Jawa.

Film *Sri* mengisahkan keteguhan wanita dalam mendampingi suaminya, Hendro (RMT Rono Suripto), saat menghadapi sakaratul maut. Sebelum sang suami dijemput si dewa maut, Yamadipati (Sardono W. Kusumo), istrinya yang masih belia menghalanginya. Sri (Rina Ariyanti) mencoba menawar agar kematian suaminya yang berusia 70-an itu ditunda, sebab masih ada tiga urusan yang belum diselesaikan Hendro. Pertama, Hendro ingin meminta maaf kepada Laksmi (Niniek L. Kariem), istri pertamanya. Kedua, Hendro akan menyerahkan sebuah keris pusaka kepada seseorang yang cocok menyimpannya, dan ketiga, ningrat Jawa itu harus berpamitan kepada guru spiritualnya.

Ternyata keinginan Sri ini berhasil membujuk Yamadipati menunda misinya. Dalam dialog Sri-Yamadipati di beberapa kali pertemuan, Marselli mencoba merefleksikan Sri sebagai wanita Jawa. Sri menolak tuduhan bahwa dirinya hanya ingin menaikkan derajatnya menjadi bagian dari lingkaran ningrat dengan menerima pinangan Hendro. "Manusia selalu menghadapi berbagai pilihan dalam hidupnya. Dan ini pilihan saya untuk menjadi wanita mandiri," kata Sri.

Setelah tiga kali Yamadipati mengabulkan permintaan Sri, pada kesempatan berikutnya dia tak lagi mengurungkan niatnya. Berbagai cara dilakukan Sri untuk menghambat si dewa maut. Di tengah keputusasaan, Sri menawarkan Yamadipati untuk mengajarinya tarian *Bedoyo Ketawang*. "Kedatangan Bapak selalu mengganggu latihan saya. Sekarang sudilah Bapak mengajari saya," Sri menawarkan. Dalam adegan ini, Marselli menyajikan aroma erotisme dalam tarian kedua makhluk yang berbeda dunia itu.

Bersama usainya tarian pasangan Yamadipati dan Sri, Hendro pun meregang nyawa. Sri hanya bisa pasrah dan merebahkan kepala suaminya dalam pangkuan, hingga Hendro dijemput ajal. Marselli pun menutup keharuan yang dibangun sepanjang filmnya itu: Sri mengantar sang suami menghadap Maha Pencipta. Dan *beberan* kehidupan Hendro, ditutup Marselli dengan melintasnya tiga wanita *sepuh* berkebaya di antara dinding-dinding pucat milik aristrokrat Jawa.

Dalam *Sri*, Marselli mencoba menggambarkan berbagai strata dalam budaya Jawa, serta posisi wanita di dalamnya. Sri yang wanita desa, begitu dipersunting ningrat Jawa
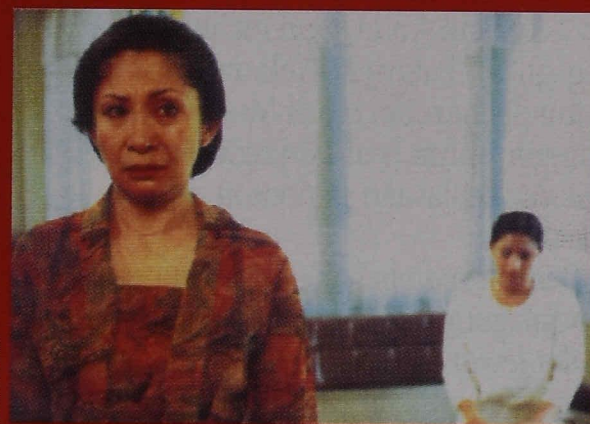
Judul:
Sri
Jenis:
Drama
Pemain:
Rina Ariyanti, RMT Ronosuripto, Sardono W. Kusumo, Niniek L. Kariem, Pudjo Darmo Suryo, dll.
Penulis Skenario / Sutradara:
Marselli Sumarno
Pengarah Musik:
Rahayu Supanggah
Pengarah Artistik:
Rudjito
Produser:
Kemala Atmodjo, Moetaryanto, Marselli Sumarno

secara otomatis posisinya terdongkrak di masyarakat. Orang-orang di sekelilingnya tak boleh membantah kata-katanya. "*Inggih, Ndoro* (Ya, tuan)," hanya kata itulah yang boleh diucapkan oleh para abdi di rumahnya. Perannya makin besar ketika suaminya tak menjalankan fungsi sebagai kepala rumah tangga.

Di lain pihak, posisinya sebagai wanita begitu lemah di hadapan suami. Meski Hendro digambarkan sebagai pemabuk, penjudi, dan suka main wanita, sang istri hanya bisa diam. Begitupun saat sang suami jatuh sakit, seluruh kehidupannya pun harus dicurahkan pada sang suami. Bahkan ketika sang suami menghadapi maut, Sri berusaha mati-matian menghalangi Yamadipati.

Meski dalam budaya Jawa banyak memakai simbol, Marselli tampak mencoba meminimalkannya sehingga film ini tak terlalu susah dinikmati bagi awam. Namun sejumlah kritik berdatangan dari para pemerhati film Indonesia. Putu Wijaya misalnya berkomentar, "Cerita tentang keharuan yang diangkat Marselli cukup bagus. Sayang Marselli kurang bisa menceritakannya." Hal ini bisa dilihat dalam alur film yang kurang konstan dalam mengatur iramanya. Namun bagaimanapun wujudnya, keberanian Marselli untuk membuat film dalam kondisi sekarang ini pantas dipuji.

Film yang berdurasi 102 menit ini memang tampak kaku, karena sebagian besar pemerannya baru pertama kali menghadapi kamera. Rina sebagai tokoh utama film ini memang dipilih Marselli karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi dalam menari. Namun kemauan Marselli untuk membuat film ini lebih *natural* akhirnya tidak kesampaian. Karena Rina masih gagap ketika berhadapan dengan kamera.

Begitu pula dengan para pemeran pendukung dalam film ini yang masih terasa amat kaku. Para pelakon yang setiap harinya menggunakan bahasa Jawa, terasa amat berat untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Namun kemunculan Niniek L. Karim mampu memberi nyawa bagi film ini, meski porsinya relatif kecil. Sedang kehadiran Rahayu Supanggah sebagai pengarah musik, dengan apik memberi nuansa dan "batin" Jawa dengan tembang dan gamelannya yang cukup menyentuh.

Sebagai anak teknologi, dalam bahasa Garin Nugroho, film apa pun jenisnya dan bagaimanapun bentuknya, senantiasa mensyaratkan kecakapan teknik. "Ide atau gagasan yang brilian akan menjadi nonsens tanpa kemampuan teknik yang memadai!" Karenanya, menurut sutradara pemborong penghargaan berbagai festival internasional ini, harus ada latihan terus-menerus untuk mengolah dan mengasah kepekaan dan kecakapan teknik. *Sri* adalah salah satu upaya untuk itu. "Kalau tidak, nasib kita akan seperti kontingen Indonesia di SEA Games 1999 di Brunei Darussalam," ujar Garin. ■

AR dan Mas'ad T.

Independence Day

Dalam kegelapan pasti ada cahaya yang menghidupkan.

Ishadi S.K.
Praktisi Komunikasi dan Pertelevisian

Berbagai cara dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan. Pada 1998, Prancis merayakannya dengan persembahan Piala Dunia oleh tim sepak bolanya. Malaysia pada 1994, merayakannya dengan membuat bendera terbesar di dunia, dan mengaraknya di sepanjang jalan Kuala Lumpur. Brunei Darussalam, mempersembahkan ulang tahun Sultan, disejajarkan dengan hari kemerdekaan, dengan *event* olahraga internasional, SEA Games.

Singapura juga merayakan kemerdekaannya tahun ini dengan pengumuman pemulihan penuh ekonominya yang terpuruk sejak dua tahun terakhir, dan menyatakan pertumbuhan ekonomi negeri itu menjadi 5%. Pada 1996, Amerika Serikat menayangkan film *The Independence Day* pada hari kemerdekaannya—film yang menghasilkan pemasukan US$811 juta ke kocek Twentieth Century Fox, produsernya.

Bagaimana di Indonesia? Perayaan disesuaikan dengan pasang surut sejarah. Pada 1995, "Perayaan Emas" 50 tahun merdeka, dilakukan dengan sangat semarak, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga seluruh rakyat, yang menggelar berbagai acara seronok, termasuk pemasangan lampu hias hampir di setiap rumah penduduk di seluruh Indonesia. Entah siapa yang mengawali, bagaikan diberi komando, mulai dari kota besar hingga pelosok desa, lampu hias berbentuk melengkung itu bekerlap-kerlip selama satu minggu.

Kegiatan semarak seperti itu pastilah tidak terjadi tahun ini. Peringatan kali ini dijalani dengan penuh keprihatinan. Ekonomi belum sepenuhnya pulih. Berbagai PHK masih terjadi. Bangunan pertokoan yang dibakar massa tahun lalu masih dibiarkan menjadi kerangka hangus, seolah monumen sejarah kelam negeri ini. Pertumpahan darah berlangsung di Ambon dan Aceh. Timor Timur segera akan menjalani program referendum, dengan kemungkinan merdeka, lepas dari negara kesatuan RI. Gerakan Aceh Merdeka, yang menuntut hal serupa, berlangsung semakin keras.

Di tengah krisis yang mendera, dan saat puluhan juta orang mendadak menjadi berada di bawah garis kemiskinan, skandal Bank Bali yang berindikasi korupsi Rp550 miliar tengah diributkan. KPU belum juga menyelesaikan tugasnya. Sementara elite politik terpecah dalam tiga kelompok: Mega, Habibie, dan poros tengah. Di arena SEA Games, yang diharapkan menjadi sedikit penawar duka, sampai tulisan ini dibuat, Indonesia masih berada di urutan ketiga, di bawah Thailand dan Malaysia. Belum pernah terjadi dalam SEA Games sebelumnya.

Barangkali, inilah hari paling gelap dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan dan terbaring dari Sabang sampai Merauke, mungkin menghela nafas panjang di alam barzakh sana.

Meski sebagian rakyat sedang susah, toh mereka masih mencoba memperingati hari bersejarah ini dengan sisa-sisa kekuatannya: bendera merah putih masih dijual di mana-mana dan lumayan laku. Panjat pinang serta pertunjukan layar tancap yang merupakan program rutin, masih berlangsung di kampung-kampung.

Apa boleh buat. Kita harus menerima kenyataan ini dengan penuh kegetiran. Dalam situasi seperti ini, menjadi sangat pas jika kita menyimak bait lagu karangan Ibu Sud yang akhir-akhir ini kerap diperdengarkan di radio dan televisi: "Kulihat Ibu Pertiwi, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang...."

Namun, apa pun yang terjadi, toh kita tetap harus optimistis dan yakin bahwa—seperti bunyi surat Kartini—"Habis Gelap Terbitlah Terang". Ya, di balik setiap kegelapan, pasti akan ada cahaya yang menghidupkan.

Dirgahayu Indonesiaku. ■

A. Suryana Sudrajat

God Has Decided

Berbagai kejadian kebetulan mengantarkan kita ke alam kemerdekaan. Nonsens, kalau dikatakan karena kehebatan bangsa Indonesia— kata Sjafruddin Prawiranegara.

Dada-dada kurus telanjang. Kain merah putih pengikat rambut gondrong. Sepotong bambu runcing serta "Merdeka atau mati!" Begitulah selalu para revolusioner muncul di mulut-mulut gang pada peringatan hari kemerdekaan. Lukisan di atas tripleks itu seperti ingin mengingatkan sekaligus mewakili gelora revolusi Indonesia.

Benar. Sebab sesudah proklamasi, para pemudalah yang mengobarkan api kemerdekaan. Bertempur baik dengan tentara Jepang maupun Inggris dan Belanda. Mereka juga menyalakan api revolusi sosial: berkonfrontasi dengan sultan dan raja-raja serta kaum bangsawan yang pro-Belanda.

Entah berapa ribu pemuda yang tewas dalam pertempuran-pertempuran di sekitar Karawang dan Bekasi, Pekalongan, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Penyair Chairil Anwar bersaksi:

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi...
Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi.

Di Semarang, 200 tentara Jepang dibunuh dengan bambu runcing, dan tentara Jepang membalas dengan menghabisi nyawa 2.000 orang Indonesia. Dan berapa yang gugur di Surabaya dalam pertempuran selama tiga minggu menghadapi pasukan Inggris yang modern. Juga di Sulawesi Selatan, di bawah Letnan Westerling, pemimpin pasukan Belanda, yang ganas itu.

ARIEF

Adapun di Aceh, para pemuda, bersama para ulama yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di bawah pimpinan Daud Beureu'eh, menyingkirkan 107 bangsawan yang berkedudukan sebagai hulubalang. Terutama di Piddie di bawah kepemimpinan Teuku Daud Cumbok yang mengejek Republik dan para pemuda revolusioner. Sebagian besar mereka digulung dalam "Perang Cumbok" yang berlangsung dua pekan.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia memang berhasil, dan kita tahu, tidak hanya melalui medan pertempuran tapi juga lewat meja perundingan. Sampai sekarang, orang masih berdebat: mana di antara kedua segi ini yang paling menentukan terusirnya kolonialisme Belanda yang sejak abad ke-17 mulai menguasai Nusantara.

Tapi Sjafruddin Prawiranegara punya pendapat berbeda dari orang ramai. Menurut kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (21 Desember 1948-13 Juli 1949), dalam wawancara dengan radio *BBC* pada tahun 1985, keberhasilan itu karena sudah takdir Ilahi. "*God has decided*, Tuhan sudah menentukan, kamu sudah mesti merdeka. Kalau tidak, itu tidak mungkin."

Tak berarti Sjafruddin seorang yang berpaham *jabariah*, meski, seperti dikatakannya, itu merupakan pandangan dirinya selaku orang beriman, yang percaya akan ketentuan Allah. Populer disebut takdir. Sebab yang kemudian menjadi fokus bidikannya adalah sekuen-sekuen 'kejadian kebetulan'.

Demikianlah, sebelum Perang Dunia II, bangsa Indonesia sudah berkali-kali mencoba melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Belanda. Tanpa kedatangan tentara pendudukan Jepang, Indonesia sulit lepas dari cengkeraman Belanda. Kemudian, bertanya Sjafruddin: "Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari penjajahan Jepang, kalau Jepang tidak dikalahkan Sekutu?" Jadi, kata dia, karena Jepang dikalahkan Sekutu, kita bisa bebas dari Jepang. Inggris memang telat sebulan untuk melucuti tentara Jepang, dan kesempatan itulah yang kita gunakan untuk memproklamasikan diri. Andaikan tepat waktu, mungkin Indonesia sudah diserahkan kembali kepada Belanda. Biarpun Belanda sudah lelah berperang, kata Sjafruddin, mustahil kita menang hanya dengan mengandalkan senjata semata. "Yang sangat membantu kami yaitu simpati daripada dunia demokrasi. Mereka itu sudah jemu berperang. Kita bisa memang... terutama karena Amerika Serikat menarik bantuannya kepada Belanda. Jadi kalau dikatakan ini karena kehebatan bangsa Indonesia, itu *nonsense*."

Menurut mantan menteri keuangan dan bekas gubernur BI kelahiran Anyer Kidul (Banten) itu, kita memang berusaha, "tetapi dibandingkan dengan segala kebetulan-kebetulan, *all kinds of*, kejadian-kejadian kebetulan itu, kita bisa merdeka". Karena itu, Sjafruddin percaya bahwa sudah menjadi takdir yang Mahakuasa kita mesti merdeka dan "insya Allah kita juga akan bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan bantuan Allah, asal kita ingat kembali kepada Allah". ■